SURVEI: PUBLIK TIONGHOA MASIH KETAKUTAN

Tajuk

BERITA, INVESTIGASI & ENTERTAINMEN

TEROR BANYUWANGI ABRI TERLIBAT?

PRABOWO: SAYA DITUDUH MEREKAYASA KERUSUHAN

HARGA Rp 9.900,-
ISSN 1410-6426
9 771410 642609 17
NO. 17 TH. I, 15 OKTOBER - 28 OKTOBER 1998

Prabowo Subianto
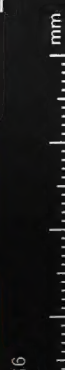
Membakukan Bahasa *Tajuk*

OKTOBER bulan bahasa. Inilah bulan "sakral", bukan hanya bagi kalangan pemerhati bahasa Indonesia, tetapi juga masyarakat pers – si penjaga garda depan dalam aktivitas pengembangan bahasa. Galibnya di bulan Oktober, awak *Tajuk* pun tak mau kalah antusias dalam menyambut bulan bahasa kali ini. Wujudnya tidak sekadar melontarkan jargon ini-itu, melainkan konkret dilakukan rekan kami **Edy Sudarto**, 35. Di luar kesibukan rutin sebagai penyunting bahasa, rekan yang baru tiga bulan bergabung dalam komunitas *Tajuk* ini, diam-diam, tengah suntuk menyiapkan sebuah "kamus".

DAHLAN

EDY SUDARTO. Reformasi bahasa memang dimungkinkan, sejauh ada pembenaran ilmiahnya.

Itulah "kamus *Tajuk*", setidaknya begitu kami menyebutnya, lantaran ia berisi kumpulan kata terpilih – hasil pemilahan kata dalam kamus resmi berdasarkan frekuensi pemakaiannya dalam penulisan artikel di *Tajuk*. Terdiri atas tiga kolom, kolom pertama dan kedua "kamus *Tajuk*" berisi seleksi kata yang dikutip dari *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Sedangkan, kolom ketiga, itulah deretan kata yang kelak akan dibakukan dan menjadi standar *Tajuk*.

Penyusunan "kamus *Tajuk*" itu sendiri, tak lain, merupakan hasil "unjuk rasa" awak redaksi, yang menuntut dilakukannya reformasi dalam pemakaian bahasa tulisan. Maklum, sebelum Edy bergabung, penulisan di majalah ini sangatlah beragam. Bukan saja diksi (pilihan kata)-nya yang berbeda-beda, tetapi juga ada yang terkesan *semau gue* dan cenderung abai terhadap kaidah bahasa. "Tugas saya adalah menginventarisasi kata pilihan *Tajuk*, lantas memberikan pembenaran sesuai kaidah bahasa. Reformasi bahasa memang dimungkinkan, sejauh ada pembenaran ilmiahnya," tutur Edy – berlatar belakang pendidikan Fakultas Sastra Universitas Indonesia – yang mengantungi jam terbang cukup panjang sebagai penyunting bahasa.

Toh, membakukan bahasa bukanlah pekerjaan sehari-dua hari. Itu adalah kerja berkesinambungan, lantaran amat peka terhadap perkembangan zaman. Namun, lepas dari itu, inilah sebenarnya sumbangsih kami – sebagai bagian dari masyarakat pers – dalam upaya mengembangkan bahasa anak negeri. Bahasa dengan kaidah yang benar, dan dipakai karena ada dasar. Salam! ▲

PENULIS KOLOM NOMOR INI

HERMAWAN SULISTYO

ADEK BERRY

DOKTOR politik lulusan Ohio University, Athen, AS, ini kembali tampil dengan kolomnya. Kali ini, membahas soal kasus pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai "dukun santet". Kasus di Jawa Timur itu, sebagaimana kasus-kasus lain yang tercatat dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara, memiliki beberapa karakteristik yang khas. Menurut peneliti dari LIPI ini, persoalan "karakteristik" pembunuhan massal itu akan lebih jelas lewat kategori konseptual dan contoh-contoh kasus. Bagaimana macam kategori itu dan contoh-contohnya? Ikuti kolomnya lebih lanjut. (*Halaman 76-77*)

TJOA HOK KIANG

ADEK BERRY

DIRUT Bank Mayora yang juga dikenal dengan nama Hertato T. Surya ini, sesuai keahliannya di dunia perbankan, menyoroti ihwal dunia perbankan nasional yang megap-megap. Ketika bank sedang *booming*, banyak orang berlomba ingin jadi bankir, sampai-sampai yang "kurang becus pun" ikut-ikutan jadi CEO. Ketika krisis moneter melanda, bank-bank yang dikelola amatiran itu kelimpungan. Untuk mengatasinya, Tjoa menawarkan solusi, mulai anjuran untuk mengadili para bankir nakal, sampai pembenahan sektor perbankan itu sendiri. Bagaimana konsepnya? (*Halaman 90*)

MAJALAH DWIMINGGUAN
Tajuk
SIUPP: **No. 306/SK/MENPEN/D.1/1996** PENERBIT: **PT GEMA JUANG.** PEMIMPIN UMUM: **Marah Sakti Siregar.** PEMIMPIN PERUSAHAAN: **Hendrix K. Hidayat.** PEMIMPIN REDAKSI: **Mohamad Cholid.** DEWAN REDAKSI: **Atwar Nurhadi, Sudjarwo.** REDAKTUR PELAKSANA : **Didin Abidin Mas'ud, Masduki Baidlawi.** REDAKTUR: **Burhanuddin Abe, Dadi R. Sumaatmadja, Djoko Quartantyo, Idrus F. Shahab, Nanang Junaedi, Sulaeman Sakib,Tatik Saadati Hafidz, Untung Widyanto.** DIVISI PELIPUTAN: **Suryansyah (Kepala), Hartono (Asisten)** REPORTER: **Ari Prastowati, Eni Saeni, Ibnu Atho', Imelda Sari K, Miftahuddin, Sulton Mufit, Swasti Astra, Usman Sosiawan** REDAKTUR FOTO: **Dahlan Rebo Pahing.** FOTOGRAFER: **Dadang Trimulyanto, Lastri Berry Wijaya.** REDAKTUR ARTISTIK: **Yadi Dahlan.** DESAIN GRAFIS: **Iftachul Ngumar.** ILUSTRATOR: **Anto Sugianto.** PRACETAK & PRODUKSI: **Hermanto.** RISET FOTO: **Syahmardi.** RISET & DOKUMENTASI: **Ita Rosita Afianti** SEKRETARIS REDAKSI: **Jaena Mariyana, Yulia Setyawati.** STAF EDP: **Muhammad Igbal, Syahrial.** IKLAN: **Diah Widyawati, Kemas M. Ridwan.** SIRKULASI: **Rochmani** SDM & UMUM: **Indra A. Bustami** KEUANGAN: **Fuad Rahman.** ALAMAT REDAKSI: **Jln. Kalibata Tengah No. 1 G - H Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, Telepon: (021) 799-6010, 797-5347,Fax: (021) 797-5348, Indonesia.** REKENING PT GEMA JUANG: **BANK RATU No. 100-00-96209-6, Jln. Jend. Gatot Soebroto Kav. 54 - 57 Jakarta Selatan dan BCA Capem Cikini No. 305 - 3002087, Jln. Pegangsaan Timur No. 7A Jakarta Pusat.** PERCETAKAN: **PT Dian Rakyat.** Isi di luar tanggung jawab percetakan. **E-mail: tajuk@dnet.net.id**

Daftar Isi

6 EDITORIAL
7 DARI PEMBACA
76 KOLOM HERMAWAN SULISTYO
87 KOLOM DARMANTO JATMAN
88 INFO PRODUK
90 KOLOM TJOA HOK KIANG

PERISTIWA

10

10 JURNAL PERISTIWA: DEMONSTRASI VERSUS DEMONSTRASI.
27 WAWANCARA: ADNAN BUYUNG NASUTION.
"Sekarang, Abang buka kartu."
36 TOKOH: AHMAD SUMARGONO.
"Pengawal ideologi" yang kontroversial.
72 POLITIK (I): HABIBIE MENOLAK MENGADILI SOEHARTO?
74 POLITIK (II): MEGAWATI SEUSAI KONGRES PDI BALI.

INFOTAINMEN

APRESIASI:
38 TEATER: Musik-tari di *Art Summit* 1998.
41 CERMIN: Santet.
58 NUKILAN BUKU: Memoar Lee Kuan Yew.

47

PROFIL
42 PERSONAL: YOSEANO WAAS dengan koleksi jas dan dasinya.
47 EKSPOSE: BELLA SAFIRA. Ia bertanya: Akan dibawa ke mana negeri ini?
50 VISI: SUJAK WIDODO bermodal dengkul.
GAYA HIDUP
44 BUSANA: PANTALON & KAUS KAKI
54 REHAT: *NYANTAI* di Café Karafella.
63 TREN: MINUM *energy drink*, josss.

FOTO COVER: DADANG TRI

FOKUS TAJUK

12

12 FOKUS TAJUK: PENGAKUAN PRABOWO DAN "DALANG" KERUSUHAN MEI
Hasil penyelisikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang mengusut kerusuhan 13-15 Mei, akan diumumkan pekan depan. Sejumlah temuan menunjukkan, tindak kejahatan seksual memang benar terjadi, dan kerusuhan itu dilakukan secara terorganisir. Siapa "dalangnya"? Apa saja pengakuan Letjen Prabowo Subianto kepada TGPF? Dan, apa pula kaitannya dengan terbunuhnya Marthadinata, anggota Tim Relawan pendamping korban perkosaan?
66 EKBIS (I): AKIBAT KEPPRESNYA, SOEHARTO BISA DIADILI?
68 EKBIS (II): JIKA PEMERINTAH "PINTAR", KURS RUPIAH BISA MENGUAT KE LEVEL 7.000.
70 EKBIS (II): GARUDA TERBANG TINGGI LAGI.

INVESTIGASI

78 MENYINGKAP "DALANG" TEROR BANYUWANGI.
Eskalasi pembantaian "dukun santet" meluas ke seantero Jawa Timur. Sejumlah pesantren diteror. Ratusan tersangka ditangkap, tetapi teror jalan terus. Benarkah mereka preman berkedok *ninja*? Apa motif di balik kasus ini, dan benarkah ABRI terlibat? *Tajuk* menginvestigasi.
32 SURVEI: PUBLIK TIONGHOA DIRUNDUNG KETAKUTAN.
SISIPAN: *MUNCUL HURU-HARA, MUNCUL PULA RAMALAN JAYABAYA.*

Sindrom Rusia dan TGPF

RUSIA adalah contoh konkret sebuah reformasi yang menghasilkan kepedihan. Pada akhir 1991, ketika Uni Soviet tak lagi bisa dipertahankan akibat disintegrasi, banyak yang berharap dengan optimistis, Rusia yang lahir kembali akan tumbuh dengan kekuatan ekonomi pasar dan sistem politik yang demokratis. Para investor asing ikut berperan menyuburkan optimisme tersebut, termasuk pemain besar di pasar valuta seperti George Soros. Tetapi, sistem politik dan ekonomi yang dipertaruhkan selama tujuh tahun, sejak bendera Rusia yang tiga warna itu dikibarkan di Kremlin Natal 1991, hari-hari ini digugat keabsahannya.

Setelah lepas dari komunisme dan sekarang juga tak berminat menempuh jalur itu lagi, bangsa Rusia belakangan ini menghadapi kenyataan, reformasi yang mereka tempuh ternyata tidak menuju ke mana-mana. Salah satu keluhan mereka, antara lain, dana miliaran dolar AS yang dipompakan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memutar ekonomi pasar negeri itu telah digerogoti barisan kleptokrasi -- birokrasi bermental maling. Bank-bank swasta yang dijadikan simbol pasar bebas telah pada kolaps. Golongan menengah baru, sebagai landasan terbentuknya demokrasi, terpojok oleh keadaan, setelah tabungan mereka tak bernilai, dan sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan. Mereka seperti dikhianati bayangan masa depan.

Rubel, mata uang mereka, anjlok nilainya terhadap dolar AS, dengan devaluasi sekitar 34% akhir Agustus kemarin. Terjadi hiperinflasi. Kredit, dengan harga berapa pun, tak bisa diperoleh. Biro-biro perjalanan tak sanggup menetapkan harga tiket. Kenyataan sehari-hari yang dihadapi warga Rusia adalah, ternyata pemimpin yang mereka pilih tidak sanggup menjalankan pemerintahan. Krisis ekonomi menjadi makin parah karena kepemimpinan politik yang lemah dan konfrontasi perihal konstitusi Federasi Rusia.

Begitulah realitas di Rusia yang tertulis di sejumlah media massa internasional. Barangkali, sebagian dari kita akan tertarik untuk ikut mambahas kenyataan Rusia tersebut, dan sejumlah kepahitan lain di Asia (termasuk Indonesia), dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang teori pasar bebas, globalisasi, serta demokrasi. Karena ekonomi dan politik adalah dua sisi berbeda dari sekeping mata uang. Kini, Bank Dunia, IMF, Kementerian Keuangan AS, dan komplotan mereka di Washington atau di pusat-pusat keuangan lain di dunia, tengah diusik perangai ekonomi dan politik yang mengalami perubahan di luar perkiraan, sepanjang proses globalisasi yang belum tuntas.

Sementara itu, sebagian lain dari kita tentunya juga menyadari betapa kepahitan yang tengah berlangsung di Rusia itu kurang lebih juga kita alami di Indonesia, yaitu ketidakpastian ekonomi (yang sebagiannya diakibatkan oleh kleptokrasi) dan politik. Pemerintahan Kabinet Reformasi B.J. Habibie boleh dikatakan terkena sindrom Rusia. Yang membedakannya, barangkali, pengalaman kita lebih panjang dalam percobaan pasar bebas, di bawah kendali sistem kapitalisme semu berdasarkan pada para kroni. Atau, adanya optimisme yang dikumandangkan saudara-saudara kita di wilayah-wilayah yang tetap sanggup mengekspor hasil bumi. Serta, pertahanan kita untuk menepis godaan menjalankan sistem federal.

Namun, di samping adanya beberapa perbedaan itu, Rusia dan Indonesia sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama, yakni kepemimpinan yang kuat (dapat dipercaya) dan uang.

ISTIMEWA

Untuk yang pertama, menyangkut kepemimpinan, kita mestinya sanggup mengelolanya sendiri di dalam negeri. Hari-hari ini, misalnya, pemerintah memiliki peluang untuk memperlihatkan kredibilitasnya, antara lain dengan membebaskan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dari beban bias politik, supaya *output* yang diumumkan bukan hasil rekayasa demi kepentingan (penguasa) sepihak. Masyarakat sangat mengandalkan ketulusan para anggota TGPF dan keberanian mereka menolak upaya rekayasa – semoga Tuhan memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada mereka.

Sedangkan, untuk kebutuhan kedua, yaitu dana, hambatannya tidak kecil, ditambah dengan persaingan untuk mendapatkannya. Dunia lebih cemas terhadap perkembangan Rusia, katakanlah dibanding Indonesia. Para bankir dan pengelola dana dunia yang sering rapat di Washington tentu lebih kalkulatif menghitung bahaya berbaliknya Rusia menjadi nasionalis ekstrem, pendendam, diktator, anti demokrasi, dan anti Amerika. Karena, Rusia memiliki 22.000 peluru kendali berhulu ledak nuklir. Sedangkan, Indonesia tak terlalu mereka risaukan, barangkali karena bukan senjata nuklir yang kita miliki, melainkan 100 juta mulut yang menganga akibat termiskinkan oleh keadaan dan ratusan politikus yang belum juga saling menyapa secara ikhlas demi perbaikan negeri dan bangsanya. ▲

Mohamad Cholid
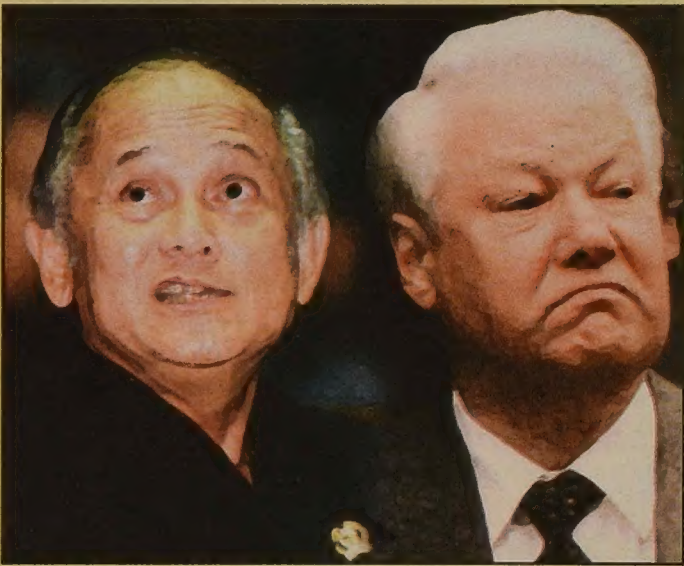
Dari Pembaca

Anggota ABRI di DPR

WARGA Negara Indonesia yang paling "beruntung", mungkin, yang bisa jadi perwira ABRI. Untuk menjadi perwira ABRI hanya perlu waktu 3-4 tahun, kemudian lulus dengan pangkat letnan dua, dan dilantik presiden. Setelah itu, kenaikan pangkat berkala pun akan diperoleh, setelah menerima penugasan dan tambahan pendidikan yang sesuai untuk itu.

Bandingkan dengan seorang insinyur, yang harus menghabiskan masa studi tidak kurang dari 6-7 tahun. Begitu lulus, belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Begitu pula dengan seorang mahasiswa kedokteran, yang harus menempuh masa pendidikan sekitar 7-8 tahun, kemudian ditambah lagi dengan tugas lapangan di daerah terpencil, sebelum akhirnya mengantungi izin praktek sebagai dokter umum.

Keuntungan lain anggota ABRI adalah terbukanya peluang di segala sektor, menjadi anggota DPR/MPR misalnya, tanpa harus melalui proses pemilihan umum. Sedangkan, bagi kalangan sipil, untuk bisa menjadi anggota DPR, ia harus menjadi anggota parpol tertentu, harus menjadi kader yang *outstanding*, dan setelah memasuki proses yang panjang barulah bisa menjadi anggota Dewan yang terhormat, itu pun harus melalui lorong persaingan yang panjang dan ketat.

Oleh karena itu, rasanya tidak adil dan tidak demokratis bila anggota ABRI menjadi anggota DPR. Masih bisa dimengerti bila anggota ABRI terwakili di MPR, namun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, sekitar empat orang saja – yang mewakili masing-masing angkatan dan Polri. Karena, berapa pun jumlah anggota ABRI di MPR, suaranya tetap satu juga sebagaimana telah digariskan Mabes ABRI.

Gustam Effendi
Komp. LP Sukamiskin RT 01/03
Arcamanik - Bandung

Menunggu Janji Pak Harto

SEBAGAI rakyat jelata, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Harto, yang pernah membawa rakyatnya merasakan manis madunya Orde Baru. Tetapi, ada satu hal yang menjadi perhatian saya tentang beliau. Yaitu, ketika Pak Harto berkunjung ke Kairo (ketika masih presiden). Melalui media massa diinformasikan, beliau sebagai orang keempat terkaya di dunia.

Malah, media massa asing pun me-*ranking* Pak Harto pada urutan ketiga terkaya di dunia (khusus raja-raja). Komentar beliau ketika itu benar-benar membuat saya terharu, gembira, dan bangga. Adapun, jawaban Pak Harto, "Syukur alhamdulillah, kalau memang benar, saya akan gunakan untuk kesejahteraan rakyat."

Nah, sekarang kita sangat mengharapkan beliau menepati janjinya. Kami mendengar, konon sebagian saja dari kekayaan Pak Harto bisa digunakan untuk membayar seluruh utang negara kita, dan kita tidak perlu *mengemis-ngemis* ke IMF agar dipinjami uang.

Seandainya beliau menepati janjinya, rakyat pasti akan senang. Dan, nanti anak-cucu Pak Harto pun akan bangga. Selebihnya, tentulah, nama harum bagi Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto.

Pandu Syaiful
Jln. T. Zainal Abidin
Duri, Riau 28884

Semangat Nasionalisme

DENGAN berakhirnya zaman rezim Orde Baru dan dimulainya "era reformasi total" di segala bidang ini, terlihat adanya gerakan-gerakan disintegrasi bangsa, yakni munculnya keinginan untuk mendirikan "Negara Federal". Hal ini disebabkan, selama rezim Orba berkuasa, terlihat, "nasionalisme" sepertinya ditabukan, bahkan hendak dilenyapkan, dan diganti dengan prinsip "monoloyalitas" hanya terhadap penguasa/pemerintah.

Hal itu, misalnya, lewat dicetuskannya prinsip monoloyalitas dalam birokrasi yang dikenakan kepada setiap anggota pegawai negeri sipil (PNS) yang termasuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Akibatnya, politik "de-nasionalisasi" bangsa yang diterapkan selama rezim Soeharto (Orba) berkuasa, ternyata, kini menghasilkan ancaman munculnya disintegrasi bangsa, serta memunculkan banyak partai politik.

Sungguh ironis. Kita harus membayar sangat mahal dengan mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka, layaknya kita menyalakan kembali "api dan semangat" nasionalisme bangsa Indonesia yang telah hilang tersebut dalam era reformasi total ini, dengan dukungan persatuan dan kesatuan dari kaum nasionalis Indonesia.

Ir. Agam K. Zebua
Jln. Bahagia No. 6
Medan 20217

Tanggapan Pemblokiran BCA

SEHUBUNGAN dengan keluhan Ir. John Suraputra (*Tajuk* No. 14/3 September 1998, *Dari Pembaca*) mengenai keterlambatan pemblokiran, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada PT Bank Central Asia.

Kami turut menyesal atas peristiwa penipuan yang menimpa Universitas Darma Persada yang mengakibatkan kerugian materi jutaan rupiah.

Perlu diketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus penipuan dengan modus operandi serupa. Pemberitaan mengenai kasus-kasus tersebut pun telah banyak dimuat berbagai media massa.

Menerima laporan mengenai kasus penipuan yang melibatkan nasabah BCA dan pernyataan di berbagai media massa, kami mengimbau agar nasabah/masyarakat berhati-hati terhadap upaya penipuan yang memanfaatkan/menyalahgunakan kepemilikan rekening di bank. Imbauan semacam itu juga telah dikeluarkan Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia.

Mengenai keluhan Bapak atas sikap petugas kami di BCA Capem Klender dan BCA Capem Fatmawati, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi masalah/sengketa antara nasabah BCA dan pihak ketiga, posisi BCA adalah netral, tidak berpihak pada siapa pun. BCA harus berpegang pada asas praduga tak bersalah. Artinya, BCA bukanlah polisi, yang berwenang melakukan penyidikan, ataupun hakim, yang berhak memutuskan siapa yang benar (misalnya yang ditipu) atau siapa yang salah (misalnya yang menipu), dalam suatu perkara yang melibatkan nasabah dengan pihak ketiga tersebut.
2. Secara hukum, setiap transaksi kiriman uang (transfer), sejauh perintah transfer, nama, dan nomor rekening penerima, serta jumlah dana yang akan ditransfer, sudah jelas dan benar, petugas akan melaksanakan perintah transfer tersebut sesuai permintaan pengirim. Dengan demikian, dana yang telah dibukukan ke rekening penerima tidak dapat dibatalkan atau didebit kembali oleh pihak bank maupun pengirim, karena dana tersebut telah

menjadi hak milik si penerima/pemilik rekening tersebut.

3. Permohonan pemblokiran terhadap rekening nasabah bank hanya dapat dilakukan oleh bank apabila telah menerima surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan minimal oleh Kepolisian Resor (Polres) dan ditandatangani oleh kapolres.
4. Tanpa surat minimal dari Polres atau penetapan pengadilan (untuk pemblokiran), izin menteri keuangan (untuk permohonan data-data pemegang rekening), atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bank (dalam hal ini BCA) tidak berwenang melakukan pemblokiran, penyerahan data-data pemegang rekening, atau mendebit rekening nasabah BCA yang diduga menipu.
5. Hal tersebut di atas berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan operasional bank, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Bab VII pasal 40 yang mengatur tentang Rahasia Bank. Sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan tersebut sangat berat dan telah diatur dalam UU tersebut.

Dengan alasan itu, petugas BCA Capem Klender maupun BCA Capem Fatmawati tidak dapat dipersalahkan apabila menolak membatalkan setoran yang telah dibukukan dan memblokir rekening penerima setoran tanpa adanya surat permohonan pemblokiran yang minimal berasal dari Polres dan ditandatangani kapolres.

Penolakan petugas BCA tersebut tidak menyalahi prosedur, semata-mata hanya karena tidak ingin melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan penjelasan tersebut kami berharap, Bapak dapat memahami posisi bank dalam kasus penipuan yang Bapak alami. Sehingga Bapak dapat pula memahami, kami tidak pernah bermaksud menolak memberikan bantuan kepada Bapak atau bahkan bekerja sama dengan "penipu".

Dan, kami mohon maaf apabila belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Bapak.

Sapto Rahmadie
deputy manager - PT Bank Central Asia
Divisi Corporate Communications - Biro Humas

Susah Jadi "Oposan"

DALAM beberapa hari belakangan ini, hampir semua media cetak dan elektronik memuat berita penjelasan Bapak Akbar Tanjung, baik sebagai ketua umum Golkar maupun sebagai mensesneg, tentang Yayasan Dakab, kekacauan sosial, dan komentarnya tentang hujatan kepada mantan Presiden Soeharto.

Kesemuanya itu membuat saya terkesima. Kenapa? Saat ini, masyarakat dihadapkan pada masalah yang lebih besar, yaitu: PHK, daya beli yang lemah, dan harga barang terus naik – termasuk harga-harga sembako. Tetapi, Bapak Akbar yang ikut "bunyi reformasi" itu masih merangkap mensesneg, sehingga sulit mengambil posisi sebagai "oposan" untuk bisa memberikan ma-

sukan-masukan yang kritis terhadap pemerintah guna mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, saya ingin bertanya kepada Bapak: Apakah Bapak menjadi bos di perumahan-perumahan Citra Raya, Rancamaya, dan Kota Legenda? Kalau itu benar, sebaiknya lupakanlah. Karena, kalau Bapak masih merangkap bisnis serta jabatan mensesneg itu, dan dalam Pemilu 1999 nanti hasilnya Golkar yang menang, bisa-bisa masyarakat akan meragukan kejujuran dan keadilannya.

Deandri Kusuma Agus
Jln. H.A. Latief
Karet Tengsin-Tanah Abang - Jakarta Pusat

Kabut di Seputar Halim

MEMBACA artikel *Menyingkap Kabut di Seputar Halim* (*Tajuk* No. 15/17 September 1998), saya ucapkan terima kasih dengan dimuatnya wawancara saya dalam edisi tersebut. Dalam garis besarnya, isi artikel itu cukup baik. Hanya, ada beberapa keterangan yang menurut saya bertendensi provokatif.

Halaman 21: "Keterangan ini senada dengan pembelaan Omar Dhani sendiri, yang disampaikan dalam sidang Mahmilub, Desember 1966. Kala itu Omar membenarkan, pada Juni 1965 Jono pernah melapor tentang kegiatannya. Ia bilang, latihan dilakukan dalam rangka menyiapkan "angkatan kelima" (gagasan PKI yang berupaya mempersenjatai rakyat, sebagai angkatan kelima, setelah AD, AU, AL, dan AK) – di mana Omar Dhani dikenal sebagai *pendukung beratnya*. Waktu itu, dst."

Kata-kata "angkatan kelima" dan *pendukung berat* kurang tepat, dan saya tidak dapat menyetujuinya. Tetapi, dalam hal ini, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya menyarankan untuk membaca dengan teliti pembelaan Saudara Omar Dhani di depan Mahmilub halaman 21 s.d. 25.

Wisnu Djajengminardo
marsekal muda (purn.)
Jln. Veteran I/5 - Jakarta 10110

Orde Baru dan Pancasila

PADA mulanya saya berpikir, pemerintah Ode Reformasi akan membuang jauh-jauh segala sesuatu yang berbau Orde Baru, misalnya perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Nyatanya, tidak. Di beberapa media tampak dengan jelas, pemerintahan Habibie masih meneruskan salah satu tradisi era Soeharto itu.

Padahal selama ini masyarakat luas tahu persis, Pancasila hanya digunakan sebagai alat oleh rezim Orba untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan Pancasila, pemerintah Orba menuding siapa saja yang tidak sejalan dengan kehendaknya sebagai kelompok anti Pancasila.

Dengan dalih menegakkan Pancasila, pemerintah Orba melakukan berbagai tindakan yang melanggar HAM. Hal ini terbukti dari adanya berbagai kasus berdarah; seperti kasus Komando Jihad, Tanjungpriok, Aceh, Lampung, Haur Koneng, tragedi 27 Juli 1996, dan sebagainya.

Kembalikan Pancasila ke tempat asalnya, sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Hapuskan asas tunggal dalam parpol, yang sangat anti demokrasi.

Irfan Suryahardy
Suryodiningratan M.I 2
Yogyakarta, 55141

Ralat

Dalam *Tajuk* No. 16/1 Oktober 1998, pada tulisan berjudul *Setelah Kawin Paksa Itu Bubar*, ada disebut: "Haryoto P.S. merasa (*at home*) dalam rumah PDI Perjuangan." Seharusnya: "Theo Syafei merasa (*at home*) dalam rumah PDI Perjuangan." Dengan demikian, kesalahan diperbaiki – ***Redaksi.***

Penjelasan

DALAM artikel di *Tajuk* No. 16/15 Oktober 1998, halaman 54-56, tentang *Ayam Kampung dan Esek-Esek di Kafe*, foto-foto tersebut dimuat hanya untuk memberikan gambaran suasana santai di sebuah kafe. Diharapkan tidak menimbulkan salahpenafsiran – ***Redaksi.***

JURNAL PERISTIWA

DIDUBESKAN & DIKOMUNISKAN

HABIBIE insyaf, kepercayaan itu tidak datang dari kursi kepresidenan. Kita bisa bayangkan, sebelumnya ia khilaf ketika berkeinginan mengirim Mar'ie Muhammad, mantan menteri keuangan yang suaranya masih didengar orang dan punya reputasi moral yang bagus dengan julukan Mr. Clean, ke luar negeri. Menjadi dubes di luar negeri merupakan salah satu bentuk penghargaan, di mana sebuah negara yang berdaulat "hadir" di negara orang, melalui sang duta besar. Barangkali, ia ingat penghargaan tulus yang diberikan Presiden Cile, Salvador Allende, kepada pemenang nobel untuk kesusastraan, Pablo Neruda, pada 1973. Yakni, menjadi dubes Cile di Paris.

Tetapi, kemudian banyak mata memandang tajam ke arah jago aeronautika lulusan Jerman ini. Bukankah apa yang mungkin direncanakannya sama dengan yang selama ini dilakukan mantan Presiden Soeharto. Sebelum Revolusi Mei meletus, orang masih percaya: pengutusan seseorang, khususnya yang vokal dan mencoba keluar dari *mainstream*, untuk menjadi dubes di negara sahabat, sama saja dengan mengasingkan anasir yang mengusik kenyamanan kekuasaan.

Memang, bagaimanapun, menyingkirkan seorang calon pesaing dengan cara seperti itu masih lebih baik bila dibandingkan dengan cara-cara penyiksaan dan intimidasi canggih yang diberlakukan di mana saja dan kapan saja. Amangkurat II menyingkirkan kawan seperjuangannya, Trunajaya, dengan cara terbuka, di hadapan sidang para bupati. Ada kira-kira selusin keris yang menghunjam ke tubuh yang lelah itu, sebelum akhirnya Trunajaya roboh di balairung dengan perut yang terbelah, dan hati yang tercabik-cabik. Kepalanya dipenggal, darah masih menggelimang di wajahnya ketika kepala Trunajaya diletakkan di ambang pintu keputren, supaya setiap putri bisa menginjaknya.
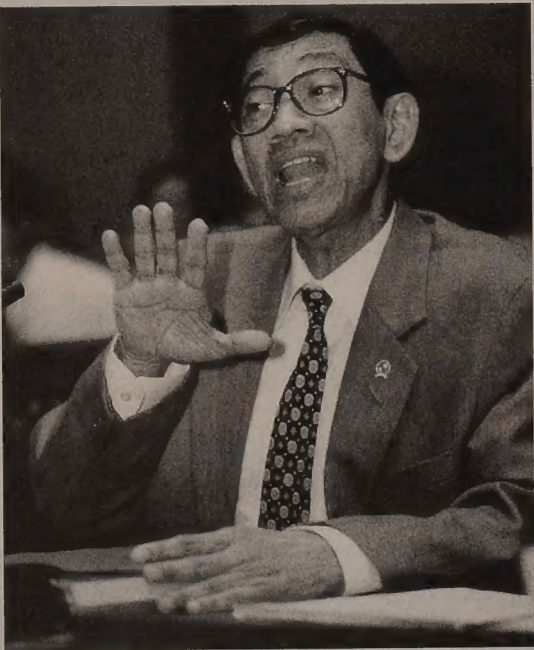
ADEK BERRY

Di Prancis, negeri yang konon dibanding sekelilingnya lebih dulu mengenal makna *liberte, fraternite,* dan *egalite,* ada kisah horor tentang kematian Damiens, seorang musuh penguasa, di Place de Greve, pada 1757. Ia diletakkan di pancang, dagingnya direnggutkan dari dada, lengan, dan betisnya, dengan sepasang sepit yang dipanaskan. Kemudian, dituangkan timah cair ke luka bekas renggutan yang masih berdarah. Dan, setelah enam ekor kuda yang dikerahkan untuk merobek tubuh Damiens yang malang tak sanggup menyelesaikan tugasnya dengan baik, para algojo pun beraksi dengan pedangnya. Di situ, hidup Damiens berakhir.

Namun, Habibie tampaknya orang yang sadar: di zaman ketika Amangkurat II dan Damiens hidup, tak ada Komnas HAM, tak ada kalangan pers yang suka mengorek kesalahan-kesalahan pejabat, dan tak ada masyarakat yang bangkit kala empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan bedil. Ia tahu, mandat kekuasaan datang dari kepercayaan masyarakat, dan siapa tahu hal itu bisa diperolehnya melalui seorang kawan yang dijuluki Mr. Clean, Mar'ie. Mungkin, niatnya benar-benar ikhlas – ingin membentuk pemerintahan yang sungguh-sungguh *clean* – ketika ia mengulurkan tangan menawarkan jabatan penasihat ekonomi pemerintah kepada si kacamata tebal alumnus Fakultas Ekonomi UI itu.

Tetapi, orang masih memandangnya dengan sorot mata curiga. Karena, dalam kamus politik Orde Baru, rangkulan terhadap tokoh-tokoh kritis tak berbeda dengan upaya kooptasi – penjinakan. Untuk sementara ini, siapa pun bisa menarik kesimpulan bijak: mencari musuh lebih mudah dari mencari kawan. Tak bisa dihindari, setelah 32 tahun mengendalikan kekuasaan, Orde Baru telah menciptakan pola-pola intimidasi dan persuasi terhadap lawan-lawan atau pesaing-pesaing politiknya dengan efektif. Meski, tak hanya sekali pemerintah menjerumuskan dunia perpolitikan kita ke dalam langkah-langkah yang machiavelis. Sejarah memang berderap maju, dan koreksi demi koreksi telah kita lakoni bersama dengan penuh harap. Tetapi, hingga kini, istilah "di-dubes-kan" (untuk pesaing politik) dan "di-komunis-kan" (untuk lawan politik) terbukti masih bergerak hidup dalam benak kita masing-masing. ▲

Idrus F. Shahab

POLITIK

TANPASANGKUR DAN BEDIL

APA yang harus dilakukan terhadap lawan politik? Setelah dua tahun berlalu, ternyata, luka yang ditimbulkan oleh Tragedi 27 Juli yang berbau amis itu tidak juga sembuh. Kebencian terhadap pengkhianatan tersebut masih membayang. Sementara, pemerintah serba salah: tak mengakui kepemimpinan PDI Mega berarti "buta" terhadap aspirasi masyarakat, tak mengakui Soerjadi (kemudian Budi Hardjono) sama saja dengan menjilat ludah sendiri.

Tetapi, kendati pemeo "politik itu kotor" selalu terdengar gaungnya di setiap sudut, kerinduan kita akan politik yang "bersih" – setidaknya yang taat pada etika – tak pernah mati. Kita masih ingat betapa masyarakat sanggup melupakan golongan, agama, asal-muasal daerah, untuk beramai-ramai mengutuk aksi penculikan para aktivis (hingga kini, 14 aktivis yang terculik masih tak ketahuan rimbanya). Pada puncaknya, kesabaran masyarakat habis ketika empat mahasiswa baik-baik gugur oleh bedil "oknum" tak dikenal, dalam sebuah demonstrasi yang damai di Universitas Trisakti, Jakarta, Mei lalu.

Tak jelas apakah kita cukup arif belajar dari kesalahan masa lalu. Yang terang, percikan-percikan kekerasan masih mewarnai cara intimidasi dan persuasi yang dilancarkan terhadap lawan-lawan politik. Mungkin, perbedaan yang paling mencolok antara rezim Soeharto dan rezim Habibie adalah gaya pihak oposisi menghadapi pemerintah: sekarang secara frontal dan terus terang. Alhasil, dalam kurun dua bulan terakhir ini, terdapat perkembangan pola intimidasi/persuasi terhadap lawan politik yang layak disimak. ▲ **Idrus F. Shahab**

DAHLAN RF

DEMO ANTI ARIFIN PANIGORO: Gaya oposisi menghadapi pemerintah: frontal dan terus terang.

Waktu	Bentuk-bentuk intimidasi/persuasi	Tujuan	Reaksi/ keterangan resmi
Kamis, 1-8-1998	Barisan Nasional berdiri. Merekalah yang pertama-tama memakai istilah **oposisi terbuka**, dan terang-terangan menyatakan mau menggembosi Golkar.	Menurunkan Habibie dari jabatan presiden dalam Sidang Istimewa November 1998, dan menggantikannya dengan kepemimpinan presidium.	"Kita butuh kritik, apalagi dari senior," kata Mendagri Syarwan Hamid
Selasa, 9-9-1998	Disponsori oleh Forum Kota (Forkot), ribuan mahasiswa menggelar **demo** di depan Gedung DPR. Dua mahasiswa jadi korban penusukan oknum tak dikenal. Esok harinya, Surabaya diguncang demo serupa, dan 44 orang luka luka.	Menuntut pembubaran kabinet Habibie dan pembentukan presidium, pengadilan bagi Pak Harto, penurunan harga sembako, dst.	Menhankam/Pangab Wiranto berjanji akan menindak tegas demo-demo yang dinilai mengganggu ketenangan masyarakat.
Jumat,11-9-1998	Seorang pejabat menularkan info menyesatkan kepada Ketua F-PDI, Budi Hardjono. Kadung percaya bahwa Mar'ie Muhammad tak bersedia dicalonkan menjadi ketua Bepeka, F-PDI mendukung calon yang dijagokan F-KP, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Melalui voting, nama Mar'ie hilang dari daftar calon.	Menggolkan jagoan F-KP, Satrio "Billy" Joedono, setelah Presiden B.J. Habibie mengembalikan soal calon dan pemilihannya ke tangan DPR.	Mar'ie membantah pernah menyatakan keberatan. Sedangkan, Ir. Sarwono Kusumaatmadja menyayangkan **disinformasi** macam itu sampai terjadi di DPR.
Selasa, 15-9-1998	Pemerintah menunjuk eks Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad sebagai **dubes** RI di Brussel, Belgia. Beberapa waktu berselang, jabatan "penasihat ekonomi pemerintah" juga disodorkan kepada Mar'ie.	Banyak media massa yang kontan menganggap, ini strategi **"pengasingan"** dan **kooptasi** terhadap tokoh-tokoh kritis.	Mar'ie menghargai kepercayaan pemerintah. Tetapi menolaknya, karena masih merasa dibutuhkan di dalam negeri dan di lain tempat.
Kamis, 17-9- 1998	**Spanduk-spanduk** kembali bermunculan di persimpangan-persimpngan strategis. Cuma, kali ini, dengan *overtone* khusus pada **PKI**.	Mencoba meletakkan gerakan-gerakan yang mau menurunkan Habibie "segolongan" dengan PKI. Ada spanduk Kelompok Mahasiswa Pendukung Reformasi Konstitusional (KMPRK) yang bertuliskan, "Komunis, Nasakom, PRD, Forkot... selalu memperalat rakyat."	Ahmad Sumargono, ketua KISDI, mengaku melihat gerakan PKI di balik aksi kerusuhan.
Rabu, 30-9-1998	**Apel siaga** yang melibatkan 20.000-an massa Islam digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sekadar untuk mengingatkan akan bahaya laten komunisme, dan silaturahmi.	Menolak ide-ide pembentukan presidium. Dukungan terhadap kepemimpinan Habibie sampai SU MPR 1999.	Menhankam/Pangab Wiranto mendeteksi, ada indikasi: aksi-aksi demo didalangi kaum komunis.
Jumat, 2-10-1998	**Batu-batu** ikut beterbangan ketika sekelompok pemuda yang menyebut dirinya Front Penyelamat Bangsa menggelar demo di depan rumah pengusaha-politikus Arifin Panigoro.	Arifin diminta untuk segera "menghentikan tindakan-tindakannya yang dianggap mengganggu stabilitas negara".	Arifin menilai, aksi itu diorganisir pihak tertentu.
Sabtu, 10-10-1998	Sanksi **pemecatan** bagi pemrakarsa Kongres V PDI Medan 1996, dan Kongres IV PDI Palu 1998, dalam kongres PDI pro Mega di Sanur, Bali.	Tak ada tempat buat kepemimpinan Budi Hardjono dan Soerjadi. Tertutup kemungkinan untuk rujuk nasional.	Beberapa waktu lalu, Mendagri Syarwan Hamid masih mengharapkan rekonsiliasi.

Laporan akhir TGPF tentang kerusuhan 13-15 Mei diumumkan pekan depan. Kerusuhan itu terorganisir, dan tindak kekerasan seksual memang terjadi, meski tidak seseram yang diisukan selama ini. Tetapi, apa kaitannya dengan penculikan dan penembakan Trisakti?

Menanti Akhir KERUSUHA

LAPORAN Kenneth Starr. Begitulah, sambil bercanda tentu saja, para anggota Tim Asistensi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menjuluki laporan setebal lebih dari seribu halaman yang tengah mereka persiapkan. Maklumlah, Jumat 23 Oktober mendatang, tim yang dibentuk langsung atas instruksi Presiden B.J. Habibie itu menyampaikan laporan akhir temuan mereka atas kasus kerusuhan 13-15 Mei 1998 kepada Presiden dan publik. Inilah laporan yang ditunggu publik – dalam dan luar negeri – lantaran kentalnya nuansa politis yang melingkupinya. Konfidensi atas pemerintahan Habibie, di antaranya, akan ditentukan oleh isi laporan final itu.

Dijuluki demikian, karena laporan tersebut nyaris tak kalah tebal dengan hasil investigasi Jaksa Independen Kenneth Starr yang memaparkan skandal seks Presiden Bill Clinton dan Monica Lewinsky – yang mungkin akan berujung pada pemecatan (*impeachment*) sang Presiden. TGPF memang tak seperti Starr, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana jutaan dolar untuk mengusut kebohongan seksual Clinton.

Namun, dalam waktu tiga bulan – sejak dibentuk akhir Juni lalu – TGPF telah menemui dan mewawancarai ratusan saksi mata dan korban kerusuhan di enam kota: Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Solo, dan Surabaya. Sepanjang sejarah Indonesia, inilah kali pertama sebuah tim gabungan yang melibatkan unsur pemerintah dan nonpemerintah bekerja sama mengusut kerusuhan paling tragis sejak tragedi G-30-S/PKI lebih dari tiga dasawarsa silam itu.

Tetapi, belum lagi jelas apakah laporan TGPF tersebut akan diperlakukan persis seperti laporan Kenneth Starr di Amerika – terbuka untuk publik sampai ke soal *esek-esek*-nya segala. Karena, berbeda dengan laporan Starr, yang cuma mengisahkan dua lakon (Clinton dan Lewinsky), laporan TGPF mencakup aneka dimensi politik Indonesia yang hampir-hampir tak terperi. Laporan TGPF juga ada unsur *esek-esek*-nya – namun dalam konotasi yang jauh berbeda. Itulah kontroversi seputar perkosaan massal yang disebut-sebut terjadi selama kerusuhan itu.

"Laporan tim asistensi sih blak-blakan saja. Kita laporkan apa adanya," ujar Ketua Tim Asistensi Dr. Hermawan Sulistyo. Namun, menurut Ketua TGPF Marzuki Darusman – yang berwenang menentukan format akhir laporan final itu – kepada *Tajuk*, pihaknya akan mempertimbangkan pelbagai aspek. Misalnya, keselamatan saksi dan korban serta berbagai aspek politis lainnya, apalagi di musim pancaroba yang serba galau ini.

Lebih dari itu, TGPF sendiri – seperti terlihat dari komposisi anggotanya – terdiri dari berbagai unsur kepentingan. Tarik-menarik, yang sejak semula memang sudah tampak, tentu saja wajar dan pasti akan terjadi. Pada prinsipnya, kata Marzuki, laporan itu akan menggambarkan latar belakang masalah, temuan tim, dan rekomendasi – terdiri dari kelembagaan dan tindak lanjut hukum – yang mereka ajukan. "Tetapi, masih ada data yang akan kita simpan. Kalau ada proses keadilan yang mau ditegakkan, ada tekad pemerintah untuk itu, ya kita berikan," ujarnya.

Lepas dari berbagai aspek dan tarik ulur kepentingan itu, laporan TGPF haruslah menjawab sedikitnya empat isu utama yang selama ini mengendap di benak masyarakat. Nah, agar Anda memiliki gambaran bagaimana kira-kira isi laporan akhir TGPF itu, sepanjang dua pekan silam *Tajuk* mewawancarai berbagai sumber yang terlibat dalam pela-

caka
silny
ra w

spo

pola
umu
ra s
Pang
misa
men
emo
hasi
disa
(liha

rilis

DINDING ORANG HILANG. Dalam kasus penculikan, Prabowo sudah diberhentikan.

DAHLAN RP

...hir Misteri ...HAN MEI

cakan itu – termasuk para anggota TGPF. Hasilnya, kami rangkumkan dengan temuan para wartawan *Tajuk* di lapangan, berikut ini:

• Kerusuhan 13-15 Mei: terorganisir atau spontan?

Selama ini, ada dua pendapat mengenai pola kerusuhan ini. Para pejabat ABRI umumnya menilai, kerusuhan itu terjadi secara spontan dan tidak terorganisir. Mantan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, menyebut, kerusuhan di Jakarta itu merupakan spontanitas massa yang terbakar emosi mereka oleh penembakan brutal mahasiswa Trisakti. Pandangan yang sama juga disampaikan Danjen Marinir Mayjen Suharto (lihat: *Anak Buah Saya Sudah Kayak Kitiran*).

Namun, dalam laporan awalnya yang dirilis akhir bulan lalu, TGPF menyatakan adanya pola-pola kerusuhan yang terorganisir dengan ciri-ciri pelaku kerusuhan yang tertentu pula. Laporan final, tampaknya, akan memperkuat dugaan itu. Teori bahwa kerusuhan tersebut terjadi secara spontan tak didukung oleh fakta bahwa kerusuhan itu terjadi secara hampir serempak, dengan modus operandi yang nyaris mirip di keenam kota.

Toh, itu tak berarti bahwa kerusuhan yang spontan tidak terjadi di beberapa tempat. Sedikitnya ada tiga pola kerusuhan yang teridentifikasi. *Pertama*, kerusuhan yang sifatnya spontan dan sporadis tadi – seperti yang terjadi di Surabaya. *Kedua*, pola kerusuhan yang terorganisir dan terencana, seperti Jakarta, Solo, dan sebagian Medan. Dalam kerusuhan model inilah, diidentifikasi adanya provokator lokal yang berbeda dengan massa penjarah.

Berbagai temuan lapangan *Tajuk* juga mendukung data ini. Contohnya, kasus pembakaran dan penjarahan swalayan Goro di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi mata menyaksikan adanya kendaraan umum yang menurunkan para provokator itu. Mereka kemudian mengagitasi massa melakukan perusakan, dan segera menghilang sesudahnya. Kasus serupa, menurut Ketua Tim Testimoni TGPF Bambang W. Soeharto, juga dijumpai di Jln. Daan Mogot, Jakarta Barat, dan Karawaci, Tangerang.

Ketiga, pola gabungan antara kedua pola sebelumnya. Pada model ini, situasi sudah cukup panas. Sehingga, ada atau tidak ada provokator, kerusuhan akan tetap meledak.

• Bila kerusuhan itu cenderung terorganisir, adakah indikasi keterlibatan militer di dalamnya?

Pertanyaan ini muncul. Lantaran, untuk bisa "mengorganisasikan" kerusuhan dalam derajat luar biasa dahsyat seperti yang terjadi di Jakarta – plus empat kota lainnya – dalam waktu yang bersamaan, tentulah diperlukan "tangan-tangan yang terlatih". "Dan, di negeri ini, siapa yang memiliki keahlian semacam itu kalau bukan tentara?" tukas Abdul Hakim Garuda Nusantara, direktur eksekutif ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi HAM) yang juga anggota TGPF, sambil tertawa.

TGPF, kabarnya, memang menemukan sejumlah bukti keras mengenai keterlibatan oknum-oknum militer dalam kerusuhan itu. Di antaranya, pengakuan seorang oknum Kopassus yang membayari para preman calon perusuh di Solo, empat hari menjelang pecahnya kerusuhan. Sedangkan di Medan, dilaporkan, ada oknum Kopassus berpakaian preman, namun menyandang senapan M-16 dan pistol FN-45, mengagitasi massa melakukan kerusuhan.

Berbagai data lapangan yang dikumpulkan *Tajuk* pun mendukung sinyalemen keterlibatan oknum militer itu. Kusbianto, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, misalnya, menyebut adanya pertemuan membahas rencana kerusuhan di Koramil Medan

Denai, pada malam menjelang kerusuhan 4 Mei. Salah seorang anggota Pemuda Pancasila yang hadir dalam pertemuan itu, tetapi tak menyetujui niatan tersebut, lalu melaporkannya kepada seorang anggota LBH Medan. Bahkan, ada pula spekulasi mengenai keterlibatan oknum Kodam I/Bukit Barisan dalam rekayasa kerusuhan tersebut. Namun, Kapendam I/Bukit Barisan maupun Ketua Harian DPW PP Medan menampik tudingan itu (lihat: *Dari Medan Kerusuhan Bermula*).

Meski begitu, ditengarai pula adanya keterlibatan sejumlah organisasi massa, perguruan bela diri, serta tokoh sipil yang punya hubungan dekat – atau memiliki persamaan kepentingan – dengan kalangan militer (lihat: *Yang Dituduh Menggerakkan Perusuh*).

Kesaksian para jenderal yang bertanggung jawab dalam pengamanan Ibu Kota pada saat kerusuhan itu (lihat: *Pengakuan Para Jenderal*) juga memicu serangkaian tanda tanya tentang keterlibatan militer itu. Dari kesaksian tersebut, menurut Marzuki, tampak adanya komplikasi dalam koordinasi. Sesuatu yang sejatinya janggal terjadi di tubuh ABRI. Tak pelak lagi, pertanyaan yang muncul adalah: Adakah ini menunjukkan faksionalisme yang tajam di tubuh militer sebagaimana disinyalir selama ini, ataukah ada unsur kesengajaan? "Sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa," ujar Marzuki. Namun ditegaskannya, tidak ada indikasi yang menunjuk keterlibatan ABRI secara institusional dalam kerusuhan itu.

Tetapi, bila kerusuhan tersebut terorganisir dan ada oknum militer terlibat di dalamnya, siapakah dalangnya? Apakah pula kaitannya dengan penculikan dan penembakan Trisakti?

Ihwal "dalang" kerusuhan dan keterkaitan antara tiga peristiwa besar yang memicu runtuhnya Orde Baru ini memang salah satu isu yang paling ditunggu dari hasil kerja TGPF itu. Maklumlah, dalam dua peristiwa yang pertama terbukti sudah adanya keterlibatan tangan-tangan militer. Pertanyaannya kini: Apakah kerusuhan 13-15 Mei itu juga satu paket yang digerakkan oleh tangan-tangan yang sama?

Saat ini, ada dua versi – yang bisa dibilang saling bertentangan. Yang pertama meyakini, ketiga peristiwa itu berdiri sendiri dan tidak ada satu "dalang" yang memainkannya. Dalam kasus penculikan para aktivis, mantan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto, yang memerintahkan tindakan itu, sudah diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.

Dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kesalahan ditimpakan di pundak dua perwira menengah Brimob, oleh mahkamah militer. Sementara, dalam hal kerusuhan, sejumlah tokoh yang dikenal dekat dengan Prabowo merilis tudingan bahwa aksi itu didalangi mantan Menhankam/Pangab Jenderal (purn.) L.B. Moerdani. "Kalau TGPF *fair*, mereka harus pula memeriksa kemungkinan ini," ujar Ahmad Sumargono (baca: *Pengawal Ideologi yang Kontroversial*). Sumargono menunjuk sejumlah data intelijen, yang mengindikasikan adanya pertemuan rahasia kelompok Benny – sapaan akrab L.B. Moerdani – di sebuah hotel di kawasan Bogor menjelang kerusuhan itu. Untuk ini Benny Moerdani belum memberikan konfirmasi.

KERUSUHAN DAN KORBAN. Masing-masing berdiri sendiri, atau terorganisir?

Versi kedua – yang lebih populer – menduga, Prabowo adalah "dalang" utama dalam ketiga peristiwa tersebut. Sebagai jenderal paling berpengaruh di jajaran ABRI ketika itu, ia memiliki semua sarana yang diperlukan untuk melaksanakan operasi itu. Ia juga diduga punya motif: menciptakan kondisi tak stabil namun tetap terkendali (*contained instability*), agar ia berkesempatan mendaki ke pucuk pimpinan ABRI atau malah puncak pimpinan negeri. Prabowo menyadari aneka tudingan yang diarahkan kepadanya. "Saya dituduh merekayasa kerusuhan," katanya kepada tim TGPF, sekaligus menyatakan bantahannya.

TGPF, kata Bambang Soeharto, tidak menyelisik sampai ke wilayah itu. Tetapi, mereka mencoba menalikan benang merah ketiga peristiwa tersebut. Karena, bagaimanapun, fakta menunjukkan: peristiwa Trisakti adalah faktor pemicu terjadinya kerusuhan 13-15 Mei itu. Dan, penembakan di Trisakti tersebut didahului oleh terjadinya aksi penculikan terhadap para aktivis. Karena itu, Senin pekan lalu (11/10), sejumlah aggota tim bertemu dengan mantan Ketua DKP KSAD Jenderal Subagyo H.S. dan Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. "Beliau-beliau itu hanya menanyakan proses DKP dan hasilnya," ujar Kadispen AD Brigjen I Dewa Putu Rai, seusai pertemuan selama satu setengah jam itu.

Toh, menurut Hermawan Sulistyo, yang memimpin penulisan laporan Tim Asistensi, sampai saat ini keterkaitan antara ketiga peristiwa dan kemungkinan keterlibatan Letjen Prabowo Subianto masih merupakan perta-

nyaan terbuka.

• **Perkosaan: ekses atau bagian terencana dari kerusuhan?**

Inilah isu paling kontroversial dari seluruh *item* yang harus dijawab TGPF. Karena, sejatinya, tim itu dibentuk akibat gencarnya tekanan di dalam dan luar negeri agar pemerintah menginvestigasi dugaan mengenai terjadinya perkosaan massal pada saat kerusuhan tersebut.

Seperti diketahui, berita tentang perkosaan massal itu pertama kali dirilis Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), yang dipimpin Romo Sandyawan Sumardi – yang juga anggota TGPF. Pada bulan Juni, TRuK melaporkan terjadinya 168 kasus tindak kekerasan seksual (*sexual assault*) di enam kota, yang terjadi sejak kerusuhan Mei hingga akhir Juli. Tim percaya, tindak kekerasan seksual itu merupakan bagian terencana dari kerusuhan (*systematic rapes*), dan karenanya merupakan kejahatan negara (*state violence*).

Laporan tentang perkosaan massal itu, kemudian diikuti penyebaran foto-foto yang disebut sebagai "foto perkosaan" di jaringan internet sedunia, kian meremukkan citra Indonesia di mata dunia. Sejumlah pejabat pemerintah – yang mendasarkan sikap mereka atas hasil investigasi aparat keamanan – telah membantah isu terjadinya perkosaan itu. Namun, jajak pendapat dengan responden para eksekutif di Asia yang digelar majalah terkemuka *Far Eastern Economic Review* barubaru ini, misalnya, mendapati: mayoritas responden mempercayai terjadinya perkosaan massal itu. Kontroversi kian menghangat kini, setelah salah seorang anggota TRuK itu ditemukan tewas terbunuh, di tengah kabar tentang gencarnya aksi-aksi teror yang dialami anggota tim (lihat: *Ita Pergi di Tengah Kontroversi*).

Tetapi, terbuktikah klaim yang diajukan TRuK tersebut? Sejauh ini, kabarnya, tim belum berhasil membuktikan kebenaran klaim tersebut. Menurut Dr. Rosita Noer, sekretaris TGPF, tim telah meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) – karena sejumlah dokter dilaporkan telah merawat para korban perkosaan itu – dan melakukan verifikasi atas data yang mereka terima. "Tetapi, sampai sekarang, kita belum menemukan bukti adanya tindak perkosaan sistematis," ujar pengurus Bakom PKB yang juga instruktur di Lemhannas itu kepada *Tajuk*.

Sampai saat ini, kabarnya, hanya ada 11 data perkosaan yang berhasil diverifikasi – jauh dari angka yang dilaporkan TRuK. Perinciannya: tiga kasus penyerangan dan pembunuhan, dua kasus pelecehan dan perkosaan, satu kasus perkosaan dan penganiayaan, dan enam kasus perkosaan. Dari dua kasus penyerangan seksual – yang kabarnya dilakukan secara massal oleh belasan orang – diidentifikasi ciri-ciri pelaku: berambut cepak, berbadan tegap, dan sebagian bertato.

Data yang berhasil diverifikasi itu pun bukan berasal dari TRuK – melainkan data Bakom PKB dan temuan tim sendiri. Namun, dari sekian kasus itu, kecenderungan yang ada menunjukkan: tindak kekerasan seksual yang terjadi itu lebih merupakan ekses ketimbang bagian terencana dari kerusuhan.

Mengapa terjadi perbedaan angka yang begitu besar? Menurut sebuah sumber *Tajuk*, laporan TRuK memiliki cacat metodologis yang sangat mendasar. Yakni, tidak adanya pembedaan derajat validitas informasi yang diterima. "Ada seseorang melaporkan satu kasus perkosaan, dicatat sebagai satu kasus. Lalu, ada laporan lagi dari kerabat korban, dicatat lagi. Dipukul rata saja, tidak ada klarifikasi data," ujarnya. Kabarnya, Romo Sandyawan sendiri gagal membuktikan satu kasus yang dilaporkannya itu dalam tim TGPF.

Namun, ketika dimintai konfirmasi *Tajuk*, Sandyawan tetap mempertahankan validitas temuan timnya. Saat ini pun, katanya, telah beberapa di antara korban itu yang bersedia memberikan kesaksian. Sebagai contoh, kata Romo, pada Sabtu 3 Oktober lalu, dua orang korban telah datang memberikan kesaksian.

Dua orang korban ini – ibu dan anak – sempat bersembunyi di sebuah pulau lantaran mengalami trauma luar biasa. Rencananya, mereka akan memberikan kesaksian di hadapan anggota Komnas HAM. Tetapi, karena si putri mengalami *shock* begitu ia melihat kerumunan orang saat turun dari pesawat terbang – yang mengingatkannya pada kerumunan massa saat kerusuhan lalu – pemberian testimoni dilakukan di penginapan mereka. Lalu, pada hari Rabu, sembilan orang pendamping korban perkosaan – yang masing-masing mengaku mendampingi lebih dari tiga korban – telah pula datang ke posko TGPF di Departemen Kehakiman. Dengan begitu Romo yakin, pada tanggal 22 Oktober nanti – tenggat terakhir sebelum laporan final – pihaknya akan mampu membuktikan klaim timnya itu.

Apa pun kontroversinya, publik kini menanti hasil kerja TGPF itu. "Kita ingin tahu siapa dalangnya, apa motivasinya, bagaimana kejadiannya," ujar Martias, warga keturunan Tionghoa yang mengaku percaya pada independensi TGPF tersebut, kepada *Tajuk*. Menurut presdir Surya Dumai Industry Group itu, pemerintah tidak perlu menutup-nutupi apa yang sesungguhnya terjadi. "Semuanya harus bisa terbongkar sedalam-dalamnya. Lalu, sebagai negara hukum, semua harus diusut tuntas dan dihukum setimpal," sambungnya.

Bukankah orang bijak mengajarkan "Katakanlah kebenaran, walau itu pahit menyakitkan"? Karena, dengan belajar dari kesalahan yang pahit, kita bisa bangkit dan tegak kembali sebagai bangsa. ▲

Tim Tajuk

Marzuki Darusman, ketua TGPF: PERSEPSI PARA

INI pekan paling sibuk bagi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Mereka bekerja siang-malam, merumuskan temuan yang akan disiarkan pada 23 Oktober mendatang. Tugas yang berat, memang. Apalagi, selama ini sudah beredar rumor di tengah masyarakat tentang apa dan siapa yang berada di balik aksi kerusuhan berdarah 13-15 Mei lalu. Kalau sama dengan opini massa, tidak masalah. Tetapi, kalau berlawanan – katakan sama dengan opini pemerintah – bisa muncul macam-macam pandangan.

Para anggota TGPF merasakan dilema itu. Namun, apa pun, demikian Marzuki Darusman, ketua TGPF, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyatakan kebenaran. "Kalau nanti ada pandangan kita yang sama dengan pemerintah, apa bisa dikatakan bahwa kita tidak independen?" katanya, ketika ditemui di ruang kerjanya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/10). Berikut wawancara wartawan **Miftahuddin, Usman Sosiawan**, dan fotografer **Dahlan Rebo Pahing**, dengan Marzuki:

Pertemuan TGPF dengan DKP menyiratkan adanya pertalian antara kasus penculikan aktivis dengan penembakan di Trisakti dan kerusuhan 13-15 Mei.

Kita belum mempertalikan antara penculikan, penembakan Trisakti, dan kerusuhan itu sendiri. Tetapi tesisnya, memang, kita menghubungkan ketiga peristiwa tersebut. Sehingga, kita harus punya akses dengan badan-badan peradilan. Namun, itu masih dan sedang berjalan, sedangkan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) sudah boleh dikatakan semifinal, tinggal mengajukan orang-orangnya ke Mahkamah Militer.

Apa benang merah ketiga peristiwa itu?

Kita diberi mandat atau tugas untuk meneliti dampak peristiwa kerusuhan dan dampak ikutannya. Tetapi, tidak mungkin meneliti peristiwa-peristiwa ini kalau tidak melihat kondisi awal yang mengarah kepada proses timbulnya kerusuhan itu. Kerusuhan tersebut kan ada dua aspek. Masyarakat dalam kondisi marah akibat adanya penculikan sehingga rentan terhadap tindak kekerasan dan mudah dibangkitkan emosinya. Ini ditambah krisis ekonomi. Soalnya sekarang, apakah masyarakat yang berada dalam posisi berpotensi untuk melakukan kekerasan melakukannya dengan spontan atau tidak. Faktor lainnya adalah faktor pengamanan pada saat itu, yang bisa mencegah terjadinya kerusuhan, atau setidaktidaknya memperkecil kerusuhan yang terjadi. Itu yang kita teliti.

Anda pernah mengatakan, ada kelompok terorganisir yang mendalangi peristiwa itu. Sejauh mana pendalaman tentang hal ini?

Kelompok terorganisir tampak dari penelitian kita. Ini merata di semua kota: Solo, Medan, Jakarta, dan Surabaya. Aspek organisasi melahirkan kelompok teroganisasi – kita ingin tahu hal itu. Dalam kasus penculikan, sudah jelas diakui Menhankam/Pangab: ada hubungannya dengan ABRI. Jelas pula, penembakan Trisakti itu ada kaitannya dengan ABRI. Sekarang, tinggal kerusuhannya, ada nggak hubungannya dengan ABRI. Terus terang saja, kita nggak ada spekulasi, ABRI ikut terlibat apa nggak. Kita ingin tahu indikasi, yang menunjukkan, ada pengorganisasian di balik kerusuhan itu.

Hasilnya bagaimana?

Nah, itu sedang diteliti.

TGPF kan sudah melakukan pemeriksaan?

Tetapi, belum bisa disimpulkan.

Kalau dua peristiwa lain sudah jelas melibatkan ABRI, apa belum bisa disimpulkan bahwa ABRI juga terlibat dalam peristiwa kerusuhan?

Begini ya. Antara penculikan dan penembakan di Trisakti, jelas ada hubungan sebab-akibat. Tetapi, antara penembakan dan kerusuhan, apakah ada hubungan sebab-akibat, ataukah hubungan dampak? Kita nggak bisa spekulasi. Yang jelas kita menemukan, ada aspek terorganisasi, ada aspek ciri-ciri persamaan. Jadi, kalau ABRI dikatakan sudah terlibat dalam dua peristiwa itu (penculikan dan penembakan – Red.), tidak bisa begitu saja kita katakan bahwa ABRI juga terlibat

DAHLAN RP

A PERWIRA ITU BERLAINAN

dalam kerusuhan.

Memangnya, ada kemungkinan lain?

Lho, sekarang begini, soal penculikan itu. Siapa yang tahu bahwa dari jumlah semua yang diculik itu dilakukan satu sumber. Berapa yang harus menjadi tanggung jawab Prabowo? Itu juga persoalan. Itu bukan urusan TGPF. Tetapi TGPF memerlukan datanya, karena itu perlu ketemu DKP. Sebab, dalam kerusuhan itu, juga terjadi hilangnya beberapa orang.

Anda menyatakan, kerusuhan itu terorganisir. Seperti apa sih?

Ciri-ciri pelakunya. Ini kan sudah dimuat juga di *Tajuk.*

Apa TGPF menemukan indikasi, kerusuhan itu direncanakan?

Belum. Kalau berangkat dari dua teori itu, kita memang melihat bahwa kondisi sudah matang. Soalnya, apakah kematangan itu otomatis melahirkan kerusuhan? Itu kan pertanyaannya. Kemungkinannya ada yang mengorganisir, yang berusaha menimbulkan kerusuhan. Dan dia gampang melakukan itu, karena kondisinya sudah tercipta seperti itu. Ini bisa saja ada pelaku-pelaku aktif tanpa bersusah payah lagi. Kenapa sudah ada? Ya, karena rakyat marah, karena sudah ada penculikan, sudah ada penembakan, misalnya begitu. Hal-hal seperti itu sudah nggak harus ada perencanaan.

Apa kesimpulan TGPF setelah bertemu dengan tokoh-tokoh militer yang bertugas saat itu: Sjafrie Sjamsoeddin (pangdam Jaya/pangkoops), Hamami Nata (kapolda Metro Jaya/wapangkoops), Prabowo Subianto (pangkostrad), dan yang lainnya?

Yang saya bisa katakan, di antara mereka tidak ada kesejalanan dalam pandangan. Begitu saja.

Maksudnya?

Ya, persepsi di antara mereka berlainlainan. Dari ABRI kan kita harapkan satu persepsi tentang suatu masalah. Ternyata nggak. Pokoknya ada kesan, di antara satuan-satuan ini mengalami sedikit komplikasi dalam hal koordinasi. Kita juga bertanya, bagaimana itu bisa terjadi.

Termasuk koordinasi antara Pangkoops dan Wapangkoops?

Ya, termasuk itu. Tetapi, kita belum menyimpulkan bagaimana perkaranya. Hanya, kesan awal, pandangan-pandangan di antara para perwira ini beraneka. Ini suatu hal yang agak janggal dalam lingkungan kebijakan ABRI. Biasanya, dalam ABRI, masing-masing sudah saling mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan fungsinya, dan harus melakukan apa dalam situasi krisis.

Konkretnya, bagaimana perbedaan pandangan mereka?

Kita lihat, di situ tidak ada tindakan yang sifatnya represif. Intensitas kerusuhan itu dibiarkan sampai reda sendiri. Setelah reda, baru keamanan diambil alih kembali oleh aparatur. Tak ada suatu *policy* untuk melakukan tindakan-tindakan represif, karena saat itu memang sudah di luar kemampuan aparat. Yang ingin kita ketahui: Apakah sungguh-sungguh antisipasi pengamanan itu sudah sampai pada tahap yang maksimal? Apakah evaluasi intelijen itu sudah sampai pada komandan-komandan, sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan preventif? Ini semua kan memberikan pengaruh tentang gambaran menyeluruh mengenai *policy* penanganan krisis.

Di samping itu, kita juga menginventarisasi sementara pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya dikatakan, telah terjadi kesenjangan atau kevakuman. Di sisi lain ABRI mengatakan, itu bukan kesenjangan, melainkan memang *policy* bahwa itu merupakan kesengajaan untuk tidak menempatkan pasukan di situ.

Mengapa polisi menghilang tanggal 14 Mei?

Itu masih menjadi bagian yang kami teliti. Kita masih mendalami itu. Pihak mana sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam hal pengamanan tersebut.

Sjafrie dan Hamami kan sudah diperiksa?

Yang bisa kita katakan, masih ada perbedaan persepsi antara ABRI dan masyarakat. Ini nggak bisa dipertemukan. ABRI mengatakan, tidak ada kesenjangan. Masyarakat bilang, ada kesenjangan. Dan, kesenjangan itu dihubungkan dengan kebijakan yang tidak berjalan.

Opini di luar berkembang begitu rupa: militer terlibat dalam kerusuhan.

Ha... ha... ha... ya nggak begitu. Persoalan tentang keterlibatan ABRI seperti itu kan juga harus diteliti lagi, pada tingkat personel atau kelembagaan. Kita belum sampai sejauh itu. Kita masih pada teori tanggung jawab.

Untuk mengetahui apa yang terjadi pada 13-15 Mei, kan minimal TGPF mempunyai struktur: pra peristiwa–peristiwa—pasca-peristiwa.

Betul. Dan, itu yang kita temukan beberapa indikasi. Ada kelompok terorganisir, mengenai ciri pelaku, dan rentang waktu yang sama. Tetapi kan ada yang mengatakan, ini bukan soal baru. Seperti kerusuhan pada 27 Juli, ada tahap-tahap seperti itu. Tahapan seperti itu juga tampak di Tasikmalaya dan Situbondo.

Dari urutan yang sistematis begitu, TGPF kan bisa mengambil kesimpulan. Misalnya, apakah ada aktor intelektualnya?

Soal aktor intelektual, belum. Itu juga masih kita teliti.

Indikasinya kan kuat?

Ya, indikasinya kita peroleh dari kira-kira siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengorganisasian besar-besaran seperti itu. Adanya pertanyaan seperti itu saja sudah merupakan indikasi, kan?

Apa semua data yang dimiliki TGPF nantinya akan diserahkan kepada pemerintah?

Masih ada data yang kita simpan. Sebab, begini, kita kadang susah. Misalnya, polisi atau ABRI mengatakan, ini tidak benar. Kalau kita berikan data mengenai korban, risiko besar bagi korban itu. Jadi, kita belum putuskan apakah kita akan berikan semua atau tidak. Kalau diminta, akan kita kasih. Tetapi, harus ada jaminan keselamatan bagi yang bersangkutan, baik saksi maupun korban. Kalau ada proses keadilan yang mau ditegakkan, ada tekad pemerintah untuk itu, baru kita berikan. ▲

PENGAKUAN PARA J

TIM testimoni TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) tinggal merumuskan kata-kata akhir. Dikomandani Bambang W. Soeharto, tim ini telah menemui sejumlah jenderal yang terkait dengan satuan pengamanan saat pecahnya kerusuhan 13-15 Mei. Apa lagi maksudnya, kalau bukan untuk mengungkap misteri kerusuhan berdarah itu. Dan, apa kata para jenderal tersebut? Berikut petikan pengakuan mereka:

Letjen TNI Prabowo Subianto

BINTANG yang melesat dan redup. Itulah gambaran banyak orang tentang Prabowo. Ia sudah meraih bintang tiga – alumnus Akabri 1974 yang pertama kali meraih itu – dan menjabat pangkostrad, ketika tiba-tiba kabar buruk itu datang. Ia digeser menjadi komandan Sesko ABRI di Bandung, lalu diberhentikan, begitu diketahui terlibat dalam kasus penculikan aktivis. Resminya belum dipecat, karena mesti menunggu hasil pengadilan militer.

Bukan soal penculikan itu, memang, yang ditanyakan tim testimoni TGPF kepada Prabowo. Menantu mantan Presiden Soeharto tersebut, yang ditemui tim di rumahnya di bilangan Menteng, dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai pangkostrad – saat terjadi kerusuhan 13-15 Mei lalu. Yang ditanyakan kepada Prabowo berkisar seputar pengendalian keamanan saat itu, jumlah pasukan Kostrad, sampai pada sasus yang beredar setelah kerusuhan, tentang siapa tokoh intelektual yang berada di balik aksi berdarah tersebut.

Kabarnya, Prabowo menjawab semua itu dengan tenang dan lugas. Tak terkesan ia jadi layu gara-gara pemberhentiannya dari dinas aktif. Katanya, pengendalian keamanan ketika itu berada di bawah tanggung jawab Pangkoops Jaya, Sjafrie Sjamsoeddin. Pasukan lain, termasuk Kostrad, berada di bawah koordinasi Pangkoops. Dalam bahasa Prabowo, kendati bintang tiga ia tidak punya hak untuk memerintah Sjafrie. "Jadi, saya lebih sering bertindak sebagai penasihat," tutur bapak seorang putra ini. Misalnya, Sjafrie diberitahukan ada kekosongan pasukan di satu lokasi kerusuhan. Bahkan, bersama Sjafrie dan Danjen Kopassus (ketika itu) Muchdi P.R., tanggal 14 Mei, ia naik panser berkeliling ke beberapa lokasi kerusuhan menenangkan massa.

HAMAMI NATA DAN SJAFRIE. "Kita lihat di tv, polisilah pembunuhnya, saya kaget sekali. Apa iya anak buah saya melakukan itu?"kata Hamami.

Massa memang tak terbendung. Pasukan yang digelar untuk mengendalikan massa tak bisa berbuat banyak. Padahal, pasukan bantuan dari luar Jakarta ikut melapis, termasuk dari Kostrad. Bila hari-hari pertama kerusuhan ada 10-12 SSK Kostrad, pada 20 Mei sudah ada 60 SSK Kostrad di Jakarta. Ini didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Ujungpandang. Bahkan, setelah ditambah pasukan dari satuan lain pun – sehingga total jenderal mencapai 170 SSK – mereka tak bisa meredam aksi massa yang datang bagai air bah. "Rakyat begitu banyak di luar, dan pasukan sedikit sekali," tutur Prabowo.

Pasukan pengaman mestinya lebih banyak dari itu. Prabowo lantas menuturkan salah satu diskusinya mengenai sistem pengamanan dengan Bambang S. Yudhoyono, yang ketika diskusi itu menjabat kasdam Jaya. Dari hasil studi banding di Tokyo (Jepang) dan Seoul (Korsel), dua kota yang acap diamuk demo, ditemukan angka. Untuk wi-

A JENDERAL

ADEK BERRY

layah seperti Jakarta, dibutuhkan sekitar 225 SSK. Sebagai perbandingan, saat peristiwa 27 Juli 1996 hanya ada 100 SSK. Pada hari pertama kerusuhan Mei, tanggal 14, kekuatan pasukan juga sebanyak itu. Aparat baru ditambah menjadi 170 SSK menjelang *lengser*-nya Soeharto. Menurut Prabowo, penjagaan keamanan di Ibu Kota Jakarta baru bisa dilakukan dengan kekuatan 400 SSK atau 40.000 personel – sekitar 10% dari kekuatan ABRI.

Tetapi, benarkah ada dalang di balik aksi kerusahan itu? Prabowo sendiri, kabarnya, mendengar sasus tersebut – termasuk yang mengarah kepada dirinya. Yang didengarnya, ada yang bilang bahwa dialah dalangnya, ada pula yang menyebut L.B. Moerdani, bahkan sampai ICMI segala. "Saya tahu, saya dituduh merekayasa kerusuhan," kata Probowo seperti dikutip Bambang W. Soeharto, ketua tim testimoni TGPF, kepada *Tajuk*. Tuduhan yang langsung ditepisnya saat itu pula kepada tim testimoni. "Tetapi, kan kita *cross check*," kata Bambang lagi. Apa hasil akhir tim ini belum jelas, sebab penyidikan memang sedang berlangsung.

Prabowo tegas menolak tuduhan tersebut. Sebab, itulah – katanya – yang selalu diingatkannya sejak Desember 1997 setiap bertemu dengan LSM, aktivis, dan para ulama. Kalau ada kerusuhan, tuturnya, ia selalu meyakinkan agar orang-orang itu sabar, jangan turun ke jalan, jangan aksi massa. Dan, untuk itu, ia dibilang mempertahankan *status quo*. "Saya dituduh mempertahankan Pak Harto." Ada pula tudingan bahwa ia memanfaatkan sebuah kelompok perguruan silat Satria Muda Indonesia (SMI). Tuduhan itu, begitu katanya kepada tim, memang suatu kampanye untuk menghabisi dan menghancurkan dirinya. Padahal, perguruan silat itu di Jawa Barat dan di mana-mana sering membantu dandim dan danrem dalam pengamanan swakarsa. "Kok dibalik bahwa kita yang melakukan. Saya kira, itu fitnah yang sangat besar," kata Prabowo.

Kabarnya, sejak beberapa hari ini ia berada di mancanegara. Upaya *Tajuk* untuk memperoleh konfirmasi ulang atas semua yang diucapkan Prabowo tersebut, melalui keluarganya di Jakarta, memperoleh jawaban: nanti dulu.

Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin

"PANGKOOPS yang bertanggung jawab," kata Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin kepada tim testimoni TGPF, seperti ditirukan Ketua Tim Bambang W. Soeharto, kepada *Tajuk*. Sebagai pangdam Jaya sekaligus panglima komando operasi (pangkoops) Jaya, memang Sjafrie-lah yang menjadi penanggung jawab keamanan saat itu. *Tajuk* sudah lebih dari sekali melayangkan surat resmi kepadanya untuk mendengar cerita langsung dari Sjafrie, tentang situasi Jakarta saat kerusuhan Mei. Namun, staf ahli pangab bidang politik ini – lewat surat yang dikirim Dinas Penerangan Kodam Jaya – tak bersedia, karena sudah memberikan keterangan kepada TGPF.

Kepada tim testimoni, Sjafrie menjelaskan bahwa pola operasional pengamanan ketika itu ada dua: pengamanan langsung (pamsung) dan pengamanan tak langsung (pamtaksung). Pamsung di bawah kendali Polda Metro Jaya, sementara pamtaksung didukung oleh unsur lain di luar polisi, yakni: TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Mereka menjaga lima wilayah pengamanan, di antaranya sentra ekonomi (kebutuhan pokok rakyat dan transportasi), sentra pemerintah-politik (Gedung DPR/MPR), instalasi tinggi negara (Istana Negara, kediaman presiden), dan publik vital (RRI/TVRI, bank sentral).

Itu di atas kertas. Tetapi, eskalasi kerusuhan bulan Mei lalu begitu luas. Titik apinya amat banyak. Itu sebabnya, pengendalian keamanan di bawah komando Pangkoops Jaya tak bisa berbuat banyak kendati kekuatan pasukan terus ditambah. Menurut pengakuan Sjafrie, kekuatan pasukan pada 12 Mei ada 61 SSK atau 6.100 personel. Saat pecah kerusuhan tanggal 13-15 Mei, pasukan bertambah menjadi 112 SSK, 142 SSK, dan terakhir 174 SSK. "Sampai tenaga administrasinya Kowad sudah dilibatkan semuanya," tutur Sjafrie. Jadi, kalau melihat rasio, satuan pengaman tidak sebanding dengan jumlah massa. Akibatnya, massa jadi tidak terbendung. Yang bisa dilakukan petugas hanya sampai pada tahap memblokade daerah kerusuhan.

Ada memang laporan masuk ke markasnya bahwa kerusuhan itu menggerakkan orang-orang dari luar Jakarta, seperti dari Jawa Tengah, Lampung, dan beberapa daerah lain. Ini diketahui dari para pelaku yang tertangkap di lokasi kerusuhan. Ketika ditanya, mereka mengaku datang dari Jawa dan Lampung. Yang dari Jawa Tengah, menurut Sjafrie, masih berusia sekolah dasar kelas IV, V, bahkan ada yang kelas III. Ada pula preman. Mereka didatangkan ke Jakarta dengan truk.

Pertanyaannya: Siapa yang menggerakkan mereka? Belum jelas. Kepada tim, kabarnya, Sjafrie juga melihat adanya indikasi bahwa kerusuhan itu digerakkan kelompok terorganisir. Ini dilihatnya sendiri ketika patroli tanggal 14 Mei. Ketika toko-toko pada tutup, tiba-tiba ada truk yang membawa orang sampai ratusan.

Mayjen Pol. Hamami Nata

"SAYA akan pertaruhkan jabatan saya untuk mengamankan Ibu Kota." Kalimat itu datang dari Mayjen Pol. Hamami Nata, ketika menjabat kapolda Metro Jaya. Tak lama berselang, kerusuhan pecah di Jakarta. Dan, Hamami – entah ada hubungannya dengan pertaruhan itu atau tidak – akhirnya diganti. Pada 28 Agustus lalu, setelah pensiun dari kapolda, Hamami tampak di ruang rapat Kapolri lantai 3 gedung National Center Bureau (NCB) Interpol. Didampingi enam bekas bawahannya, saat itu ia bertemu dengan enam anggota tim testimoni TGPF.

Keterangan Hamami jadi penting, sebab dialah kapolda dan wakil pangkoops Jaya saat kerusuhan. Kepada tim, Hamami menuturkan bahwa pola pengamanan pasca-Sidang Umum MPR menggunakan pola Koops Jaya. Yakni, bila skala eskalasi rendah, polisi berada di depan. Tetapi, jika eskalasi tinggi, dia akan bermain dengan Koops Jaya. Yang terjadi sejak tanggal 12 Mei itu di luar perhitungan aparat keamanan. Massa menyerang, merusak, dan membakar pusat-pusat ekonomi dan sarana umum lainnya.

Pos-pos polisi bahkan ikut jadi sasaran. Ada 22 markas komando polri, dua polsek, sekian pospol dan pospol pembantu, rusak berat. Itulah yang membuat Hamami heran. "Kenapa hanya markas polisi yang terbakar dan dibakar, kenapa hanya polisi yang diserang? Apakah akibat tuduhan masyarakat waktu kejadian 12 Mei? Saya tidak menganalisis itu. Atau, ada *something wrong*? Itu fakta yang kami sampaikan," katanya.

Tuduhan itu yang membuat polisi tak tampak di lapangan pada 13 Mei . Mereka pulang ke markasnya. "Ada sedikit *shock* karena tudingan masyarakat bahwa polisi membunuh," kata Hamami. "Kita lihat di tv, polisilah pembunuhnya, saya kaget sekali. Apa iya anak buah saya melakukan itu?" Soalnya, sebelum turun ke lapangan, anak buahnya sudah diwanti-wanti untuk hanya membawa peluru karet, bukan peluru tajam. Hamami meminta agar TGPF bisa mengusut dan mengungkap siapa pelaku penembakan sebenarnya. Mantan kapolda ini pantas penasaran. Sebab, dari pemeriksaan laboratorium forensik (labfor) terhadap peluru, kabarnya tidak ada yang identik dengan senjata polri.

Kendati trauma begitu, tuturnya, polisi tetap berupaya *all out*. Buktinya, masih bisa menangkap 2.000 pelaku kerusuhan. Yang aneh, berdasarkan laporan yang diterima dari anak buahnya, pasukan samping – yakni pasukan lain di luar polisi – tidak melakukan pengejaran, penangkapan, maupun penindakan. Tak cuma itu.

Pasukan samping sepertinya melepas polisi – yang banyak jadi sasaran massa – bekerja sendirian. Di depan Universitas Indonesia Salemba, misalnya, pasukan samping diam saja padahal massa membakar mobil polisi. "Yang saya tahu, di sana sudah di-*setting* oleh anggota dari pasukan samping," ujar salah seorang pejabat polda kepada tim.

ADEK BERRY

Mayjen TNI Zaki Makarim

TIM testimoni TGPF meminta keterangan Zaki Makarim sebagai kepala Badan Intelijen ABRI (BIA). Posisi strategis yang masih dipegangnya sampai sekarang. Sebagaimana galibnya intelijen, institusi ini memberikan "tanda-tanda" kepada satuan-satuan di lingkungan ABRI tentang apa yang bakal terjadi. Beberapa bulan sebelum Mei, kabarnya, tanda-tanda itu sudah diberikan BIA.

Pada pertengahan bulan April, misalnya, institusi ini konon sudah mencium peningkatan eskalasi ancaman. Setiap kodam diberitahukan, termasuk Kodam Jaya. Ancaman itu semakin terasa sejak mulai digelarnya mimbar bebas di beberapa tempat.

BIA mencium, puncak dari peristiwa ini akan berlangsung tanggal 20 Mei – bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Setiap satuan diminta waspada dan berusaha menghindari benturan fisik.

Sebelum meletusnya tembakan di Trisakti 12 Mei, kabarnya, badan intelijen ini juga sudah mewanti-wanti setiap kodam kemungkinan munculnya aksi penggabungan dari kelompok miskin di kota, pekerja, dan pelajar. Makin jelas bahwa eskalasi kian meningkat, tetapi tetap diminta kepada setiap satuan untuk mencegah timbulnya martir.

Harapan tetaplah harapan. Martir akhirnya jatuh. Peristiwa penembakan di Trisakti itu seperti "menuang minyak dalam api". Keesokan harinya, kerusuhan pecah di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Padahal, kabarnya, pihak intelijen mulanya malah menduga, martir akan jatuh di Yogyakarta. Nyatanya di Trisakti, Jakarta, tempat yang tak disangka.

DADANG TRI

Mayjen TNI Sudi Silalahi

Sudi, yang ketika peristiwa Mei menjabat kasdam Jaya dan ketika bicara pada TGPF masih brigjen, kini bintang dua dan menjabat assospol kassospol ABRI. Ia tak bersedia memberikan keterangan ketika dihubungi. "Kalau soal kerusuhan 13-15 Mei, tanyakan kasdam Jaya yang baru saja," katanya kepada wartawan *Tajuk* Swasti Astra. Ia sebenarnya sudah cerita kepada tim testimoni TGPF pada 24 September lalu di ruang rapat Kodam Jaya.

Penjelasannya kepada tim, kurang lebih, sama dengan penjelasan Sjafrie – atasannya ketika itu. Dari sekian banyak titik api saat itu, katanya, pasukan memprioritaskan pengamanan pada 364 obyek. Ini adalah titik rawan yang mudah meletus, selain VVIP, VIP – yakni kediaman dan kantor dubes – dan sentra-sentra ekonomi. Ke-364 titik ini dapat diamankan dari pembakaran dan penjarahan massa. Saat itu, komando pengendalian (kodal) otomatis berada di tangan Pangkoops, karena suasana sudah sedemikian rupa ruwetnya.

Juga, karena – pada saat yang sama – polisi sudah sangat kewalahan. Melihat itu, tutur Sudi, Pangkoops mengerahkan pasukan untuk mengamankan markas-markas polisi. Mulai dari polsek, polres, polda, sampai asrama-asrama polisi. Soalnya, ancaman dari luar ke arah polisi amat nyata. "Bahkan, karena takut terlambat dengan gerakan massa yang akan melakukan kerusuhan, kita melakukan dengan modus udara, yaitu dengan *fast dropping*," kata Sudi Silalahi. ▲

Tim Tajuk

Mayjen TNI (Marinir) Suharto:

Anak Buah Saya Sudah Kayak Kitiran

MAYJEN TNI (Marinir) Suharto termasuk salah satu petinggi militer yang ditemui tim testimoni TGPF. Sebagai komandan korps marinir, Suharto tahu banyak apa yang terjadi di lapangan saat kerusuhan 13-15 Mei di Jakarta. Saat itu, anak buahnya meredakan amuk massa yang menjalar ke seluruh wilayah kota. Entah bagaimana cara mereka menghadapi massa, mereka memperoleh simpati publik. Berikut penuturan Suharto kepada wartawan *Tajuk* **Miftahuddin, Sulton Mufit, Sulaeman Sakib,** dan fotografer **Dadang Trimulyanto**:

Mengapa kerusuhan itu sampai tak tertangani?

Saya melihatnya begini. (Luas) Jakarta kan 450 kilometer persegi lebih. Dengan penduduk kalau siang itu 12 juta dan malam 8 juta, nggak mungkin (bisa di-*cover* oleh) 147 SSK (Satuan Setingkat Kompi). Karena, terus terang, demonstrasi dan unjuk rasa yang datang berbarengan. Kalau Malari, tempat-tempatnya kan tertentu. Tetapi ini, di Cinere ada, di kawasan lain ada, di sini ada, di sana ada. Tidak mampu dengan 147 SSK. Anak buah saya itu sudah kayak kitiran. Pindah sini, pindah sana, karena banyaknya yang harus diredakan. Makanya, terus ada bantuan dari luar itu. Kadang-kadang, saya kasihan lihat anak buah saya.

Bagaimana kondisi operasi saat itu?

Operasi itu kan dikendalikan oleh Pangkoops, termasuk anak buah saya. Anak buah saya itu tidak dikendalikan oleh saya, tetapi oleh Pangkoops, karena saya BKO-kan kepada Pangkoops. Saya hanya membekali mereka dengan: bagaimana kita bersikap menghadapi rakyat kita, yang notabene kalau kita bicara rakyat adalah saudara kita. Mungkin di situ ada adik kita, ada bapak kita, ada keponakan kita, dan lain-lain. Untuk itu, jangan kita sakiti. Karena, mereka adalah bagian dari kita.

Yang kedua, marinir didesain dari satu posisi di laut ke darat, itu nol. Jadi, kalau saya menyerbu ke darat, siapa pun musuh. Konsepsi kita, musuh ini kan tidak pernah rakyat kita, tetapi orang luar. Karena, memang doktrin bahwa musuh musuh orang luar.

Mengapa pada tanggal 13-14 Mei terjadi kevakuman?

Kalau terjadi kevakuman, jujur saya katakan tidak vakum. Karena, tanggal 14, saya datangi dengan heli setiap (tempat yang) ada asap. Di sana, saya melihat ada pasukan (marinir).

Kenyataannya di lapangan kan tidak ada pasukan?

Saya tidak bisa mendakwa kalau mereka nggak ada sama sekali. Karena, ada tempat-tempat yang saya datangi, memang nggak ada pasukan. Tetapi, tempat lain yang saya datangi juga, ada pasukan. Dan, itulah tempat anak buah saya (marinir). Seperti di ITC Roxy, memang ada. Karena, anak buah saya, mulai dari Gajahmada Plaza sampai Harmoni. Begitu pula di ITC Roxy Mall, perumahan Roxy Mas, Atrium.

Kedutaan juga, kabarnya, ada yang tidak dijaga.

Kalau kedutaan, saya yang jaga, semua kedutaan. Karena, itu perintah Pangab kepada saya. Kalau bicara kedutaan, mari. "Pengamanan untuk kedutaan besar, marinir," kata Pangab di Garnisun, Gambir, tanggal 13 Mei. Itu langsung diperintahkan Pangab. Malam itu juga, saya membuat surat untuk 53 kedutaan. Dan, pagi harinya, kedutaan yang minta dijagakan itu ada 26. Itu langsung saya jaga. Saya juga punya *recording*, ada kedutaan yang mengucapkan terima kasih kepada saya.

Kabarnya, Kapolda minta bantuan pasukan langsung ke Pangab.

Mungkin juga. Yang jelas, waktu permintaan itu, pasukan yang datang pertama kali adalah marinir. Waktu peristiwa Solo, pasukan yang pertama kali datang ke Solo juga marinir. Karena, kita punya sistem rayonisasi. Kami selalu siap, karena kami punya pasukan yang selalu siap di dalam, yang siap kami kerahkan. Sedangkan, yang di luar, kita pakai rayonisasi dengan sistem *gethok tular.*

Benarkah kerusuhan itu direkayasa?

Kalau saya boleh katakan, ini sporadis, spontan. Jika ada yang menggerakkan, polanya terbaca. Malari dulu, misalnya, saya lihat, ada yang menggerakkan. Karena apa? Ada yang berjaket sekitar 9-10 orang, di depannya anak-anak SMP. Yang menggerakan itu kelihatan. Saya comot saja yang pakai jaket, berhenti itu. Kemarin nggak kelihatan. Sporadis, timbul di mana-mana, dan kayaknya tidak terkonsepsi. Jadi, sulit kalau saya katakan dikendalikan.

Ada asumsi, penculikan, penembakan di Trisakti, dan kerusuhan, terkait.

Saya nggak tahu. Betul-betul saya nggak tahu. TGPF juga nggak tanya saya soal itu. ▲

ITA PERGI DI TENGAH KONTROVERSI

DAHLAN RP

Anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan dibunuh menjelang ia mendampingi korban perkosaan bersaksi di Amerika. Banyak yang ragu bahwa itu tindak kriminal murni.

MARTHADINATA, 18, tak akan pernah bersekolah ke Kuching, Malaysia. Cita-cita siswa kelas III jurusan IPS SMU Pascalis, Jakarta Pusat, itu untuk melanjutkan pendidikan ke ibu kota Serawak luluh – bersama jasadnya yang dikremasikan di Krematorium Cilincing, Minggu 11 Oktober lalu. Ita, begitu ia akrab disapa, yang belakangan aktif di Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), Jumat lalu ditemukan tewas di rumahnya, Jln. Berlian No. 25, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Ita tewas akibat luka tusukan di perut, dada, ulu hati, lengan, dan leher. Lehernya bahkan nyaris putus kena gorok.

Kematian gadis pendiam putri pasangan Leo Haryono dan Wiwin Suryadinata ini karuan saja menimbulkan berbagai dugaan. Pasalnya, bersama ibunya, yang juga aktivis TRuK, Ita berencana menemani empat orang korban perkosaan yang akan bersaksi di hadapan sebuah lembaga HAM di AS. Kalangan aktivis TRuK langsung saja menghubungkan kematian Ita dengan teror yang banyak menghantui lembaga yang dipimpin Romo I Sandyawan Sumardi ini.

Maklumlah, baru lima hari lalu, Sandyawan bersama sejumlah anggota TRuK lainnya datang ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengadukan teror – baik lewat telepon maupun langsung secara fisik – yang dialami para relawan sejak bulan Juni 1998. "Kita baru saja melaporkan soal teror-teror itu. Tiba-tiba, anggota kita mengalami nasib seperti ini. Jadi, ini bukan tidak direncanakan," ujar Sandyawan saat berkunjung ke rumah duka. Sandyawan menganggap, kematian Ita merupakan pukulan berat dan puncak dari seluruh ancaman yang diterima anggota tim relawan selama ini.

Namun, belum lagi hilang kesedihan dan keterkejutan anggota tim relawan atas kematian Ita, anggota tim lainnya, Hj. Sundus Aninah Salim, melapor telah menerima teror dan ancaman kekerasan. Minggu (11/10), selepas tengah malam, Aninah mendapat dua kali telepon bernada pelecehan seksual. Dan, sekitar pukul 04.30 WIB, beberapa orang membongkar pintu besi rumah tokonya di Jln. Bojong Raya, Cengkareng. Sepeda motor milik Aninah ikut raib dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan itu. Seminggu sebelum kejadian tersebut, rumah Aninah selama tiga hari berturut-turut mulai pukul 04.30 WIB sampai pukul 08.00 WIB diawasi seorang laki-laki tak dikenal. Aksi orang misterius itu baru berhenti setelah salah seorang anggota keluarga Aninah menanyakan niat para pengintai itu.

Didukung oleh serangkaian teror yang dialami anggota tim relawan, sejumlah tokoh LSM dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) juga menduga, kematian Ita berkait erat dengan aktivitasnya di TRuK. Apalagi, keberangkatan Ita dan ibunya ke AS ternyata tidak sekadar menemani korban perkosaan. Tetapi, mereka juga akan ikut bersaksi di hadapan sejumlah kelompok perlindungan HAM di AS.

Bahkan, menurut Paskah Irianto, aktivis PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Ita dan ibunya adalah korban tindak perkosaan yang terjadi dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998. Di tengah pekatnya kontroversi seputar isu perkosaan itu, tak mengherankan bila kematian tragis Ita mendapat liputan luas di dalam dan luar negeri. Harian internasional berpengaruh *International Herald Tribune* (IHT), misalnya, sampai memajang foto ke-

luarga Ita yang tengah berduka di halaman depan.

Namun, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol. Drs. Noegroho Djajoesman dengan tegas menampik sinyalemen itu. Ia juga menepis anggapan adanya unsur politis di balik kematian Ita. Dalam konferensi pers pada pukul 01.00 Minggu dini hari – atau tiga jam setelah petugas Kapolres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berhasil membekuk Suryadi alias Otong, 24, tersangka pembunuh Ita – Noegroho menyatakan, motif pembunuhan Ita adalah tindak kriminal murni.

"Motif pembunuhan adalah perampokan biasa. Tersangka mencuri uang untuk menutupi utang bapaknya. Tersangka menghabisi korban untuk menghilangkan jejak," kata Noegroho. Kapolda juga membantah pernyataan bahwa Ita adalah korban perkosaan. "Kalau melihat perilaku sehari-harinya, dia tetap sekolah seperti biasa. Dia bukan korban perkosaan," jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan adanya luka di dubur dan kemaluan korban – yang dilaporkan oleh tim medis kepolisian? Ahli forensik Dr. Mun'im Idries, yang melakukan otopsi terhadap mayat Ita, membenarkan: ada luka bekas sodomi di duburnya. "Tetapi itu luka lama, sudah tahunan. Tidak terjadi dalam waktu dekat, dan tidak dilakukan sekali atau dua kali. Jadi, sudah menjadi semacam habitualis," jelasnya.

Mun'im juga menolak bahwa kematian Ita terkait dengan kerusuhan 13-15 Mei. Menurutnya, tidak ada unsur politis dalam peristiwa itu. Karenanya dia berharap, relawan dan LSM jangan mencari menangnya sendiri. "Ini soal kejujuran, bukan menang-menangan. Sebagai dokter saya menyatakan, memang terjadi perilaku penyimpangan seksual yang sudah lama dilakukan almarhum. Tidak benar jika luka itu terjadi pada sekitar tanggal kerusuhan," tegasnya kepada *Tajuk*.

Dugaan penyimpangan seksual yang dilakukan Ita dikuatkan oleh pakar psikologi Prof. Dr. Sarlito Wirawan. Merujuk pada hasil otopsi Dr. Mun'im Idries, Sarlito berasumsi: korban merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang. "Dia perlu biaya, karena itu dia menjadi pekerja seks. Itu sebabnya, pada dubur korban ditemukan luka lama hasil penetrasi benda tumpul yang berulang-ulang," ujar Sarlito, yang banyak mengamati perilaku remaja.

Sebuah sumber *Tajuk* yang dekat dengan kalangan relawan membenarkan: korban adalah *drug user*. Korban juga terbiasa melakukan perilaku seksual menyimpang. Konon, Ny. Wiwin mengajak putrinya itu bergabung dengan TRuK justru agar Romo Sandyawan bisa membantu problem yang dihadapi Ita. Keluarga Ny. Wiwin memang cukup dekat dengan Romo. Kakak Ita, Evi, juga aktif di tim relawan.

PROSESI MENJELANG PEMAKAMAN DAN MENDIANG MARTHADINATA. Didukung oleh serangkaian teror yang dialami anggota tim relawan, sejumlah tokoh LSM dan anggota TGPF menduga, kematian Ita berkait erat dengan aktivitasnya di TRuK.

Sejumlah tokoh masyarakat menyayangkan munculnya informasi-informasi negatif mengenai perilaku seksual korban. "Dia anak baik. Tetapi media cetak maupun elektronik menggambarkan, seakan-akan dia memiliki problem kehidupan rumah yang berkepanjangan. Ini merupakan usaha untuk menciptakan disinformasi, menekan orang yang posisinya sudah lemah, supaya tidak berdaya," kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja, kepada *Tajuk*.

Apa pun motif di balik kepergian Ita, menurut Direktur LBH-APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Nursyahbani Katjasungkana, tragedi itu adalah bentuk teror dan kekerasan terhadap para aktivis HAM di Indonesia. Karenanya, Nursyahbani minta agar Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto dan jajarannya memberi jaminan keamanan yang tegas kepada seluruh anggota masyarakat, khususnya para aktivis HAM – supaya terbebas dari segala bentuk teror dan kekerasan. ▲

Hartono/Miftahuddin dan Eni Saeni

APRIADI GUNAWAN

DARI MEDAN RUSUH BERMULA

Ada kemiripan pola kerusuhan di Jakarta dan lima kota lainnya. Benarkah rusuh di Medan adalah "persiapan" bagi kerusuhan yang lebih besar di Ibu Kota?

JAKARTA bukan satu-satunya kota yang lumpuh akibat kerusuhan 13-15 Mei lalu. Pada tiga hari naas itu, kerusuhan juga terjadi di Palembang, Lampung, Solo, dan Surabaya. Bahkan, sebelumnya, Senin 4 Mei, kerusuhan sudah merebak di Medan. Tak mengherankan bila orang pun bertanya-tanya: Adakah keterkaitan di antara semuanya?

Analisis atas berbagai fakta di lapangan – baik yang ditemukan tim penyelidik resmi maupun dari kalangan masyarakat – menunjukkan adanya keseragaman pola-pola kerusuhan di keenam kota itu. Umpamanya, ada upaya "pematangan situasi" sebelum kerusuhan akhirnya meledak.

Yang juga mencolok adalah keseragaman ciri-ciri provokator kerusuhan itu. Di hampir semua tempat, ciri-ciri umum yang digambarkan para saksi mata adalah: mereka umumnya laki-laki, berbadan tegap, berambut cepak. Sebagian ada yang mengenakan seragam SMU. Tetapi, ada pula, sebagaimana konon dilaporkan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta), yang bercelana loreng dan bersepatu lars – entah diperoleh dari mana.

Tak kalah menarik pula adalah keseremakan waktu terjadinya perusakan dan penjarahan. Di Jakarta, kerusuhan merata terjadi pada 14 Mei sekitar pukul 08.00-11.00 WIB. Di Solo, pada 08.00-09.00 (didahului oleh pemadaman listrik). Sedangkan, di Palembang – terutama pada 15 Mei – terjadi setelah salat Jumat. Singkat kata, keajekan dan kemiripan pola itu memicu dugaan adanya keterkaitan kuat antara kerusuhan di enam kota tersebut.

Dari kisah kerusuhan di enam kota itu – tentu saja selain Jakarta – kasus Medan menarik untuk diselisik. Rusuh itu seolah-olah mengawali rentetan kerusuhan yang terjadi kemudian di berbagai kota. Berbagai faktor lokal (ketegangan politik akibat pergantian pangdam, pemilihan gubernur Sumut, dan intrik menahun HKBP) dan nasional (tuntutan reformasi dan naiknya harga BBM) turut memicu kerusuhan itu.

Rusuh tersebut bermula dari aksi para mahasiswa IKIP Medan, yang berakhir ricuh karena terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Pada saat bentrokan inilah, terjadi pelecehan seksual oleh para oknum prajurit atas para mahasiswi yang berusaha keluar kampus mereka. Dan, jeritan pilu para nona itulah yang memicu emosi para warga di sekitar kampus. Dari kampus IKIP itu, aksi dengan cepat menjalar menjadi kerusuhan yang membakar Kota Medan dan sekitarnya sampai tiga hari berikutnya.

Sejumlah sumber – baik dari kalangan sipil maupun militer – yang dihubungi *Tajuk*, kini, mensinyalir: rusuh di IKIP itu sengaja "diledakkan". Bahkan, merupakan *test case* bagi kerusuhan berikutnya di kota-kota lain. Eddy Rianto, ketua umum Forum Amanat Masyarakat Sumatera Utara (FAMSU), misalnya, mengaku memergoki seseorang berambut cepak, berbadan tegap, mengendarai Toyota *hardtop*, menyerahkan uang kepada sejumlah orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan IKIP. Penyerahan uang itu dilakukan di perkebunan cokelat Desa Lau Dendang, sekitar pukul 01.30 dini hari keesokan paginya.

Disebut-sebut pula keterlibatan oknum anggota organisasi Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Kekaryaan (IPK) dalam kerusuhan itu. Namun, tudingan tersebut dibantah Sakhyan Asmara, ketua harian DPW PP. "Kalau ada yang menyebut bahwa PP terlibat kerusuhan, saya pribadi siap menantang secara hukum," ujarnya kepada *Tajuk*. Sementara itu sebuah sumber resmi dari dinas militer menyebut, ada "instruksi" lisan dari seorang oknum perwira di Kodam kepada satuan yang bertugas untuk sengaja "mengerjai" para mahasiswi itu.

Oknum militer terlibat? Kepada *Tajuk*, sejumlah sumber militer di Medan dan Jakarta tak sepenuhnya menolak sinyalemen itu. Malah, konon ada "keanehan" yang terjadi di lingkungan Kodam pada menjelang dan saat-saat berlangsungnya kerusuhan itu. Itulah "ditariknya" kembali Kolonel Dasiri Musnar pada sekitar bulan April, mantan asisten intelijen (asintel) Kodam, dari posnya sebagai danrem 011/-

KERUSUHAN DI MEDAN. Seolah-olah mengawali rentetan kerusuhan yang terjadi kemudian di berbagai kota.

Lilawangsa Lhokseumawe. Dasiri (Akabri '74) dikenal dekat dengan Pangdam Mayjen Ismed Yuzairi (Akabri '71), yang pernah akrab dengan mantan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto.

Dasiri secara tak resmi, kabarnya, menggantikan fungsi asintel Kodam Kolonel Winardi, yang "diisolasi" – belakangan ia di-*non-job*-kan ke Mabesad. Konon, pengisolasian ini terjadi karena ia tak menjalankan perintah Pangdam untuk "mengamankan" sejumlah aktivis mahasiswa. Praktis, kemudian, keputusan penting di Kodam diambil oleh Pangdam bersama Dasiri dan Asisten Operasi (Asops) Kolonel Kuswa. Kabarnya pula, Ka-BIA Mayjen Zacky Makarim sempat mempertanyakan "pengambilalihan" itu.

Ketika dimintai konfirmasi *Tajuk*, Kapendam Letkol (Inf.) Agus Ramadhan tegas-tegas menolak sinyalemen miring itu. Dasiri dipanggil karena, sebagai mantan asintel yang berpengalaman, ia bisa membantu Kolonel Winardi dan Kolonel Kuswa mengatasi gejolak di Medan. "Jadi, bukan untuk mengkondisikan kerusuhan," tegasnya. Agus juga menolak tudingan adanya oknum militer yang terlibat rekayasa kerusuhan. "Kami prihatin, kalau ada yang beranggapan, ABRI merekayasa kerusuhan Medan. Itu tidak benar, karena ketika itu semua satuan ABRI dikerahkan ke semua sektor mengamankan kota," ujarnya.

Namun, sinyalemen akan adanya keterlibatan oknum militer juga berembus di Solo. Menurut sejumlah sumber *Tajuk*, ada temuan, yang menunjukkan, oknum Kopassus yang bermarkas di Kandang Menjangan, Kartasura, terlibat dalam penggalangan calon pelaku kerusuhan. Oknum baret merah itu membayari mereka sekitar Rp 20.000 per orang, pada tanggal 10 Mei. Para calon perusuh ini kemudian di-*pool*-kan di sebuah rumah milik pimpinan Pemuda Pancasila di Solo. Kabarnya pula, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas oknum Kopassus ini sudah disiapkan pihak Polres setempat.

Namun, kepada *Tajuk*, Kapolres Solo Kolonel Imam Suwangsa menolak memberikan konfirmasi pasti. "Begini, Mas, soal itu menyangkut banyak pihak dan fakta hukum. Saat ini, belum bisa menjadi konsumsi pers," tangkisnya, dengan sopan. Hanya saja, ia membenarkan: pergerakan massa pelaku kerusuhan di Solo itu bermula dari Kampung Gendingan, yang dikenal sebagai daerah preman. ▲

Tatik S. Hafidz , Hartono, Suryansyah, Apriadi Gunawan (Medan), dan Ridlo Aryanto (Solo)

YANG DITUDUH MENGGERAKKAN PERUSUH

MASIH ingat Anton Medan? Mantan bos preman yang tobat dan menjadi dai itu menggegerkan publik lantaran dituduh sebagai penggerak kerusuhan di bilangan Jakarta Pusat. Ia diduga mengajak massa melakukan aksi di Jln. Pangeran Jayakarta, Jakarta Utara – termasuk membakar rumah *taipan* Liem Sioe Liong di bilangan Gunung Sahari – pada tanggal 14 Mei. M. Ramdhan Effendy (begitu nama aslinya) sempat diperiksa tim Polda Metro Jaya. "Mereka periksa empat kali, 60 pertanyaan. Tetapi, sampai hari ini nggak ada panggilan ke pengadilan," ujar Anton kepada *Tajuk*, Sabtu 10 Oktober lalu.

Namun, menurut sejumlah sumber *Tajuk*, perkara Anton memang masih dalam tahap pemberkasan. Pihak kepolisian telah memeriksa tak kurang dari 19 orang saksi mata. Semuanya mengaku menyaksikan: Anton, yang hari itu berjubah dan bersorban putih, mengagitasi massa melakukan perusakan dan penjarahan di sepanjang kawasan Jln. Pangeran Jayakarta, Gunung Sahari, hingga Muara Karang.

Anton, menurut para saksi itu, sembari meneriakkan takbir mengomando massa. "Gulingkan Soeharto, hancurkan harta orang Cina kaya, biar sama-sama melarat," ujar seorang saksi, yang mengaku melihat Anton di Jln. Pangeran Jayakarta pada sekitar pukul 14.00, menirukan dai yang dikenal punya banyak koneksi di kalangan petinggi militer itu. Seorang saksi lain malah bercerita mendengar ceramah-ceramah Anton yang bernada agitatif, jauh sebelum terjadinya kerusuhan itu.

Kepada *Tajuk*, Anton mengakui ihwal ceramahnya yang "keras". Tetapi, tudingan agitasi itu tegas dibantahnya. Pada hari itu, setelah menerima info adanya kerusuhan, ia berniat pergi dari rumahnya di Mangga Besar ke Pesantren At-Taibin di Cisarua, Bogor. Karena mobil terhalang massa, ia memutuskan berjalan kaki sepanjang Jln. Pangeran Jayakarta, yang rusuh. "Saya justru mencegah mereka membakar dan merusak. Naluri saya sebagai dai muncul," tangkisnya.

Dai lain yang juga disangka sebagai pelaku agitasi adalah Syaiful Rizal, 25, pengurus Masjid Jami' Al-Falah, Balaraja, Tangerang. Menurut laporan pihak kepolisian, Rizal diduga menggerakkan massa melakukan kerusuhan di Balaraja. Namun perkaranya belum bisa diberkas, karena keterangan saksi-saksi belum lengkap.

Tetapi, menurut pengakuan Rizal kepada *Tajuk*, pada Kamis dan Jumat 14-15 Mei itu, ia justru mengerahkan massa untuk membantu aparat keamanan menghalau para perusuh yang datang bertruk-truk dari luar Balaraja. Para perusuh itu, kata Rizal, tampak terlatih. "Mereka kayak preman, bertato, dan mengaku-aku arek Surabaya. Ada juga yang tubuhnya besar-besar, rambutnya cepak," ujarnya.

Warga, menurut Rizal, menangkap empat di antara mereka – yang sempat mereka gebuki. Ia ikut menyerahkan satu orang ke Polsek, yang lalu melimpahkannya ke Koramil. Tetapi, ketika malam harinya ia ke Koramil, orang itu sudah tidak ada. "Kata seorang teman, malam-malam orang ini dibonceng anggota Koramil, entah ke mana," kisahnya.

Makanya Rizal heran, kok kini ia yang dituduh terlibat kerusuhan. Untuk meluruskan masalah, ia minta surat keterangan dari pihak berwenang bahwa ia bukan perusuh. "Pak Camat dan Kapolsek tanda tangan, tetapi Danramil nggak mau," ujarnya. Sayangnya, hingga Senin pekan ini, Danramil Balaraja Lettu Warja belum bisa dihubungi untuk konfirmasi.

Pihak Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi 36 orang tersangka penggerak kerusuhan itu. Dalam laporannya kepada Kapolri bulan Agustus lalu, Kapolda Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman menyebut, 14 orang di antara mereka telah ditangkap, dan dua lagi – Anton dan Rizal – diperiksa. Dari jumlah itu, berkas perkara 12 orang tersangka sudah dilimpahkan ke penuntut umum. Bila mereka diadili, barangkali kita akan tahu siapa "dalang" sejati kerusuhan itu. ▲

Miftahuddin, Sulton Mufit, dan Tatik S. Hafidz

WAWANCARA
ADNAN BUYUNG NASUTION

Lebih Baik Se...
ABANG B...

Adnan Buyung Nasution tak pernah bisa diam. Suaranya tetap keras dan tajam. Di tengah tak menentunya pengusutan terhadap harta kekayaan Soeharto dan keluarga, pengacara tersohor ini angkat bicara. Abang – begitu ia menyebut dirinya – kepada Jaksa Agung menyarankan agar membentuk Komisi Independen. Sayang, usulan ini tak bersambut. Jaksa Agung Andi M. Ghalib malah menyorongkan kemungkinan membentuk Dewan Pakar, yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran strategis kepada Jaksa Agung dalam menentukan kebijakan. Buyung sendiri diminta duduk sebagai ketua.

Apa tanggapannya? "Abang setuju ada Dewan Pakar, tetapi tidak dalam kaitan pemeriksaan KKN. Kalau pemeriksaan, dilakukan oleh Komisi Independen." Dewan Pakar, demikian mantan ketua YLBHI ini, tujuannya mengembalikan citra Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum tertinggi di Indonesia. Citra ini kacau balau sejak Dekrit 5 Juli 1959. Semua aparat negara, termasuk Kejakgung, menjadi alat kekuasaan semata-mata. "Seharusnya menjadi alat hukum, sesuai dengan asas negara hukum. Tetapi, karena didegradir oleh Demokrasi Terpimpin, hukum menjadi alat kekuasaan," katanya kepada wartawan *Tajuk* **Imelda Sari K., Suryansyah,** dan fotografer **Dadang Trimulyanto.**

Abang bersedia jadi ketua Dewan Pakar Kejakgung?

Abang sudah setuju sebagai ketua. Itu kan sifatnya internal, jadi cukup Jaksa Agung yang mengangkatnya. Anggotanya Abang usulkan, satu, mantan jaksa yang amat pintar dan *dedicated*: Prof. Priyatna Abdul Roshid, yang sekarang ketua BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Ada juga ahli pidana Prof. J.E. Sahetapy, ahli kriminologi Prof. Harkristuti Harkrisnowo, ahli hukum tata negara Prof. Soetandyo – karena pandangan-pandangannya amat dekat dengan Abang dalam memahami tata negara Indonesia, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang lain. Itu disetujui.

Sebelum itu, Abang mengusulkan adanya Komisi Independen untuk mengusut KKN, termasuk Soeharto. Menurut Abang, benarkah pemerintah punya komitmen untuk mengusut kekayaan Soeharto?

Abang kira ada. Tetapi, sejauh mana keberanian dan kemampuan untuk benar-benar melaksanakannya sampai tuntas, Abang belum tahu. Ini kan tergantung situasi dan kondisi. Semakin didesak oleh masyarakat, akan jadi faktor yang menentukan. Kalau tidak, ya cukup sampai sekian. Orang macam Ghalib harus tunjukkan bahwa dirinya betul-betul mampu. Kalau tidak, dia harus *out*. Habibie dan Wiranto pun begitu, kalau tidak mau melaksanakan tuntutan rakyat. Di pemilu nanti, orang akan melihat, pemerintahan apa ini tidak bisa membersihkan negara dari KKN. Itu satu amunisi yang luar biasa bagi pihak oposisi. Kalau Abang oposisi, langsung Abang ambil isu itu. Bahwa, oposisi akan membersihkan negara tanpa pandang bulu.

Tetapi, tampaknya Jaksa Agung ragu-ragu melakukan pemeriksaan.

Abang sudah kritik mereka habis-habisan, waktu Abang bertemu Jaksa Agung dan stafnya. "Kenapa kalian mesti ragu-ragu, sungkan, khawatir." Menggunakan kata "memeriksa" saja tidak berani, pakai istilah "klarifikasi". Apalagi istilah "meneliti", memangnya LIPI. Mereka ketawa semuanya, ha... ha... ha.... Sejak kapan kejaksaan berubah jadi LIPI. Baca Undang-Undang Kejaksaan. Abang berani bilang begitu karena Abang yang membikinnya. Kenapa mesti mengada-ada memakai istilah "meneliti". Menurut Abang, jawabannya hanya satu: menghindari penggunaan kata "memeriksa" karena takut yang bersangkutan merasa tersinggung kalau diperiksa, atau merasa khawatir melanggar asas praduga tak bersalah.

Mungkinkah mereka sungkan, karena pemeriksaan terhadap Soeharto memang tidak dimaksudkan untuk dibuka secara tuntas?

Kalau Abang ikut-ikutan berpikir begitu, Abang sudah berburuk sangka, apriori, terhadap Jaksa Agung. Abang *ndak* mau, sebab itu merusak pikiran kita sendiri. Kita jernih saja berpikir. Bahwa, pemerintah Habibie – dalam hal ini Jaksa Agung – sudah *committed* untuk melakukan pemberantasan KKN. Ini diucapkan di depan umum oleh Presiden Habibie, termasuk kepada Abang, pada masa awal Habibie jadi presiden. Bahwa pelaksanaannya kayak keong, maju-mundur, memang masalah yang harus kita dorong. Ini masih dalam proses. Kalau nanti benar-benar tidak dilaksanakan, Abang termasuk orang pertama yang tidak segan-segan mengatakan: Percuma, tidak ada gunanya lagi usaha yang dilakukan pemerintahan Habibie, termasuk Jaksa Agung Ghalib dan aparatnya.

Abang kasih waktu sampai kapan?

Janganlah dulu kita gegabah, ha... ha... ha.... Kita percaya, dan dorong teruslah.

Sudah menjadi opini umum, Habibie adalah bagian dari pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Tidakkah ini menyulitkan Habibie untuk melakukan pemeriksaan secara tuntas?

Abang tidak tahu, karena Abang bukan orangnya Habibie, bukan menterinya Habibie. Bukan pula orang yang duduk di

pen
pek
dan
logi
Kal
dile
me

Ko
kar
pu
tor
ke
ber
hal
seb
tep
logi
lain
Hal
beg
dar
mu
kep

ik Sekarang
G BUKA KARTU

pemerintahan sehingga tahu bagaimana pergulatan pemikiran dan pekerjaan Habibie. Abang bertemu dia jarang sekali. Tetapi, pandangan serupa itu yang memang banyak di kalangan masyarakat ada logikanya. Namun, sesuatu yang logis itu tidak selamanya benar. Kalau yang benar, pasti logis. Memang benar, Habibie tidak bisa dilepaskan dari rezim Soeharto, bahkan beliau tidak malu-malu menyatakan: "Saya ini muridnya Soeharto."

Toh sejarah juga mencatat, dalam banyak negara, di antaranya Korea Selatan, (mantan) Presiden Kim Yung San naik jadi presiden karena dibantu presiden yang korup: Roh Tae Woo. Roh Tae Woo pun bagian dari pemerintahan Chun Do Hwan, dua-duanya koruptor dan diancam hukuman mati. Tetapi, kenapa pemerintahan Kim Young Sam berani memberantas korupsi, padahal dia bagian dari rezim sebelumnya. Di sinilah tidak tepatnya kita berdasar pada logika, bisa terjadi kebenaran lain yang muncul. Siapa tahu, Habibie termasuk orang yang begitu. Walaupun dia bagian dari rezimnya Soeharto, mungkin karena mengingat kepentingan bangsa dan negara, ia

DADANG TRI

mau sungguh-sungguh memberantas KKN. Siapa tahu.

Faktor masyarakat di Korea Selatan amat kuat. Tetapi, di sini, masyarakat terbelah. Aksi demo terhadap pemerintahan Habibie disambut dengan kontra demo.

Ini pertanyaan bagus. Abang bawa ke masalah politik. Abang mendambakan, dan menganjurkan: sudah saatnya sekarang, dalam menghadapi perkembangan politik ke depan, khususnya kalau kita terima bahwa penyelesaiannya lewat jalan yang demokratis, harus melalui pemilu. Inilah jalan demokratis yang paling adil, damai, dan paling berbudaya. Tidak main politik jatuh-menjatuhkan, yang justru akan mengakibatkan *chaos*. Karenanya, sudah waktunya bagi mereka yang menganggap dirinya oposisi atau menentang pemerintahan Habibie – apa pun alasannya – segera mengkonsolidasi diri. Bentuklah sekarang aliansi oposisi dari semua kekuatan yang menentang pemerintahan Habibie. Tetapi, dasarnya jangan karena kebencian, karena itu amat emosional dan personal sifatnya. Janganlah kita membangun kekuatan oposisi atas dasar kebencian, melainkan harus sahih dan rasional.

Buatlah kekuatan oposisi dengan program yang jelas. Misalnya, pembersihan negara dari KKN, merombak struktur atau sistem ekonomi, menyempurnakan UUD 1945 – pokoknya hal-hal yang memberikan alternatif baru bagi pembangunan bangsa. Dengan begitu, nantinya, ada dua kekuatan: kekuatan oposisi dan yang pro pemerintah. Kekuatan oposisi mungkin dari Barisan Nasional, sebagian dari LSM. Sementara, yang pro pemerintah, Abang bayangkan, misalnya Golkar, PDI-nya Budi Hardjono, PPP, partai-partai baru (Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, mungkin PAN-nya Amien Rais). Biar saja mereka menyusun suatu aliansi yang pro pemerintah. Belum tentu menjagokan Habibie. Mungkin menjagokan Akbar Tanjung, atau mau pilih tentara, seperti Wiranto. Silakan saja. Ini supaya konflik melembaga secara konstitusional. Konstitusional tidak harus dalam arti konstitusi, tetapi sesuai dalam kehidupan yang baik menurut ajaran konstitusi. Biar mereka berlaga dalam arena pemilu, bukan di luar itu.
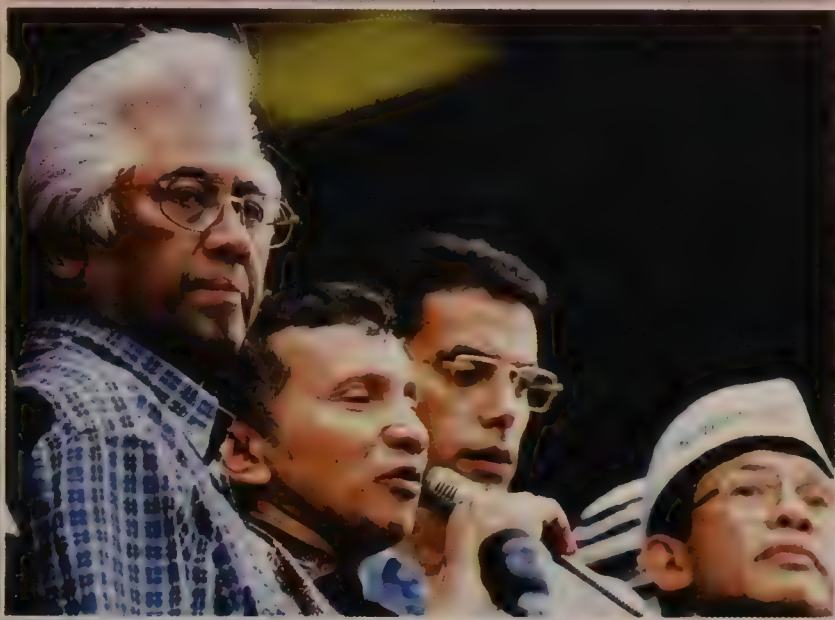
DENGAN AMIN RAIS. Selama ini oposisi dianggap tabu dan bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.

Selama ini kan oposisi tabu, dianggap bertentangan dengan Demokrasi Pancasila, dengan format politik Orde Baru. Menurut Abang, pikiran kacau balau seperti itu harus dirontokkan. Format politik atau Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan Presiden Soeharto tidak benar. Itu harus dibuang jauh-jauh.

Oposisi kan tidak populer pada rezim Orde Baru. Bagaimana kalau itu dipakai terus oleh pemerintahan Habibie?

Kalau Habibie masih melakukan itu, Abang tetap akan menentang dia. Terus terang saja, lebih baik sekarang Abang buka kartu. Kalau itu mau dijalankan, Abang akan oposisi dengan Habibie.

Abang berkaca pada konsep oposisi Amerika?

Dulu, tahun 1968, hal ini sudah Abang kemukakan bersama Jenderal H.R. Dharsono. Saat itu, dikemukakan konsep dwipartai: Partai Orde Baru dan Partai Orde Lama. Tetapi, Dharsono malah ditindas saat itu, lalu dicopot dari Siliwangi. Dharsono diadili dan dipersalahkan, karena dianggap lancang, padahal langkahnya betul. Kalau konsep dwipartai itu dilaksanakan, baru sehat negara ini. Barangkali saat itu bisa menimbulkan masalah, karena kita belum biasa mengkonsolidasi, usulan Dharsono tidak dipakai. Namun, dalam kondisi sekarang, ini bisa dilakukan. Asalkan, betul-betul *committed* pada negara kesatuan dengan dasar Pancasila.

Sekarang, kan muncul aspirasi untuk mengakhiri negara kesatuan.

Buat saya, negara kesatuan adalah suatu yang harus dipertahankan sampai mati. Cuma, sekarang, pemahaman negara kesatuan disalahgunakan jadi negara penindas. Ini yang harus kita ubah. Begitu juga mengenai Pancasila, kita pertahankan sampai akhir zaman. Tetapi, Pancasila itu harus dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan maknanya yang otentik. Jangan diubah, ditafsir-tafsirkan, dirumus-rumuskan, seperti kesalahan Soekarno pada akhir masa hidupnya. Mengubah Pancasila menjadi Panca Azimat, dan doktrin-doktrin buatan Soekarno yang sebenarnya merusak Pancasila. Ini bertambah rusak oleh Soeharto, yang – menurut Abang – gila-gilaan membuat BP-7 dengan 36 butir Pancasila. Itu bikinan yang merusak makna, pemahaman, maupun tafsiran Pancasila. Menurut Abang, Pancasila harus dikembalikan pada maknanya yang otentik sebagai dasar negara. Bukan asas, bukan ideologi. Negara adalah satu institusi yang tidak punya ideologi. Yang punya ideologi adalah manusia, partai. Negara harus netral, menjadi wadah yang melindungi dan menaungi segala macam partai dengan ideologi yang berbeda-beda.

Pikiran Abang kan membuka peluang bisa berbedanya ideologi partai nanti. Tidakkah ini malah memicu instabilitas?

Izinkan semua partai punya ideologi yang berbeda. Hanya saja, kalau mereka punya asas dan ideologi masing-masing, mereka harus punya komitmen tidak mengubah dasar negara. Apa yang dikatakan Bung Karno sudah benar. Bung Karno bilang, "Pancasila adalah dasar negara, ibarat taman bunga yang indah, ditanami berbagai bunga.

Itulah partai-partai itu semua, tumbuh semarak di atas bumi. Dan, jangan satu pun mengklaim dirinya berideologi Pancasila." Karena, kalau salah satu merebut, yang lain bilang, "Kok kamu merebut?" Itu milik kita semua. Kesalahan atau distorsi terhadap Pancasila ini dilakukan oleh Soeharto waktu dia melihat Pancasila sebagai ideologi negara.

Pertimbangan Soeharto?

Mau jalan pintas. Mau menindas semua partai. Mau menindas

Negara adalah satu institusi yang tidak punya ideologi. Yang punya ideologi adalah manusia, partai. Negara harus netral, menjadi wadah yang melindungi dan menaungi segala macam partai dengan ideologi yang berbeda-beda.

hati nurani orang yang paling dalam tentang asas dan ideologi yang diyakininya. Ideologi kan sangat personal, sesuai keyakinan pribadi orang. Bahkan, Abang ingin katakan, kalaupun ada anak-anak muda percaya pada Marxisme, biarkan saja. Itu hak asasi dan hati nurani masing-masing. Cuma, Abang bilang, mereka jadi lawan politik Abang. Abang anti komunis. Mereka tidak boleh larang hati nurani Abang, dan tidak Abang biarkan mereka tumbuh jadi partai besar. Akan Abang perjuangkan negara ini jadi makmur, sehat, kuat, sehingga ideologi komunis yang mereka miliki tidak bisa berkembang. Abang melempar ini agar partai-partai bisa *mikir*.

Ini kan membuka peluang bagi partai yang muncul sekarang berideologi komunis, yang anti Tuhan. Padahal, ini bertentangan dengan dasar negara Pancasila, yang mengakui adanya Tuhan.

Memang itu masalah. Orang yang beriman, beragama, dan mengakui adanya Tuhan, tidak akan bisa menerima itu. Tetapi, kalau kita lihat sejarah saat negara kita dibangun, pemerintah dengan sadar mengizinkan partai komunis. Karena, dalam Pancasila, tidak dimaksudkan semua orang harus ber-Tuhan. Ini kesalahan Soeharto juga, yang memaksakan melalui Pancasila bahwa semua orang harus ber-Tuhan. Tidak. Negara menjunjung tinggi dan menghormati asas Ketuhanan. Artinya apa? Pada orang yang ber-Tuhan, negara menjunjung tinggi, tidak boleh dimusuhi dan dikejar.

Bagi mereka yang tidak ber-Tuhan, jangan coba-coba merusak agama dong. Kalau ada orang tidak beragama, mau sekuler, itu hak dia. Abang juga tidak setuju dengan pikiran orang seperti itu, tetapi hak dia dong. Tidak boleh ditindas. Ini semua memang harus dihadapi secara politik juga. Kita bangun negara demokrasi dengan kekuatan pro demokrasi yang beriman, berketuhanan, sehingga menjadi kukuh. Dengan begitu, orang yang berpaham seperti itu (anti Tuhan) terkucil sendiri, karena tidak dapat pasaran. Jangan ditindas, sebab itu bertentangan dengan asas berperikemanusiaan juga.

Kita beralih ke masalah lain. Abang tampil sebagai pengacara polisi yang belakangan divonis terlibat dalam penembakan mahasiswa Trisakti. Opini di luar sangat kuat: kedua polisi itu sengaja dikorbankan untuk menutupi aktor sebenarnya. Bila ini benar, menurut Abang, siapa sebenarnya aktor intelektual di balik peristiwa itu?

Ini sudah seperti benang kusut, tidak tahu dari mana memulainya. Menurut hemat Abang, keseluruhan proses pemeriksaan peristiwa Trisakti sudah salah kaprah dari awal. Sebenarnya, Pangdam Jaya (ketika itu) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin selaku penanggung jawab keamanan tertinggi di Jakarta mestinya diberhentikan sementara. Nyatanya dia malah jadi pahlawan, kasih instruksi sana-sini. Itulah yang terjadi. Dari awal juga tidak diperiksa secara obyektif dan profesional semua senjata yang dipakai semua pasukan di lapangan waktu itu. Tidak hanya pasukan polisi, tetapi juga senjata pasukan lain yang bertugas saat itu. Senjata tersebut mestinya diperiksa ahli balistik. Barangkali dari situ diketahui, salah satu dari senjata itu dipakai. Jenazah-jenazah juga diperiksa, diambil visumnya. Ini tidak dilakukan. Sudah dikubur, baru digali lagi. Ini kan menunjukkan kecerobohan yang luar biasa untuk sebuah perisiwa sebesar itu. Apa ini ceroboh atau memang kesengajaan untuk menghilangkan jejak. Sekarang, kalau sekian bulan senjata itu diperiksa, tidak akan bisa lagi, karena terlalu banyak cara untuk menghilangkan jejak. Kalau lop-lop senjata diganti, misalnya, bagaimana? Jadi, makin sulitlah mencari pemegang laras senjata yang mengeluarkan peluru tadi. Itu satu.

Kedua, yang menjadi tanda tanya Abang, kenapa tidak diadakan pemeriksaan terhadap kemungkinan lain – bukan hanya pasukan yang berbaris menghadapi mahasiswa di sekitar Trisakti. Misalnya, penembakan dari arah Citra Land, atau dari arah jalan layang. Kecerobohan dalam pemeriksaan perkara ini mempersulit pencarian siapa pelaku atau pembunuh sebenarnya.

ADEK BERRY

SIDANG TRISAKTI. Penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan kerusuhan sosial, diduga kuat saling mengait.

Abang melihat celah lain dari pihak luar untuk menutupi siapa pelaku sebenarnya?

Kita lihat secara lebih luas: tiga peristiwa besar, penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan kerusuhan sosial, terjadi dalam waktu relatif singkat. Menurut Abang, ketiga peristiwa ini saling mengait. Paling tidak, itulah dugaan yang kuat. Seharusnya, ini dijadikan bahan pemeriksaan untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi. Apa ada persekongkolan atau konspirasi. Kalau ada konspirasi, siapa otaknya. Ini semua mengarah kepada terjadinya pergantian politik Indonesia. Kalau dipakai teori konspirasi, seakan ini peristiwa-peristiwa yang dibuat sebagai satu rangkaian peristiwa untuk mengkondisikan situasi untuk terjadinya peralihan kekuasaan di negara ini. Kalau ini teori konspirasi, harus dicari siapa yang mendapat keuntungan dari peristiwa ini. Apa Habibie, yang kemudian jadi presiden. Apa dia ikut terlibat, atau orang-orangnya terlibat. Atau Wiranto, yang bisa *survive* jadi pangab. Ataukah Soeharto

Selama ini, mereka tidak rela melihat kepemimpinan negara ini. Bukan karena mereka demokrat dan mau membangun demokrasi. Buktinya, waktu berkuasa pun, mereka ikut menindas kita semua. Otoriter juga.

sendiri, di mana dengan cara ini dia tetap selamat sebagai presiden. Banyak kemungkinanlah. Belum lagi orang lain di luar ketiga orang tadi.

Dari sekian banyak kemungkinan tadi, siapa yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini?

Abang masih sulit menerka, karena tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Yang terjadi selama ini kan sifatnya parsial dan terbatas sekali. Pemeriksaan soal penculikan, itu pun *ndak* tuntas. *Ndak* diperiksa dalam kaitannya dengan yang lain. Peristiwa penembakan, yang diperiksa orang Brimob saja. Begitu pula soal kerusuhan, yang dicari hanya siapa yang jadi korban. Dengan cara seperti ini, tidak akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dari peristiwa itu. Jadi, tidak bisa dibongkar.

Coba kita lihat satu per satu. Soeharto tentu tidak mendapat keuntungan, karena dia sendiri jatuh. Bisakah dikatakan, Soeharto bermain, hanya kebetulan dia salah perhitungan?

Bisa, bisa begitu. Mungkin beliau tidak bermaksud sejauh itu. Kebablasan bisa juga.

Artinya, bisa ada komando dari sana?

Bukan komandolah. Kalau ada orang yang bertujuan ingin membela posisi Pak Harto waktu itu, mereka melakukan hal-hal yang menurut perhitungan mereka akan bisa menyelamatkan posisi beliau. Ternyata, ini peristiwa di luar kontrol mereka, atau ada orang lain yang menunggangi. Ditunggangi orang, lalu kebablasan sehingga jadi begitu. Pak Harto malah jatuh, bukannya selamat. Banyak kemungkinan yang kita tidak tahu.

Kalau Habibie, yang kini jadi presiden?

Sama saja. Tetapi yang kita lihat sementara, saat menjelang Presiden Soeharto jatuh kan masih ada upaya terakhir dari beliau untuk menyelamatkan kedudukannya – sehari atau dua hari sebelum serah terima jabatan. Pada saat itu, jelas sikap Pak Harto, yang tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Habibie. Setelah upaya penyelamatan itu gagal, baru beliau terdesak untuk mundur dan mau menyerahkan kepada siapa. Di situlah masuk orang-orang Habibie, mendorong supaya Habibie naik jadi presiden. Apakah orang yang mendorong Habibie itu ikut dalam mengkondisikan keadaan supaya terjadi, *wallahu a'lam*. Tetapi, mesti diperiksa juga dong. Ini kan tugas besar.

Bagaimana dengan Pangab Wiranto.

Di kalangan militer sendiri, kan tidak semuanya mendukung beliau. Kelemahannya juga ada. Dilihat dari karier militernya, beliau tidak sejaya jenderal lainnya. Tidak mustahil, ada jenderal lain, yang lebih punya karier, lebih punya bintang cemerlang, karena pengalaman tempur dan sebagainya, menginginkan posisi tersebut. Itu wajar sekali, meski pada akhirnya beliau yang berhasil. Tetapi, dalam proses sebelum berhasil itu, tidak mustahil bahwa terjadi pergulatan-pergulatan internal yang kita tidak tahu. Pokoknya, kalau ada pemeriksa yang pintar, cerdas, tajam, dan mau melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Abang kira, itu suatu hal yang bisa direkomendasikan sebenarnya. Tetapi ini masuk masalah politik, jadi harus ada keputusan politik untuk menetapkan hal itu.

Kalau pemerintah Habibie dan jajaran ABRI nggak mau hal itu diperiksa atau nggak mau lagi diperiksa, ya selesai sudah. Jadi, buat apa kita bicara panjang lebar, karena nggak ada gunanya lagi, ha... ha... ha....

Kemungkinan lain di luar itu?

Orang di luar yang selama ini anti bukan saja kepada (mantan) Presiden Soeharto tetapi juga kepada seluruh birokrasi yang mendukung Soeharto – baik jajaran sipil seperti Habibie dengan ICMI-nya, maupun Feisal Tanjung, Syarwan Hamid, Wiranto – *ndak* ikhlas. Entah karena perbedaan ideologi atau agama, mereka *ndak* ikhlas. Mereka tersisih, meski dulu mereka berkuasa juga.

Maksud Abang, Benny Moerdani?

Ya *ndak* usah sebut namalah. Kau ini nakal, ha... ha... ha.... Kalau sama Abang, jangan coba-coba menjebak, ha... ha... ha.... Selama ini, mereka tidak rela melihat kepemimpinan negara ini. Bukan karena mereka demokrat dan mau membangun demokrasi. Buktinya, waktu berkuasa pun, mereka ikut menindas kita semua. Otoriter juga. Tetapi, soalnya kedudukan dalam kekuasaan negara. Selama ini mereka enak duduk di kursi empuk kekuasaan, tiba-tiba terempas semua. Mereka tersingkir oleh grupnya Habibie dengan Feisal Tanjung dan ICMI. Mereka tidak ikhlas. Tidak mustahil, mereka berusaha macam-macam untuk bisa mengalihkan kembali kekuasaan negara ke tangan orang yang mereka percayai. Menurut Abang, ini semua mesti diperiksa. Apa pun, ini semua analisis, belum tentu benar.

Tadi Abang menyebut, kasus penculikan, penembakan, dan kerusuhan, terkait satu dengan yang lain. Dalam kasus pencu-

BIODATA

DADANG TRI

ADNAN BUYUNG NASUTION:

Lahir : Jakarta, 20 Juli 1934
Agama : Islam
Pendidikan :
- SD Negeri Yogyakarta, 1947
- SMP Negeri I Yogyakarta, 1951
- SMA Negeri I Yogyakarta, 1954
- Studi Hukum Internasional, Universitas Melbourne, Australia, 1959
- Advance Course Detective Training School, Victoria Police, Australia, 1959
- Sarjana Hukum, FH-IPK UI, 1964
- Doktor, Rijksuniversiteit Utrecht, Belanda, 1992

Karier:
- Jaksa/Kepala Humas Kejakgung, 1957-1959
- Anggota DPRD/MPRS, 1966-1968
- Direktur/Ketua Dewan Pengurus LBH, 1970-1980
- Ketua Umum Yayasan LBH Indonesia, 1981-1983
- Ketua DPP Peradin, 1977-1983
- Advokat/Konsultan Hukum Adnan Buyung & Associates, 1970-1984
- Ketua YLBHI, 1992-1996
- Konsultan Hukum Nasution, Soedibyo, Maqdir & Partners, 1996-1998
- Konsultan Hukum Adnan Buyung & Partners, 1998-...

likan sudah jelas, Prabowo terlibat di dalamnya.

Ya, Prabowo ketika itu danjen Kopassus, yang punya berbagai pasukan di bawah. Salah satu unit pasukannya adalah Sandi Yudha. Bahwa dia memerintahkan, atau dengan setahu dia, operasi penangkapan, penculikan, di mata dia, dia melakukan tugas negara. Tetapi, bagi kita, dia tidak berwenang melakukan penangkapan, apalagi di luar KUHAP. Kita anggap, dia melakukan penculikan. Namun, sebagaimana diakuinya, dia menculik sembilan orang saja. Berarti, belasan orang lainnya bukan dia. Siapa? Mungkinkah ada perintah lain masuk ke dalam pasukannya. Bisa dari atasan dia, atau dari luar yang punya akses ke sana. Jadi, saling menunggangi dalam intel biasalah. Begitu juga dalam peristiwa penembakan Trisakti dan kerusuhan sosial 13-15 Mei.

Abang ingin mengatakan, Prabowo, yang terlibat dalam kasus penculikan, ikut pula dalam penembakan di Trisakti dan kerusuhan?

Ndak bisa dong. *Ndak* adil kita bersikap begitu. Abang kira, di sinilah kekeliruan masyarakat kita, karena sering pukul rata. Selama belum bisa dibuktikan bahwa Prabowo terlibat dalam semuanya, jangan dibebankan pada Prabowo dong. Dalam prinsip keadilan, orang hanya boleh dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Kita kembali pada kasus penembakan Trisakti. Apa senjata Abang untuk bisa melepas kedua polisi itu dari kasus penembakan.

Abang ingin dengar dulu kapolri baru, tentu membawa *policy* baru. Tidak mustahil, dia bawa pesan dari Mabes ABRI, bisa pula dari Presiden Habibie. Sebab, setelah kasus ini heboh, masyarakat juga terbuka matanya: kedua polisi dikorbankan, sementara penembak sebenarnya masih gentayangan. Belum lagi keluarga korban penembakan, apakah orang tuanya atau para mahasiswa Trisakti. Mereka banyak bertanya kepada Abang, "Bang, kita buat apa?" "Ayolah bersama-sama," Abang bilang. Kita masih kejar terus pelaku penembakan. Dan, Abang sebenarnya mengharapkan, orang-orang dari kampus Trisakti, baik mahasiswa maupun dosennya – termasuk Adi Andojo Soetjipto – jangan diam. Jangan cuma bisa maki-maki Abang di pengadilan, ha... ha... ha.... ▲

Potret Diri Para Bi

Kalangan etnis Tionghoa memandang diri sendiri sebagai *economic animal*: hemat, piawai berdagang. Jaringan bisnis mereka yang luas, dan keyakinan bahwa Indonesia masih merupakan tempat yang baik untuk berusaha, menjadikan etnis Tionghoa aset yang penting untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Sayangnya, masih banyak yang enggan pulang ke Indonesia setelah mereka mengungsi tempo hari.

Tabel 2:
Faktor yang dukung tumbuhnya konglomerat:

Jago dagang	55,5%
Jaringan bisnis	18,0%
Kemampuan modal	4,0%
Jago lobi	8,5%
Lainnya	7,5%
Tidak Tahu/Jawab	6,5%

N = 200

Tabel 3:
Dengan fasilitas sama, lebih maju:

Etnis Tionghoa	56,0%
Pribumi	0,5%
Tidak Tahu/Jawab	43,5%

N = 200

ETNIS Tionghoa menjadi faktor kunci pemulihan ekonomi Indonesia yang kini babak belur. Tanpa kehadiran kembali warga keturunan itu, sulit diharapkan perekonomian akan bergulir kembali. Memang, sejak kerusuhan Mei lalu, etnis Tionghoa ramai-ramai "mengungsi" ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan negara lain. Kepergian mereka didahului dengan transfer dana besar-besaran.

Tak ada yang tahu pasti berapa duit yang terbang dari Indonesia. Ada yang memperkirakan "cuma" miliaran dolar. Tetapi, ada pula yang menduga hingga di atas 50 miliar dolar. Jadi, jika dana tersebut balik lagi ke Indonesia, pemerintah tak perlu susah payah mengerek suku bunga untuk memperkuat kurs rupiah. Jika dolar yang telanjur terbang pulang kandang, rupiah otomatis bakal menguat.

Sayangnya, hingga kini masih banyak etnis Tionghoa yang masih bertahan di negeri orang. Sebagian memang sudah kembali – terutama mereka yang bekalnya "tipis". Tetapi sebagian besar enggan kembali ke Indonesia, karena khawatir kerusuhan bakal meledak lagi. Aksi penjarahan, demo yang tak kunjung henti, dan meningkatnya angka kriminalitas, membuat mereka berpikir dua kali untuk segera kembali ke Bumi Pertiwi. Apalagi, sebentar lagi akan diselenggarakan sidang istimewa MPR, disusul pemilihan umum – yang rawan kerusuhan.

Akankah mereka melupakan Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, dan berbagai hal seputar peran etnis Cina di bidang perekonomian, *Tajuk* bersama CESDA-LP3ES melakukan survei dengan responden dari kalangan etnis Tionghoa sendiri. Hasilnya? Sebagian besar responden (87,0%) percaya, alasan di balik itu adalah rasa tidak aman, bukan rendahnya rasa kebangsaan (2,0%) atau mengalihkan bisnis ke luar negeri (1,5%). Sebagian besar responden juga menyatakan masih tertarik untuk berbisnis di Indonesia (62,5%) – jauh lebih banyak ketimbang yang tak tertarik lagi (22,5%).

Jadi, tampaknya tinggal bagaimana pemerintah mengambil langkah nyata yang kondusif buat menghilangkan trauma etnis Tionghoa terhadap kerusuhan Mei lalu. Dan, langkah pemerintah yang bijaksana, agaknya, bukan cuma akan menarik partisipasi mereka untuk membawa negeri ini keluar dari krisis ekonomi. Tetapi, juga menyelesaikan potensi konflik buat selamanya, dan mengembangkan seluruh potensi yang ada untuk memenangkan persaingan ketat di milenium mendatang.

Tabel 1:

	Setuju	Tak setuju	Tak tahu
Ekonomi dikuasai etnis Tionghoa	21,5%	74,0%	4,5%
Konglomerat identik dengan Tionghoa	33.5%	62,0%	4,5%
Kebijakan ala Malaysia perlu diterapkan	39.0%	41,0%	20,0%
Kemitraan upaya tepat atasi kesenjangan	57.0%	13,5%	29,5%
Tionghoa tetap tertarik berbisnis di Indonesia	62.5%	22,5%	15,0%

N = 200

Ketika dilontarkan pertanyaan "Apakah warga keturunan Tionghoa menguasai perekonomian", lagi-lagi sebagian besar publik Tionghoa menyatakan "tidak" (74,0%) walau tak sedikit (21,5%) yang menyetujuinya. Alasannya sederhana. Dalam wawancara, sebagian besar dari 200 responden yang dipilih secara purposif itu menolak anggapan bahwa konglomerat, atau pengusaha besar, identik dengan orang Tionghoa. Lebih dari separo (62,0%) tak setuju dengan gambaran stereotipikal ini, walau sepertiganya (33,5%) dengan bangga mengakui.

Seorang eksekutif dari Grup Lippo, misalnya, tak memungkiri kenyataan: di zaman Orde Baru, Liem Sioe Liong memang hebat dalam bisnis.

Bintang Ekonomi

Tetapi, itu karena ia dekat dengan penguasa. Bahkan, katanya, "Ada orang bilang, setiap saat Pak Harto bersedia bertemu Om Liem jika dibutuhkan." Dari sini sang eksekutif menyimpulkan, "Kedekatan dengan penguasa itulah yang memunculkan *image* bahwa etnis Cina menguasai perdagangan di Indonesia."

Apa yang disampaikan eksekutif yang tak mau disebut namanya itu tentu ada benarnya. Pada kenyataannya, di republik ini sukses bisnis – juga sukses jabatan di pemerintahan, termasuk BUMN – berbanding terbalik dengan jarak koneksi seseorang dengan sumbu kekuasaan. Bukan rahasia lagi, di era lalu, semakin dekat seseorang dengan pusat kekuasaan di Cendana, semakin berkibarlah ia. Warna kulit dan bentuk mata hanyalah faktor kedua.

Sukses Om Liem tak lepas dari sejarah kedekatan sang *taipan* dengan mantan Presiden Soeharto, sejak zaman perang kemerdekaan dulu. Dan, tali persahabatan itu terus dijaga melalui keikutsertaan Sudwikatmono sebagai salah satu catur tunggal, *The Gang of Four*, penguasa kerajaan bisnis Grup Salim. Kecuali itu, kita tahu, pada dekade terakhir kekuasaan Pak Harto, atau setelah "P-3" (Putra-Putri Presiden) cukup dewasa untuk berbisnis sendiri, golongan pengusaha yang meroket paling cepat adalah para "Pangeran dan Putri Biru" dari Cendana.

Dan, kalau kita masih rajin baca berita di zaman krismon ini, mungkin pernah ketemu cerita tentang seorang Hau Pok Thien yang mati bunuh diri, setelah membunuh dua anaknya, karena putus asa tak mampu menafkahi keluarganya. Lelaki dengan "nama tiga" ini adalah buruh tani yang tinggal di sebuah gubuk berdinding lumpur di pinggiran Pontianak.

Orang-orang seperti Hau Pok Thien – dan Om Liem, di sisi lain – memang merupakan contoh ekstrem. Para responden umumnya mengakui, etnis Tionghoa umumnya lebih kaya ketimbang pribumi. Kesenjangan inilah, menurut mereka, yang membuat warga keturunan jadi sasaran amuk massa, seperti pada kerusuhan 13-15 Mei lalu. Sebab itu, responden umumnya menginginkan agar kesenjangan ekonomi dipersempit.

Caranya? Menurut sebagian besar dari mereka (57,0%): melalui pola kemitraan antara pengusaha besar dan kecil. Hanya sedikit (13,5%) yang menganggap, kemitraan model Kesepakatan Jimbaran – pemberian bantuan modal dari konglomerat kepada pengusaha guram – tidak tepat.

Tabel 4:
Pilih mitra bisnis yang mana?

Etnis Tionghoa	18,5%
Pribumi	4,0%
Sama saja	76,5%
Tidak Tahu/Jawab	1,0%
	N = 200

Metode kemitraan yang sebenarnya semacam derma paksaan ini setidaknya lebih disukai para responden yang mewakili masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta itu ketimbang *affirmative action* ala Malaysia. Hanya 39,0% yang setuju kebijakan politik pemerintah yang memberi prioritas kepada kalangan pribumi di bidang ekonomi-bisnis – lebih sedikit ketimbang yang tak setuju (41,0%). Maklum, kebijakan seperti ini dipandang membuat etnis Tionghoa semakin terdiskriminasi.

Selama ini, diskriminasi di bidang politik mereka pandang telah memaksa etnis Tionghoa untuk berkonsentrasi di bidang bisnis.

ILUSTRASI : ANTOK SUGIANTO

Diskriminasi yang satu ini saja telah mereka pandang hanya menguntungkan sekelompok (kecil) pengusaha Tionghoa dan merugikan golongan Tionghoa secara keseluruhan. "Saya sendiri, misalnya," kata Hestia Wonodjojo Utomo, direktur pelaksana PT Kobe Lyna Industri, "kalau ditanya apa yang saya inginkan, akan menjawab: 'Saya ingin menjadi pengarang atau malah pengajar, dan tidak memilih bisnis seperti sekarang.'"

Dalam survei, hanya 70 dari 200 responden (35%) yang memilih tokoh bisnis sebagai idola, sisanya menyatakan tak menentukan pilihan apa-apa. Dari yang 70 ini, dua *taipan* papan atas, Om Liem dan Om Willem (William Soeryadjaya), mendapat suara terbanyak, masing-masing 22,9%. Untuk tokoh non-bisnis, 98 responden (49%) menjatuhkan pilihan, dan sisanya (51%) tidak menjawab. Di sini, tokoh PDI Kwik Kian Gie justru mendapat tempat lebih luas di hati mereka (33,5%).

Sekarang, konsentrasi di bidang bisnis yang berihwal dari kurangnya kesempatan di bidang lain itu diakui sebagai penyebab awal mengapa etnis Tionghoa lebih sukses di bidang yang menghasilkan fulus tersebut. Alasan lain mengapa etnis Tionghoa lebih cepat berkibar, menurut para responden, adalah kemampuan berdagang (55,5%). Faktor ini didukung oleh kemampuan memanfaatkan jaringan bisnis yang luas (18,0%) dan melakukan lobi (8,5%). Cuma 4,0% responden yang menganggap, sukses seperti yang diraih Om Liem dan para konglomerat lainnya karena kemampuan modal yang dimiliki.

Tabel 5:

Nasionalismenya rendah	2,0%
Merasa tidak aman	87,0%
Alihkan bisnis ke luar negeri	1,5%
Lainnya	1,5%
Tidak Tahu/Jawab	8,0%

N = 200

Kalau orang dari etnis Tionghoa dan pribumi diberi modal dan peluang usaha yang sama, sebagian besar (56,0%) responden yakin, orang Tionghoa tersebut bakal lebih maju. Cuma 0,5% yang percaya, pribumi akan lebih sukses. Dan, sisanya (43,5%) tak bersedia memberi jawaban pasti.

Musababnya? Respons bisnis etnis Tionghoa, masih menurut eksekutif yang tak mau ditampilkan jati dirinya di atas, sangat berbeda dari pribumi. "Pada umumnya, orang Tionghoa, kalau mendapat bantuan modal, langsung diputarkan lagi, untuk memperkuat modal yang telah dimiliki. Soal sandang, pangan, atau mobil mewah, kurang diperhatikan. Lain halnya dengan kebanyakan pengusaha pribumi. Begitu mendapat bantuan kredit, langsung beli mobil mewah – bahkan ada yang kawin lagi," katanya, meyakinkan. "Ini bukan bercanda, kenyataan di masyarakat memang begitu. Jadi, wajar kalau pengusaha nonpri cepat berkembang dan memperoleh untung besar dari usahanya itu."

Thomas Darmawan, pengusaha agroindustri yang aktif sebagai ketua bidang indus-

Kami Berusaha Jadi *Good Citizens*

MASALAH Tionghoa, jika tak diselesaikan tuntas, akan jadi bom waktu. Kerusuhan Mei lalu bukanlah kali yang pertama. Dan, kalau tak dicegah dengan kebijakan kondusif, tak ada jaminan sebagai yang terakhir. Untuk itu, suara dari etnis Tionghoa sendiri perlu didengar.

Buat mendapat gambaran utuh tentang citra diri etnis minoritas yang punya kekuatan ekonomi besar ini, *Tajuk* dan CESDA mengadakan survei terhadap 200 responden di Jakarta. Berikut petikan wawancara dengan tiga eksekutif dari etnis Tionghoa.

● **Anonim, eksekutif sebuah grup bisnis yang besar**

Kalau kita mau belajar dari sejarah, memang etnis Tionghoa sudah menguasai bisnis di Indonesia sejak dulu. Jadi, wajar kalau mereka unggul di bidang ini.

Tetapi, bukan berarti etnis Tionghoa menguasai pasar. Kalau kita jeli, banyak juga suku bangsa Indonesia asli yang mampu bersaing. Suku Padang, misalnya, walau tak menguasai sektor perdagangan barang, unggul di sektor jasa rumah makan. Ini harus kita akui.

Etnis Tionghoa ahli berdagang, karena sejak kecil lingkungannya mengajarkan tata cara dagang yang baik. Untuk menguasai bidang ini tidak mudah, perlu pengalaman dan etos kerja tinggi. Jadi, upaya pemerintah menggantikan distribusi barang, yang selama ini dikuasai etnis Tionghoa, tak akan mudah.

Untuk mengembangkan jaringan distribusi perlu waktu bertahun-tahun. Sebab, kunci keberhasilannya adalah kepercayaan dan kejujuran. Tanpa ini, jaringan usaha pasti akan cepat jebol.

Selama Orde Baru, bidang pekerjaan lain sulit dimasuki etnis Tionghoa. Anda lihat sendiri, selama Pak Harto jadi presiden, tidak ada menteri dari kalangan Tionghoa. Di era Bung Karno, sempat ada tiga atau empat menteri yang berasal dari etnis Tionghoa.

Jabatan strategis sebetulnya sangat mempengaruhi perkembangan etnis Tionghoa, secara psikologis maupun sosiologis. Mestinya, jangan hanya diberi kesempatan di sektor dagang, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial.

Ingat saat kerusuhan Mei lalu? Tim badminton kita berhasil merebut Thomas Cup, padahal mayoritas dari etnis Tionghoa. Seperti kata Ketua Umum PBSI Jenderal Subagio, dengan persatuan dan kesatuan kita akan mampu menghadapi kendala apa pun.

● **Hestia Wonodjojo Utomo, direktur pengelola PT Kobe Lyna Industri**

Kalau dikatakan pengusaha etnis Tionghoa dapat fasilitas, barangkali ada beberapa. Namun, kebanyakan adalah karena kegigihan. Saya, misalnya, hanya mengawali bisnis dari dapur. Semua saya usahakan sendiri, dengan perjuangan keras.

Memang sih, saya dapat peluang dari BPEN: dibukakan jalan menembus pasar luar negeri. Tetapi, itu hasil perjuangan juga. Jadi, kalau digeneralisasi bahwa pengusaha etnis Tionghoa selalu mendapat berbagai fasilitas, saya rasa tidak benar.

Kami ini, terus terang, boleh dibilang sangat kikir dan pelit. Bukan apa-apa. Kikir dan pelit dalam artian: kalau mengeluarkan sesuatu, pasti dipikir masak dulu. Nggak ada itu istilah boros. Jadi, kami ini bertindak dengan perencanaan yang matang.

Soal nasionalisme? Karena saya tinggal di Indonesia, bagi saya Indonesia-lah negara saya. Saya memang Tionghoa, tetapi saya – juga teman-teman – tidak rela melihat kondisi negara kita yang porak-poranda. Kami sangat prihatin dan tidak ingin meninggalkan Indonesia, walau sebenarnya mampu untuk tinggal di negara tetangga, seperti Singapura. Kami berusaha menjadi *good citizens*.

● **Thomas Dharmawan, pengusaha agroindustri**

Ada betulnya, jalur bisnis menjadi pilihan utama etnis Tionghoa. Sebab, kalau masuk ke bidang lain, seperti pegawai negeri atau tentara, pada umumnya masih banyak hambatan. Saya tidak mau memberikan contoh orang lain, keluarga saya sendiri mengalami: istri saya, dokter, yang pernah kerja di Puskesmas sam-

tri pangan, Kompartemen Industri dan Farmasi, Kadin Indonesia, melukiskan kiat sukses etnis Tionghoa dengan kata-kata yang lebih lugas: "Orang Tionghoa itu *economic animal*." Kendati demikian, sebagai binatang ekonomi, sebagian terbesar dari mereka (76,5%) menyatakan tak mempermasalahkan ras dalam memilih mitra usaha. Tetapi, dari responden yang menentukan sikap, lebih banyak yang lebih suka sesama Tionghoa (18,5%) ketimbang pribumi (4,0%) sebagai partner.

Menanggapi pernyataan yang lebih mengarah (selain dengan kalangan penguasa, pengusaha Tionghoa selama ini cenderung memilih sesama Tionghoa sebagai mitra bisnis), para responden masih cukup konsisten: sebagian besar tetap menyatakan dengan tegas "tidak setuju" (57,5%), jauh lebih banyak ketimbang yang "setuju" (31,5%) maupun tak menjawab (11,0%). Namun, ketika diminta memilih etnis yang paling cocok untuk bermitra, jawaban yang diberikan terbelah: 25% menganggap, semua etnis sama saja (yang penting mau berbisnis dan melakukannya dengan benar), dan 22,5% lebih sreg dengan etnis Jawa. Sisanya, yang terbesar memilih orang Eropa (4,5%) dan etnis Batak (4,0%), dengan jumlah terbesar (36,5%) tak memberikan jawaban.

Temuan yang terakhir ini mungkin disebabkan: responden yang diambil hanya dari DKI Jakarta, yang – notabene – populasinya didominasi orang Jawa. Kecuali itu, ada pula beberapa kritik lain, seperti yang dikemukakan Thomas. Berdasarkan umur, menurutnya, di Indonesia ada tiga kelompok bisnis orang Tionghoa. Pertama, Cina totok, yaitu golongan tua yang lahir di Cina, Hong Kong, atau Taiwan. Kedua, golongan peranakan, kalangan yang telah beberapa generasi lahir di Indonesia. Ketiga, golongan muda, orang-orang Tionghoa yang sudah mendapat pendidikan di luar negeri. "Ketiganya," ujarnya, "berbeda dalam cara berpikir dan bertindak."

Hal lain yang berpengaruh besar, masih menurut Thomas, adalah suku atau dialek, seperti Hokian, Teochiu, Hakka, yang masing-masing berasal dari kawasan berbeda di Daratan Cina. Kesejarahan yang berbeda ini membuat mereka memiliki keahlian yang berbeda pula.

Untuk kedua hal ini, sampel responden yang diambil agaknya cukup mewakili generasi etnis Tionghoa yang ada sekarang, yang diharapkan ikut membawa Indonesia ke era globalisasi abad ke-21. Setidaknya, usia mereka yang hanya sedikit (10,5%) yang di atas 55 tahun, dan pendidikan mereka yang SLTA ke atas, menunjukkan hal ini.

Kenyataannya, analisis mendalam terhadap data tabulasi silang menunjukkan, kecenderungan opini mereka tak dipengaruhi faktor kelompok umur, jenis pekerjaan, pendidikan, strata sosial-ekonomi, agama, dan sebagainya. Apalagi, Jakarta yang bagai magnet besar yang mampu menarik pendatang dari pelbagai kelompok etnis – termasuk etnis Tionghoa dari Sumatra (yang kebanyakan Teochiu) dan Kalimantan (yang mayoritas Hakka) – membuat sampel yang diambil agaknya juga cukup mewakili kelompok masyarakat "*Chinese-Indonesian*" yang ada. ▲

Prih Sarnianto, Ari Prastowati, dan Swasti Astra

---

pai golongan III/d, dan sepupu saya, yang masuk jadi tentara dan saat ini berpangkat kapten.

Mereka banyak dapat hambatan. Misalnya, untuk mencari gelar dokter spesialis saja selalu dipersulit. Karena itu, keduanya lalu memutuskan keluar – terjun ke dunia bisnis.

Soal etos kerja bisa kita lihat juga dari buntut krismon sekarang. Banyak ahli komputer dari kalangan Tionghoa lari ke luar negeri. Bukan karena takut terhadap kerusuhan Mei lalu, melainkan dibayar gede oleh perusahaan komputer di sana. Fenomena ini juga terjadi ketika Thailand terkena krisis. Banyak ahli garmen dan pasar uang mereka lari ke Indonesia. Inilah cermin era globalisasi. Profesionalisme dan kesempatan karier jadi tujuan utama.

Modal etnis Tionghoa adalah keuletan dan keahlian. Sudah rahasia umum kalau kami lebih mudah dapat kredit. Ini bukan karena etika bisnis yang memegang teguh 5 K: karakter yang baik, kemampuan yang teruji, kondisi (prospektif untuk berbisnis, dan semakin tua makin bijak), kapasitas, dan kolateralisme (jaringan kolega bisnis yang luas).

Modal 5-K ini adalah bentuk keandalan SDM yang tak dapat diperoleh melalui bangku sekolah. Dengan ini, *networking* gampang dibentuk. Tak heran kalau para pengusaha Australia dan Selandia Baru berlomba memanfaatkannya. Mengapa kita tidak? ▲

Prih Sarnianto

Para Binatang Ekonomi Itu

ORANG Melayu itu suka di bidang politik, dan orang Cina di bidang ekonomi. Premis yang satu ini pernah dipercaya di Malaysia. Hasilnya: pada 13 Mei 1969, kerusuhan antara etnis Melayu dan Cina pun meledak di Negeri Semenanjung itu. Kebijakan pemerintah Kualalumpur lalu diubah. Dan, sejak itu, tak pernah terjadi lagi *ontran-ontran* antaretnis.

Pemerintah Indonesia, seperti yang dilakukan rezim Orde Baru, percaya pada premis yang sama – dan tersandung pula di batu persoalan serupa. Jika keadaan ini tak diselesaikan tuntas seperti di Malaysia, sulit bagi kita buat mengharap dapat membangun negeri tercinta ini dengan baik. Langkah awal ke arah ini adalah pengenalan. Di sini, *Tajuk* berusaha menangkap suara mereka, langsung melalui survei yang diadakan bersama CESDA-LP3ES.

Survei kecenderungan persepsi masyarakat Tionghoa tentang masalah ekonomi ini dilakukan pada 25 Juli sampai 12 Agustus 1998. Sebagai sampel, diambil 200 orang (50% lelaki dan 50% perempuan), yang penyebarannya ditentukan berdasarkan informasi mengenai kantung-kantung permukiman masyarakat Tionghoa. Responden dipilih secara purposif. Dengan demikian, tak dapat diperoleh angka margin.

Kendati demikian, dari hasil tabulasi silang, dapat diambil kecenderungan responden yang menggambarkan persepsi umum yang berkembang di kalangan etnis Tionghoa, khususnya di Jakarta. Tabulasi silang tersebut dilakukan terhadap berbagai variabel; seperti umur, jenis pekerjaan, pendidikan, strata sosial-ekonomi, agama, dan sebagainya – yang kesemuanya tampaknya sudah mewakili etnis Tionghoa yang ada saat ini dan mendatang.

Dan, karena Jakarta mampu memikat beragam etnis dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk etnis Tionghoa dari pelbagai daerah (seperti Sumatra, yang etnis Tionghoa-nya mayoritas berdialek Teochiu, dan Kalimantan, yang mayoritas Hakka) untuk tinggal, sampel yang diambil diharapkan sudah memenuhi keragaman Chinese-Indonesian yang ada. ▲

Prih Sarnianto

Profil Responden

Umur
- 18-25 (37.5%)
- 26-35 (21.5%)
- 36-45 (16.5%)
- 46-55 (14.0%)
- 55+ (10.5%)

Pendidikan
- SD (2.5%)
- SLTP (7.5%)
- SLTA (42.0%)
- Diploma (11.0%)
- S-1+ (37.0%)

Pekerjaan
- Usaha 20.0%
- PNS 1.0%
- Karyawan 39.5%
- Skl/Kuliah 26.5%
- Tak Kerja 0.5%
- IRT 9.5%
- Lainnya 3.0%

TOKOH: Ahmad Sumargono

PENGAWAL IDEOLOGI YANG KONTROVERSIAL
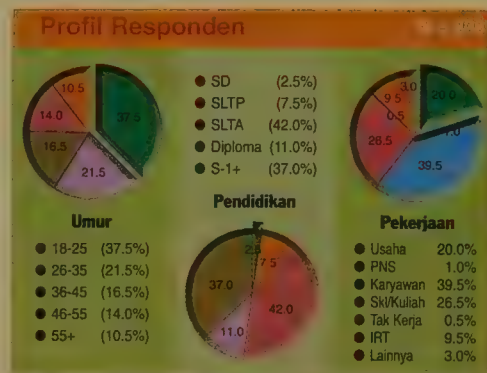
Tiada hari tanpa demo. Kesan ini melekat pada diri Ahmad Sumargono, ketua pelaksana harian Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Dalam setiap aksinya, pesan sentral yang dikumandangkan adalah menegakkan "bendera Islam". Beberapa institusi dan tokoh masyarakat – yang dituduhnya melecehkan umat – sudah pernah merasakan bagaimana didemo aktivis KISDI. Dari situ, kemudian bergulir tudingan bernada negatif: KISDI hanya menggunakan Islam untuk kepentingan politiknya.

Tidak bisa dimungkiri, satu dasawarsa terakhir KISDI memang jadi salah satu motor aksi massa yang membawa-bawa bendera Islam. Selama itu pula, Gogon, panggilan akrab Ahmad Sumargono, menjadi tokoh yang menonjol. Alhasil, pria kelahiran Jakarta 55 tahun lalu tersebut identik dengan sosok militan. Secara diametral, dia ditempatkan pada kutub berseberangan dengan Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid, yang dipersepsikan sebagai pengayom kelompok minoritas.

Tengok saja sikap KISDI menghadapi isu pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei lalu. "Isu perkosaan massal adalah fitnah yang keji dan terbukti telah merugikan bangsa dan negara Indonesia. Isu ini lebih merupakan propaganda politik yang mewakili kepentingan politik pihak tertentu," kata Ahmad Sumargono bersama KISDI dalam pertemuannya dengan Komisi I dan II DPR, Kamis (1/10) lalu.

Pada kesempatan itu, dia mendesak Tim Gabungan Pencari Fakta bekerja lebih adil dan obyektif, dalam mengumpulkan fakta seputar kerusuhan pertengahan Mei. "Termasuk meminta keterangan dari L.B. Moerdani." KISDI, ujarnya, mendengar kabar, mantan menhankam/pangab itu berada di balik kerusuhan Mei. Dalam pikiran Gogon, Beny Moerdani masih bermain di belakang layar pada pentas politik nasional.

Untuk kasus yang sama, sebelumnya Gogon juga menggugat tulisan di Majalah *Jakarta-Jakarta.* Pada edisi Juli 1998, majalah itu mengutip internet (situs The New York Times) ihwal pemerkosaan di Jakarta, Mei lalu. "*You must be raped because you are Chinese and non-Muslim,*" tutur pemerkosa kepada korban, seperti dikutip JJ. KISDI menilai, kutipan ini mempunyai tendensi untuk memojokkan umat Islam. Dalam pertemuannya dengan Dirjen PPG Deppen, akhir Juli lalu, Gogon mengancam hendak memperkarakan majalah milik kelompok *Kompas*-Gramedia tersebut.

Selain Majalah JJ, Harian *Kompas* juga pernah dituntut KISDI. Hal itu berkaitan dengan tajuk rencana *Kompas* mengenai Aljazair tanggal 28 Agustus dan 2 September 1997. Ketika itu KISDI bersama 73 tokoh masyarakat menilai, *Kompas* ceroboh, tendensius, dan membuat citra buruk terhadap Islam. Mereka menguasakan perkara itu kepada Tim Pembela Islam (TPI). Tetapi, sebelum masuk ke pengadilan, akhirnya tercapai kesepakatan damai dengan pimpinan *Kompas.*

Aksi KISDI lainnya yang bikin heboh terjadi menjelang sidang umum MPR, Maret lalu. Kala itu, Gogon – yang dikenal dekat dengan Letjen Prabowo Subianto – mendemo kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), di Jln. Tanah Abang. Mereka menuntut, lembaga bentukan Ali Moertopo itu dibubarkan. Selain itu KISDI meminta, Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi (pengurus di CSIS) diajukan ke pengadilan. KISDI menuduh, Wanandi bersaudara itu mendanai aksi-aksi radikal – seperti peledakan bom di Tanah Tinggi – untuk menggoyahkan pemerintah.

Sejatinya, kelahiran KISDI (tahun 1986) digagas Mohammad Natsir. Ketika itu, bangsa Palestina tengah berjuang menuntut kemerdekaan dari Israel. Gerakan intifadah jadi pola perjuangan pemuda Palestina. Mantan ketua Masyumi itu lalu mengundang beberapa tokoh dan ormas Islam, seperti: Dewan Dakwah, Korps Mubalig Jakarta, Al Irsyad, dan lainnya. Mereka sepakat membentuk KISDI. "Sesuai namanya, *concern* semula pada dunia luar," tutur Gogon.

Tablig akbar dan penggalangan dana dilakukan. Lalu, ketika Serbia melakukan pembantaian terhadap etnis muslim di Bosnia, aktivitas KISDI kian memuncak. Namun, beberapa tahun terakhir, ada anggota yang protes. "KISDI kok mainnya di dunia luar, di Indonesia sendiri ada umat Islam yang mengalami nasib sama seperti di Bosnia," tutur Gogon, menirukan protes tersebut. Keluhan itu merujuk pada kasus kerusuhan di Timor Timur. Waktu itu, ada masjid dibakar, dan ribuan pendatang mengungsi ke luar Bumi Lorosae.

KISDI lantas mengirim tim ke propinsi termuda tersebut. Sejak itu, mulailah se-

rangkaian aksi berdasarkan isu lokal dilakukan Gogon. Menurutnya, dana untuk setiap aksi itu berasal dari pengurus harian, yakni: Kiai Rasyid, Kholil Ridwan, Husein Umar, dan dirinya. "Tidak ada bantuan dari luar negeri untuk KISDI." Diakuinya, memang ada beberapa individu yang menyumbang. Belum lama ini, misalnya, ada kawannya, seorang pengusaha Mesir, prihatin terhadap masyarakat Sudan yang diblokade ekonominya. "Ia menyerahkan US$ 20 ribu kepada saya, lalu semuanya saya kirim ke Sudan."

Untuk merancang setiap aksinya, KISDI dibantu mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi Islam. "Kecuali, dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang berafiliasi dengan NU – **Red.**). Mungkin tidak boleh sama Gus Dur, ha… ha…." Para mahasiswa itulah yang menjadi dapur pemikiran. Karena banyak pengurus yang punya kesibukan di luar, dibentuklah pelaksana harian, dan Gogon duduk menjadi ketua. "Untuk mengejar momentum, sering kali aksi diputuskan melalui telepon. Kalau lewat rapat, kelamaan."

Lalu, apa saja persoalan yang menjadi latar belakang aksinya? "Orientasi kami ideologi dan solidaritas, sesuai dengan nama KISDI."

Menurutnya, tidak ada target politik yang dicapai. "Orang bilang, kami pengawal ideologi." Bagi Gogon, KISDI itu independen. Tidak dipengaruhi kekuatan sosial-politik mana pun. Disebutnya, Harian *Republika* milik ICMI pernah didemo. Kala itu, ada artikel tentang Nike Ardila, yang mempersonifikasikan Tuhan. "Umat marah, lalu kami meneruskan protes itu ke kantor *Republika*."

Dari orientasi itu muncul tudingan, KISDI mau membentuk negara Islam Indonesia. Gogon membantah. "Kita tidak perlu nama atau merek, tetapi secara bertahap bagaimana *syariah* Islam itu harus ditegakkan." Tentunya, penerapan *syariah* Islam itu harus adil dan dilakukan ijtihad. Gogon khawatir, bila digunakan bentuk formal negara Islam, akan seperti Malaysia. "Lihat saja dua tokoh Islam, Mahatir dan Anwar, saling *berantem*."

Lalu, benarkah Gogon anti Cina dan Kristen? "Sekitar lima belas tahun saya bekerja dengan Jan Darmadi. Apa logis tuduhan itu?" tangkisnya. Jan Darmadi, seorang pengusaha etnis Cina, memang jadi sahabatnya. Selepas Gogon dipenjara pada tahun 1980-an, karena aktivitasnya dalam dakwah Islam, Jan Darmadi menawarkannya untuk mendirikan perusahaan bagi Gogon. Namun, karena bosan, dia kembali ke perusahaan sahabatnya itu. Setelah pensiun, anak Gogon meneruskan ayahnya bekerja di perusahaan milik Jan Darmadi.

Dari silsilah keluarga, Gogon lahir bukan dari kalangan santri. Karena ayahnya meninggal kala dia masih kecil, Gogon dibesarkan oleh pamannya, yang menjadi jawara atau guru silat di Jakarta. "Saya jadi tukang berkelahi." Gogon mulai intens mendalami Islam ketika aktif di HMI. Dia membantu HMI ketika dipimpin Mar'ie Muhammad dan Ridwan Saidi pada 1960-an. Dari sini, dia aktif di Korps Mubalig Jakarta.

Di era reformasi ini, Gogon mulai melangkah jauh. Dia ikut membidani, sekaligus terpilih jadi salah satu ketua, Partai Bulan Bintang. Lantas, siapa calon presiden yang dia usulkan pada pemilu nanti. Apakah Megawati? Ternyata, bukan. Menurutnya, jika tidak ada pilihan lain, ya Amien Rais. "Tetapi, dia harus dibaiat dulu, betul *ndak* mau membela umat. Dan, jangan plintat-plintut." ▲

UWD

BIODATA

Nama:
Ahmad Sumargono

Tempat/tgl. lahir:
Jakarta, 1 Februari 1943

Istri:
dr. Yoon Sumargono, M.Sc.

Anak:
1. Muhammad Rido
2. Salman Alfarisi
3. Fatia Ulfa
4. Khusnul Khotimah
5. Shilbi Kaafah

Pendidikan
- SD s.d. SMA di Jakarta
- Fakultas Ekonomi UI (1963-1985)

Pekerjaan
Karyawan PT Jan Darmadi Corporation (1973-1980)
General Manager PT Autonesia Tripama (1984-1990)
PT Jan Darmadi Corporation (1990-1997)

Aktivitas
- Staf PB HMI
Korps Mubalig Jakarta
KISDI (ketua pelaksana harian, 1986-sekarang)
Perhimpunan Pekerja Muslim Indonesia (penasihat)
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Ketua Partai Bulan Bintang

ADEK BERRY

Revolusi yang Dimulai dari

Karya-karya *tanztheatre* dari Jerman atau pemusik kontemporer Theo Loevendie dari negeri Belanda sarat dengan pesan-pesan perubahan di dunia tari dan musik. Kian banyak produk seni pertunjukan yang bersifat multibudaya.

KADANG, kita yang berada jauh di luar lingkaran elite politik negeri ini jadi tak habis pikir. Apa dasarnya sehingga seorang B.J. Habibie, presiden Indonesia ketiga yang pengalaman internasionalnya tak perlu diragukan lagi, tiba-tiba memberikan *warning* yang mengejutkan. Habibie, yang selama ini lebih disibukkan oleh langkah-langkah buat menarik simpati yang luas, sekonyong-konyong banting stir, dan kasih peringatan tegas tentang adanya bibit-bibit kelompok revolusioner dan radikal di tengah-tengah masyarakat.

Kita pun jadi membayangkan yang tidak-tidak. Kalau dia sempat mengintip satu-dua pertunjukan yang digelar para artis kontemporer Indonesia dan mancanegara dalam *Art Summit II Indonesia* di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), atau di Graha Bhakti Budaya, dalam tiga minggu terakhir ini, tidakkah air mukanya akan bersemu merah? Karena, siapa pun yang berani berharap akan menikmati karya-karya di zaman renaisans dan barok yang serba simetris, rapi, dan meletakkan unsur keteraturan di atas segalanya, seperti dijumpai dalam komposisi J.S. Bach dan Friedrich Handel, disarankan bersiap-siap untuk kecewa. Dari katalog acaranya saja, kita

ADEK BERRY

ADEK BERRY

dari AtasPanggung

sudah bisa mengendus betapa "radikal" dan "revolusioner"-nya pertunjukan teater, musik, dan tari, yang digelar.

Kelompok *tanztheatre* asal Bremen, Jerman, yang lahir dalam suasana revolusioner persis pada saat terjadinya revolusi mahasiswa Jerman (Barat) 1966-1968, tak bisa melepaskan diri dari pengaruh suasana yang penuh pemberontakan terhadap *status quo*. Memang benar, tak ada gas air mata dan bom molotov yang dilontarkan ke tengah-tengah panggung, dan tak ada anak-anak muda yang mengarak gambar fotogenik Che Guevara yang berambut gondrong dan mengenakan baret *trade mark* seorang marxis revolusioner. Tetapi, dari bentuk-bentuk perlawanan yang mereka berikan terhadap tradisi balet klasik (Barat), kita bisa menyaksikan serangkaian pembaharuan yang tak tanggung-tanggung besarnya.

Ketahuilah, mereka telah mengizinkan gerak-gerik hidup keseharian memasuki panggung-panggung pertunjukan, memperbolehkan penari-penarinya berbicara satu sama lain dalam dialog, atau *ngoceh* sesuka hati (sesuatu yang hanya mungkin kita dapatkan dalam teater), menyingkirkan sepatu balet serta korsetnya jauh-jauh, dan menari dengan kaki telanjang. Perhatikan pula, mereka telah mengurangi rasa hormatnya pada teknik lompatan-lompatan tinggi yang menyimbolkan perseteruan (baca: alienasi) tak berkesudahan antara manusia modern dan gravitasi bumi, tetapi telah menjadi salah satu tonggak kebanggaan dunia balet klasik. Sebaliknya, mereka banyak mengeksplorasi gerakan-gerakan yang memperlihatkan terjalinnya suatu keakraban antara manusia dengan bumi pertiwinya melalui "permainan-permainan bawah". Dengan mengandalkan otot pinggang dan punggungnya yang kuat, para penari membungkuk, kemudian secepat kilat menengadahkan muka dan dadanya, serta bergulingan di lantai.

Dalam sebuah nomor tarinya yang diberi judul *Frauenballett* (tarian perempuan, 1996), koreografer Susanne Linke – yang memberikan tempat istimewa pada gerakan-gerakan ritmis para penari perempuannya yang memperagakan aktivitas keseharian ibu rumah tangga seperti mencuci, membilas, menjemur cucian, dan *ngerumpi* – menorehkan pesan-pesan yang bersandar pada feminisme. Sementara para wanita harus bekerja banting tulang, demikian Susanne yang berusia 54 tahun itu menyusun skenarionya, dua orang penari pria tampak duduk ongkang-ongkang kaki sambil berdiskusi panjang lebar, tepat di tengah-tengah panggung.

Kita serasa berhadap-hadapan dengan sebuah dunia yang telah berubah menjadi *showroom* raksasa, di mana semua orang dipersilakan untuk mengekspresikan diri masing-masing, tanpa harus takut diciduk undang-undang anti subversi. Ekspresi-ekspresi verbal, celetukan-celetukan konyol, atau pelesetan jargon-jargon politik yang dilontarkan di tengah-tengah pementasan-pementasan karya Susanne Linke, sering kali menggunakan instrumen empat bahasa:

Jerman, Inggris, Spanyol, dan Indonesia. Sementara itu, dalam bidang yang berbeda, ada komponis Jin Hi Kim yang berkolaborasi dengan *No World Improvisation* yang mendemosntrasikan kemampuan alat-alat musik tradisional *pipa* Cina, *djembe* dari Senegal, dan *komungo* dari Korea, untuk saling menyapa, *ngobrol*, dan saling mengenal.

Selain itu, kita juga diberi kesempatan untuk menyaksikan kerja keras seorang komponis asal Belanda yang namanya cukup populer, Theo Loevendie, dalam memadukan unsur-unsur "multilingual-multikultural" pada musiknya. Ia mengerahkan segenap kemampuan musiknya demi mempertahankan ide "keberagaman adalah berkah", lewat suatu perkawinan yang janggal antara instrumen harpa, mandolin, dan obo, yang menelusuri liku-liku melodi, dengan *tarbouka*, tambur berlapis kulit kambing tipis asal Turki yang tugasnya menjaga irama.

Kita tak bisa menganggap sepi asumsi, yang mengatakan, suasana revolusioner yang serba tanggung memegang peranan sangat besar dalam pembentukan karakter musik seorang Theo Loevendie, 68. Ketika usianya mulai menyentuh 20-an tahun, ia menyaksikan pemandangan yang tak terlalu menyenangkan di mana para seniman musik Negeri Kincir Angin celingukan mencari jati diri yang tinggal "tulang-tulang berserakan", setelah identitasnya diratakan dengan tanah oleh tentara pendudukan Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Namun, ketika rekan-rekan musikus berduyun-duyun menyatakan sumpah setianya kepada aliran serialisme – yang menggunakan dua belas nada dan masing-masing dengan interval satu nada – di bawah tampuk komando Arnold Shoenberg, ia tak berminat untuk bergabung. Sebaliknya, ia tak sanggup berpisah dari *jazz*, yang dicintainya sampai ke tulang sumsum. Di samping, ia juga tak bisa menampik, hatinya lebih tergerak ketika mendengarkan musik-musik eksotis dari luar negeri, terutama dari Afrika dan Timur Tengah. "Persoalan multibudaya sudah marak sejak 1970-an, sewaktu tokoh teater seperti Peter Brook, Eugenio Barba, Grotowsky, dan July Taymor, menyerbu ke Asia untuk mencomot teknik dan materi buat karya-karya mereka," kata pengamat tari, Sal Murgiyanto, dalam sebuah kesempatan.

Memang, apa yang kita dapati dalam *Art Summit II* ini tak lain dari produk yang mengalir dari tonggak perubahan-perubahan sejarah. *Tanztheatre*, yang lahir di sela-sela *setting* revolusi mahasiswa 1968, dan Loevendie, berawal dari pencarian identitas komponis seusai pendudukan Nazi Jerman dan penolakan terhadap nasionalisme Belanda sebelum Perang Dunia II, dan tari *butoh*, yang muncul pada gerakan mahasiswa Jepang pada tahun 1960-an. Simak saja, betapa revolusionernya tarian *butoh*. Menurut penari *butoh* Yukio Wagari, tubuh penari merupakan ruang kosong yang bisa "diisi" oleh pelbagai hal melalui suatu proses identifikasi diri terhadap benda-benda atau proses di sekelilingnya – sesuatu yang hanya eksis dalam benak pikiran si penari.

Namun, di lain pihak, mungkin kita bisa pahami seandainya kata "revolusioner" lebih sering mengundang keterkejutan ketimbang keingintahuan. *Art Summit II* memang mengetengahkan produk-produk seni pertunjukan yang untuk sebagian besar orang sangat membingungkan. Seni alternatif yang dipertontonkan tidak lagi berpijak pada pakem-pakem kesenian yang sudah mentradisi secara turun-temurun, sehingga bisa dipahami apabila rasa asing dan aneh – di samping "revolusioner" –menyergap dengan tiba-tiba.

Tetapi, musik berbicara dengan bahasanya masing-masing. Dan, karena itu, jamak saja apabila sering terjadi salah paham atau salah menerjemahkan sinyal-sinyal musikal di antara para penganut mazhab kontemporer dan mazhab klasik, atau antara pop dan *jazz*. Dan, kalau dipikir-pikir, tampaknya tak ada kalangan pemusik yang lebih siap dari pemusik kontemporer macam Loevendie untuk memahami keterbatasan bahasa musikal yang mereka gunakan. Mereka tidak gampang puas sebelum melakukan percobaan-percobaan yang "aneh" dengan bunyi.

Tipis-tebalnya rasa ketertarikan orang pada jenis musik tertentu juga bergantung pada siap-tidaknya konsumen musik kita menerima *surprise* suatu disonansi – rentetan nada aneh yang kedengaran sumbang karena tak pernah tercatat dalam perbendaharaan musik masing-masing pribadi. Dan, untuk itu, tampaknya kita tak melihat adanya pilihan yang lebih baik daripada membangkitkan gairah petualangan para konsumen musik nasional untuk menjelajahi setiap sudut belantara musik.

Tetapi, untunglah, dalam dataran musik ini berlaku juga pemeo "tak kenal maka tak sayang". Dalam sebuah tulisannya yang baik, *Perceptive Listening*, Gary M. Martin mengungkapkan keyakinannya: pengetahuan dasar mengenai musik merupakan bahan bakar yang dapat mengobarkan semangat seseorang untuk mengeksplorasi keragaman dalam dunia musik. Dengan modal yang satu ini, segenap perbedaan selera yang dibentuk oleh perbedaan lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, strata kelas dalam masyarakat, serta etnosentrisme, dapat diperangi. Dalam buku yang sama, Gary juga mengemukakan: dari waktu ke waktu, penolakan masyarakat terhadap gejala-gejala disonansi semakin berkurang.

Dulu, gara-gara saratnya unsur disonansi di dalamnya, *The Rite of Spring*, karya komponis abad ke-20 Igor Stravinsky, yang sangat dihormati dewasa ini, pernah menjadi sasaran caci maki masyarakat serta para kritikus musik. Sekarang, telinga para penggemar musik pop tidak merasa gatal-gatal lagi ketika mendengar akor miring dan nada-nada berinterval setengah digunakan dalam musiknya. Di mana-mana, pengaruh *jazz* sudah diterima dengan tangan terbuka. Terakhir, setelah melalui serangkaian eksplorasi-eksperimentasi yang pantang mundur, para penganut fanatik tradisi kromatis-diatonik mulai tidak terganggu lagi dengan nada-nada *slendro pelog* yang terdapat pada gamelan Jawa. Bukankah perubahan yang revolusioner telah berlangsung? ▲

Idrus F. Shahab

Santet

PADA 1672, di kota kecil Salem, Inggris, seorang bocah kesurupan setelah mengikuti upacara ritual *voodoo* yang dilakukan sekelompok gadis di sebuah hutan. Si bocah bicara *nyerocos* tak karuan, terkadang pingsan, terkadang siuman. Saat siuman, matanya *mendelik* (memelotot), lalu berteriak-teriak histeris mengatakan melihat setan. Seluruh penduduk di kota kecil itu menjadi geger. Maka, operasi pembersihan terhadap siapa-siapa yang terlibat dalam ritual itu dilancarkan. Mereka, yang dianggap terlibat atau dituduh sebagai tukang sihir, ditangkap dan digebah, sebagian lainnya bahkan harus tewas di tiang gantungan.

Arthur Miller, dramawan kenamaan Amerika, menulis kisah itu dalam lakon *full length play* tiga babak, *The Crucible* (1953). Lakon yang dimaksudkan Miller sebagai kritik politik terhadap senator McCarthy yang mengejar-ngejar komunis itu pernah dipentaskan Wahyu Sihombing (almarhum) di TIM pada 1976, dan juga difilmkan dengan judul sama oleh sutradara Nicholas Hyttner (1994). Film yang dibintangi Daniel Day-Lewis dan Winona Ryder ini, selain tampil sangat dramatis, juga sangat mencekam.

Tetapi, itu di film. Sedangkan, di daratan Eropa bahkan sampai memasuki abad ke-20 kehidupan *voodoo* (ilmu sihir asal Afrika Hitam) masih ada. Persis seperti halnya di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, sampai kini masih berpraktek apa yang disebut *hungan* (dukun santet laki-laki) dan *mambo* (dukun santet perempuan). Begitu panjangnya "sejarah" dunia sihir-menyihir itu, menohok jauh ke belakang sejak zaman Firaun, dan entah sampai kapan berakhir.

Dan, jika di Eropa abad pertengahan para penyantet ada yang dihukum bakar, tidak hanya di Eropa tetapi di mana-mana telah muncul satu paradigma yang sama: bangsa penyantet adalah penyembah ilmu hitam. Itu sebabnya, dalam *The Crucible*, "operasi pembasmian" terhadap penyembah ilmu hitam di Inggris abad ke-16 itu dianggap sah. Tetapi, pada akhir abad ke-20 ini, kisah yang "mirip" dengan itu juga sedang marak-maraknya, dan tempatnya tidak lagi di Inggris.

Diberitakan, sebuah "aksi pembersihan" terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun santet di Jawa Timur dilancarkan oleh orang-orang berpakaian ala *ninja*. Begitu kejamnya pola pembersihan itu, sampai-sampai para ulama yang bukan dukun santet pun difitnah, diberangus, dan kemudian dihabisi nyawanya untuk tujuan-tujuan yang belum diketahui.

Siapa sesungguhnya orang yang dijuluki sebagai *perewangan*, tukang sihir, *tenung*, atau tukang santet? Dalam obrolan seharihari, kita pernah (atau sering?) mendengar adanya orang sakit atau meninggal lewat proses yang tidak wajar. Biasanya, si korban didahului oleh penderitaan hebat berkepanjangan, dan tak dapat disembuhkan dokter. "Ketika si penderita dibawa ke orang *pinter*, ternyata di tubuhnya ditemukan sejumlah paku berkarat, jarum, dan logam tajam lainnya," begitu stereotip kisah tentang orang disantet.

ANTOK SUGIANTO

Bahwa kenyataannya manusia hidup itu tidak hanya berhadapan dengan benda-benda *wungkul* (nyata) tetapi juga dikepung oleh imajinasinya sendiri, kisah-kisah tentang santet (juga hantu, *sundelbolong, wewegombel, pocong, kunthilanak*, dan sebangsanya) dapat hidup pula dalam diri manusia, sepanjang imajinasi tentang itu masih ada. Dan, ketika ada orang yang dengan piawai mengembus-embuskan masalah *perewangan* ini lewat fiksi-fiksi horor demi "keuntungan ekonomis" seperti para produser film, imaji irasional "hantu-santet" tambah *ngendon* di alam bawah sadar mereka.

Kita terkadang jumawa "berteori": kepercayaan yang kental kepada kekuatan mistik lebih banyak dimiliki mereka yang berpendidikan cekak dan hidup dalam sistem sosial "tradisional". Tetapi, "teori" ini menjadi tidak patut ketika kita dapat menjumpainya di tengah masyarakat modern perkotaan, bahkan dalam kalangan yang sering disebut intelektual. Datanglah sekali-sekali ke paranormal (orang *pinter*) dan amati, tidak semua pasien yang mengeluh terkena guna-guna datang dari kalangan "bawah", "tindak berpendidikan", dan "tidak rasional".

Itu artinya, setuju tidak setuju, dunia semacam itu dipercaya ada, yang sering dianggap sebagai pengejawantahan sikap irasionalitas seseorang kepada hidup yang terus-terusan dilanda kebuntuan, putus asa, atau yang sejenisnya, sebagai latar. Ketika dunia semacam ini – termasuk isu-isunya – makin meruyak sebagai akibat makin meluasnya latar penyebabnya, tidak mengherankan jika dunia *perewangan* – termasuk santet di dalamnya – menjadi subur.

Dalam situasi semacam itu, barangkali, kebencian yang kita pendam terhadap orang-orang yang dimasukkan dalam kelas kaum penyantet itu membuat kita lengah. Seperti setengah sadar kita melihat, para *ninja* bebas *merangsek* ke depan dengan sebuah daftar panjang. Ketika para korban yang sudah wafat itu ternyata sebagian besar ulama, dan para *ninja* bertepuk seru, kita tiba-tiba menangis. ▲

Djoko Quartantyo

JAS & DASI dengan

YOSEANO WAAS

MANUSIA terbentuk oleh lingkungan. Tapi, ada hal lain yang ikut membentuk jati diri Yoseano Waas, 63. Itulah setelan jas – lengkap dengan dasinya – yang, bisa dibilang, telah menjadi seragam keseharian anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR/MPR ini. Yos, sapaan akrabnya, memang lama dikenal sebagai penggemar berat busana jas. Mulai rajin mengoleksi sejak 1960-an, hingga kini tak kurang dari 200 jas dan 200 dasi padat memenuhi ruangan kamarnya.

Berbeda dari umumnya para pengguna jas, koleksi Yos sarat dengan sederet nilai lebih. Selain bakal kainnya yang banyak diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia, juga karena jas-jas itu meyoritas terlahir sebagai hasil rancangan Yos sendiri. Bahkan, koleksi yang *made in* luar negeri sekalipun – terutama dari bahan *wool* dan rayon – ia usahakan membelinya dalam bentuk kain, agar bisa didesain sesuai keinginan. "Sejak masih aktif di film, saya selalu berusaha mendesain busana sendiri untuk dikenakan dalam film-film saya," tutur aktor gaek yang sudah malang-melintang di dunia perfilman sejak 1950-an itu.

Telanjur menjadi "penggila" jas, Yos tentu tak mau sembarangan dalam memilih kain. Itu sebabnya, setiap kali bepergian ke daerah – saat syuting film atau melawat sebagai anggota DPR – ia selalu menyempatkan diri untuk berburu kain langsung ke perajinnya. Katanya, selain lebih murah harganya, keaslian kain pun lebih terjamin. "Dalam memilih kain, orientasi saya tidak pada mahalnya, tetapi lebih pada pantas-tidaknya saya kenakan," ujar Yos, yang mengaku hafal sejumlah tempat penjualan tenun di daerah-daerah itu.

Mencermati koleksi Yoseano, memang, seperti dibawa ke sebuah museum kain tenun. Di samping kain-kain dari Jawa dengan berbagai motif, "museum" Yos juga dipenuhi jas-jas yang terbuat dari kain bikinan perajin Lampung, Padang, Medan, Aceh, Ujungpandang, hingga Timor Timur. "Meski kualitasnya amat relatif, tenun daerah sangat kaya dengan motif dan ornamen. Di sini saya bangga, karena motif yang kaya itu ternyata mampu mengilhami saya untuk membuat jas-jas dengan bahan tenun," tutur penggemar warna merah, ungu, biru, hijau, dan toska, itu.

Yang pasti, ketelatenan Yos dalam berburu tenun orisinal membuat harga jas-jasnya menjadi murah. Kecuali satu-dua yang bernilai jutaan (utamanya yang bikinan luar negeri dan dibeli jadi), harga koleksi yang lain hanya berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 400 ribu per set. Maklum, konsep "pahe" tak cuma ia terapkan dalam memburu kain dan membuat desain, tetapi juga dalam menjahitkan hasil rancangannya. "Saya lebih suka pergi ke tukang jahit biasa, bukan ke tailor yang upahnya kelewat mahal," kata lelaki berdarah Maluku-Manado kelahiran Tarakan, 22 Juni 1935, ini.

Aktif di sejumlah organisasi dan yayasan – antara lain SOKSI, FKPPI, dan Yayasan Putra Sapta Utama – Yos tentu bukanlah perancang profesional. Toh, menilik deretan karyanya, Yos jelas seorang perancang yang amat peka terhadap perkembangan mode. Yos sendiri berujar, desain-desainnya sangat dipengaruhi selera zaman. Misalnya, jas dengan kerah kancing tiga, kancing satu, atau kancing banyak. "Saking banyaknya model yang saya ciptakan, banyak orang meniru gaya jas saya. Saya pernah dengar, ada orang bawa kain ke tailor dan minta jasnya dibuat seperti model Pak Yos," ujar pensiunan aktor yang sudah membintangi lebih dari 100 film ini.

Yoseano pantas berbangga. Apalagi, selain apresiasi positif dari rekan sejawatnya, jas-jas Yos pun acap memantik perhatian bule saat dipakai di luar negeri. Dalam banyak kesempatan Yos sengaja atraktif dalam berjas-ria saat di luar negeri. Usai mengikuti pameran makanan sedunia di Chicago (1977), misalnya, Yos melanglang ke sejumlah negara di Eropa dan Amerika. Selama itu, beraneka jas bermotif batik Yogya dan Taninbar Sumatra Barat sengaja ia jadikan busana sehari-hari. "Saya ingin, tenun daerah kita terkenal di luar negeri, sehingga penghasilan perajin tenun Indonesia bisa terdongkrak."

Bagi Yoseano, ketertarikannya untuk memakai dan mengoleksi jas, memang, tak lepas dengan urusan penampilan. Katanya, siapa pun dia – entah seniman, bisnisman, maupun politikus – faktor penampilan sangat menentukan posisi *bargaining*. "Secara pribadi, saya ingin memiliki karakteristik khusus dalam berpenampilan. Buat saya, berbusana rapi juga termasuk bagian dari strategi politik, di mana orang respek kepada kita tanpa harus bicara," tutur peraih predikat eksekutif berbusana terbaik 1998 ini.

Dalam konteks pergaulan, berpakaian rapi bisa juga berarti menghormati orang lain. Setidaknya, membuat orang lain bahagia dan respek terhadap kita. Menyitir pepatah "busana membentuk manusia", Yos berpendapat, orang yang berbusana rapi semestinya bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk disesuaikan dengan rapinya nurani si pemakai. "Dengan berbusana rapi, saya mendisiplinkan diri pribadi. Rapi dalam ketepatan

waktu, janji, tutur bahasa, dan lainnya," papar politikus yang juga mantan wartawan ini.

Yos memelihara koleksinya juga dengan tertib. Selain digantung berjajar di dalam lemari, ada sebagian lain yang memang sengaja digantung di luar. Ini, umumnya, dilakukan untuk jas-jas yang sudah di-*laundry*. Menurut Yos, kalau terlalu lama disimpan di dalam lemari, jas-jas itu malah lembab dan kusut. "Sementara, jika ditaruh di luar, sirkulasi udara yang baik membuat jas tampak baru, di samping lebih memudahkan dalam memilih jas yang hendak dipakai."

Kendati koleksi Yos kelewat berjibun, *ehm*, jangan harap Anda bisa ikut mewarisinya. Setiap jas punya nilai dan kesan tersendiri – merefleksikan perjalanan kariernya. "Karena itu, sedapat mungkin jas itu jangan sampai berpindah tangan. Sebab, 50 tahun kemudian, ia bakal punya nilai, meski dipakai anak atau cucu saya. Jadi, dari sepotong jas, kita bisa menelusuri jejak karier seorang seniman atau politikus. Dan lagi, bukankah, semakin lama barang disimpan, harganya juga semakin tinggi?"

Yang menarik, koleksi jas dan dasi Yoseano kebanyakan berwarna cerah dan cenderung *ngejreng* – seperti merah, ungu, kuning, *pink*, dan oranye. Ini berbeda dengan umumnya lelaki dewasa, apalagi seusia Yos, yang cenderung menyukai warna-warna gelap. "Saya memang penggemar busana atraktif, karena itu bagian dari trik psikologi. Apalagi, walau sering memakai jas dengan warna *ngejreng*, saya tidak pernah dikoreksi orang bahwa jas yang saya pakai tidak pantas."

Dalam memilih corak dan warna kain, ia tak pernah bisa dipengaruhi pendapat orang, termasuk istri sendiri. "Saya memilih kain sesuai selera saya sendiri. Saya tidak pernah tertarik untuk meniru kesukaan orang pada motif-motif tertentu. Sebab, ini kuncinya, saya ingin menjadi diri saya sendiri," cetus bapak tujuh anak ini, seraya tergelak. ▲

Eni Saeni/NJU

DAHLAN RP

WARNA NGEJRENG
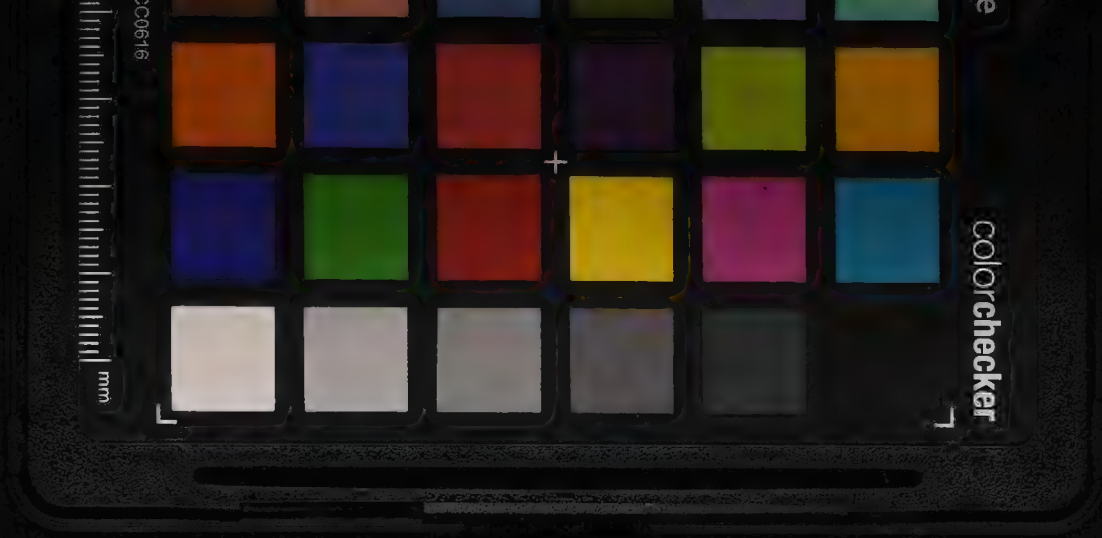
Memilih Pantalon

Tubuh Pendek, HINDARI MOTIF KOTAK-KOTAK

Celana panjang atau pantalon merupakan busana sehari-hari pria. Jangan salah pilih kalau ingin tampil rapi dan serasi.

ISTIMEWA

CELANA panjang identik dengan busana pria, seperti halnya rok yang identik dengan busana wanita. Hampir setiap hari pria mengenakan celana panjang, baik untuk kesempatan formal maupun kasual. Bahkan, pantalon sudah menjadi seperti *dress code* tak tertulis untuk pergi ke kantor.

Model celana panjang untuk pergi ke kantor atau ke acara-acara formal cenderung klasik dan elegan. Di bagian depan pinggang diberi dua lipatan (*pleats*) yang membuat pemakainya merasa lebih nyaman untuk duduk maupun bergerak. Benda-benda yang Anda masukkan ke dalam kantung juga tidak tampak menonjol bila mengenakan pantalon ber-*pleats*. Untuk pergi ke kantor, upayakan mengenakan celana panjang model ini daripada memilih pantalon yang ketat di bagian depan.

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Bila hendak membeli celana panjang, perhatikan *pleats*-nya. *Pleats* yang bagus akan "jatuh" dengan rapi ke bawah, tidak tampak terbuka maupun miring. *Crease*

(lipatan setrika) di bagian depan pipa celana harus lurus, membelah tempurung lutut dan jatuh tepat di bagian tengah sepatu Anda. Bila *crease* tak jatuh tepat di tengah, mungkin teknik penyetrikaannya salah atau ada jahitan yang keliru di bagian dalam celana panjang Anda.

Crease di bagian bawah celana panjang mesti sedikit tertekuk di atas sepatu. Dengan demikian, panjang pantalon Anda cukup untuk menutupi kaus kaki ketika Anda melangkah. Lebar bagian bawah pantalon paling tidak harus menutupi dua pertiga dari panjang sepatu.

Bagian bawah pipa celana bisa dilipat ke dalam (dikelim) atau dilipat keluar (*cuff*). *Cuff* membuat bagian bawah pantalon menjadi lebih berat sehingga *pleats* dan pipa celana menjadi lebih bagus jatuhnya. *Cuff* sebaiknya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, ukurannya harus proporsional secara keseluruhan. Pria yang bertubuh pendek sebaiknya mengenakan celana yang lebar *cuff*-nya sekitar 3,5 cm. Sedangkan, yang bertubuh tinggi bisa mengenakan *cuff* yang lebarnya sekitar 4,5 cm.

Motif garis-garis tipis pada celana dapat membuat tubuh yang pendek menjadi terlihat lebih tinggi. Hindari motif kotak-kotak besar bila Anda bertubuh pendek. Sebaiknya, pilih pantalon polos daripada pantalon yang bermotif kotak-kotak. Paduan warna kemeja dan celana jangan terlalu kontras sehingga membuat tubuh Anda tampak "terpotong". Bila Anda ingin mengenakan jas, usahakan warna jas sama dengan warna celana. *Suspender*, selain membuat Anda tampak lebih modis, juga membantu tubuh agar terlihat lebih tinggi. ▲

Ratih W. Teguh

ISTIMEWA

AGAR SERASI DAN PAS DI BADAN

TIDAK semua orang mempunyai tubuh dan perawakan seperti model, yang pantas mengenakan busana dan aksesori apa pun. Setiap orang itu unik. Untuk itu Anda perlu mengenali diri, agar bisa tampil benar dan serasi. Berikut ini, ada beberapa patokan berbusana yang pantas dengan bentuk tubuh Anda:

TUBUH PENDEK DAN RAMPING

Jaket/Jas:
1. Pundak harus lebih tinggi dan sedikit lebih lebar.
2. Jas jangan terlalu panjang, menutupi pantat tanpa "memotong" tubuh menjadi dua.
3. *Single breasted*, *coats* berkancing tiga bisa membuat tubuh lebih tinggi.
4. Kenakan motif garis-garis vertikal.

Celana Panjang:
1. Kenakan warna celana panjang yang tidak terlalu kontras dengan kemeja.
2. Ban pinggang celana sebaiknya dikenakan sedikit di atas pinggang, agar kaki terlihat lebih panjang.
3. *Cuff* (sekitar 3,5 cm)

Aksesori :
1. Kemeja bergaris tanpa kerah dan manset yang berwarna kontras.
2. Kerah dengan sudut yang lebar.
3. *Suspender* membuat tubuh terlihat lebih tinggi.
4. Dasi bergaris dengan simpul *four in hand.*
5. Sepatu bersol agak tinggi.

TUBUH PENDEK DAN GEMUK

Jas:
1. *Coats* berpotongan lurus.
2. *Single breasted* dengan dua kancing lebih baik daripada dengan tiga kancing, juga lebih baik daripada *double breasted.*
3. Bahan busana harus lembut, seperti 100% *wool*, dan berwarna gelap.
4. Gunakan warna gelap atau bergaris-garis vertikal yang agak tebal.

Celana Panjang:
1. Ban pinggang celana dikenakan tepat di pinggang, jangan di bawah pinggang.
2. Kenakan celana panjang yang ber-*cuff.*

Aksesori:
1. Kerah berwarna putih yang kontras dan manset lengan bisa mengurangi kesan tinggi pada tubuh.
2. Ikat pinggang dapat "memotong" tinggi tubuh.

TUBUH TINGGI

Jas:
1. Potongan pundak melebar.
2. *Double breasted* dengan kancing berada di pinggang, bukan di bawah pinggang.
3. *Single breasted* dengan dua kancing.
4. Bahan harus tampak tebal dengan motif besar-besar dan garis-garis horizontal.

Celana Panjang:
1. *Pleats* harus dalam.
2. *Cuff* 1 3/4 inci.

Aksesori:
1. Kerah dan manset lengan berwarna putih yang kontras.
2. Kerah melebar.
3. Kemeja bergaris-garis renggang horizontal.
4. Ikat pinggang bisa "memotong" tubuh yang tinggi.
5. Sepatu tanpa hak

TUBUH ATLETIS

Jas:
1. Jangan mengenakan bantalan bahu (*padding*).
2. *Single breasted* dengan dua kancing, hindari yang tiga kancing.
3. Bahan yang agak tebal dan solid.
4. Motif garis dengan jarak garis yang tidak kurang dari 3/4 cm.

Celana Panjang:
1. Ban pinggang pantalon dikenakan tepat di pinggang.
2. Tak perlu *pleats.*

Aksesori:
1. Kerah kemeja yang sudutnya tidak melebar.
2. Dasi dengan warna solid, bisa bermotif garis atau gambar.
3. Kemeja dengan garis-garis yang tegas.
4. Sepatu yang bagian depannya melebar, bukan meruncing.

Ratih W. Teguh

Jangan Remehkan KAUS KAKI

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok dengan *suit*-nya atau kaus kakinya terlihat merosot ketika dia duduk, bisa dipastikan bahwa penampilannya akan terlihat sedikit "cacat".

Kaus kaki, sepatu, dan busana, memang perlu saling menunjang untuk penampilan yang serasi. Bila dipandang dari atas ke bawah, celana panjang, kaus kaki, dan sepatu, harus "mengalir", tidak terputus oleh nuansa warna yang berbeda-beda. Bila Anda mengenakan celana panjang biru tua, kenakan kaus kaki yang juga berwarna biru tua.

Tetapi, bila celana panjang warna khaki yang jadi pilihan, kaus kaki warna *beige* tampak serasi dengan celana Anda. Celana panjang cokelat tua bergaris-garis bisa dipadukan dengan kaus kaki polos warna khaki. Sementara, celana panjang abu-abu bisa dikombinasikan dengan kaus kaki yang juga berwarna abu-abu.

ISTIMEWA

Walaupun celana panjang, kaus kaki, dan sepatu, harus merupakan suatu kesatuan, bukan berarti bahwa Anda harus mengenakan kaus kaki polos. Kaus kaki bermotif juga bagus dikenakan, asal warnanya tetap sesuai dengan warna celana panjang Anda. Yang perlu diingat, kenakan kaus kaki polos bila Anda memakai celana panjang bermotif.

Selain itu, semakin rapi busananya, kaus kaki yang dipilih juga harus semakin halus dan lembut. Bila Anda mengenakan busana formal yang bahannya halus, pilihlah kaus kaki dengan bahan yang halus dan tipis. Jangan memilih kaus kaki yang bahannya tebal dan terlihat agak berbulu untuk celana kerja Anda yang terbuat dari *wool* halus. Bila Anda mengenakan busana kasual atau busana olahraga, kaus kaki yang terbuat dari katun dan bahannya sedikit tebal akan sangat nyaman dan serasi dengan busana Anda.

Upayakan tidak memakai kaus kaki terlalu pendek, agar kulit betis tidak terlihat ketika Anda duduk. Inilah etiket berbusana yang perlu Anda perhatikan. Kaus kaki yang karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak mengeluarkan bau tak sedap. ▲

ISTIMEWA

Ratih W. Teguh

Sisipan

Ada

HURU-HARA Muncul JAYABAYA

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-
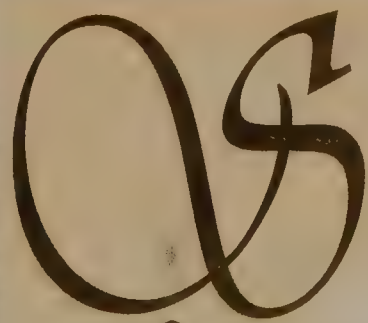
Setiap kali bangsa ini dilanda *ontran-ontran* (huru-hara), nama Jayabaya kembali muncul. Raja Kediri ini diyakini – utamanya oleh masyarakat Jawa – sebagai futuris yang mampu meramalkan apa yang bakal terjadi. Kehadiran tentara Jepang (1942), misalnya, sudah diramal Jayabaya. "Pasukan katai" ini akan menggempur penjajah Belanda, dan sesudah itu mereka hanya akan bertahan di Jawa seumur jagung (3,5 bulan).

Jauh sebelumnya, ketika revolusi kemerdekaan sedang berkecamuk, ramalan Jayabaya silih-berganti disitir pula. Mulai dari Bung Karno, H.O.S. Tjokroaminoto, sampai Muhammad Husni Thamrin. Umumnya, isi ramalan mengungkapkan, "Usai *ontran-ontran* akan muncul Ratu Adil; yakni seseorang yang diyakini akan membawa kesejahteraan bagi bangsa, menuju masyarakat adil makmur."

Di penghujung akhir abad ke-20 ini, kita kembali dilanda *ontran-ontran*. Bukan saja berupa krisis moneter berkepanjangan yang meluluh-lantakkan roda ekonomi, tetapi juga kemudian disusul kerusuhan sosial, peningkatan kejahatan, keberingasan massa, ausnya tata nilai, dan macam-macam lagi – yang meresahkan semua pihak. Benarkah ramalan Jayabaya terkait dengan segala *ontran-ontran* ini? Ikuti *Sisipan* berikut.

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak megeluarkan bau tak sedap. ▲

Ratih W. Teguh

ISTIMEWA

Sisipan

SIKLUS RAMALAN ITU KEMBALI BERPUTAR

ADA semacam mitos di Jawa, ramalan Jayabaya itu *maujud* (ada). Siapa yang mula-pertama meluncurkan ramalan-ramalan yang diklaim sebagai "asli dari Prabu Jayabaya" itu? Masih dalam perdebatan. Tetapi, dalam tataran masyarakat Jawa, ramalan Jayabaya dipercaya sebagai keniscayaan. Bahkan bukan hanya rakyat jelata, kaum bangsawan Jawa kontemporer saat ini pun masih banyak yang percaya terhadap ramalan itu.

Kita tahu, ketika Prabu Jayabaya masih hidup, Republik Indonesia belum ada. Itu sebabnya, perspektif geografis Sang Prabu dalam meramal hanya meliputi kawasan Pulau Jawa. Cuma, anehnya, seiring perjalanan waktu, tiba-tiba kawasan ramalan itu meluas hingga mencakup seluruh wilayah RI, bahkan meluas sampai ke mancanegara. Kejatuhan pasukan Sekutu di Asia-Pasifik, misalnya, dikait-kaitkan dengan adanya ramalan Jayabaya sebelumnya.

Di tanah air, kapan ramalan Jayabaya itu muncul? Tidak selalu *ajeg* (konstan). Seperti siklus, kadang ia muncul, kadang lengser (surut). Pada saat-saat bangsa ini dilanda *ontran-ontran* yang hebat, sebutlah misalnya ketika menjelang rezim Orde Lama tumbang (1966), ramalan Jayabaya muncul dan dikaitkan dengan akan lahirnya seorang

PDAT

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

dis-
man

a di
yang
0%.
man
ing-
p.▲

Teguh

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-
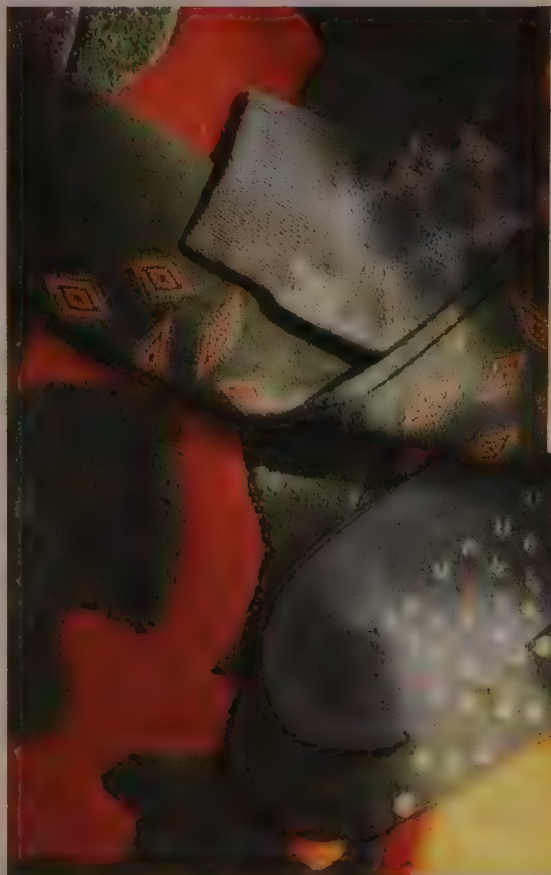
●ARAK-ARAKAN DARI KERATON. Menjadi kerakyatan dan demokratis.

pemimpin baru dan pemerintahan baru. Tetapi, kemudian, setelah pemimpin dan pemerintahan baru itu (rezim Orde Baru) berkuasa secara "stabil" selama 32 tahun, ramalan Sang Prabu lengser.

Lalu, memasuki saat-saat tumbangnya rezim Orba dan kemudian disusul aneka gejolak seperti sekarang, ramalan tersebut muncul kembali. Sebuah ceramah dan diskusi tentang ini, misalnya, sudah digelar oleh Metafisika Study Club di Jakarta, 13 September silam. Meski diskusi membahas masalah relevansi ramalan Jayabaya dalam menghadapi era perubahan yang cepat di akhir abad ke-20, kaitan dengan adanya siklus kemunculan ramalan itu tak terelakkan.

H. Yoedhoprawiro, seorang pembicara dalam diskusi, mengaitkan ramalan Jayabaya dalam era reformasi yang terjadi sekarang ini dengan harapan akan segera munculnya zaman baru. "Era reformasi akan mengubah tata negara menjadi kerakyatan dan demokratis." Inilah yang dimaksudkan dengan zaman baru itu.

Selanjutnya, masih dikaitkan dengan isi ramalan Jayabaya, reformasi itu diawali dengan peringatan Tuhan menggunakan alat api dan air. Kata Yoedho, api mulai membakar sejak peristiwa 27 Juli 1996, disusul kebakaran hutan, lalu pembakaran kota-kota dalam huru-hara 1997, kemudian kasus penembakan mahasiswa Trisakti yang diikuti huru-hara dan pembakaran toko-toko pada kerusuhan Mei 1998, berakhir dengan turunnya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Sedangkan, dengan alat air, berupa munculnya El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang sehingga panen gagal. Lalu, disusul La Nina yang akan mengakibatkan bencana banjir dan badai. "Sementara, di dunia politik, diwarnai penculikan dan pelanggaran HAM. Di bidang ekonomi, ditandai rontoknya perbankan. Devisa dikuras habis diparkir di luar negeri. Itu semua pertanda mulai berlakunya zaman edan," tegas Yoedhoprawiro.

Ramalan Jayabaya, sebagaimana

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak mengeluarkan bau tak sedap. ▲

ISTIMEWA

Ratih W. Teguh

Sisipan

dikutip pembicara, menyebutkan, untuk menanggulangi semua itu ialah dengan diadakan pengadilan. "Yang salah dihukum, dan yang tidak bersalah akan terbalas," tegas Yoedhoprawiro. Baru, sesudah itu, "Indonesia akan mengalami zaman keemasan."

Pada zaman revolusi fisik dahulu, ketika perjuangan untuk merdeka bagi bangsa ini sedang berkecamuk, ramalan Jayabaya juga sudah muncul. Di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, waktu itu terdengar ramalan-ramalan Jayabaya, yang mengatakan, tentara Belanda akan hancur apabila sudah masuk ke dalam *dulang emas* dan *jala sutera. Dulang emas* adalah Kedu, Magelang, dan Banyumas. Sedangkan, *jala sutera* adalah Yogyakarta dan Sala.

Dan, anehnya, ramalan itu benar adanya. Tentara Belanda ternyata hanya beberapa bulan menduduki Yogyakarta, untuk kemudian mengundurkan diri dan terpaksa mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Sebelum itu, pahlawan nasional, M. Husni Thamrin, di depan sidang Volksraad (DPR-nya penjajah Belanda) pada Juli 1934, memperingatkan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan mengutip ramalan Jayabaya. "*Tunjung putih sirna, muktinya orang Jawa*," kata Thamrin. Tunjung putih, maksudnya pemerintah Hindia Belanda.

Di depan sidang itu, M.H. Thamrin melanjutkan mengutip ramalan Sang Prabu, "Jika Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, kelak akan datang *jago kate wiring kuning dedege cebol kepalang* yang menguasai Pulau Jawa hanya seumur jagung." Yang dimaksud *jago kate* berbulu kuning bertubuh katai adalah orang Jepang, akan menjajah hanya dalam tiga bulan.

Kita tidak tahu dari mana M.H. Thamrin, yang orang Betawi, tahu dan percaya akan adanya ramalan Jayabaya. Sedangkan, Bung Karno, yang juga pernah mengutip ramalan Jayabaya di depan sidang Volksraad (1930), juga tak pernah mengatakan mengetahui ramalan itu dari mana.

Berbagai sumber ada yang menyebutkan, Bung Karno mungkin mulai mengenal konsep "Ratu Adil" Jayabaya sejak ia masih tinggal di

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-

PDAT

rumah H.O.S. Tjokroaminoto. Sebagai pemuda yang dibakar idealisme kebangsaan, Bung Karno memahami: suksesnya gerakan Sarekat Islam (SI) pada awal kelahirannya adalah berkat kemampuan tokoh-tokoh SI di daerah menggunakan ideologi "Ratu Adil" bagi pergerakan mereka (Sindhunata, 1993).

Itu sebabnya, dalam pidato *Indonesia Menggugat* di depan Volskraad itu, Bung Karno berujar, "Haraplah fikirkan, Tuan-tuan Hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil, apakah sebabnya Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain tak bukan ialah karena hati rakyat yang menangis itu, tak habis-habisnya menunggu atau mengharap-harap datangnya pertolongan."

● PETILASAN JAYABAYA. Ramalannya itu *maujud* (ada).

Bung Karno, sebelum proklamasi kemerdekaan RI, tercatat tiga kali mengunjungi bekas *patilasan* (kerajaan) Prabu Jayabaya di Desa Menang, Kediri, Jawa Timur. Sindhunata dalam tulisannya di *Kompas* (19/7/1993) mewawancarai Surohardjo, mantan lurah Menang. "Sekurang-kurangnya tiga kali sebelum proklamasi kemerdekaan Bung Karno berkunjung ke Menang," ungkap Surohardjo.

Kepada Surohardjo, Bung Karno berkata: kedatangannya ke Menang untuk *nyuwun wahyune kraton*, dan meminta agar Surohardjo memelihara

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak megeluarkan bau tak sedap. ▲

ISTIMEWA

Ratih W. Teguh

Sisipan

patilasan itu. "*Rumaten sing apik, iki perlu banget* (Peliharalah yang baik, ini penting sekali)," pesan Bung Karno. Sejak itu, *patilasan* dirawat dengan baik, bukan saja oleh Surohardjo tetapi juga warga Menang yang lain.

Nama Bung Karno sendiri bagi kebanyakan masyarakat Jawa, memang, tak dapat dilepaskan dari ramalan Jayabaya. Dalam ramalan itu diyakini, mereka yang akan menjadi pemimpin di negeri ini adalah *Notonagoro*. Yang disebut terakhir ini bukan nama satu orang, melainkan akronim nama-nama orang yang berakhiran dengan aksara (fonem) *no, to, na, go*, atau *ro*. Mereka inilah yang diyakini bakal menjadi pemimpin bangsa ini secara berurutan.

Soekarno menjadi presiden RI (pertama) karena sesuai dengan ramalan itu. Suku kata terakhir nama Soekarno adalah *no*. Kemudian, muncul Soeharto menjadi presiden RI (kedua) yang juga dianggap cocok karena suku kata terakhir nama Soeharto adalah *to*.

Lalu, sesuai urutan ramalan, yang akan menjadi presiden RI (ketiga) seharusnya yang punya nama berakhiran *no* lagi. Tetapi, nyatanya presiden RI (ketiga, sekarang) adalah B.J. Habibie – secara fonetik Jawa, nama ini berakhiran aksara *bo*. Apa sesungguhnya yang terjadi? (Untuk menjawab ini, lihat: *Sekarang Memasuki "Goro-Goro"*).

Ramalan tentang akan munculnya pemimpin bangsa itu, memang, selalu diawali suatu *ontran-ontran* besar. Tampilnya Soekarno dan Soeharto ke pucuk pimpinan RI, keduanya, ditandai dengan *ontran-ontran* yang berkecamuk sebelumnya. Nah, "Setelah terjadi *ontran-ontran* besar lagi nanti, baru kemudian muncul pemimpin baru dengan nama berakhiran *no* lagi," tutur salah seorang tokoh Kejawen mengutip ramalan Jayabaya.

Lepas dari benar-tidaknya ramalan itu, boleh jadi memang tidak sedikit yang mempercayainya. Pada masa-masa stabil, ramalan itu tidak muncul. Tetapi, ketika bangsa ini bergejolak, nama Jayabaya kembali disebut. Tampaknya, krisis telah melariskan idiom "irasional" semacam itu di tengah masyarakat. Harapan-harapan untuk mendapatkan tokoh baru sebagai Sang Ratu Adil mendorong sebagian orang "lari" kepada fatalistik. Ketidakpastian masa depan yang membuntukan akal sehat menyuburkan ramalan-ramalan mistik – tanpa kecuali ramalan Jayabaya.

Siapa sebenarnya Prabu Jayabaya? ▲

Djoko Quartantyo

NANANG JUNAIDI

● PRASASTI JAYABAYA. Akronim nama-nama pemimpin negeri.
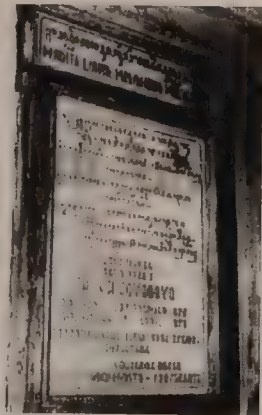
FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-

● BERDIALOG DENGAN ARWAH. Budaya dan agama tidak mesti kontradiktif.

PDAT

MITOS SEPUTAR SANG PRABU

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak megeluarkan bau tak sedap. ▲

Ratih W. Teguh

ISTIMEWA

Sisipan

SAMPAI hari ini, belum ditemukan sebuah kitab pun yang memuat ramalan Jayabaya secara otentik. Apalagi, kitab "asli" yang berisi tulisan/karya raja Panjalu (Kediri) itu. Sebuah buku karangan H.A. Van Hien – *De Javanese Geestenwereld, De Geschiedenis der Godsdiensten op Java*, terbitan Batavia 1910 – halaman 325-327 sebagaimana dikutip Yudhoprawiro memang berisi tentang ramalan Jayabaya. Tetapi, dari mana sumber penulisan ramalan itu tidak jelas. Sebab, Van Hien tidak menyebutkannya.

Menurut Van Hien, ramalan Jayabaya ada dua. Pertama mengandung prakondisi kemerdekaan RI, perang kemerdekaan, pendudukan Jepang, pertempuran Ambarawa, sampai tercapainya kemerdekaan RI sepenuhnya lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949. Kemudian, ramalan kedua (pasca-kemerdekaan), berupa prediksi tentang bakal terjadinya perubahan politik yang dahsyat pada 1998, dengan embrionya sejak 1996-1997.

Secara garis besar, isi ramalan itu tampaknya sambung-menyambung dengan ramalan Ronggowarsito yang termuat dalam karyanya, *Serat Kalatidha* (1862) – yang antara lain berisi ramalan tentang akan munculnya zaman edan (maraknya anarkisme). Tetapi, sebelum itu, Ronggowarsito juga sudah menulis *Serat Jangka Jayabaya Sabdapalon Nayagenggong*, yang – menurut Yudhoprawiro – ramalan (ditulis pada 1842) itu sudah mengisyaratkan timbulnya Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila.

Yang menarik, ramalan-ramalan Jayabaya tersebut justru memiliki plastisitas (keluwesan) sedemikian rupa sehingga "cocok" untuk segala zaman. Pada mulanya, ramalan Jayabaya hanya "dianggap" membicarakan tentang "akan terjadinya malapetaka dahsyat di bumi ini dan diakhiri dengan tampilnya Sang Ratu Adil atau Herucokro". Tetapi, kemudian, ramalan itu "ditambahi" dengan pembagian waktu. Yakni, "waktu (usia) dunia ini terdiri dari empat periode", sejak prasejarah sampai kiamatnya dunia.

Selain itu, fragmentasi terhadap isi ramalan juga dapat dikaitkan dengan kondisi apa pun. Tentang ramalan Jayabaya yang mengatakan, *"Sebagian akan tenggelam di dalam laut dan kembali ke bentuk semula, termasuk Pulau Madura menjadi sembilan pulau"*, setidaknya ditafsirkan oleh Yoedho untuk masa kini sebagai berikut:

Sebagian akan tenggelam di dalam laut, berarti, akan terjadi perubahan di

● PENDUDUK DESA MENANG. Bagaimana cara menata negara.

PDAT

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-

ISTIMEWA

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak megeluarkan bau tak sedap. ▲

Ratih W. Teguh

● SELAMATAN. Bergeser kepada orang-orang muda.

bidang politik; kekuatan politik Orba kian menyurut. *Kembali ke bentuk semula*, artinya, kehidupan politik akan kembali pada Pancasila dan UUD '45. *Pulau Madura menjadi sembilan pulau*, berarti, kekuatan politik Orba (yang terdiri dari ABRI, birokrat, Golkar, PPP, dan PDI Soerjadi) akan digantikan puluhan partai baru, yang nantinya berkoalisi menjadi sembilan partai dengan dukungan rakyat penuh setelah pemilu yang jurdil.

"Ramalan Jayabaya adalah kekuatan metafisika, mengatur keseimbangan serta masa depan bangsa," ungkapnya.

Jika disebutkan bahwa dalam ramalan Jayabaya termaktub pula bakal tampilnya Herucokro (Ratu Adil), kita belum tahu siapa yang bakal tampil setelah pemilu itu. Dr. Damardjati dari UGM Yogya memandang, yang akan "jadi" adalah antara Megawati dan Sri Sultan Hamengkubowono X. Sedangkan, pada masa lalu, tokoh-tokoh yang pernah dianggap sebagai Herucokro ternyata pada akhirnya diragukan atau malah menolak.

Diponegoro (putra Pakubowono I) yang dibuang Belanda ke Madagaskar pada 1723, dan Diponegoro (pangeran) yang dibuang Belanda ke Makassar pada 1930, serta H.O.S. Tjokroaminoto (pemimpin Sarekat Islam), ketiganya pernah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai Herucokro. Tetapi, anggapan ini akhirnya surut. Sebab, kedua Diponegoro ternyata mengalami kekalahan melawan Belanda, sedangkan H.O.S. Tjokroaminoto menolak konsep semacam itu.

Cairnya anggapan terhadap hadir-

PDAT

nya Herucokro yang tadinya menggumpal itu memang tak ada yang mempermasalahkan. Itu karena, mungkin, ramalan-ramalan tersebut sekadar mitos. Ia dipercaya, tetapi sulit dilacak kebenaran otentisitasnya. Sampai kini, belum seorang pun mampu menyodorkan bukti otentik kitab karangan Jayabaya itu.

Seorang Dr. Soekanto Kartoatmodjo, pakar epigrafi (ahli tafsir tulisan kuno) dari UGM Yogyakarta, seperti dikutip Soesanto Kartoatmodjo, S.H. pada diskusi 13 September lalu, menyangsikan keaslian *Serat Jangka* (ramalan) Jayabaya itu. Ia tidak menemukan bukti-bukti bahwa *serat* ramalan itu betul-betul gubahan atau karangan Jayabaya.

G. Zorab juga sependapat dengan Dr. Soekanto. Ahli parapsikologi dari Amsterdam ini, menurut Soesanto, dalam Majalah *Tijdschrift voor Parapsikologie* No. XIV, mengatakan: karena tidak ada bukti-bukti ilmiah, isi ramalan Jayabaya itu disangsikan. Sebab, tanpa bukti ilmiah, Zorab menganggap, *serat-serat* yang memuat ramalan Jayabaya adalah *ngarang*.

Jayabaya, lengkapnya bernama Sri Maharaja Sang Mapanji Sri Warmeswara Madhusudanawartanindita Parakrama Digyotunggadewa (1135-1157), menjadi terkenal dan "membumi di tanah Jawa" setelah *Serat Kakawin Bharatayudha* karya Empu Sedah dan Empu Panuluh – dua pujangga yang hidup di masa pemerintahan Jayabaya – diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh Yosodipuro atas perintah Sri Pakubuwono III (1749-1788).

Dalam *Serat Kakawin* itu, terdapat (atau diselipkan oleh Yosodipuro?) sejumlah ramalan Jayabaya. Kemudian, Ronggowarsito dalam karya-karyanya juga memasukkan ramalan yang konon "asli" dari Jayabaya. Sejak itulah, nama Jayabaya menjadi tambah populer di segala lapisan masyarakat Jawa, sampai sekarang.

Tetapi, bagi Prof. Djokosoetono, mantan dekan pertama Fakultas Hukum UI, asli-tidaknya ramalan Jayabaya tidak penting. Yang penting dan menakjubkan, ramalan Jayabaya itu nyatanya adalah suatu mitos. Dan, mitos adalah pegangan bagi rakyat, lepas dari isi mitos tersebut. Bagi penguasa, mitos dapat digunakan untuk memberi semangat kepada rakyat dalam menghadapi "sesuatu" pada waktu-waktu tertentu (Mungkin, seperti ketika M.H. Thamrin dan Bung Karno berpidato di depan Volskraad). ▲

Djoko Quartantyo

NANANG JUNAIDI

● GANESHA. Mega dan Sultan akan tampil menjadi duet yang serasi.

S i s i p a n

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-

ISTIMEWA

SEKARANG ME

GORO -

TIME
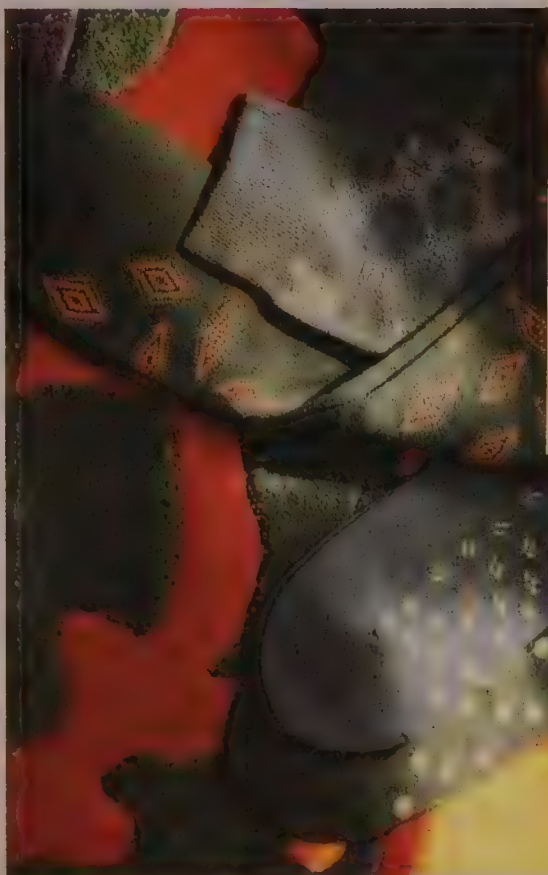
ADEK BERRY

Tajuk NO. 16, TH. I - 1 OKTOBER 1998

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak mengeluarkan bau tak sedap. ▲

Ratih W. Teguh

G MEMASUKI

-GORO

Sisipan

ADEK BERRY

DADANG TRI

dis-
nan

di
ang
9%.
nan
ng-
. ▲

eguh

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-

TAMPILNYA B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga sering kali dianggap sebagai "teka-teki", dikaitkan dengan konsep ramalan Jayabaya. Orang beranggapan – dengan merujuk pada konsep *Notonagoro*-nya Jayabaya, di mana *no*-nya adalah Soekarno, kemudian *to*-nya Soeharto – mestinya yang jadi presiden kembali ke *no* lagi, yakni Try Sutrisno. Tetapi, yang terjadi, ternyata B.J. Habibie yang tampil sebagai presiden. Bagaimana sesungguhnya relevansi ramalan ini?

Menurut Dr. Damardjati Soepandjar, pakar budaya Jawa kontemporer asal Yogyakarta, konsep *Notonagoro* itu sebenarnya bukan dari Jayabaya. "Tetapi, sebelum kita bicara soal konsep *Notonagoro*, kita sebaiknya bicara lebih dulu soal budaya," tambahnya.

Budaya itu, menurutnya, berbeda dengan agama. Meski berbeda, antara budaya dan agama tidak mesti kontradiktif. Orang yang mempertentangkan pandangan agama dan budaya, tambah dosen filsafat di UGM ini, hanya *nggolek perkara* (cari perkara), karena perbedaan itu menyangkut adanya perbedaan Sang Khaliq dengan makhluk. Nah, "Dari kerangka pikir ini, kalau saya membuat ramalan berdasarkan konsep *Notonagoro*, bukan berarti saya mau mendahului Allah," tuturnya.

Konsep *Notonagoro* itu sama sekali bukan bikinan Prabu Jayabaya. Konsep itu, menurut Darmadjati, pertama-tama dikemukakan Prof. Notonagoro, pendiri Universitas Gadjah Mada. Inti konsepnya: bagaimana cara mengatur dan menata negara (*notonagoro*). Jadi, dalam pandangan Prof. Notonagoro yang berlandaskan budaya Jawa, negara itu perlu ditata secara demokratis menurut paham Kejawen. "Tetapi, konsep itu tak lebih hanya *forecasting*," kata Damardjati.

Sebagai murid Prof. Notonagoro, Damardjati kemudian melakukan "olah kata" atau *othak-athik gathuk* terhadap konsep gurunya itu. "Konsepsi *Notonagoro* lalu saya gulirkan, dan terjabarkan menjadi: *No*, Soekarno; *to*, Soeharto; *na*, Try Sutrisno; *go*, Megawati; dan *ro*, Amien Rais," tuturnya.

Tetapi, kenapa untuk presiden RI ketiga yang "harusnya" *na* (Try Sutrisno) jatuh ke Habibie? Menurut Damardjati, makna *na* itu memang tidak berarti Try Sutrisno *himself*, melainkan dalam periode presiden ketiga itu calonnya mesti berasal dari santri

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak megeluarkan bau tak sedap. ▲

ISTIMEWA

Ratih W. Teguh

yang *tiwikrama*. Cuma, masalahnya, "Sejak dulu, konsep *Notonagoro* itu sudah *dicuekin* oleh Pak Harto," tambahnya.

Pak Harto, menurut Damardjati, sudah menggunakan konsepnya sendiri. Sebagai presiden enam periode, konsep *Noto* yang seharusnya bersambung dengan *nagoro*, diganti dengan *Noto, toto, toto, to*. "Itu konsep Soeharto," katanya. Akibatnya, karena ia melawan kodrat, terjadilah seperti sekarang: setelah *Noto, toto, toto, to*, langsung menjadi *goro-goro*.

Jadi, periode pemerintahan Habibie sekarang adalah periode *goro-goro*. Dari perspektif Jawa atau pewayangan, dalam periode *goro-goro* yang main adalah para *punakawan*, yakni para figur sebelum munculnya para ksatria sejati. "Karena itu, *punakawan* tak terlalu lama menjabat pimpinan. Kalau terlalu lama, bisa *salah kedaden*," urai Damardjati.

Peran Habibie, menurutnya, hanya mengisi jeda waktu sebelum tampilnya *ksatria piningit* (tersembunyi). Karena masih *piningit*, ksatria ini belum tampak sekarang. "Siapa ksatria ini nanti, kalau menurut paranormal Permadi, sifatnya *no one knows* (tak ada yang tahu)," tambahnya pula.

Menurut Damardjati, sebelum kemunculan sang *ksatria piningit*, akan didahului suatu perubahan besar dengan tanda bergesernya tatanan negara. "Ini yang menurut *jangka* (ramalan) Jayabaya dikatakan pada akhir milenium (abad ke-20) ini bakal terjadi perubahan besar," tambahnya.

Tanda-tanda perubahan itu bahkan kini mulai tampak. Tatanan yang semula berat pada orang-orang tua telah bergeser ke tatanan milik orang-orang muda. Di antara orang muda yang menonjol akhir-akhir ini, adalah Megawati dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya, menurut Damardjati, tergolong orang muda yang *gentur tapane* (kuat dalam menahan cobaan).

"Bukan mustahil, dua sosok itu akan tampil menjadi duet yang serasi, menyiapkan suatu tatanan negara baru," katanya, yang lalu menambahkan, "Mari kita tunggu perkembangannya, karena tanda-tanda zaman sudah mengarah ke sana."

Jadi, dikaitkan dengan konsep *Notonagoro* yang akan memimpin negeri ini, *no* itu mungkin akan jatuh pada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Atau, akan jatuh di *go*, yakni Mbak Mega. Benar-tidaknya, *wallahu a'lam bissawab*. ▲

Ridlo Aryanto (Yogyakarta

Sisipan

FIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

Ketika Anda berdiri, kaus kaki memang tidak terlihat. Tetapi, kaus kaki akan menarik perhatian ketika Anda duduk. Jadi, jangan menganggap remeh penampilan kaus kaki.

KAUS KAKI adalah bagian dari aksesori pria yang paling jarang mendapat perhatian ekstra. Padahal, benda ini sebenarnya menunjang penampilan Anda. Bila Anda melihat seseorang sudah mengenakan setelan jas yang rapi dan serasi namun mengenakan kaus kaki yang warnanya tidak cocok de-

karetnya sudah kendur lebih baik disingkirkan saja. Karena, selain tidak nyaman dipakai, juga tidak pantas dilihat.

Beragam bahan kaus kaki tersedia di toko, namun yang paling baik adalah yang terbuat dari katun lembut dan *wool* 100%. Kaus kaki dari bahan alami ini nyaman dipakai, karena menyerap keringat, sehingga kaki tidak megeluarkan bau tak sedap. ▲

ISTIMEWA

Ratih W. Teguh

BELLA SAFIRA

AKAN DIBAWA KE MANA NEGERI INI?

NAMA, apalagi wajah, sama sekali tak menunjukkan darah dan asal daerah. Mau bukti? **Bella Safira** salah satunya. Siapa sangka, si pemilik nama bak permata dan wajah imut-imut ini ternyata berdarah Batak. Lahir dari rahim ibu Elvrida Victoria Simatupang dan ayah Dr. Ir. Anggara, M.B.A., M.M., yang asli Batak, gaya bicara Bella pun jauh dari karakter Sitorus – yang cenderung "kasar" dan suka "tembak langsung". Mungkin, itu lantaran Bella lahir dan besar di Jakarta, dan cuma sesekali mudik ke tanah leluhur.

Dari mana pun asal-usul gadis jelita ini, yang pasti, Bella tergolong sosok artis "modern". Cirinya: tekun belajar, amat peduli kesehatan (ia rutin berlatih *squash*, aerobik, dan *softball*), serta punya *sense* yang lebih dari lumayan terhadap perkembangan di sekeliling. Mulai mencorong sejak wajah fotogeniknya muncul di sampul majalah wanita, popularitas Bella melejit pesat sejak ia apik berakting di sinetron perdananya, *Rumah Beton* (1996).

Tawaran silih-berganti, namun tak seluruhnya diterima. "Terus terang, saya nggak suka aji mumpung. Saya selesaikan satu sinetron, baru terima tawaran lain." Toh, dalam tiga tahun usia kariernya, dua telesinema (*Norma* dan *Cincin Pertunangan*), serta lima sinetron (antara lain *Kesetiaan* dan *Melangkah di Atas Awan*) sudah ia mainkan. Bahkan, sampai hari ini, kegiatannya padat diisi dengan syuting telenovela *Hangatnya Cinta Sepinya Hati*.

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, yang kelahiran 6 Agustus 1973, ini memang belum mengaplikasikan ilmunya. Perekonomian Indonesia yang lagi terpuruk membuatnya cenderung berniat melanjutkan kuliah. Satu-satunya kegiatan Bella yang "berbau" ekonomi, paling banter, sebatas ikut kegiatan *multilevel marketing*, yang konon lagi *ngetren* di kalangan artis.

Namun, sesibuk apa pun, Bella selalu menyempatkan diri melahap berita koran, majalah, dan televisi. Dari situlah, Bella diam-diam belajar menjadi "pengamat". Bukan cuma ekonomi, melainkan juga politik. "Cuma, saat ini saya sedang memasuki titik jenuh membaca berita politik. Mungkin, karena isinya itu-itu saja," tuturnya.

Kini, partai baru sudah mencapai 70an. Mana yang berpeluang jadi mayoritas?

Buat saya, partai mayoritas adalah partai yang didukung orang-orang yang benar. Bukan partai yang punya banyak massa tetapi nggak jelas programnya. Untuk apa punya massa kalau partainya nggak benar. Seiring perjalanan waktu, saya kira, kita bisa melihat partai mana yang akan didukung rakyat dan mana yang tidak.

Selain PDI Perjuangan, partai Amien Rais diperkirakan bakal menyedot massa pemilih.

Saya justru tidak suka sama orang yang terlalu vokal. Orang yang banyak *cuap-cuap*, belum tentu hasilnya seindah ucapannya. Tetapi, kita memang harus punya orang seperti Pak Amien. Dia pas sebagai pemimpin partai oposisi, untuk menghidupkan demokrasi. Cuma, untuk menilai dan me-

milih partai, saya lebih melihat kualitas dan bukti. Bukan sekadar janji manis yang tak ada realisasinya.

Memangnya, apa partai pilihan Bella?

Sampai sekarang sih masih bingung. Habis, masing-masing individu kayaknya ingin menonjolkan diri dengan mengatasnamakan rakyat. Mungkin benar, sistem kita salah, sehingga masyarakat jadi kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Baik pemimpin yang sekarang, maupun yang akan datang.

Maksud Bella?

Lihat saja, baru saja kita ganti pemimpin, sudah didemo disuruh turun. Kayaknya, ada aktor intelektual yang sengaja menyulut suasana supaya panas. Saya menduga, siapa pun presiden keempat nanti, kalau tiga bulan belum bisa mengubah keadaan ya didemo lagi. Sampai-sampai, saya bertanya dengan nada prihatin: Akan diapakan dan dibawa ke mana negeri ini?

Prediksi Bella tentang Pemilu 1999?

Kebayangnya sih rusuh, tetapi semoga saja tidak. Saya berharap, rakyat Indonesia punya niat baik dan bisa *nahan* diri. Namun, itu sangat tergantung pada ada-tidaknya kecurangan dalam pemilu. Soal figur presiden, rasanya juga masih sulit diprediksi. Yang pasti, orang yang jiwanya pemimpin akan lain dengan orang yang jiwanya pengikut. Karena, dia pasti tidak punya ide dan kemampuan untuk mengambil keputusan. ▲

Eni Saeni, Ari Prastowati/NJU
Foto-foto: Dahlan RP

SUJAK WIDODO

BERMULA DENGAN MODAL DENGKUL

SETELAH kerusuhan merebak ke seluruh wilayah di Indonesia, banyak pengusaha mulai menaruh harapan ke Batam. Bahkan, sebelum kerusuhan sekalipun, wilayah Riau yang berdekatan dengan Singapura itu sudah menawarkan impian. Paling tidak, itu yang diyakini Sujak Widodo ketika menginjakkan kakinya di pulau tersebut pada 1994. "Saya punya keterampilan, dan kalau saya tekuni saya pasti berhasil di rantau," tuturnya.

Keyakinan Sujak ternyata benar. Pria kelahiran Surabaya, 30 September 1960, itu kini dikenal sebagai pengusaha bengkel yang sukses. Spesialisasinya di bidang *body repair* dan pengecatan mobil dengan sistem oven. Karena pengerjaannya baik dan rapi, ia juga dipercaya PT Astra International untuk menangani karoseri mobil Toyota di Batam.

Siapa nyana, Sujak bukan berasal dari kalangan berada. Bungsu dari enam bersaudara, anak pasangan Abdul Kohari dan Markona, itu bahkan sudah yatim sejak usia 6 tahun. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Sujak kecil membantu ibunya berjualan sayur-mayur. Setiap pagi, pukul 02.00 WIB, ia harus berjalan kaki 5 km untuk mencapai Pasar Sepanjang, Surabaya, tempat dagangan digelar.

Selepas membantu berjualan sayur, Sujak rupanya tidak menyia-nyiakan waktunya. Pada siang hari, ia *nongkrong* ke bengkel-bengkel mobil. Bukan untuk bermain, tetapi memperhatikan cara kerja perbengkelan, yang menjadi minatnya saat itu. Tidak sia-sia. Pada usia 15 tahun, ia sudah mengerti sedikit-sedikit ilmu perbengkelan, terutama mengecat dan mendempul. Ia pun kemudian mulai berani menerima order pengecatan motor milik teman-teman yang dipercayakan kepadanya.

Dengan modal keterampilan tersebut, pada 1978 ia berangkat ke Jakarta. Di Ibu Kota, ia sempat bergaul dengan para preman Monas, sebelum akhirnya mendapat kesempatan bekerja di perusahaan karoseri, PT Amalgam. Setelah dua bulan, ia kemudian pindah ke perusahaan sejenis di PT Sunter Podomoro. Rupanya, di sini pun ia belum berjodoh, sehingga harus meloncat lagi ke perusahaan karoseri ACC pada 1986.

Di perusahaan yang disebut terakhir itulah, ia merasa menemukan hokinya. Ia bahkan sempat dipercaya menjadi asisten manajer dengan gaji Rp 100.000 per bulan. Kecil memang, tetapi ia mempunyai kesempatan untuk belajar menyusun program kerja, administrasi, keuangan, bahkan pemasaran. "Di ACC, saya juga mengenal *customer satisfaction management*," ujar lulusan SMP itu.

Dari pengamatannya, ia berkesimpulan: ACC belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya, kalau bengkel lain sudah melakukan *full press body*, ACC belum, sehingga para pelanggan pindah ke tempat lain. Itu sebabnya, setelah lima tahun bertahan, Sujak akhirnya meloncat juga ke perusahaan lain, PT Buana Sakti. Tetapi, lagi-lagi, ia tidak puas. Kendati sang bos memberi kepercayaan besar kepadanya, teman-temannya tidak ada yang mendukung dia.

Apa boleh buat, hanya sembilan bulan ia bertahan di Buana

Sakti. Dalam masa menganggurnya itu, ia berpikir untuk pergi ke luar Jawa saja. Kebetulan, seorang temannya ada yang bekerja di Batam. Tekad merantau memang sudah bulat, namun – yang menjadi masalah – Sujak tidak punya ongkos untuk pergi ke pulau tersebut. Pucuk dicinta, sponsor tiba. "Tuhan rupanya mempertemukan saya dengan Pak Kenny," cerita Sujak.

Kenny adalah pemilik bengkel di Batam, PT Inti Mega Motor. Ia tahu, Sujak adalah pekerja bengkel yang andal. Itu pula yang membuat dia bersedia mempekerjakan Sujak di bengkelnya dan membelikan tiket pesawat ke Batam. Dengan uang Rp 7.500 di saku, Sujak cabut ke pulau harapan.

Tiba di Batam, langsung bergabung di Inti Mega Motor, Sujak dipercaya memegang divisi karoseri dengan gaji Rp 800.000 per bulan. Cukup lumayan untuk pegawai pemula. Hanya saja, teman-teman sekerja tidak suka melihat kemajuan Sujak, mungkin iri atau apa. Dari pelbagai pengalaman itu, Sujak bisa mengambil kesimpulan: bekerja di perusahaan sendiri lebih baik ketimbang ikut orang lain.

Karena itu, setelah merasa cukup bekal, pada 1994 ia membuka bengkel sendiri. Namanya PT Surya Sejahtera, tetapi orang kemudian lebih sreg menyebutnya Sujak Motor. Ketika mendirikan bengkel ini, Sujak mendapat dukungan dari teman-teman polisinya dari Polres Kepri Barat. Terutama, dalam hal motivasi dan disiplin. Sementara, bantuan lain datang dari perusahaan lain yang dianggap sebagai "bapak angkat".

Tidak ada kesulitan yang berarti bagi Sujak untuk mencari pelanggan. Selain sudah mempunyai *network* yang luas, ia juga dikenal sebagai orang yang pandai bergaul. Ia juga beruntung, sebab Asuransi Rama mempercayakan kepadanya jika mobil-mobil yang masuk dalam jaminannya rusak.

Enam bulan pertama dapat ia lewati dengan mulus, bahkan bengkelnya tergolong laris. Itu pula yang membuat Sarana Riau Ventura menawari Sujak bantuan modal ventura sebesar Rp 40 juta. Tetapi, Sujak menolak. Bukan apa-apa, uang sebesar itu tidak cukup untuk membeli peralatan baru. Maka, jumlah bantuan yang disepakati kemudian meningkat menjadi Rp 250 juta.

Dengan dana segar itu, langkah Sujak menjadi lebih leluasa. Ia membeli oven buatan Italia seharga Rp 150 juta, sedangkan sisanya dipakai untuk uang muka pembelian gedung di Repindo Industrial Park seharga Rp 300 juta. Pertaruhan yang cukup berani, memang. Tetapi, dengan naluri bisnis yang kuat – tentu saja dengan perhitungan yang cermat – pinjaman dari Sarana Riau Ventura itu pun bisa dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dibanding bengkel-bengkel lain di Batam, tarif yang dikenakan Sujak lebih tinggi. Untuk pengecatan, ongkosnya berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 6 juta – bergantung pada tingkat kerumitan pengerjaannya. Tetapi, menurut Amril Damanik, karyawan BTN Cabang Batam, ongkos mahal itu relatif. "Apalagi, kerjaan Sujak itu rapi dan bersih," katanya.

Tidak mengherankan kalau Sujak Motor kini menjadi salah satu bengkel favorit di Batam. Selain mobil-mobil pribadi, Sujak pun dipercaya mereparasi bus-bus karyawan beberapa perusahaan, juga

EDI SISWOYO

Modal kerja sebesar Rp 250 juta ia suntikkan. Pertaruhan yang cukup berani, memang. Tetapi, dengan naluri bisnis yang kuat – tentu saja dengan perhitungan yang cermat – pinjaman tersebut toh bisa dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

SUJAK DAN MENPORA. Mengantungi izin pembuatan karoseri dari pihak Otorita Batam, bekerja sama dengan PT Astra International.

kendaraan beberapa hotel berbintang di Batam. Bengkel yang kini mempekerjakan 43 karyawan itu setiap bulannya sanggup menangguk rata-rata omzet Rp 70 juta. Dikurangi biaya operasi dan gaji karyawan, Sujak masih bisa mengantungi pendapatan bersih sekitar Rp 20 juta per bulan.

"Memang, pada saat krismon seperti sekarang, mobil yang masuk ke bengkel kami berkurang. Kalau dulu bisa 10 sampai 20, kini cuma 4 sampai 5 mobil per hari," ungkap Sujak, yang di waktu senggangnya masih menyempatkan diri untuk berkaraoke.

Tetapi, yang terang, saat ini Sujak sudah mengantungi izin pembuatan karoseri dari pihak Otorita Batam, bekerja sama dengan PT Astra International. "Saya sudah merancang 10 unit," kata ayah empat anak itu. Memang tidak terlalu banyak, namun lumayan untuk seorang pemula.

Pria yang yang gemar bulu tangkis itu berharap bisa bekerja sama dengan pemda setempat untuk merancang mobil angkutan kota (angkot) untuk kebutuhan masyarakat luas. "Sedangkan, untuk taksi-taksi yang sudah tidak layak operasi, keluaran sebelum tahun 1990-an, bisa diperbaiki dan dioperasikan di daerah pinggiran, misalnya di wilayah Pulau Natuna," kata pengurus Hipmi Cabang Batam yang sedang menjajaki pembelian *spare part* murah dari Jepang itu. ▲

Burhanuddin Abe/Edi Siswoyo (Batam)

CITRA PARIWARA '98

Mc: Rebecca T • Indra S • Nico S • Tika P

Erwin Gautawa Big Band • JP Project • AB THREE • Shakila • Salahuddin • Caberawit • Iwa K • Christine Hakim
Oppie A • Ireng Maulana • Titiek Puspa

PEDULI ANAK JALANAN

Malam Citra Pariwara '98

Tempat : Studio 4 RCTI
Jl. Raya Pejuangan, Kebon Jeruk Jakarta
Tanggal : 16 Oktober 1998
Pukul : 16.00 WIB - selesai
Undangan : **Kenny / Dinny**
JC & K Advertising
Telp. 7253425
Faks. 7290046, 7253480

AdSport Citra Pariwara

Tempat : Mega Sport Senayan Jakarta
Tanggal : 17 dan 18 Oktober 1998
Pukul : 16.00 WIB
Pendaftaran : **Meity**
Mega Sport Senayan
Telp. 9229640, 9229639, 9229638
Faks. 9229641

CITRA PARIWARA

Menyiasati Realitas Mengembangkan Kreatifitas

ppp

Karavella
Cita Rasa Asli Italia

KAPAL pesiar menjadi salah satu tempat makan malam yang romantis. Bayangkan, makanan enak, desir angin laut, suasana temaram, dan musik lembut. Barangkali, itu yang membuat PT Mugi Boga Abadi mendirikan kafe berbentuk kapal. Atau, kapal yang berbentuk kafe di danau Taman Ria Senayan, Jakarta.

Karavella, nama kafe itu, berasal dari bahasa Italia, yang berarti *journey*. Diambil dari sejarah Christopher Columbus yang melakukan perjalanan mengelilingi dunia pada 1492. Dalam melayari samudra dunia itu, Columbus menggunakan tiga kapal yang berbeda; Nina, Pinta, dan Santa Maria. Karavella sendiri berasal dari kata *The Caravelle*, yang sudah mencakup tiga kapal tersebut.

Pengelola kafe ini seolah ingin mengajak orang untuk melakukan perjalanan ke Italia untuk menikmati cita rasa makanan negeri tersebut, tanpa harus datang secara fisik. Untuk menikmati makanan seperti *italian seafood, pizza,* dan pasta, cukup di Karavella. Jika duduk di *deck* (Venice) lantai tiga pada malam hari, dengan lampu-lampu yang mengelilingi danau, kita seolah-olah sedang berada di sebuah pelabuhan laut yang indah.

Banyak kafe menjajakan menu Italia. Tetapi, Karavella menawarkan masakan dengan cita rasa asli Italia, bukan made in *Amerika. Aha, berada di kafe ini serasa berpesiar di atas kapal.*

DADANG TRI

Karavella memang bukan satu-satunya kafe ala Italia di Jakarta. Tetapi, tidak seperti kafe lain yang menyajikan masakan Italia ala Amerika, Karavella mengklaim diri sebagai kafe dengan menu asli Italia. "*Executive chef* kami, Fabio Magliocchetti, berasal dari Italia," tukas *Public Relations Officer* Karavella, Astrid Soeleman. Ia menambahkan, Fabio juga pernah menjadi koki aktor Hollywood Robert de Niro.

Citra Italia memang sengaja dibangun sejak awal. Bahkan, pada malam pembukaan 27 Agustus lalu, pesta serasa meriah. Interior dihias dengan lampu warna-warni. Di kiri kanan sepanjang halaman menuju kapal, berdiri tenda-tenda putih. Menyusuri jalanan ini serasa menyusuri jalanan Venesia, lengkap dengan kafe-kafe tenda, gondola, dan rumah-rumah tua.

Sementara, para pramusaji yang melayani tamu mengenakan kostum dengan dominasi warna hijau, merah, dan putih – warna bendera Italia. Dari segi pelayanan, Karavella, yang mempekerjakan 100 karyawan, demikian Astrid, berusaha memberikan servis yang terbaik kepada pengunjungnya.

Bentuk kapal dipilih karena diilhami keunikan bentuk kapal pinisi dari Sulawesi. Kapal berkapasitas 250 orang yang kemudian berubah menjadi *The Original Italian Restaurant* itu terbagi menjadi tiga lantai. Lantai pertama dinamakan The Columbus Bar.

Ruang utama kafe ini mempunyai kapasitas 97 tempat duduk. Melihat interiornya, antara lain terlihat logo jangkar di belakang bar, kita seolah berada di sebuah lambung kapal. Tempat yang cocok untuk rileks, makan, dan minum, sambil mendengarkan *live music* dari panggung pertunjukan. Bar ini buka pada pukul 18.00 WIB dan ditutup pada 01.00, sedangkan pada akhir pekan sampai 02.00.

Kemudian, lantai dua adalah *dining room*, yang disebut Rome. Nama Rome diambil dari nama ibu kota Italia. Ruangan ini cukup eksklusif, seperti berada di ruangan makan sebuah rumah tinggal mewah. Penampilan meja dan kursinya formal, dengan taplak meja segala macam. Suasananya tenang, dengan diiringi musik *classy jazz*, sehingga ruang berkapasitas 100 tempat duduk ini cocok untuk makan malam dan bercengkerama bersama keluarga. Untuk makan siang buka pukul 11.00-15.00 WIB, sedangkan makan malam 18.00-23.00.

Lalu, lantai tiga disebut *deck* (Venice). Dek dengan 62 tempat duduk ini tempatnya terbuka, sehingga kita bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Kalau bosan dengan suasana ingar-bingar di Columbus Bar, Venice cocok dijadikan tempat *rendezvous*, berbincang santai bersama teman, atau cukup menyendiri sambil menyaksikan sejuta bintang di langit. Cukup fleksibel, karena dibuka sejak pukul 12.00 hingga 02.00 dini hari.

Masih ada gerai lagi yang terletak di dek paling atas sebetulnya, yakni *bar corner*, yang menyediakan anggur dan cerutu terbaik asal Kuba. Dengan demikian, Karavella menjadi kafe yang lengkap. Aneka makanan bisa dipesan sesuai dengan kemampuan kocek masing-masing, mulai dari *pizza* yang standar hingga makanan Italia tradisional – seperti *rigatoni all'amatriciana* (sejenis makaroni), *spaghetti alla carbonara* (pasta *spaghetti* dengan daging, telur, keju, dan merica), atau *tagliatelle all'aragosta* (pasta dengan saus lobster spesial).

Untuk yang suka *seafood*, makanan berikut ini juga layak dicicipi; seperti *pesce all'arrabbiata* (ikan segar dengan cili, saus tomat, minyak zaitun, dan bawang putih), *aragosta thermidor* (lobster dengan saus dan *brandy cream*), atau *salmone alla moda dello chef* (ikan salmon yang dimasak dengan saus tomat dan sayur-sayuran).

Sementara, untuk minuman, tersedia bir, anggur, serta *cocktail*. Minuman favorit, antara lain, *mixologist juice*, yang terdiri dari campuran nanas, *orange, sweet & sour*, serta *mirinda strawberry*. Sedangkan, *cinderella* terdiri dari *orange*, susu segar, dan sirup *grenadine*. Coba juga minuman khas Karavella yang diberi nama *Karavella Cruise Line*, yang terdiri dari *Smirrnoff, Seagrams, Beamero, Triple Sec, Passport, cranberry juice*, dan *draft beer*.

Yang menjadi jualan utama, menurut Astrid, memang makanan dan minumannya. Tetapi, bukan berarti bahwa Karavella

DADANG TRI

DADANG TRI

tidak peduli dengan *live entertainment*-nya. Untuk itu, sejumlah band dan penyanyi sudah siap menghibur pengunjung; antara lain Java Jive, Karua Boys, Funky Thumb, dan penyanyi yang lagi naik daun, Shakila.

"Di sini suasananya enak, lokasinya juga cukup strategis. Dan, yang penting, makanannya enak, *taste*-nya cocok dengan lidah saya," komentar Christian, profesional yang bekerja di perusahaan pengembang. Selain Christian, yang mengaku tiga kali dalam seminggu berkunjung, Astrid menyebut beberapa nama selebriti yang kerap *nongkrong* di Karavella. Di antaranya, Tantowi Yahya, Nico Siahaan, Adnan Buyung Nasution, Ponco Sutowo, duta besar Italia, duta besar Argentina, dan lain-lain.

Samuel Laurens, *assistant general manager* Karavella, menegaskan, kafe yang dikelolanya merupakan satu-satunya kafe di Jakarta yang terletak di atas kapal. Dulu, memang pernah ada restoran serupa yang terletak seperti kapal terapung di Ancol. Tetapi, setelah terbakar, belum ada penggantinya, sampai muncul Karavella – yang melakukan *soft opening* 1 Juli 1988.

Perlu diketahui, Karavella merupakan *sister company* Hard Rock Café dan Pisa Ice Cream Café, yang masih satu pemilik. Selain kafe, kelompok usaha yang sahamnya, antara lain, dimiliki Dian Soedarjo, putri Kartini Muljadi, itu juga mengelola stasiun radio Hard Rock FM, Majalah *Higina Kosmopolitan*, es krim Hagenn Daz, serta Club 21, pemegang *franchise* busana bermerek untuk Indonesia – seperti Giorgio Armani, Isey Miyake, Donna Karan, Calvin Klein, dan lain-lain. Semuanya adalah simbol gaya hidup metropolitan.

Laurens tidak menyebut dana yang telah ditanamkan para pemegang saham. Ia hanya menyebut ancar-ancar: untuk mendirikan sebuah kafe di Jakarta, harus siap investasi Rp 3-5 miliar. Sejak dibuka, menurut Laurens, Karavella bisa menggaet sekitar 100 pengunjung pada hari biasa, dan 200 pengunjung pada akhir pekan, dengan omzet rata-rata Rp 10 juta per malam.

Kalau keadaan itu bisa dipertahankan, ia yakin akan bisa kembali modal sekitar 3-4 tahun. "Tetapi, Anda kan tahu sendiri, Taman Ria Senayan kan dekat dengan Gedung DPR/MPR, yang rawan demo. Kalau ada demo, sudah pasti pengunjung menurun," keluhnya. ▲

Burhanuddin Abe dan Sulton Mufit

DADANG TRI

DADANG TRI

Rendez-Vous

LOVE'S CAFE
(Kompleks Taman Ria Senayan)
Second Born, Jumat
Zig Zag, Sabtu
Jam 21.00-00.00 WIB

PHARAOH PUB
(The Acacia Hotel)
Jump Selection, Senin
Abadi Soesman, Selasa
One Vision, Rabu
Zig Zag, Kamis
One Field, Jumat
Arnesia, Sabtu
Titi D.J., 31 Oktober
Jam 21.30-00.30 WIB

KAFE PISA ICE CREAM
(Jln. Gereja Theresia)
Jamaican Café, Senin-Selasa
Eksis, Rabu
Motion, Kamis
More Donut's, Jumat
Ocean Park, Sabtu
Jam 21.00-00.30 WIB

PLAZA DE ESPANA
(Crowne Plaza Hotel)
Los Mambos, Rabu-Sabtu
Rhapshody, Minggu-Senin
Warna Warni, Sabtu
Jam 19.30-24.00 WIB

THE NEW PARKIT CLUB
(Jln. K.H. Wahid Hasyim No. 86)
Rabu, Jamaican Café
Kamis, Premium Night
Jam 21.30-00.00 WIB

INTERNATIONAL YACHT CLUB
(Hotel Sheraton Media)
Bilaz, Rabu
Hot News, Kamis
Zig Zag, Jumat
Sexy Cool, Sabtu
Jam 21.00-01.00 WIB

ITALIANNI'S RESTAURANT
(Kompleks Taman Ria Senayan)
Mansyah Chamber, kamis
Bill Saragih, Jumat
Ireng Maulana Combo, Sabtu
Jam 19.30-23.00 WIB

FRONT ROW SPORTS GRILL
(Kompleks Taman Ria Senayan)
Flash Back, Rabu
Motion, Jumat
Protonema, Sabtu
Sport Program, Minggu
Jam 22.00-01.00 WIB

CHAMPIONS BAR & RESTAURANT
(Kompleks Taman Ria Senayan)
Lemon Tea, Kamis
Karua Boys, Jumat
Gypsy Can, Sabtu
Mix Line, Minggu
Jam 22.00-01.00 WIB

JALAN JALAN
(The Penthouse, Menara Imperium)
Bias Lima, Selasa
B2 90's, Rabu
Smart, Kamis
Ocean Park, Jumat
Atlantic, Sabtu
Jam 21.00-01.00 WIB

FASHION CAFE
(Wisma 46, BNI City)
Eksis, Minggu-Selasa
Karua Boys, Rabu
Mixline, Kamis-Sabtu
Jam 22.00-00.00 WIB

ELVIS BAR & RESTAURANT
(Gedung Arthaloka, Jln. Jend. Sudirman)
Iskandar, Rabu
Bilaz, Jumat
Ultimate, Sabtu
Jam 20.00-00.00 WIB

KOMODO AIRWAYS
(Hotel Atlet Century Park)
Solvez, Senin dan Rabu
Platinum, Jumat
Gypsy Four, Selasa, Kamis & Sabtu
Jam 21.30-01.00 WIB

BATS
(Hotel Shangri-La)
Alexia Gardner, Senin-Sabtu
Jam 20.30-01.00 WIB

PLANET HOLLYWOOD
(Jln. Gatot Subroto Kav. 16)
Valencia, Kamis
Wach Dach, Jumat,
40 Band, Sabtu
Jam 21.00-01.30 WIB

STIX PUB & RESTAURANT
(The Park Lane Hotel)
Los Numero Uno, Senin-Sabtu
Jam 21.00-24.00 WIB

JALAN TERJAL
LEE KUAN YEW

Senin itu seperti hari-hari lain di Singapura, sampai tiba-tiba alunan musik di radio berhenti. Pada jam 10.00, nada-nada pop yang terputus digantikan oleh sebuah pengumuman yang mengubah hidup masyarakat Singapura dan Malaysia – selamanya.

"...I, Lee Kuan Yew, prime minister of Singapore, do hereby proclaim and declare on behalf of the people and the government of Singapore that as from today, the ninth day of August in the year of one thousand nine hundred and sixty five, Singapore shall be forever a sovereign, democratic and independent nation..."

Di Semenanjung Malaya, 250 mil sebelah utara, Tunku Abdul Rahman meluncurkan deklarasi serupa. *"Singapore ceases to be a state of Malaysia and shall forever be an independent and sovereign state..."*

Sebuah pemisahan – kemerdekaan – yang tiba-tiba: cuma dua tahun sejak Singapura jadi bagian dari Republik Federasi Malaya yang baru saja terbentuk. Masa depan yang tak menentu mengadang, di tengah pasang naik nasionalisme Asia yang baru lepas dari penjajahan.

Bagaimana kedua negara yang sama-sama bekas jajahan Inggris ini bercerai? Apa peran Lee Kuan Yew – juga Indonesia, yang waktu itu terlibat dalam konfrontasi dengan mereka – dalam hal ini? *Tajuk* mencoba menceritakannya untuk Anda dengan menukil buku memoar Lee Kuan Yew, *The Singapore Story* (Times Editions Pte. Ltd., 1998).

JUMAT, 5 Juni 1959. Siang itu, Lee Kuan Yew diambil sumpah sebagai perdana menteri Singapura. People Action Party (PAP) memenangkan 43 dari 51 kursi parlemen dalam pemilu di bawah konstitusi baru.

Tetapi, tulisnya bertahun-tahun kemudian, "Dengan kemenangan besar ini, aku tak terlalu gembira. Aku sadar besarnya masalah yang mengadang – mulai dari tingkat pengangguran yang selangit, harapan yang kelewat tinggi terhadap perbaikan ekonomi yang cepat, sampai maraknya gerakan komunis, pembangkangan oleh serikat pekerja dan asosiasi, pemogokan, dan mengecilnya arus investasi. Kecuali itu, ada lagi masalah pelik: tingkah negara tetangga di utara."

> "Aku lalu kasih persetujuan: lebih baik menempuh tindakan tak populer di awal masa pemerintahan ketimbang di akhir nanti."

Bagaimana tidak. Dana cadangan pemerintah kian menipis. Menteri Keuangan Goh Keng Swee memperkirakan, tahun itu defisit anggaran akan menggelembung sampai $ 14 juta. Sementara, tabungan masyarakat diramalkan tak lebih dari $ 5 juta.

Artinya? Tak tersedia dana pembangunan. Dan, semua langkah yang perlu diambil untuk menyeimbangkan anggaran bersifat tidak populer, baik bagi masyarakat maupun para anggota kabinet. Tetapi, untuk membukukan rapor merah di tahun pertama pemerintahan, rasanya berat juga. Sebab itu, kenangnya, "Aku lalu kasih persetujuan: lebih baik menempuh tindakan tak populer di awal masa pemerintahan ketimbang di akhir nanti."

Jurus pengencangan ikat pinggang pun dilancarkan. Pos pengeluaran seperti uang muka pembelian mobil pejabat dipangkas. Kecuali itu, gaji menteri juga dipotong, dari $ 2.600 menjadi $ 2.000/bulan, buat memberi contoh, sehingga pegawai negeri lainnya – setidaknya yang bukan di lapisan terbawah – rela disunat gajinya.

Dengan cara ini, defisit dapat ditekan 43% ke angka $ 8 juta. Penghematan lebih lanjut dilakukan dengan membekukan pengangkatan pegawai negeri baru. Lowongan di pemerintahan tak dapat diisi tanpa persetujuan menkeu. Kebijakan ketat ini tentu saja memicu reaksi serikat kerja pegawai negeri. Mereka membentuk Council of Joint Action buat menuntut pemberian gaji penuh, seperti yang pernah dilakukan PAP terhadap pemerintah kolonial Inggris.

Tetapi, PM Lee tetap bertahan. Pada pidato pertama sebagai perdana menteri, 22 Juli, ia berseru: "Kalau pemerintahan PAP (People Action Party) gagal, bukan pihak oposisi yang bakal ambil kekuasaan. Mereka akan kabur buat mempertahankan hidup. Karena, di belakang kami, tak ada alternatif yang siap untuk berfungsi dalam sistem yang demokratis. Menurut analisis terakhir, kalau kami gagal, kekuatan brutal akan marak..."

Hasilnya? "Ternyata, semua menuruti imbauan kami. Pada akhir tahun, anggaran sudah kembali seimbang, dan penerimaan negara tak terus terjun bebas seperti yang dikhawatirkan Keng Swee." Tak urung, Lee mengakui, "Kalau aku bisa mengulang sejarah, aku tetap akan menyetujui pengetatan ikat pinggang, tetapi tak akan seketat itu – kira-kira sepertiganya. Dengan begitu, aku tetap bisa mengirim pesan kepada kalangan masyarakat berbahasa Cina. Dan, walau pegawai negeri berpendidikan Inggris tetap *unhappy*, mereka tak akan terguncang kelewat keras."

Sejarah, kita tahu, tak kenal kata "tetapi". Yang jelas, sepanjang pemerintahannya, Lee selalu mempertahankan prinsip *strong government*. Kesannya yang mendalam terhadap penjajah Jepang agaknya berpengaruh besar.

MEMOIRS OF LEE KUAN YEW

BERSUMPAH SEBAGAI PERDANA MENTERI. Mempertahankan prinsip *strong government*.

Pada saat Inggris menyerah, keadaan Singapura sungguh *amburadul*. Polisi lokal – orang Cina, India, maupun Melayu – pada kabur semua menghindari hukuman kejam yang pasti dijatuhkan oleh penguasa baru. Semua orang yang serba kekurangan tiba-tiba bebas melakukan apa saja. Penjarahan terhadap pelbagai *department store* dan toko milik kaum bule pun marak. Tetapi, hanya dalam bilangan hari, kalangan militer Negeri Matahari Terbit itu mampu mengembalikan ketertiban.

Caranya? Dengan menanamkan rasa takut yang amat-sangat. Para penjarah yang tertangkap basah langsung di-*dor* atau dipancung. Kepalanya dipancang di tiang, dan diletakkan di tempat-tempat umum.

Kemenangan balatentara Jepang – yang Asia – terhadap tentara Inggris itu juga menghapus mitos kaum kulit putih yang tak terkalahkan. Apalagi, Lee muda menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang bule, tentara Australia yang sedianya dikirim ke Eropa buat memerangi Nazi Jerman, *ngacir* dikejar para prajurit katai. Yang mundur secara gagah hanyalah prajurit Inggris asal Skotlandia.

"Mereka berbaris gagah sambil meniup *bagpipes*, walau hanya dua *pipers* yang tersisa. Ketenangan mereka menghadapi kekalahan menimbulkan impresi seumur hidup," tulisnya 50 tahun lebih kemudian.

Kejadian itu, pada saatnya, membuat Lee dan kawan-kawan punya rasa percaya diri yang cukup besar untuk menentang penjajahan Inggris setelah Jepang kalah. Tetapi, juga membuat kekaguman terhadap bangsa Inggris tak lekang, terutama terhadap sistem sosial

dan demokrasi yang telah merasuk dalam melalui pendidikan Inggris-nya, termasuk pendidikan tinggi hukum di Cambridge.

Penjajahan Jepang memberi Lee pengalaman lain: keuletan untuk bertahan hidup. Di zaman serba sulit itu, Lee muda kerja serabutan, termasuk di pasar gelap. Ia juga sempat mendirikan usaha, membuat lem yang diberi merek "Stikfas" dengan seorang kakak kelas dari Raffles College, Yong Nyuk Lin. Kelak, adik ipar Nyuk Lin yang usianya 2,5 tahun lebih tua, Kwa Geok Choo, menjadi istri Lee.

"Di belakang kami, tak ada alternatif yang siap untuk berfungsi dalam sistem yang demokratis. Menurut analisis terakhir, kalau kami gagal, kekuatan brutal akan marak..."

Tak mengherankan, sebagai pemimpin, ketika keadaan negeri begitu *amburadul*, Lee Kuan Yew tak segan turun ke bawah. "Aku tak sungkan pegang sapu – menyapu jalanan kota dengan para pemimpin masyarakat," kenangnya. Pada 1959 itu, ia membentuk People's Association, sebuah *statutory board* yang merangkul seluruh organisasi sosial sukarela, klub-klub, asosiasi-asosiasi olahraga, musik, balet, dan sebagainya.

"Kami membangun 100 *community center* lebih – besar dan kecil – tempat-tempat untuk pendidikan dan rekreasi," tulisnya dalam memoar. Kegiatannya? Dari tenis meja, badminton, catur Cina, kursus reparasi radio dan kulkas, pelajaran tentang teknik perdagangan, dan lain-lain. Untuk mensupervisi pusat-pusat itu, fungsi Departemen Kesejahteraan Sosial diubah menjadi Departemen Pengembangan Komunitas. "Kami ingin memberikan rakyat sesuatu yang positif untuk dilakukan, dan mengajak mereka taat hukum dan aturan."

Pemerintahan Lee juga mengorganisasi sebuah Works Brigade yang merangkul para penganggur muda (lelaki dan perempuan), memberi mereka seragam semi-militer, menempatkan mereka di barak-barak kayu untuk diajari cara bertani, membangun jalan, mendirikan tembok dan pekerjaan konstruksi lainnya. "Pokoknya, membekali mereka disiplin, dan yang terpenting menarik mereka dari jalanan."

Disiplin juga diberikan kepada mereka yang telah bekerja. Alasannya sederhana, "...kami perlu memperkuat pegangan terhadap serikat pekerja yang waktu di bawah kendali komunis untuk menghentikan aksi pemogokan politik."

Caranya, tentu saja, sesuai hukum: dengan mendirikan pengadilan arbitrase. Pada 1950-an, Australia memiliki hubungan industri yang bagus, karena mereka punya prosedur arbitrase yang jempolan. "Atas permintaan kami, mereka mengirim seorang ahli dari Kementerian Tenaga Kerja, Harry Bland, buat membantu."

Setelah pengadilan arbitrase terbentuk, menteri tenaga kerja dapat memerintahkan setiap pemogokan besar yang ada, terutama yang berkaitan dengan jasa vital seperti transportasi publik, untuk menyelesaikan masalah di situ. Begitu ditelurkan keputusan, ilegal buat serikat pekerja untuk meneruskan pemogokan yang akan menunda eksekusi keputusan. Dan, kalau mereka membandel, serikat bisa dibubarkan. Kecuali itu, sebelum pemogokan, juga harus dilakukan pemungutan suara yang bebas dan rahasia – bukan cuma acungan tangan setelah pidato yang berapi-api oleh pemimpin serikat.

"Satu hal yang kami setuju dengan pandangan kaum komunis: salah satu alasan mengapa Cina dan negara Asia lainnya, kecuali Jepang, terbelakang adalah karena kaum perempuannya belum beremansipasi," Lee mengakui.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintahan PAP meluncurkan UU Perempuan yang antara lain menetapkan monogami sebagai satu-satunya praktek perkawinan yang legal, dan memasukkan poligami, yang waktu itu lazim, sebagai tindak kriminal – kecuali untuk kalangan muslim. Dengan UU yang komprehensif ini, status perempuan diubah sama sekali. Sayangnya, hal itu tak mampu menghapus bias budaya yang lebih memperhatikan anak lelaki ketimbang perempuan.

Buat membatasi gerak komunis, pemerintah membersihkan masyarakat (*gangster*) rahasia Cina dan mengharamkan pornografi, pertunjukan *striptease, pin-table saloons,* bahkan lagu-lagu seronok. Ini tak menambah masalah negeri yang sudah berat, kecuali sedikit pengangguran dan membuat Singapura agak kurang menarik bagi turis. Tetapi, lambat laun, para pelaut yang banyak berkeliaran di Singapura akhirnya menemukan juga tempat *mojok* di pinggiran pulau. Diam-diam prostitusi tetap jalan, dan Lee tutup mata saja. Sebab, tak mungkin memberantas profesi tertua di dunia itu tanpa melakukan tindakan bodoh yang tak efisien.

MEMOIRS OF LEE KUAN YEW

BERSAMA PRESIDEN JOMO KENYATTA. Menghapus mitos kaum kulit putih yang tak terkalahkan.

Program yang paling membanggakan adalah menempatkan anak-anak ke bangku sekolah dalam tempo setahun. "Kakak iparku, Yong Nyuk Lin, yang waktu itu menteri pendidikan, membuat kami bangga: dalam tempo 12 bulan ia berhasil menggenjot penerimaan anak sekolah dua kali lipat, mengubah setiap sekolah yang ada jadi dua sekolah, dengan memecahnya jadi sekolah pagi dan sore. Ia meluncurkan *crash program* untuk melatih guru dan mempromosikan guru senior menjadi kepala sekolah. Ia juga mengembangkan pendidikan buat orang dewasa....

Apa yang dilakukan pemerintahan PAP waktu itu adalah upaya massal dan terintegrasi. "Kami mengadopsi metode komunis, yang terbukti manjur. Misalnya, kampanye massal, kami tak melihat alasan mengapa kami harus memberi MCP (Malayan Communist

Party) monopoli buat mempraktekkan teknik yang ampuh ini...."

"Kami ingin memberikan rakyat sesuatu yang positif untuk dilakukan, dan mengajak mereka taat hukum dan aturan."

Tetapi, tentu saja, tetap tak mudah menjadi pemimpin pada usia 35. Lee lahir pada 16 September 1923. "Aku lahir di sebuah bungalo bertingkat dua, di 92 Kampong Java Road," tulisn Lee Kuan Yew. "Waktu itu, keluargaku lalu berkonsultasi ke seorang ahli untuk memberiku nama yang cocok. Ia mengusulkan 'Kuan Yew' atau *guang yao* dalam dialek Mandarin, yang berarti 'sinar dan terang'. Dan, kakekku memberi tambahan nama depan, sehingga nama lengkapku jadi Harry Lee Kuan Yew."

Buat Lee muda, kakek dan neneknya lebih membanggakan ketimbang ayah dan ibunya, Lee Chin Koon dan Chua Jim Neo. "Kakekku mencintai dan memanjakanku. Ayahku, yang memaksaku untuk disiplin, keras sekali," kenangnya. "Kakekku sukses meraih kekayaan. Ayahku cuma anak orang kaya."

Lee Hoon Leong, kakek Lee Kuan Yew yang dipanggil dengan sebutan kesayangan "Kung" (kakek) dan kawin dengan Ko Liem Nio yang Cina Semarang, adalah generasi kedua imigran Cina di Singapura. Ia orang Hakka – Cina Han dari kawasan utara dan tengah daratan Cina yang mengungsi ke Fujian, Guangdong, dan propinsi selatan lainnya, 700 sampai 1.000 tahun lalu. Tetapi, karena lama bergaul dengan kapten, *first officers*, dan *chief engineers*, yang semuanya orang Inggris, ketika bekerja sebagai awak kapal milik raja gula dari Jawa, Oei Tiong Ham, ia jadi kebarat-baratan. "Mungkin itu sebabnya, kakek dan nenek tak keberatan ketika ibuku, atas permintaanku, memindahkan aku ke Telok Kurau English School, walau, pada Januari 1930 itu, baru dua bulan di Choon Guan School," kenang Lee Kuan Yew.

MEMOIRS OF LEE KUAN YEW

SAMBUTAN HANGAT MASSA. "Aku sadar besarnya masalah yang mengadang."

Prestasi bagus yang diraih di sekolah sistem Inggris inilah, termasuk di Raffles College, yang memungkinkannya mendapat beasiswa di Cambridge. Setelah lulus *bar exam* di Inggris, Lee Kuan Yew segera pulang kampung dan magang di kantor pengacara Laycock & Ong, yang diselesaikannya pada 7 Agustus 1951.

"Artinya, sejak hari itu, aku sudah boleh mewakili klien di pengadilan. Tiga hari kemudian, aku menangani kasus pertama: membela empat orang Melayu – dari total 13 orang – yang didakwa membantai Charles Joseph Ryan, seorang perwira Royal Air Force, dalam sebuah kerusuhan."

Pengadilan itu berlangsung dua minggu di hadapan seorang hakim dan tujuh juri. Sebagai pembelaan, Lee menyerang akurasi identifikasi oleh saksi terhadap sang pelaku. Maklum, ketika para perusuh menarik Ryan dari bus yang membawa lelaki bule itu dari Changi ke kota, lalu menghabisinya di kawasan perkampungan Melayu Geylang Serai, hari sudah gelap.

"Aku bawa hakim, juri, dan para saksi, ke lokasi kejadian. Aku tanya mereka, bagaimana orang yang sama sekali asing dan melihat 40-50 orang Melayu dan India Muslim di tempat yang begitu temaram bisa mengenali para terdakwa sebagai orang-orang yang menghajar si korban di dermaga sana. Seberapa jauh saksi dari para penyerang di saat kejadian? Berapa lama mereka melihat para terdakwa? Apa pakaian yang dikenakan para terdakwa waktu itu? Apa tanda atau wujud fisik khas yang dimiliki terdakwa?"

Hasilnya, tiga dari empat klien Lee dibebaskan. Para juri yang orang Cina dan India lega, karena kurang bukti untuk memberi terdakwa hukuman mati. Hakim dan jaksa penuntut yang orang Inggris tak puas. "Aku sendiri muak dengan hasil sidang itu, tetapi berusaha menghibur diri. Sebagai pengacara, tugasku toh membela klien di persidangan – tanpa menyalahi hukum – walau aku yakin, di malam naas tersebut, keempat klienku tak ragu menghabisi orang kulit putih mana pun. Yang terjadi waktu itu adalah kerusuhan SARA, yang dipicu isu agama."

Kasus pembelaan lain yang berkesan muncul pada Mei 1952. Itulah kasus pertamaku versus pemerintah. Waktu itu, empat pegawai kantor pos – tiga Melayu dan satu orang India – menemuiku. Serikat Pekerja Pos dan Telekomunikasi (SPPT), kata mereka, telah mengajukan klaim untuk revisi gaji, tetapi tak mendapat hasil memuaskan. Gaji mereka hanya disamakan dengan gaji pegawai kantor pos Malaya, padahal biaya hidup di Singapura jauh lebih tinggi. Nah, buat menyelesaikan ini, SPPT telah memberi izin untuk menyewa pengacara. Kecuali itu, direncanakan pula pemogokan untuk mendukung tuntutan.

Reputasinya sebagai pembela masyarakat ini, dan kedekatannya dengan massa serikat pekerja, mendorong Lee Kuan Yew mendirikan PAP pada November 1954. Prinsip PAP yang terbuka dan bersifat nasionalistis membuat Lee merekrut berbagai unsur masyarakat – puak Cina, Melayu, India, termasuk mereka yang berideologi komunis sebagai anggota, bahkan pendiri – pada awalnya. Setelah kuat, baru ia menonjolkan ideologinya yang nonkomunis.

Buat mencegah agar partai tak jatuh ke tangan unsur komunis, Lee dan teman-teman sepaham menggunakan sistem yang diadopsi dari gereja Katolik dalam memilih lingkaran kepemimpinan puncak. Ide ini didapat ketika suatu kali ia mampir ke Roma setelah perjalanan dinas ke London. Di sana, ia melihat massa yang mengelu-elukan Paus Pius. Di Vatikan, pikirnya, hanya para kardinal yang berhak memilih dan dipilih menjadi paus. Dan, para kardinal itu

dipilih paus terdahulu. "Sistem seperti ini bisa bertahan selama ribuan tahun, jadi pasti telah teruji ketangguhannya."

Tetapi, justru ketangguhan PAP-lah yang membuat pemerintah pusat Kualalumpur khawatir. Tunku Abdul Rahman, PM Republik Federasi Malaya (negara induk Singapura waktu itu), tak terlalu suka dengan keikutsertaan PAP di pemilu tingkat nasional yang, antara lain, tentunya melawan kandidat dari UMNO, partai Melayu yang berkuasa. Sementara, kalangan Cina juga khawatir dengan dominasi Melayu di Semenanjung. Masyarakat Singapura sendiri, yang 42% Cina, lama-kelamaan merasa menjadi warga negara Malaysia kelas dua.

"Salah satu alasan mengapa Cina dan negara Asia lainnya, kecuali Jepang, terbelakang adalah karena kaum perempuannya belum beremansipasi."

Perbedaan lain (tak adanya UU Anti Korupsi di Malaya, keinginan Kualalumpur untuk menguasai pendapatan daerah, keteguhan pemerintahan PAP untuk tetap menjadi pelabuhan bebas), ditambah tekanan dari pemerintahan Soekarno di Jakarta, membuat Malaya dan Singapura semakin jauh bersimpang jalan. Pemberontakan di Brunei, yang konon didukung Soekarno, membuat Kualalumpur kian gampang curiga.

Untuk pengamanan, pada 2 Februari 1963 diluncurkan operasi "Cold Store". Sekitar 370 polisi dari Singapura dan 133 dari Malaya dikerahkan buat menciduk gembong-gembong komunis. Di Singapura saja, pada jam 03.00 dini hari, dilakukan 65 penggerebekan yang berhasil menangkap 115 dari 165 orang yang diarah.

Setelah gelombang penggrebekan reda, Tunku mengusulkan agar PAP mundur dari pemilihan sela di Sembawang dan membiarkan Aliansi SPA-UMNO-MCA-MIC berhadapan muka dengan kelompok Barisan. "Sesopan mungkin aku katakan kepada Tunku, Aliansi tak bakal menang. Dan, kemenangan Barisan akan menggugah semangat kalangan pro komunis," kenang Lee Kuan Yew.

MEMOIRS OF LEE KUAN YEW

BERSAMA PM AUSTRALIA, SIR ROBERT MENZIES. Memiliki hubungan industri yang bagus.

Tunku kelihatan tersinggung. "Masalah yang kuhadapi dengan Tunku adalah, aku serius untuk melakukan merger, sementara ia tidak. Ia merasa, Singapura mendapat segala keuntungan, sedangkan Malaya harus menanggung banyak masalah. Alhasil, posisi tawar-menawar jadi tak seimbang." Kendati demikian, penggabungan Singapura ke dalam Republik Federasi Malaya tetap ditandatangani pada 9 Juli 1963 – mundur sehari dari rencana tanggal 8 Juli, tanggal keberuntungan Tunku.

Masalah yang datang kemudian adalah, dalam pemilu calon dari UMNO kalah oleh calon PAP yang tak bersedia mengundurkan diri – di kawasan yang mayoritas Melayu. Tunku segera turun, membawa Syed Ja'afar Albar, orang Arab Melayu yang menjabat sekretaris jenderal UMNO dan terkenal sebagai orator ulung, buat memastikan: orang-orang Melayu yang telah terbujuk oleh PAP kembali ke pangkuan partai Melayu itu.

"Saat itu aku mengira, pidato panas Syed Ja'afar hanya untuk mendongkrak moral kalangan Melayu. Aku masih *ngomong* soal UMNO dan PAP memerangi musuh bersama, MCP dan Soekarno dari Indonesia, yang dipengaruhi komunis." Tetapi terbukti kemudian, pidato sekjen UMNO itu memicu kerusuhan Cina-Melayu.

Merasa bahwa ancaman dari Indonesia lebih besar ketimbang perpecahan di dalam dengan puak Melayu, awal 1964 Lee Kuan Yew mengajukan diri menjadi duta keliling untuk merebut simpati negara-negara Afrika. Misi itu sukses, tetapi hubungan Singapura-Malaya terus memburuk.

Koran *Utusan Melayu*, yang dicetak dalam huruf Jawi (Arab gundul), terus saja memuat seruan Syed Ja'afar yang bernada SARA. "Orang-orang Melayu dianaktirikan pemerintahan PAP," seru corong UMNO itu. Padahal, pemerintah Singapura justru memberikan pendidikan gratis kepada mereka – suatu keistimewaan yang tak diberikan kepada ras lain. Dan, walau tak ada kuota buat kaum Melayu untuk izin taksi dan sebangsanya seperti di Malaya, pemerintah selalu memastikan: ada toko dan warung Melayu untuk memenuhi kebutuhan warga Melayu di setiap kawasan.

Kerusuhan berdarah pun meledak. Pada 21 Juli 1964, bertepatan dengan perayaan Maulid, terjadi bentrokan yang membuat 23 nyawa melayang dan 454 orang luka-luka. Kerusuhan baru berhenti pada 2 Agustus. Indonesia meniup berita, kerusuhan rasial itu merupakan bukti adanya campur tangan neo-kolonialisme.

Pada 17 Agustus, terjadi lagi kerusuhan yang makan korban 13 jiwa dan 109 orang luka-luka. Lalu, ketika Lee Kuan Yew sedang di Brussel pada 2 September, kerusuhan lain meledak pula. Di Kualalumpur, para pemuda UMNO berdemo, *"Suspend Singpore Constitution! Detain Lee Kuan Yew! Crush Lee Kuan Yew!"*

Inggris berusaha mendamaikan, tetapi keadaan kian tak tertahankan. Tunku mengusulkan suatu *"constitutional rearrangement"*. Lee Kuan Yew tak menangkap maksud Tunku Abdul Rahman dengan istilah ini. Baru, dalam pembicaraan selanjutnya, ia sadar: Tunku itu ingin, Singapura keluar dari Republik Federasi Malaya. Pembicaraan rahasia pun lalu dilanjutkan, bahkan tanpa sepengetahuan Inggris. Sampai akhirnya, 9 Agustus 1965, Lee mengumumkan kemerdekaan Singapura.

Pada saat yang sama, di Kualalumpur, Tunku mengumumkan hal yang sama. Lalu, parlemen Malaya membuat pengesahan: tiga kali. Talak tiga telah dijatuhkan. Singapura dan Malaysia resmi bercerai.. ▲

Prih Sarnianto

DAHLAN RP

MINUMAN BERENERGI

DOPING untuk Yang Loyo

Minuman berenergi mulai jadi kebutuhan masyarakat modern. Merek apa yang paling populer di pasaran, dan bagaimana perilaku konsumen terhadap minuman yang katanya bisa memulihkan stamina loyo itu?

"BISA!" kata El Manik, penuh semangat, sambil mengepalkan tangannya. Itulah salah satu adegan iklan di televisi yang pernah populer. Seseorang yang tadinya loyo, setelah minum sebotol *energy drink* (minuman berenergi), langsung *oye* – terbit tenaganya.

Minuman berenergi pernah mewabah, dan sampai sekarang pun berlangsung. Pelbagai merek minuman yang dikategorikan berenergi tersebut terus memenuhi pasaran. Sebutlah M-150, yang diiklankan El Manik itu. Atau, Kratingdaeng, Lipovitan, Fit Up, Sakaginseng, Panther, Bachus D, dan seterusnya. Bahkan, Hemaviton, yang dikenal sebagai *food supplement*, belakangan meluncurkan seri minumannya.

Tidak ada data pasti tentang tingkat konsumsi masyarakat terhadap minuman berenergi. Tetapi, menurut seorang periset pemasaran, peminatnya memang besar, yakni masyarakat kota, yang konon "sadar kesehatan". Stres dan kelelahan akibat ritme kerja yang semakin cepat, serta permasalahan yang makin kompleks, membuat mereka mencari obat penawar. Mengkonsumsi minuman berenergi adalah salah satu caranya.

"Kalau pas capek-capeknya, saya selalu minum Lipovitan. Badan rasanya segar, mungkin karena sugesti, *ngkali*," ungkap Nina Tursina, eksportir ikan arwana yang juga ketua Himpunan Pengusaha Flora dan Fauna.

Sementara, Jelly Tobing, penggebuk drum Bharata Band, mengaku minum minuman berenergi secara berkala kendati ia tidak melihat manfaatnya secara langsung. "Merasa *segeran* sih, tetapi efeknya tidak seperti yang diiklankan itu," katanya, tertawa.

Yang terang, gaya hidup ber-*energy drink* sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Tentu, kebutuhan mereka yang mengkonsumsi minuman berenergi memang sudah di atas sembako. Lalu, merek apa yang paling populer di antara minuman berenergi yang beredar di pasaran?

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Polling Centre terhadap 5.061 responden di tujuh wilayah (Sumatra, Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan wilayah lainnya), Kratingdaeng menduduki peringkat teratas (39%). Selanjutnya: Extra Joss (21%), Gatorade (21%), M-150 (6%), Lipovitan (4%), Fit-Up (4%), Sakaginseng (2%), Panther (2%), dan Bachus D (1%).

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam poling ini terbagi menjadi pria (39%) dan wanita (61%). Jika diperinci lebih lanjut, pria maupun wanita memilih Kratingdaeng sebagai minuman favoritnya, masing-masing 43% dan 36%. Baru disusul Extra Joss (22%
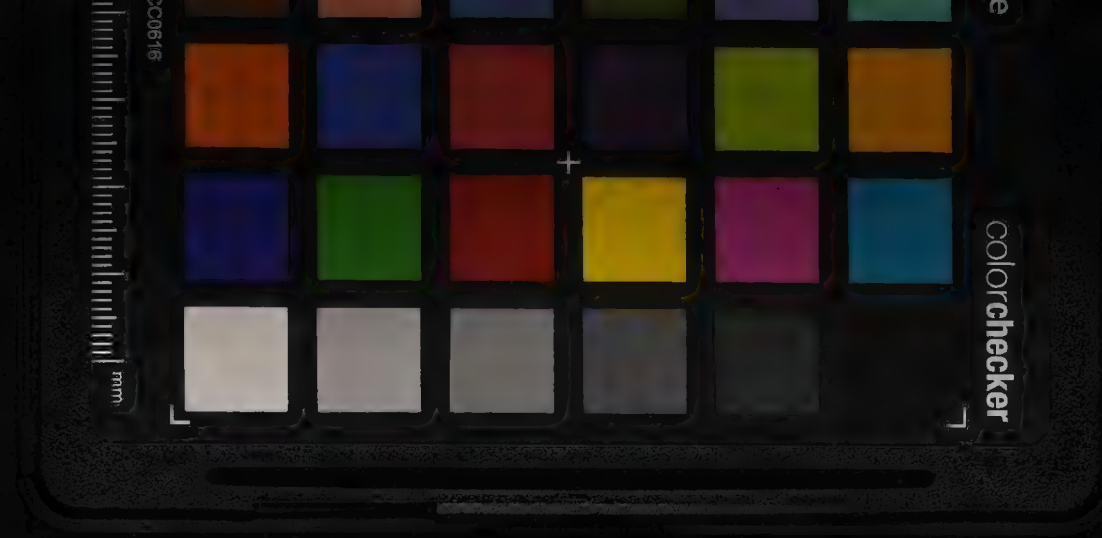
dan 21%) dan Gatorade (16% dan 24%), serta sisanya terbagi ke enam merek yang lain.

Dilihat dari segi usia, pekerjaan, dan wilayah responden tinggal, hasilnya similiar. Artinya, Kratingdaeng tetap menempati posisi paling atas, sedangkan juru kunci ditutup oleh Bachus D. Memang, di wilayah tertentu Gatorade tidak memegang *runner up*, tetapi harus mengalah kepada Extra Joss. Misalnya, di Jawa Timur, dengan 887 responden, Extra Joss menempati posisi kedua (26%), setelah Kratingdaeng (36%), sementara Gatorade harus rela menempati posisi ketiga (19%).

Lalu, tentang perilaku konsumen, ke mana mereka mendapatkan minuman berenergi? Sebagian besar lebih suka membeli di supermarket, yang di dalamnya termasuk pasar swalayan, minimarket, dan toko (54%). Warung terdekat menjadi pilihan kedua (40%), dan hanya 6% yang membeli minuman berenergi di pasar tradisional.

Jika diperinci lebih lanjut, ada perbedaan sedikit antara konsumen pria dan wanita. Tingkat belanja pria ke supermarket sama besarnya dengan ke warung (masing-masing 47%), baru kemudian pasar tradisional (6%). Sementara, konsumen wanita menempatkan supermarket sebagai tempat pembelian minuman berenergi teratas (58%), baru kemudian warung (36%), dan sisanya pasar tradisional (6%).

Bagaimanapun, minuman berenergi bukan kebutuhan utama. Itu sebabnya, konsumen hanya membeli secukupnya kalau kebetulan belanja. Sebagian besar responden (53%) mengaku hanya membeli satu botol, sedangkan yang membeli lebih dari satu botol sebanyak 39%, dan hanya 8% yang membeli satu karton.

Dalam hal tingkat kepuasan konsumen terhadap barang yang dibeli, sebagian besar (55%) mengaku sangat puas, dan 38% mengaku puas. Artinya, mereka hanya setia terhadap satu merek, dan hanya 7% yang ingin mencoba merek lain. Sama dengan pengalaman Nina Tursina, pertama kali mencoba Lipovitan, selanjutnya tidak ingin ganti yang lain. "Rasanya pas. Pernah sih mencoba Kratingdaeng, tetapi nggak cocok dengan lidah saya," katanya.

Penelitian tersebut cukup menarik. John Adrian, manajer pemasaran Panther, memberi komentar, Kratingdaeng mampu menduduki peringkat teratas karena memang terlebih dahulu masuk ke Indonesia. Sementara Panther, yang menempati posisi hampir paling buncit, baru dipasarkan pada awal 1990-an.

Hanya saja, ia menyayangkan, penelitian tersebut memasukkan minuman isotonik ke dalam minuman berenergi. Minuman isotonik yang dimaksud adalah Gatorade dan Extra Joss.

Minuman isotonik, menurut John, diminum setelah melakukan aktivitas (misalnya olahraga), untuk menggantikan air yang keluar dari tubuh. Sedangkan, minuman berenergi tergolong *food supplement*, yang diminum sebelum beraktivitas, untuk menambah energi. "Minuman energi ini, selain mengandung vitamin, biasanya juga mengandung madu dan kafein," katanya.

Memang, orang awam umumnya tidak terlalu membedakan antara minuman berenergi dan minuman isotonik. Teges Prita Soraya, *PR manager* Hard Rock Café Jakarta,

Membidik Responden dengan *Tele-data*

BAGAIMANA survei minuman berenergi (*energy drink*) dilakukan? Menurut Yanti B. Sugarda, dirut Polling Center, pengerjaan riset minuman berenergi ini menggunakan sebuah jasa *tele-data* yang dinamakan *tele-poll*. Prosesnya, responden diajak proaktif menghubungi sebuah nomor pesawat telepon tertentu (biasanya berawalan 0809xxx dan bertarif telepon premium).

Begitu menghubungi nomor yang bersangkutan, responden itu biasanya akan langsung mendengarkan rekaman pelbagai pertanyaan seputar minuman berenergi itu. Responden cukup menjawab dengan pilihan jawaban yang disesuaikan dengan angka-angka yang ada di pesawat telepon.

"Jadi, untuk menjawab, responden tinggal pencet-pencet angka yang ada di pesawat telepon," urai Yanti. Jawaban yang diberikan respoden secara otomatis langsung terproses, karena alat perekam tersebut sudah tersambung ke *data processing* pada sebuah komputer khusus.

Komputer ini juga dilengkapi dengan program tertentu yang mampu secara langsung mengeliminasi dan mengedit jawaban-jawaban responden yang salah ataupun yang tidak masuk akal. Sehingga, kekhawatiran bahwa responden yang akan menjawab hanyalah orang-orang yang sama bisa dikesampingkan.

Ajakan kepada masyarakat luas untuk memberikan tanggapan seputar minuman berenergi ini telah dipublikasikan Polling Center selama 5-6 hari di salah satu televisi swasta. Selama durasi waktu itulah, berhasil terjaring sebanyak 12.000 responden. "Tetapi, dari 12.000 responden yang terjaring itu, setelah mengalami proses *editing* dan eliminasi oleh program komputer, tersisa sebanyak 5.000 jawaban yang dianggap layak untuk dianalisis," ungkap Yanti.

Nah, kalau kita bicara sampel, *tele-poll* ini menggunakan model nonprobabilitas. Artinya, responden yang terjaring adalah *volunteer sample* (sampel sukarela), yang sudah barang tentu mempunyai akses melalui telepon dan televisi. *Error* bisa diketahui dan dihitung berdasarkan populasi pemilik pesawat telepon.

Tetapi, apa itu Polling Center? Polling Center

MINUMAN YANG PALING POPULER

Merek	%
Kratingdaeng	39%
Extra Joss	21%
Gatorade	21%
M-150	6%
Lipovitan	4%
Fit-up	4%
Sakagingseng	2%
Panther	2%
Bachus D	1%
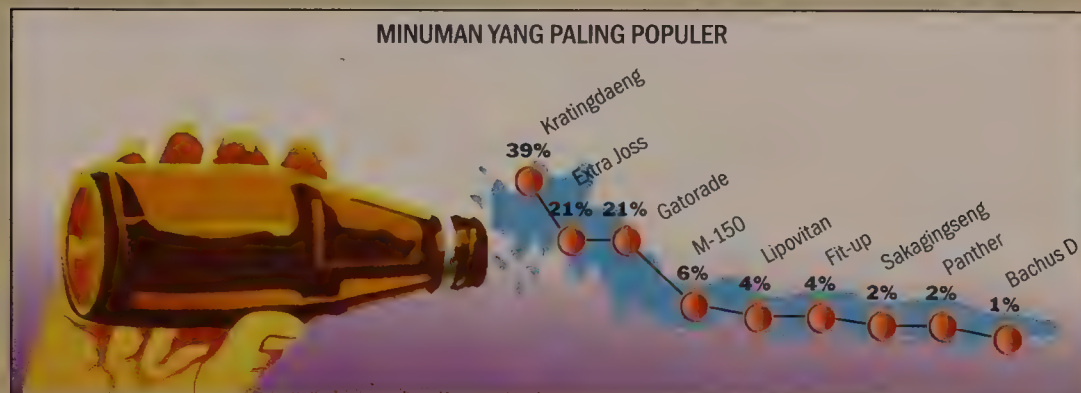
punya pengalaman buruk. Ketika masih duduk di bangku SMU, sehabis berolahraga, seharusnya dia minum minuman isotonik, tetapi malah minum minuman berenergi.

"Selang beberapa menit, saya langsung pingsan," tuturnya, mengenang. Ia tidak hendak menyalahkan minuman berenergi hasil pemberian tersebut, "Mungkin badan saya yang kurang fit."

Menurut Dr. M.A. Husaini, minuman berenergi biasanya mengandung zat adiktif. Asal tahu saja, Kratingdaeng, misalnya, di dalamnya terkandung kafein yang cukup tinggi, yakni 80 mg, dalam botol yang berisi 150 ml. Artinya, minum sebotol Kratingdaeng hampir sama dengan menenggak segelas kopi. Orang yang loyo dan mengantuk sudah pasti akan terjaga kalau minum minuman berenergi ini.

Husaini, peneliti utama di Departemen Kesehatan yang juga telah melakukan riset kepada atlet-atlet bulu tangkis nasional setahun lalu berkenaan dengan formula makanan yang baik untuk olahragawan, berpendapat, minuman berenergi itu mengandung unsur *doping material.* Unsur tersebut merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu agar lebih berenergi.

DAHLAN RP

MINUMAN BERENERGI. Sebaiknya diminum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tubuh Anda.

Selain dilarang untuk atlet yang hendak bertanding, demikian Husaini, jenis minuman ini juga kurang dianjurkan untuk umum. Pertama, karena membuat metabolisme tubuh menjadi tidak biasa, yakni mengeluarkan hormon-hormon tertentu untuk menghasilkan energi yang lebih dari biasanya. Kedua, akan menimbulkan ketergantungan kepada pemakainya. "Jika tidak minum, badan jadi *lemes*," katanya.

Ia juga mengingatkan, konsumen sebaiknya lebih berhati-hati terhadap penggunaan minuman berenergi, jangan terlalu percaya kepada iklan yang biasanya menjanjikan khasiat berlebihan. Zat-zat kandungan dalam minuman itu, seperti kafein, gula, karbonat, dan seterusnya, disebut *empty calory.*

"Sifatnya merangsang sesaat, dan secara psikologis bisa memulihkan tenaga, tetapi hal itu hanya *temporary* sifatnya," ujarnya. Nah, pilihan memang ada di tangan Anda. ▲

Burhanuddin Abe, Eni Saeni, Ari Prastowati, dan Imelda Sari K.

---

tiada lain adalah sebuah lembaga periset yang menawarkan jasa survei dengan metode *tele-data* – boleh jadi yang pertama di Indonesia. Jasa yang ditawarkan di antaranya *tele-poll* (memotret masalah ekonomi, sosial-politik, dan subyek tertentu), *tele-check* (hanya memotret masalah pada satu saat), *tele-track* (memotret masalah tertentu dengan cara berkala atau berulang sehingga menjadi sebuah tren), dan *tele-reaction* (memotret reaksi atas sebuah statemen, sebuah konsep tertentu).

Bermodalkan jasa *tele-data* ini, saat ini Polling Center bisa melakukan jasa riset pemasaran untuk pelbagai produk, atau riset tentang perkembangan sosial-politik di tanah air, misalnya soal kehadiran berbagai parpol baru. Untuk yang disebutkan belakangn ini, Polling Center telah menjalin kerja sama dengan stasiun televisi TPI dan SCTV.

Dan, untuk mendapatkan hasil riset berupa satu bentuk laporan tertentu, lembaga ini akan mengenakan ongkos – di antaranya berupa biaya desain riset, analisis riset, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.

"Jika klien kami *customize*, dia akan mendapatkan laporan berdasarkan permasalahan yang dia inginkan. Tetapi, ada juga yang melakukannya secara sindikasi. Yakni, mereka yang tertarik dalam satu permasalahan yang sama namun ingin mengeluarkan ongkos yang lebih murah," papar Yanti. Untuk satu produk kategori, Polling Center paling tidak mengenakan biaya Rp 3 juta- Rp 4 juta, sedangkan biaya untuk *summary report* berkisar antara Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Didirikan sejak 13 Agustus 1998, lembaga ini kini dijalankan oleh Yanti B. Sugarda dan Almaida Joesoef – nama yang tak asing lagi di dunia riset. Lembaga ini juga didukung sepenuhnya oleh PT Asitelindo Data Buana (Asiatel) sebagai penyedia fasilitas provider (teknologi) dan perangkat keras. Di antaranya, alat perekam komputerisasi ber kapasitas sambungan telepon sebanyak 1.050 *line.*

Jadi, boleh dikata, Polling Center ini adalah perkawinan antara personel yang biasa berkecimpung di bidang riset dan penyedia teknologi atau fasilitas perangkat keras. ▲

Ari Prastowati

Jenis Kelamin
61%
39%
Pria
Wanita

Pekerjaan
20%
Ibu Rumah Tangga
Pelajar
Karyawan
Wiraswasta

Daerah
38%
12%
Jabotabek
Jatim
Jabar
Sumatra
Jateng
Pulau lain
Kalimantan

N=5.061

Tempat Pembelian Minuman
Warung Terdekat
Pasar
Supermarket

Kepuasan akan Minuman
Puas
Ingin Merek Yang Lain
Sangat Puas

N=5.061
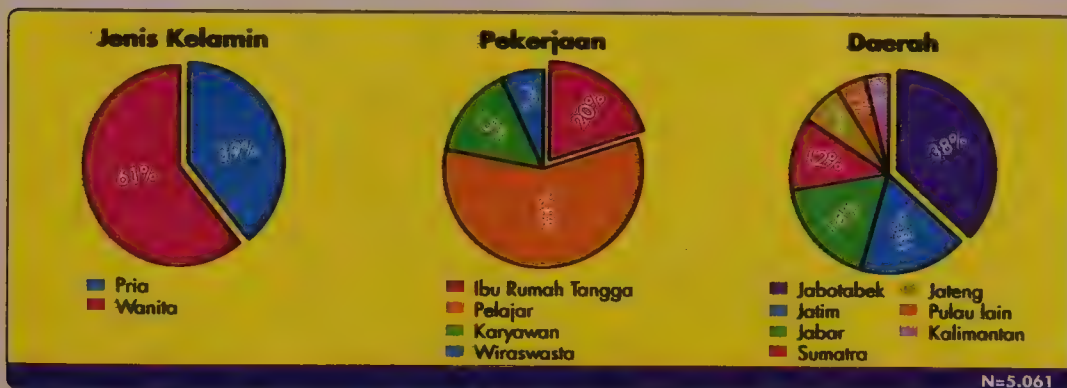
MENGADILI SOEHARTO LEWAT KEPPRES?

Kebijakan Soeharto saat menjabat presiden, cuma menguntungkan segelintir pengusaha, dan banyak merugikan negara. Dari sinikah, pengusutan bisa dimulai?

KALAU saja ada pemilihan presiden paling taat hukum di dunia ini, niscaya Soeharto akan masuk sebagai salah satu kandidat juara. Langkah-langkah yang dilakukannya semasa menjabat presiden tampak terukur. Amat jarang, presiden kedua RI itu melakukan sesuatu di luar jalur hukum. Itu sebabnya, begitu banyak keppres atau inpres yang keluar dari tangannya.

Menilik gelagat demikian, pantas bila musuh-musuh politik Soeharto – yang ingin menyeretnya ke meja hijau – saat ini seolah kebingungan. Mulanya, muncul isu soal harta di luar negeri. Tetapi, Soeharto bukannya *ngumpet*, malah enteng saja mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan surat kuasa pengusutan kekayaannya di luar negeri.

Langkah Soeharto ini pasti membuat frustrasi para "pemburu" harta Soeharto. Dan, hampir pasti: *diobok-obok* dengan cara apa pun, rekening bank atas nama Soeharto di luar negeri tak bakal terendus. Soeharto bukan orang bodoh. Buat apa ia membuka rekening pribadi untuk menimbun kekayaan di mancanegara, yang suatu saat bisa menjadi alat bukti untuk menyeretnya ke pengadilan.

Ia pun tak perlu memiliki perusahaan sendiri. Sebab, dengan kekuasaan mutlak yang digenggamnya, ia bisa meminta "bantuan" para pengusaha – terutama para kroninya – untuk menutupi kebutuhan dana tunai. Ketika transaksi valas membuat Bank Duta sempoyongan pada awal 1990-an – karena rugi ratusan miliar rupiah – dengan mudah Soeharto menyuntikkan dana segar sehingga Bank Duta tetap selamat meski modalnya sempat minus. Duit yang dipakai untuk menambal kerugian Bank Duta bukan dari rekening Soeharto, melainkan dari uluran tangan para konglomerat. Begitu pula untuk kepentingan sosial dan politik. Para pengusaha tak segan-segan – bahkan terkesan berlomba-lomba – menyetorkan dananya.

Soeharto, juga tidak memiliki saham di perusahaan mana pun, kecuali satu-dua lembar saham di perusahaan yang bertujuan mulia, seperti PT Abdi Bangsa dan PT Dua Satu Tiga Puluh. Bahkan, saham Bank Central Asia (BCA) yang diberikan dari konco kentalnya, Liem Sioe Liong, sejak tahun 1970-an, kepemi-

13 KEPPRES YANG DIGUGAT GEMPITA

PERATURAN	MATERI	PENERIMA	KERUGIAN
Keppres 42/1996 Inpres 2/1996	Mobnas	PT Timor (Tommy)	Rp 7,1 triliun
Keppres 20/1992 Inpres 1/1992	Tata niaga cengkeh	BPPC (Tommy)	–
Keppres 42/1994	Pengembangan pesawat N-250	IPTN	Rp 400 miliar
Keppres 14/1981	Pungutan Tol TMII dan Cibubur	Yayasan TMII dan Perumka	–
Keppres 82 & 83/1995 dan Keppres 74/1998	Lahan gambut sejuta hektar	Ari Sigit & Sudono Salim	Rp 527 miliar
Keppres 18/1991	Tagihan PPh	PT PAL	Rp 166,281 miliar
Keppres 34/1988	Pungutan Rp 1 untuk setiap pita cukai rokok	Pramuka & Setneg	–
Keppres 32/1991	Pemasokan air dari Indonesia ke Singapura	Grup Salim	–
Keppres 37/1992	Listrik swasta	a.l. Sudwikatmono	–
Keppres 12/1996	Kawasan berikat buat PT Bintan Inti Industrial Est.	Grup Salim	–
Keppres 93/1996	Pinjaman dari dana reboisasi	PT Kiani Kertas (Bob Hasan)	Rp 250 miliar
Keppres 3/1996	Bantuan bagi kredit usaha keluarga sejahtera dari reboisasi	Setneg	Rp 100 miliar
Keppres 21/1996	Bantuan bagi kredit usaha keluarga sejahtera dari reboisasi	Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	Rp 100 miliar

SOEHARTO, TUTUT DAN 'ANAK BUAH'NYA DI CMNP. Keppres atau inpres itu cenderung menguntungkan segelintir pengusaha, yang selama ini menjadi bagian dari Cendana.

UMMAT

likannya sudah atas nama Tutut dan Sigit. Dari segi ini, Soeharto benar-benar bersih. Tak punya timbunan harta. Kalau anak-anaknya bisa memiliki ratusan perusahaan, itu persoalan lain. Kalau konco dan kerabat dekatnya bisa mengembangbiakkan kekayaannya secara luar biasa, lewat berbagai fasilitas, kemudahan, keppres, dan inpres, itu juga persoalan lain.

Jadi, langkah Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang akan menguber harta Soeharto bakal mentok. Karena itu, sasaran bidik perlu diubah. Jika mau mendapatkan hasil, sasaran mesti diarahkan ke kebijakan yang dibuat semasa Soeharto berkuasa. Bukan apa-apa. "Hukum Soeharto" yang kebanyakan berupa keppres atau inpres itu cenderung menguntungkan segelintir pengusaha, yang selama ini menjadi bagian dari Cendana, seperti Grup Salim (Liem Sioe Liong), Grup Nusamba (Bob Hasan – operator bisnis yayasan-yayasan "milik" Soeharto), atau putra-putri (termasuk cucu) Soeharto.

Belum lagi soal isi aturan. Jelasnya, tak sedikit materi yang diatur berupa persoalan teknis. Padahal, lumrahnya, yang namanya keppres atau inpres hanya mengurusi persoalan umum, sedangkan urusan teknis diserahkan kepada departemen. Makanya sebagian ahli hukum menyebut, aturan semacam itu sudah tergolong *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang).

Yang jadi masalah, memilah aturan mana yang menyimpang, dan mana yang tidak, jelas bukan persoalan gampang. Buktinya? Dari 410 keppres yang dibuat Soeharto pada lima tahun terakhir, 72 di antaranya tergolong cacat hukum. Sedangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir, ada 69 keppres – sepanjang 1980-1997 – tergolong menyimpang.

Persoalan lain masih mengadang. Ini bertalian dengan pembuktian adanya kerugian yang dipikul negara akibat keluarnya "hukum Soeharto" itu. Dengan rentang waktu yang bisa jadi puluhan tahun, jelas tidak gampang bagaimana mengukur kerugian negara, karena berurusan dengan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sebut saja, soal pemberian status kawasan berikat buat PT Bintan Industrial Estate.

Persoalan semacam itu, agaknya, disadari mereka yang hendak mengusut asal-muasal kekayaan keluarga Cendana. Itu tampak dari gugatan *class action* yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita) kepada Presiden B.J. Habibie pada 30 September lalu. Menariknya, gerakan moral yang dikomandani Albert Hasibuan itu hanya mencantumkan 13 keppres. Ini langkah taktis. Soalnya, semakin sedikit aturan yang digugat, makin gampang pula proses pembuktiannya.

Gugatan Gempita pun bukannya hendak menyeret Habibie ke depan meja hijau, melainkan menuntut agar presiden RI ketiga itu membentuk tim independen untuk mengusut ke-13 keppres tersebut. Soalnya, kata Sekjen Gempita Feisal Tadjuddin, "Jaksa Agung terkesan lambat dan selalu bersandar pada asas legalitas dan prosedural. Jadinya, nggak banyak yang bisa dilakukan."

Bakal muluskah jalan yang ditempuh Gempita ini? Jujur saja, upaya ini pun sulit. Pasalnya, hingga kini, yang namanya gugatan *class action* tak pernah berhasil. Contohnya, kasus Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) saat menggugat kebijakan Soeharto yang mengalihkan dana reboisasi untuk membangun pesawat CN 250. Lagi pula, kata Ketua Tim Konsultan Cendana Yohannes Yakob, "Saya ingin tahu, kalau memang si A itu membawa nama masyarakat, tolong dijelaskan identitas masyarakat itu. Makanya, saya nggak setuju yang namanya *class action* ataupun tim independen, meskipun itu kewenangan mutlak jaksa agung."

Kemudian, gugatan Gempita hanya bisa berjalan bila Mahkamah Agung mau melakukan fungsi *judicial review*. Yang jadi soal, kasus semacam itu belum pernah terjadi. Lagi pula, kalaupun Gempita *ngotot* maju ke pengadilan, hasilnya pun mudah ditebak: hakim akan menolak untuk menilai kebijakan pemerintah. Contohnya? Gugatan Megawati dalam kasus PDI.

Lalu, jalan apa lagi yang tersisa? Ya, tinggal membuktikan ada-tidaknya kekayaan hasil korupsi Soeharto. Ini jelas pekerjaan yang boleh dibilang muskil, alias *mission impossible.* Kalaupun ada celah yang bisa dimasuki, ya tinggal *political will* dari pemerintahan Habibie. Tetapi sebagian orang beranggapan, cara ini pun ibarat menunggu godot, alias mimpi semata. ▲

Ule, Ari Prastowati, Imelda Sari K., dan Miftahuddin

TIMOR RUGIKAN NEGARA RP 8 TRILIUN?

ANDAI Soeharto diadili lewat keppres yang dibuatnya, salah satu pertanyaan yang bakal muncul adalah: Berapa kerugian negara akibat peraturan itu? Berikut penuturan pengamat otomotif Soehari Sargo ihwal kerugian negara akibat kebijakan pemerintah soal mobnas:

Kalau dilihat perhitungannya, memang bisa macam-macam. Ada yang menghitung, kerugiannya hanya beberapa ratus miliar sampai triliunan rupiah. Bergantung pada cara menghitung dan referensinya. Yang pasti, fasilitas yang diterima mobnas itu pembebasan Ppn (pajak penjualan) impor (10%), dan pajak barang mewah (35%) yang ditanggung pemerintah.

Kita ambil yang ekstrem saja. Dari 40 ribu unit itu, jika dikalikan satu mobilnya seharga US$ 8.000, harga total Timor itu US$ 320 juta. Nah, jika mobil itu dimasukkan ke sini dalam bentuk *completely knocked down* (CKD), dia akan terkena pembebasan fasilitas Ppn impor dan pajak barang mewah sebesar 110%. Perinciannya, 65% untuk bea masuk CKD, Ppn impor 10%, dan pajak barang mewah 35%. Jadi, kerugian yang ditanggung negara sebesar: US$ 320 juta x 110% = US$ 352 juta.

Sedangkan, jika mobil itu diimpor dalam bentuk *completely built up* (CBU), fasilitas yang diterimanya sebesar 245%. Perinciannya, bea masuk untuk CBU sebesar 200%, Ppn impor 10%, dan pajak barang mewah 35%. Berapa kerugian negara? Kalikan saja US$ 320 juta dengan 245%, maka akan didapat angka US$ 784 juta.

Berapa kerugian itu kalau dirupiahkan? Tergantung. Kalau memakai patokan Rp 2.500/US$ – ketika Tommy mendatangkan Timor – kerugian negara bila Timor diimpor dalam bentuk CKD mencapai Rp 800 miliar. Tetapi, kalau harga US$ dipatok Rp 10.000, kerugiannya menjadi Rp 3,5 triliun.

Begitu pun menghitung kerugian bila impor mobil itu dalam bentuk CBU. Jika kurs yang dipakai Rp 2.500/US$, kerugian negara sekitar Rp 2 triliun. Sebaliknya, jika angka Rp 10.000/US$ yang dijadikan pegangan, angka kerugian pun membengkak menjadi Rp 8 triliun.

Jadi, kalau mau *ngomong* kerugian negara akibat Timor, angkanya bergerak pada kisaran Rp 800 miliar sampai Rp 8 triliun. Semua tergantung pada sudut pandang mana yang dipakai. ▲

RUPIAH MENGUAT KOK CEMAS

Ketika rupiah menerobos batas Rp 8.000 per dolar, pemerintah malah mencemaskannya. Padahal, inilah saat paling tepat untuk mendongkrak nilai rupiah yang lama loyo.

SETELAH lama terombang-ambing di atas Rp 10.000 per dolar, pekan lalu rupiah menerobos batas psikologis Rp 10.000 per dolar. Dan, bagai pelari yang menenggak *doping*, di pasar uang Jakarta, rupiah bergegas menembus Rp 9.000, bahkan sempat menginjak Rp 8.800 per dolar. Lebih hebat lagi, di pasar Singapura, mata uang Paman Sam itu sempat di-*bid* Rp 8.600. Namun, aksi ambil untung para pelaku pasar uang akhirnya mengembalikan posisi rupiah ke tingkat Rp 9.050 per dolar pada penutupan perdagangan Jumat (9/10).

Meski reli rupiah tidak berlanjut, posisi Rp 9.000 per dolar tetap melegakan. Sebab, itulah tingkat tertinggi rupiah sejak Soeharto *lengser*. Lompatan rupiah yang cepat itu (awal pekan lalu masih diperdagangkan pada kisaran Rp 10.500 per dolar) disambut keplokan oleh berbagai pihak. Toh, kecemasan tetap menggumpal. Soalnya, jika rupiah menguat terlalu cepat, para spekulan bisa kembali beringas menubruk dolar. Akibatnya, kurs dolar akan terbang kembali di atas Rp 10.000-an. Bisa Rp 11.000 atau malah 12.000 per dolar, bergantung pada suhu politik domestik dan kondisi ekonomi global – terutama pergerakan kurs yen terhadap dolar. Hal itu pulalah yang dikhawatirkan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. "Kita tidak menginginkan rupiah menguat terlalu cepat," ujarnya, seusai menemui Presiden Habibie, di Istana Merdeka.

Tentu saja, sikap pemerintah seperti itu terasa ganjil. Bukankah makin cepat otot rupiah menguat makin baik bagi perekonomian? Rupanya, Ginandjar berpegang teguh pada "ajaran" Dana Moneter Internasional (IMF), yang mematok sasaran penguatan rupiah terhadap dolar menjadi Rp 10.000 pada akhir tahun ini. Apalagi, asumsi penyusunan APBN 1998/1999 didasarkan pada kurs Rp 10.600 per dolar.

Pernyataan Ginandjar bukan mustahil bakal menimbulkan teka-teki. Sebab, omongannya bisa dianggap sebagai sinyal bagi para pelaku pasar: pemerintah enggan melihat rupiah menguat secara cepat. Jika demikian, sulit diharapkan dalam waktu dekat pasar bakal bergerak mendorong penguatan rupiah yang signifikan, misalnya, ke tingkat Rp 8.000 atau bahkan Rp 7.000 per dolar. Bahkan sebaliknya, bisa saja dolar cuma singgah sesaat saja di level Rp 9.000-an. Selanjutnya, kembali melayang-layang di atas Rp 10.000.

Mudah-mudahan, Ginandjar tidak terlalu serius dengan ucapannya. Mematuhi IMF memang penting – karena sudah lama kita memakai kacamata kuda mengikuti saran sang dewa penyelamat itu. Tetapi, jika ada peluang untuk mempercepat penguatan rupiah, buat apa menampikya. Bukankah rupiah melemah pun lewat pergerakan yang cepat: dari Rp 2.500 ke Rp 4.000, kemudian langsung meluncur ke Rp 8.000, dan akhirnya bablas di atas Rp 15.000 per dolar. Jadi,

RUPIAH MELEJIT TERHADAP DOLAR

Tanggal	Kurs (Rp)
5/10	10.500
6/10	10.000
7/10	9.500
8/10	9.000
9/10	9.000
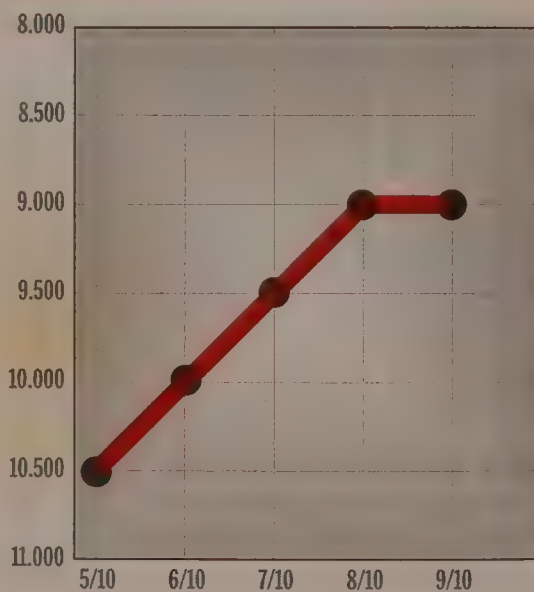
kenapa mesti bersikukuh pada target waktu yang ditetapkan IMF. Justru, inilah momentum yang paling tepat untuk mendongkrak nilai rupiah. Mumpung pasar uang dunia panik, dan dolar terkapar terhadap yen. Nah, kala sentimen terhadap dolar sedang miring inilah, pemerintah bisa ikut menghajarnya lewat berbagai cara. Bisa dengan ucapan, bisa pula dengan tindakan.

Tentu saja, ucapan yang diharapkan bukan seperti omongan Ginandjar tadi. Tetapi, yang lebih arif. Kalau perlu, yang agak menggertak pasar. Misalnya, "Kita berharap, rupiah akan makin menguat dalam waktu de-

DADANG TRI

MONEY CHANGER. Menguatnya nilai rupiah lebih disebabkan melemahnya nilai dolar terhadap mata uang regional Asia.

kat." Atau, "Penguatan rupiah belakangan ini akan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan kontrol devisa." Ucapan-ucapan seperti itu, apalagi jika "dikoordinasikan" dengan bos-bos IMF seperti Hubert Neiss atau Stanley Fischer, tentu akan membuat para spekulan berpikir dua kali sebelum mereka main tubruk dolar lagi.

Ingat, bagaimana ampuhnya pernyataan Hubert Neiss di Seoul, ketika melontarkan pernyataan mengenai kontrol devisa, pertengahan September lalu. Menurut direktur IMF Asia Pasifik itu, negara-negara yang dilanda krisis ekonomi di Asia bisa saja menerapkan kontrol devisa dalam jangka pendek, supaya dampak gejolak pasar uang bisa diredam. Pernyataan itu kontan mendongkrak rupiah dari Rp 11.450 ke 10.900. Selanjutnya, rupiah lama berada di level Rp 10.500-an. Mata uang Asia lain juga mencetak *gain* terhadap dolar.

Nah, jika kini para pejabat pemerintah cukup pintar memainkan psikologi pasar, lewat ucapan-ucapan yang bisa menciutkan nyali para spekulan, bukan mustahil rupiah bergerak ke angka Rp 7.000-an per dolar. Sayangnya, Ginandjar keburu *ngomong* soal target kurs Rp 10.000 per dolar. Dan, di Washington, Gubernur Bank Indonesia Sjahril Sabirin menyatakan, kontrol devisa baru akan diberlakukan pada 1999. Akibatnya, para pemilik duit kembali melakukan aksi borong dolar *(buyback)*, sehingga rupiah cuma bergerak pada kisaran sempit pada akhir pekan lalu. Tidak mampu menembus angka Rp 8.000 per dolar. Para pejabat kita, agaknya, mesti banyak belajar dari sejawatnya di Jepang – yang kerap main gertak untuk menghalau ulah spekulan menghajar yen.

Meski ucapan yang tepat bisa mempengaruhi arah pergerakan kurs, tindakan yang (akan) dilakukan pasti lebih dicermati pelaku pasar. BI tak perlu ragu-ragu lagi untuk melanjutkan intervensi di pasar uang lewat bank-bank pemerintah. Dulu, BI berhasil menggiring dolar ke tingkat Rp 10.500 dari kisaran Rp 13.000-an, sebelum *nongkrong* lagi di level Rp 12.000-an gara-gara maraknya demonstrasi. Kini, terbuka peluang bagi BI untuk mendorong rupiah lebih tegak: menjadi Rp 8.000, atau malah di bawahnya. Para pialang pasar uang kian kerap menyebut-nyebut kurs rupiah terhadap dolar menjadi Rp 8.000. Pada perdagangan yang tipis, karena para investor atau spekulator khawatir lalu lintas devisa di Indonesia dijaga ketat, intervensi bakal membawa hasil yang signifikan. "Kontrol devisa bisa efektif di Indonesia," kata Chua Soon Hock, kepala strategi Sanwa Bank, Singapura.

Kalangan dunia usaha dan perbankan sangat berharap, rupiah bisa bergerak lebih cepat. "Mestinya, kurs rupiah sudah berada pada tingkat Rp 7.000 per dolar," kata Direktur Utama Bank IFI, Harry Rachmadi. Menurut Harry, menguatnya nilai rupiah belakangan ini tidak disebabkan oleh membaiknya fundamental ekonomi di dalam negeri, melainkan lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yakni melemahnya nilai dolar terhadap mata uang regional Asia. Harry mengambil perbandingan nilai dolar dengan nilai yen yang sempat menembus angka 112 per dolar. Padahal, sebelumnya, yen sempat terpuruk ke level terendah 147,4 per dolar pada 11 Agustus.

Keperkasaan rupiah yang mulai pulih itu, menurut Harry, sebaiknya dijadikan pijakan untuk terus memperkuat otot rupiah. Caranya, dengan meningkatkan kegiatan humas yang positif. Misalnya, terus melakukan pengusutan terhadap harta kekayaan mantan Presiden dan kroni-kroninya, serta membereskan persoalan utang para bankir nakal. "Kalau kegiatan humas itu berjalan dengan baik, saya yakin, kurs rupiah bisa menguat hingga di bawah Rp 7.000 per dolar," ujarnya.

Memang, tak ada alasan kurs rupiah terhadap dolar tetap berada di awang-awang. Kebutuhan kalangan dunia usaha maupun pemerintah terhadap *greenback* – julukan mata uang Amerika itu – sudah jauh berkurang. Pengusaha swasta tidak perlu lagi repot-repot menguber dolar, karena utangnya bisa dibayar dengan rupiah lewat skema Indra (Indonesia Debt Restructuring Agency) dan Prakarsa Jakarta. Meski belum ada pengusaha yang masuk ke Indra, aliran dolar untuk membayar utang swasta praktis berhenti. Memang, masih ada satu-dua perusahaan yang enggan ikut skema Indra dan tetap memilih melunasi kewajiban kepada kreditornya di luar negeri. Tetapi, jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah utang swasta (termasuk bank) sebesar 33,2 miliar dolar, yang jatuh tempo hingga Maret 1999.

Utang pemerintah sebesar 4,1 miliar dolar juga sudah dijadwalkan lewat Paris Club. Begitu pula utang antarbank sebesar 7.7 miliar dolar. Utang bank-bank nasional yang jatuh tempo pada 1998/1999, lewat Kesepakatan Frankfurt, diubah menjadi pinjaman baru dengan jangka waktu 1-4 tahun. Jadi, tekanan untuk memborong US$ praktis sudah sirna. Kebutuhan dolar paling banter cuma untuk mengimpor bahan baku atau bahan penolong, dan membayar gaji ekspatriat. Itu pun jumlahnya tidak akan banyak.

Jadi, tak perlu cemas jika rupiah menguat cepat. Kecuali jika pemerintah memang ingin lama bermain-main dengan para spekulan. ▲

Didin Abidin Masud dan Hartono

ISTIMEWA

Baru tiga bulan Robby Djohan menduduki kursi dirut, PT Garuda Indonesia sudah untung Rp 200 miliar. Optimisme pun kembali muncul. Tetapi, *ngomong-ngomong*, laba itu karena program efisiensi atau operasional?

MINGGIR CALO BERDASI
GARUDA MAU TERBANG TINGGI

KALI ini, Tanri Abeng boleh menepuk dada. Maklum, pilihan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN itu menempatkan Robby Djohan sebagai dirut Garuda membuahkan hasil memuaskan. Buktinya? Pada Agustus 1998, maskapai penerbangan pembawa bendera Indonesia itu menangguk untung Rp 200 miliar. Padahal, bekas dirut Bank Niaga itu baru diangkat medio Juni silam.

Kenyataan itu cukup mengejutkan, memang. Pasalnya, pada masa lalu, Garuda selalu merugi, gara-gara timbunan utang yang amat besar. Pada 1985, misalnya, beban utangnya mencapai US$ 1 miliar. Tujuh tahun "dipiloti" Soeparno, utangnya menyusut tinggal US$ 100 juta. Tetapi, entah bagaimana, utang itu kemudian menggelembung lagi. Pada Desember 1997, misalnya, tanggungan utang dalam valuta asing mencapai US$ 129,7 juta. Sedangkan, utang rupiahnya tercatat Rp 307,2 miliar.

Salah satu penyebab lonjakan utang itu, rupanya, dipicu oleh keluarnya *promissory notes* berjangka 360 hari senilai Rp 100 miliar. Soepandi, yang saat itu menduduki kursi dirut, agaknya hendak mengurangi beban perusahaan. Soalnya, dana hasil penjualan surat berharga itu dipakai untuk membayar biaya *leasing* pesawat yang jatuh tempo.

Tetapi, usaha itu jadi sia-sia karena sifat utangnya yang berjangka pendek. Lagi pula, seperti laporan Ketua Tim Evaluasi Utang Piutang dan Refinancing, Daan Achmad, kepada direksi pada Oktober 1997, "Apabila semua biaya dan investasi seperti *leasing* pesawat dibiayai oleh Garuda, langkah ini adalah tidak benar dalam manajemen keuangan."

Kinerja Garuda kian terseok-seok ketika krisis ekonomi membuat nilai rupiah anjlok. Kerugian kurs yang harus ditanggungnya pun membubung hingga Rp 1,3 triliun. Belum lagi kerugian operasionalnya yang mencapai Rp 20 miliar setiap bulan. Kerugian itu disebabkan oleh patokan kurs dolar sebesar Rp 5.000. Selain itu, besarnya komponen luar negeri yang digunakan (80%) membuat Garuda kian terjepit.

Lalu, bagaimana caranya, Garuda tiba-tiba bisa untung Rp 200 miliar? Menurut Direktur Keuangan Garuda, Emirsyah Satar, laba tersebut diperoleh dari operasi dan program efisiensi. Dari segi operasi, kenaikan pendapatan terjadi karena Juli, Agustus, dan September, merupakan masa panen, sehingga *occupancy rate* bisa mencapai 80%. Bandingkan dengan bulan-bulan lain, yang rata-rata cuma 47%. Akan halnya titik impas, dicapai pada kisaran 60%-65% sekali terbang.

Sedangkan, demi efisiensi, Garuda memangkas jalur-jalur penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan, seperti Roma dan Paris. Dengan meniadakan dua jalur ini, setidaknya Garuda bisa menghemat US$ 60 juta setiap tahunnya, atau US$ 5 juta per bulan. Dengan kurs Rp 11.000/US$ saja (kurs Juni sampai Agustus rupiah lebih rendah lagi nilainya), selama tiga bulan sudah bisa dihemat Rp 165 miliar. Penghematan yang lumayan. Padahal, penghematan yang dilakukan

bukan cuma itu. Pembayaran sewa pesawat pun dibabat habis. Maklum, sepanjang era Orde Baru, Garuda kerap menyewa pesawat secara serampangan. "Sudah biaya sewanya mahal, pesawatnya jelek lagi," kata Robby.

Penghamburan duit seperti itu tak bakal terulang. Pada musim haji tahun ini, misalnya, Robby memutuskan tidak akan menyewa pesawat. Sedangkan, jemaah haji yang tidak terangkut akan diserahkan kepada maskapai penerbangan lain. Kerja sama dengan Saudi Arabian Airlines pun sudah diteken. "Kita perkirakan, jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini sekitar 40.000 orang. Yang 20.000 kita angkut, sisanya kita berikan kepada Saudi Arabian Airlines," kata lelaki kelahiran Semarang 60 tahun lalu itu.

Tetapi, yang paling meringankan beban keuangan Garuda adalah keberhasilan manajemen merestrukturisasi pinjamannya senilai US$ 400 juta. "Dengan tingkat bunga 3%, kita bisa menghemat US$ 12 juta," jelas Emir, seraya menambahkan, mulai stabilnya nilai rupiah pada tiga bulan terakhir membuat Garuda makin leluasa melakukan manuver.

Nah, faktor-faktor itulah yang membuat Garuda bisa menangguk untung Rp 200 miliar. Meski begitu, kata Emir, sampai akhir tahun ini manajemen hanya memasang target titik impas. Bukan apa-apa. Kerugian buku yang dideritanya hingga Agustus masih luar biasa besar, sekitar Rp 2,9 triliun. Untuk mencapai target *break even point* itu, Emir mengatakan, pihaknya akan melakukan revaluasi aset. "Pesawat-pesawat kita kan nilainya dalam US$. Kalau direvaluasi, nilainya pasti meningkat," ujar mantan kepala perwakilan Bank Niaga Hong Kong ini.

Hingga Agustus 1998, Garuda punya piutang Rp 2,7 triliun. Perinciannya, tagihan tiket ke agen-agen sebesar Rp 700 miliar, *maintenance* Rp 1,1 triliun, *allowance* kepada mitra (Roll Royce dan Air Bus) Rp 500 miliar, dan lain-lain Rp 400 miliar. Semua piutang tersebut, boleh dibilang, tidak ada masalah. Yang masih mengganjal cuma tagihan *maintenance.* Yakni, utang Lufthansa senilai US$ 10 juta, masih menunggu hasil negosiasi, karena ada perbedaan hitungan.

Akan halnya piutang Merpati Nusantara Airlines (MNA) sebesar US$ 34 juta, sulit ditagih, karena kondisi perusahaannya yang tengah megap-megap. Sempati pun jelas tak bisa diharapkan melunasi utangnya ke Garuda senilai US$ 1 juta. Makanya, Robby memilih cara *write off.* Dengan menghapusbukukan piutang bermasalah itu, neraca Garuda bakal lebih bersih. "Tetapi, kita tetap akan menempuh jalur hukum untuk menagih utang Sempati itu," kata Robby.

KONTRAK-KONTRAK YANG DIPANGKAS

NAMA PERUSAHAAN	BISNIS	PEMILIK
PT Angkasa Bina Wisesa	Perdagangan	Martini Bagus Sulaeman
PT Bimantara Graha Insurance Broker	Asuransi	Bambang Trihatmodjo
PT Antarini Mitra Sejati	Catering	Sutianah D. Sutiwibowo (adik tiri Soeharto)
Humpuss	Agen Pembelian Mesin A-330 & 300 Roll Royce	Hutomo Mandala Putera Soeharto
Humpuss	Agen Pembelian 6 Pesawat F-100	Hutomo Mandala Putera Soeharto
GPA Aero Citra Ltd.	Leasing 3 Pesawat MD-11	Konsorsium

DAHLAN RP

ROBBY DJOHAN DI DPR. "Kalau ada intervensi, pilihannya cuma dua: intervensi itu dicabut, atau saya yang pergi,"

Demi efisiensi pula, Garuda berniat mengurangi jumlah penerbang, dari 700 menjadi 600 pilot. Tetapi, langkah ini bukan berarti PHK. Soalnya, ke-100 pilot itu akan mengikuti program cuti di luar tanggungan selama 2-3 tahun. Nah, selama masa cuti itu, para pilot ini akan menerbangkan pesawat MD-100 milik Eva Air dan Swiss Air. Setelah tiga tahun (dengan perkiraan, ekonomi Indonesia sudah membaik), pilot-pilot tersebut akan kembali ke pangkuan Garuda.

Mulai mengkilapnya kinerja keuangan Garuda, agaknya, tak bisa dilepaskan dari langkah Robby membabat proyek-proyek bernuansa KKN. Maklum, kontrak-kontrak semacam itulah yang membuat kerugian sebesar 5% dari total penjualan. Jadi, kata Robby, "Kalau tahun ini kita menargetkan penjualan US$ 500 juta, berarti kita bisa menghemat US$ 25 juta."

Robby pantas geram dengan pola KKN itu. Sebut saja, PT Angkasa Bina Wisesa. Perusahaan yang mengelola pergudangan milik Martini Bagus Sulaeman (adik tiri Soeharto) itu disebut-sebut bisa masuk Garuda berbekal memo Sekretariat Negara, plus persetujuan Soeharto – yang saat itu masih menjadi presiden, tentunya. Setelah dihitung-hitung, selama empat tahun, perusahaan tersebut berhasil menangguk untung Rp 137 miliar. Sedangkan, Garuda hanya kecipratan Rp 43,9 miliar. Padahal, porter, listrik, telepon, dan biaya operasional, ditanggung Garuda. Percaloan tingkat tinggi seperti itu di masa mendatang mesti ditendang jauh-jauh, agar Garuda leluasa menggarap lahan bisnisnya.

Kini, di tangan Robby, Garuda mulai siap kembali mengepakkan sayapnya. Dari sisi operasional, agaknya, tak bakal jadi ganjalan. Citra sebagai maskapai penerbangan yang aman dan nyaman, serta tepat waktu, boleh jadi bakal segera melekat. Yang masih jadi tanda tanya: Mampukah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1967) itu membendung intervensi, yang selama ini jadi *trade mark* BUMN? "Kalau ada intervensi, pilihannya cuma dua: intervensi itu dicabut, atau saya yang pergi," katanya.

Jadi, kalau mau melihat Garuda Indo-nesia terbang tinggi, calo-calo atau maling berdasi jangan coba-coba lagi mengganduli. ▲

Sulaeman Sakib & Hartono

GOLKAR 34 TAHUN: MEMANGKAS AKAR ATAU BENALU

Recalling besar-besaran dilakukan Golkar. Upaya memuluskan Sidang Istimewa MPR?

PADA acara ulang tahunnya yang ke-34, 20 Oktober ini, Golkar menyiapkan perayaan secara sederhana. Hanya potong tumpeng yang dihadiri kalangan internal. Rapat pimpinan Golkar pada 17-20 Oktober juga dilakukan tanpa kesan jorjoran.

Tampaknya, baru kali ini pengurus DPP Golkar menyelenggarakan rapim dengan leluasa. Tak ada lagi kekhawatiran campur tangan Soeharto selaku ketua Dewan Pembina. Setelah Soeharto *lengser* dari kursi presiden, Golkar ibarat ayam kehilangan induk. Setiap faksi saling cakar. Munas Luar Biasa, Juli lalu, menunjukkan hal itu. Di tengah tuntutan reformasi, Akbar Tanjung terpilih sebagai ketua umum. Namun, pergulatan internal masih berlangsung, di pusat dan daerah.

Misalnya, tampak pada musyawarah daerah di 27 dewan pimpinan daerah Golkar. Bisa dikatakan, baru kali ini proses pemilihan dilakukan secara demokratis. Kubu keluarga besar ABRI tetap *ngotot* mendominasi kepengurusan. Kabarnya, sebanyak 15 DPD diketuai figur yang berasal dari jalur ABRI. Gesek-gesekan muncul pula pada rencana *recalling* anggota Fraksi Karya Pembangunan di MPR dan DPR.

Pekan lalu, sebulan menjelang Sidang Istimewa (SI) MPR, keluar keputusan itu. Ada dua surat yang dibuat DPP Golkar, tertanggal 9 Oktober, perihal *recalling* – resminya disebut pergantian antarwaktu (PAW). Pertama, surat bernomor R-26/Golkar/X/1998, di mana ada 36 orang anggota F-KP MPR yang terkena PAW, termasuk hampir seluruh menteri Kabinet Pembangunan VII dan sebagian menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

Di antara mereka, antara lain, Moerdiono, Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudohusodo, dan Haryanto Dhanutirto. Sedangkan, untuk menteri yang masih aktif, ada tiga orang, yakni: Tanri Abeng, Rahardi Ramelan, dan Giri Suseno. Selain itu, DPP Golkar, melalui suratnya bernomor R-27/Golkar/X/-1998, yang ditandatangani Ketua Umum Akbar Tanjung dan Sekjen Tuswandi, juga menarik lima anggota F-KP DPR. Yakni: Indra Bambang Oetoyo, Mubha Kahar Muang, Barioen Soetjipto, Arifin Wanas (meninggal, dari daerah pemilihan Jambi), dan Lengkong (meninggal, pemilihan Riau).

Ada beberapa kategori diterapkan bagi mereka yang di-*recall* dan dianggap sebagai benalu di pohon beringin. *Pertama*, kader yang sudah menyeberang alias pindah ke parpol lain, diantaranya Yusril Ihza Mahendra (ketua Partai Bulan Bintang) dan K.H. Ma'ruf Amin (Partai Kebangkitan Bangsa). *Kedua*, mantan menteri Kabinet Pembangunan.

Memang, sempat muncul perdebatan sengit. Seusai Munaslub, Edi Sudradjat dianggap ikut kelompok *mbalela* di Barisan Nasional (BN) dan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB). Dia dianggap layak untuk di-*recall*. Namun, dalam rapat Badan Pengurus Harian DPP Golkar, kabarnya Menaker Fahmi Idris yang meminta mantan menhankam ini dipertahankan. Alasannya, Edi adalah kompetitor Akbar dalam Munaslub lalu, sehingga suasana demokratis harus dipertahankan. Selain itu, ada permintaan dari petinggi militer agar Edi tetap dipertahankan di F-KP.

ADEK BERRY

AKBAR TANJUNG DAN EDI SUDRADJAT. Demi demokrasi, Edi tidak di*recall*.

Selain Edi, muncul juga usulan agar mantan Menkeu Mar'ie Muhammad – yang menolak jabatan dubes maupun penasehat presiden – juga di-*recall*. Tapi, akhirnya, Mar'ie tetap dipertahankan. Menurut sumber di Golkar, hal itu dilakukan guna menghindari cercaan masyarakat. Maklum, Mar'ie sangat populer di mata publik.

Kriteria *ketiga*, para menteri yang bukan fungsionaris DPP Golkar atau yang tidak terkait langsung dengan urusan politik. Namun, ada lima menteri yang jadi pengurus Golkar masih dipertahankan. Mereka adalah: Akbar Tanjung, Theo L. Sambuaga, Agung Laksono, Fahmi Idris, dan Adi Sasono. Dua menteri lainnya – walaupun tidak masuk kategori ketiga – masih dipertahankan. Itulah Ginandjar Kartasasmita dan Hartarto. Menko Ekuin Ginandjar, karena dia menjabat ketua F-KP

MPR. Sedangkan Hartarto, karena dia adalah penasihat fraksi dan pernah menjadi koordinator presidium harian Dewan Pembina.

Kategori *keempat*, kader Golkar yang dianggap tidak loyal. Masuk kriteria ini: Sarwono Kusumaatmadja, Siswono, Hayono Isman, Indra Bambang Oetoyo, Mubha Kahar Muang, dan Barioen Soetjipto. Tiga yang pertama berasal dari Kosgoro, dan kini aktif di BN serta penggagas GKPB. Sedangkan, tiga lainnya menjadi pengurus Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), yang juga ikut dalam BN.

Di-*recall*-nya pentolan FKPPI terang memicu isu miring. Ada yang mengaitkannya dengan upaya meminggirkan ormas yang selama sepuluh tahun ini mendominasi Golkar. Namun, sinyalemen itu dibantah Sekjen DPP Golkar, Mayjen Toeswandi. Menurutnya, langkah itu dimaksud untuk penyegaran anggota. "Tidak ada latar belakang karena mereka duduk di organisasi FKPPI," ujarnya.

Sumber di DPP Golkar juga menolak isu itu. Menurut dia, masih banyak anggota F-KP dari FKPPI yang dipertahankan. Misalnya, Rully Chaerul Azwar, Tubagus Haryono, dan beberapa lainnya. "*Recalling* itu karena mereka tidak loyal," tutur sumber itu. Memang, tiga anggota tersebut dianggap "nakal". Indra Bambang Oetoyo, misalnya, menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus DPP Golkar. Sementara, Mubha Kahar M. dan Barioen, hingga bulan lalu, belum mengembalikan formulir kesediaan menjadi pengurus. Selain itu, Mubha-lah yang bikin geger rapat paripurna DPR bulan lalu, berkaitan dengan kekisruhan calon ketua Bepeka. Dalam voting, dia ikut mendukung usul F-PP agar pencalonan pimpinan Bepeka tidak diulang.

Rapat penentuan daftar akhir kader-kader Golkar yang di-*recall*, kelihatannya, berjalan alot. Kabarnya, ada pertemuan di kediaman Presiden Habibie, Selasa malam 29 September lalu. Konon Habibie menginginkan agar Hartarto dan Indra Bambang Oetoyo dipertahankan. Namun, Toeswandi membantah bila dikatakan Habibie mengintervensi DPP Golkar. "Hanya memberi masukan, kami kan boleh dengar dari mana saja. Namun, keputusan tetap di tangan DPP, tidak seperti era lalu," katanya. Tampaknya, rapim Golkar bertema *Dengan Reformasi Kita Sukseskan Agenda Politik Nasional* perlu membahas apakah langkah *recalling* itu reformatif atau tidak. ▲

Untung Widyanto/Eni Saeni dan Imelda Sari K.

HABIBIE MENOLAK MENGADILI SOEHARTO?

KALAU Golkar tengah diguncang intrik internal, tak demikian halnya dengan PPP. Partai bintang yang terancam ditinggalkan konstituennya itu, kini, habis-habisan mendongkrak citra dengan berbagai gebrakan di DPR dan MPR. Di DPR, PPP adalah satu-satunya fraksi yang menolak Perpu No. 2/1998, yang akhirnya ditarik kembali oleh pemerintah. Mereka juga satu-satunya yang menolak adanya jatah kursi ABRI di DPR.

Di MPR, PPP mengusulkan berbagai Rancangan Ketetapan (Rantap) dan Rancangan Keputusan (Rantus) kontroversial di Badan Pekerja (BP). Di antaranya, Rantap tentang Penugasan kepada Presiden untuk Memeriksa Harta Kekayaan Mantan Presiden Soeharto, Pejabat, dan Mantan Pejabat Pemerintahan Negara beserta Keluarganya. Sayangnya, dalam voting di Badan Pekerja (BP) MPR Kamis 1 Oktober lalu, keempat fraksi lainnya menolak usulan itu. Dalam voting tersebut, PPP juga kalah suara dalam empat materi lainnya.

Toh, dengan serangkaian gebrakan itu, tak mengherankan bila *leverage* politik PPP kini cenderung meningkat. Kabarnya, tak kurang, Presiden B.J. Habibie dan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto yang turun tangan melobi pihak PPP untuk melunakkan sikapnya.

Menurut sejumlah sumber *Tajuk* di kalangan DPR, Habibie meminta PPP untuk tak meneruskan usulan Rantap tentang pemeriksaan harta Soeharto itu. Permintaan tersebut disampaikan kepada pimpinan PPP yang diundang datang ke kediaman pribadi Habibie di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa malam 29 September lalu. Dalam pertemuan itu, pihak PPP diwakili Ketua Umum Ismail Hasan Metareum, Sekjen Tosari Wijaya, dan Ketua F-PP MPR Faisal Baasir. Sedangkan, Habibie didampingi Akbar Tanjung, ketua umum Golkar yang juga mensesneg, dan Marwah Daud Ibrahim, ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR.

Sesudah Akbar, Marwah, dan Ismail, memaparkan sikap mereka, konon Habibie lalu berterus terang meminta PPP agar mempertimbangkan kembali tuntutan untuk memeriksa Soeharto. "Apakah tidak lebih baik kalau sasarannya konglomerat-konglomerat? Mereka itu kan yang memperburuk kondisi kita," begitu Habibie memberi alasan, seperti ditirukan salah seorang sumber *Tajuk*. Tetapi, pihak PPP bersikukuh. "Justru, adanya peluang yang diberikan para pejabat Orba itulah yang menumbuhkan adanya konglomerat itu," demikian argumen balik yang disampaikan salah seorang pimpinan PPP.

Akhirnya, Habibie "mengalah". Ia cuma mengharap, PPP mempertimbangkan imbauannya tersebut. Malam itu juga, pihak PPP berapat membahas "imbauan" Presiden tadi. "Kita putuskan tidak akan mundur, dengan risiko apa pun," tutur si sumber tadi. Menurut Endin A.J. Soefihara, sekretaris F-PP di MPR, Rantap itu diperlukan agar kontroversi seputar kekayaan keluarga Soeharto beserta para pejabat Orba itu tuntas adanya.

Sementara itu, menurut sumber-sumber *Tajuk* di kalangan Golkar, Habibie juga membicarakan isu tersebut dengan para pimpinan partai beringin yang menghadap pada malam itu juga. Kali ini, konon, instruksinya lebih tegas: Rantap itu tidak boleh lolos di BP MPR. "Dengan PPP saja seperti itu, apalagi dengan F-KP," ujar sumber *Tajuk* itu.

Sikap kukuh juga ditampakkan PPP kepada Wiranto. Sehari sebelumnya, pimpinan partai itu juga diundang datang ke kediaman resmi Pangab di Wisma A. Yani, Menteng. Wiranto meminta, PPP mempertimbangkan kembali penolakannya atas jatah kursi ABRI di DPR. Wiranto, konon, menyampaikan: pada prinsipnya, ia setuju bila pada akhirnya jatah kursi ABRI di DPR itu ditiadakan sama sekali. Namun, pelaksanaannya secara bertahap, tidak revolusioner. "Kita katakan, kita tidak menolak ABRI. Tetapi, kita juga tidak mengubah sikap," ujar salah seorang sumber itu.

Toh, pihak partai bintang mengaku pantang menyerah. Karena, pembahasan RUU Politik – di antaranya memuat tentang jatah kursi ABRI di DPR itu – baru dimulai bulan ini. Sedangkan, tentang Rantap pengusutan harta Soeharto tersebut, mereka bertekad akan meneruskannya ke SI MPR. "Kita akan bawa ke pemandangan umum, lalu kita perjuangkan ke komisi-komisi. Kalau ada rintangan, kita teruskan sampai pleno," ujar Ketua F-PP MPR Faisal Baasir, bersemangat. Toh, melihat perimbangan kekuatan yang ada di MPR, tampaknya tipis kemungkinan Rantap itu akan berusia sepanjang namanya. ▲

Sulton Mufit dan Tatik S. Hafidz

Kultus individu mengancam Megawati meraih kursi presiden. Persoalan internal juga membayanginya.

KONGRES PDI DI BALI
MENJAGA ASET, MENUJU ISTANA

DARI Istana Tampak Siring menuju Istana Negara. Optimisme ini terpancar pada wajah peserta Kongres V PDI Perjuangan di Bali (8-10 Oktober), seusai Megawati mengumumkan susunan pengurus. Mereka meyakini besarnya kans Mbak Mega menduduki kursi presiden RI keempat. Mereka pun melengkapi kekuasaan ketua umum dengan wewenang khusus untuk "melakukan langkah organisatoris dan tindakan yang bersifat luar biasa yang berkaitan dengan penyelamatan partai".

Akan tetapi, dukungan bulat terhadap Megawati dan besarnya kekuasaan ketua umum menimbulkan kekhawatiran baru, yakni: kultus individu. "Ini tak ubahnya suatu bentuk lain dari praktek Orba," ujar seorang peserta kongres dari Jawa Tengah. Dia merujuk pula pada penunjukan Mega sebagai formatur tunggal. "Kami jelas memilih Ibu Mega sebagai ketua umum PDI, namun untuk menghindari kesan otoriter sebaiknya ada tim formatur."

Sayang, usulan dari Jawa Tengah agar dipilih beberapa figur sebagai formatur kandas. Mayoritas peserta lebih mempercayakan kepada Mega. Argumentasi mereka merujuk pengalaman DPP PDI hasil Munas. Di mana, banyak pengurus yang "mengkhianati" Megawati, lalu memilih Soerjadi sebagai ketuanya. "Dengan tim formatur, kami khawatir nantinya ada campur tangan dari luar," kata seorang peserta.

Jeffrey Winter, seorang pengamat politik dari Northern University AS, juga membantah kesan kultus individu itu, yang memang membawa interpretasi negatif. "Saya kira, untuk menyamakan Megawati dengan Soeharto itu terlalu jauh. Mereka dua makhluk yang sangat berbeda," kata Winter, yang ikut hadir pada kongres PDI di Bali. Menurutnya, semangat yang tinggi dari peserta kongres bukanlah bentuk kultus individu. Lagi pula, semua itu bukan kemauan pribadi Megawati. "Karena mereka percaya kepada Mega dan yakin bahwa dia bisa membawa partai ini maju," timpal Mochtar Buchori, ketua DPP PDI Perjuangan.

USMAN SOSAWAN

LAUTAN MASSA PDI PERJUANGAN DI BALI. Aset PDI yang bisa dijual saat ini adalah Megawati.

Sejatinya, pro-kontra pemberian wewenang besar pada ketua umum cerminan dari konflik di antara elite lingkaran dekat Megawati. Memang, menjelang kongres, muncul isu pertentangan antara kubu Soetardjo Soerjoguritno dan Taufik Kiemas. Berada di kubu pertama, misalnya, Haryanto Taslam dan Alex Litaay. Sementara, kelompok yang mendukung Taufik, suami Megawati, antara lain Mangara Siahaan dan Suparlan. Kelompok ini memang *ngotot* formatur tunggal dan pemberian wewenang khusus kepada ketua umum. Bukan apa-apa, mereka trauma pada pembelotan Fatimah Ahmad dkk. pada kepengurusan lalu.

"Target kita kan menggolkan Megawati sebagai presiden. Jika masih ada yang plintat-plintut, bahaya nantinya," ujar suara dari kubu Taufik Kiemas. Sementara, kelompok Soetardjo menolak tudingan itu. Mereka beranggapan, kekuasaan yang besar menimbulkan citra otoriter pada Megawati. Persaingan di antara kedua kubu itu tampak pula pada jabatan sekretaris jenderal. Kelompok Taufik menjagokan Suparlan, sementara saingannya menominasikan Haryanto Taslam. Konflik kian memanas, di mana pada hari kedua sempat beredar kertas bertuliskan "Awas *Money Politics* Taufik Kiemas".

Tampaknya, Megawati mengamati perseteruan yang ada. Menurut beberapa kawan dekatnya, dia merasa cemas dengan situasi itu. "Mbak Mega akan menolak pencalonan bila friksi antar-pribadi yang memecah belah

partai tetap berlanjut," tutur sumber di PDI. Bagi Mega, kata sumber itu lagi, kekompakan adalah modal dasar PDI Perjuangan. Bila persoalan internal muncul, itu merupakan awal kegagalan untuk meraih masa depan. Mochtar Buchori setuju dengan pendirian itu. Dia tidak yakin kalau Megawati bisa didikte oleh Taufik. "Sudah berulang kali dia membuktikan sanggup menolak campur tangan suaminya," kata Mochtar, yakin.

Harapan beberapa pihak tampaknya diperhatikan Mega dalam penyusunan DPP PDI periode 1998-2003. Dua kelompok yang berseteru dirangkul. Lebih dari itu, dia juga mengajak empat figur dari beberapa komponen di luar PDI untuk menjadi pengurus, yakni: Mayjen TNI (purn.) Theo Syafei (mantan pangdam Udayana), K.H. Hasyim Wahid (adik Ketua PBNU Abdurrahman Wahid), Prof. Dr. Dimyati Hartono (guru besar Undip dan UI), dan Ir. Meliono Suwondo (pengusaha, alumnus ITB, dan adik mantan menteri kabinet pembangunan Siswono Yudohusodo).

Akan tetapi, dimasukkannya empat kader lompat pagar – yang selama ini belum menjadi anggota PDI – menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya, dari Aberson Marle Sihaloho. Mantan anggota F-PDI DPR ini tidak yakin bila mereka mampu mendukung Megawati jadi presiden. "Jangan-jangan malah Theo Syafei yang nantinya meminta Mega untuk mendukung calon dari ABRI sebagai presiden." Begitu pula pada Hasyim Wahid, yang dikhawatirkan malah meminta PDI mendukung calon presiden dari NU.

Dalam bayangan Aberson, keinginan berlebihan memang dipompakan dari susunan pengurus. Misalnya, adanya dukungan dari ABRI, NU, cendekiawan, dan pengusaha. "Namun, semua hanya *wishful thinking*," tutur Marle Sihaloho. Dia meminta agar PDI memperjuangkan sistem pemilihan presiden secara langsung. "Dengan cara ini, baru Mega akan menang." Dia khawatir, bila pemilu sistem distrik, PDI akan kalah dari Golkar, yang memiliki kader mantan pejabat daerah.

Pertanyaan lain dari beberapa peserta kongres menyangkut kurang terwakilinya unsur yang ada. Dalam sejarahnya, PDI merupakan fusi dari lima parpol, yakni: PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, dan IPKI. Melihat komposisi saat ini, unsur PNI sangat dominan. Sementara, Partai Katolik diwakili V.B. da Costa, Parkindo oleh Alex Litaay, dan Murba oleh Noviantika. Apakah soal ini jadi batu sandungan Mega? "Tidak. Dengan bulatnya dukungan terhadap Mega, unsur itu sudah luluh. Aset PDI yang laku dijual saat ini adalah Megawati," jawab Aberson. Bagi kader partai berlambang banteng, Mega adalah PDI. ▲

Usman Sosiawan/UWD

EFEKTIVITAS PDI DARI BAWAH

BALI adalah Megawati. Pekan lalu, ribuan gambar dan atribut Megawati Soekarnoputri seakan-akan menenggelamkan pulau dewata. Bagi masyarakat Bali, Mega memang lebih dari sekadar ketua umum PDI. Dia adalah saudara – karena neneknya atau ibu kandung Bung Karno adalah orang Bali, terpandang pula. Tidak berlebihan jika kaus bertuliskan *She's my president* dikenakan masyarakat. Seusai hari-hari yang melelahkan, Minggu pagi (11/10), Mega menerima **Usman Sosiawan** dari *Tajuk* untuk wawancara. Petikannya:

USMAN SOSIAWAN

Sebenarnya, bagaimana proses penentuan kepengurusan DPP?

Kongres pada akhirnya memberi wewenang penuh kepada saya sebagai ketua umum terpilih untuk menyusun DPP. Saya sudah pikirkan itu masak-masak dalam beberapa waktu. Sesuai dengan situasi dan kondisi, di mana PDI bukanlah partai yang punya banyak dana, makanya saya ciutkan menjadi angka 17 yang keramat itu.

Anda yakin, jumlah itu cukup untuk menjalankan mandat kongres dan menghadapi tantangan ke depan?

Oh, iya. Sebab, sebelumnya, orang tidak mengerti PDI. Anda bisa bayangkan, hanya dalam waktu 1,5 bulan kami bisa melakukan kongres, yang menurut saya sangat mengejutkan. Ini merupakan dukungan dari seluruh warga PDI. Jadi, efektivitas PDI itu bukan hanya dari atas ke bawah. Tetapi sebaliknya, dari bawah ke atas.

Anda berkonsultasi dulu sebelum menentukan pilihan?

Sebelumnya, saya sudah mempunyai nama-nama calon. Setelah saya pertimbangkan, saya hubungi mereka. Alhamdulillah, mereka bersedia.

Pemberian wewenang khusus itu sebenarnya bagaimana?

Pemberian wewenang khusus itu sebenarnya berarti sangat urgen. Kita sendiri melihat, masalah nasional saat ini sangat berat, di mana krisis belum juga berlalu. Jadi, tentu saja banyak hal tidak terduga yang harus segera diputuskan oleh ketua umum, baik itu melalui DPP ataupun ketua umum menentukan sebuah kebijaksanaan.

Bukankah pemberian wewenang khusus penuh kepada Anda itu bisa dikatakan sebuah indikator telah terjadinya kultus individu di tubuh PDI yang Anda pimpin?

Saya sering ditanya soal itu. Saya katakan, kultus individu atau karisma itu bukanlah masalah politik. Itu adalah masalah *culture*. Apa bisa sih orang itu disuruh, kecuali dengan paksaan, membuat gambar saya, foto, dan dengan segala macam atribut yang ditempel di mana-mana? Saya tidak pernah menyuruh atau meminta mereka untuk melakukan itu. Dan, kalau mereka bersimpati kepada saya, siapa yang bisa menghentikan keinginan mereka itu?

Kongres sempat diwarnai dengan maraknya isu konflik dan banyaknya interes pihak di luar PDI. Anda sendiri sempat mengingatkan hal itu kepada peserta. Sebenarnya, apa sih bentuk konflik itu?

Saya mengatakan hal itu bukan hanya di kongres ini. Saya kan bermaksud untuk mengingatkan kepada mereka, sepanjang sejarah PDI yang sering terjadi adalah keributan. Dan, itu disebabkan kurang satunya pendapat, dan masing-masing ingin menyatakan bahwa pendiriannya paling benar.

Kabarnya, dalam penyusunan kepengurusan, ada tangan-tangan pihak tertentu yang bermain?

Ah... (*Mega bangkit dari duduknya sambil berlalu*). Siapa yang (bisa) menekan saya. ▲

Bunuh Memb

HERMAWAN SULISTYO

ADEK BERRY

DIPERKIRAKAN, sudah lebih dari 100 orang tewas terbunuh dalam serangkaian "pembunuhan massal dan misterius di Jawa Timur". Berita yang membuat berdiri bulu kuduk ini muncul kembali, mirip laporan mengenai peristiwa rangkaian pembunuhan massal yang berlangsung pada periode pasca-segera (*post immediate period*) G-30-S tahun 1965 dulu. Skalanya memang jauh lebih kecil. Tetapi, di tengah situasi sekarang, berita tersebut mengisyaratkan sebuah pucuk gunung es, yang di bawahnya terpendam gunung lebih besar. Suatu indikasi betapa carut- marut kehidupan sosial, kebangsaan, dan bahkan kenegaraan kita.

Mengapa orang Indonesia, atau manusia di mana pun juga, mudah membunuh dalam skala massal atau kolektif? Adakah penjelasan kultural, atau struktural, bagi fenomena sejarah dan bahkan politik kontemporer ini? Pertanyaan tersebut bukan cuma releven untuk merujuk masa lampau, tetapi juga – terlebih – bagi berbagai upaya antisipasi ke masa depan. Juga, lingkupnya tak hanya terbatas di masyarakat Indonesia, karena jenis-jenis tindakan serupa juga "ditemukan" (atau diyakini orang lain "ditemukan") di masyarakat Asia Tenggara lainnya, bahkan di belahan bumi mana pun. Sayang, hampir tidak ada kepustakaan yang mengulas konsep-konsep kekerasan politik secara jernih, khususnya yang menyangkut pembunuhan massal. Bahan kepustakaan yang ada umumnya menempatkan pembunuhan massal (dilakukan beramai-ramai terhadap sekelompok orang) sebagai bagian dari peperangan, operasi militer, atau pertarungan politik dengan kekerasan.

Pertama, harus dirapikan dulu berbagai pengertian dan pemahaman mengenai keadaan bunuh-membunuh. Jika satu orang membunuh orang lain, dalam tindakan yang bisa disebut kriminal, implikasi sosial – apalagi politik – tindakan tersebut tidak terlalu mendalam, bahkan sering kali tidak ada. Jadi, jenis pembunuhan yang demikian ini dapat dikesampingkan. Kasus Jawa Timur, sebagaimana kasus-kasus lain yang khas, tercatat dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara, memiliki beberapa karakteristik yang khas, karena bukan pembunuhan jenis kriminal biasa. Persoalan "karakteristik" pembunuhan massal akan lebih jelas lewat kategori konseptual dan contoh-contoh kasus.

Kedua, masih berkaitan dengan klasifikasi konsep di atas, pembunuhan massal ini bukan termasuk kategori peperangan. Dalam suatu peperangan, yang terjadi adalah pertarungan antara kedua belah pihak yang relatif sama kuat. Atau, meskipun salah satu pihak lebih lemah, tetap ada perlawanan. Mereka saling menyerang dalam skala massal, dengan korban yang massal pula, tetapi tetap tidak bisa disebut sebagai "pembunuhan massal". Jadi, pembunuhan massal dilakukan secara tidak seimbang, oleh pelaku kolektif dengan (calon) korban yang relatif tak berdaya, dan umumnya bahkan tidak melawan sama sekali. Korban juga tidak selalu bersifat kolektif, meskipun jumlahnya bisa banyak, karena mungkin dibunuh satu per satu secara serial.

Dengan demikian, pembunuhan massal berbeda dari jenis-jenis seperti tersebut di atas. Secara umum, karakteristik pertama adalah bersifat massal. Artinya, yang membunuh atau korban tidak bertindak secara individual, melainkan bersama-sama dengan lebih dari satu orang. Kedua, terjadi pola yang berulang (*recurrent*). Pembunuhan tidak dilakukan hanya sekali, melainkan secara serial, sekalipun mungkin sifat "serial"-nya tidak memiliki pola yang beraturan. Ketiga, motif para pelakunya lebih dari sekadar bersifat individual, meskipun dalam banyak kasus juga terjadi tumpang tindih antara motif pribadi dan motif kolektif. Kasus-kasus pembunuhan pasca-G-30-S, dan banyak kisah lain dari Kampuchea atau bahkan Bosnia, apalagi Amerika Latin, menunjukkan terdapatnya transformasi kasus-kasus balas dendam pribadi (*personal vendetta*) menjadi balas dendam politik (*political vendetta*).

Dilihat dari kategorinya, pembunuhan massal pada tingkat yang paling elementer berupa apa yang dalam kepustakaan disebut sebagai *amok*. Istilah ini, yang padanannya dalam bahasa Indonesia "amuk" (sekalipun pemahaman ilmiahnya tidak persis sama), adalah kosakata Melayu yang telah masuk ke dalam kosakata Inggris dan dunia. *Amok* dirujuk sebagai kondisi psikologis yang meledak dan tak terkendalikan, sehingga membuat pelaku menjadi mata gelap. Dalam kondisi demikian, pelaku dapat melakukan tindak pembunuhan. Karena konsep psikologis, *amok* pada awalnya berada para tataran individual. Artinya, sejak awal dipakai oleh para pendatang Barat di dunia Melayu, *amok* hanya digunakan untuk menerangkan kejadian individual, bukan psikologis massa.

Setelah itu, konsep *amok* disukai banyak peneliti asing yang berkonsentrasi pada masyarakat Asia Tenggara. Salah satu alasannya, Melayu mengenal kosakata ini, sementara jarang ada kosakata bahasa lain yang menggambarkan situasi psikologis serupa. Dengan konsep ini, sejarah kekerasan politik, termasuk misalnya pembunuhan massal pasca-G-30-S, diterangkan. Namun, konsep *amok* tidak memuaskan banyak peneliti lain. Salah satu alasannya: Masa, orang mengamuk kok terus-terusan? Juga, seperti telah disinggung,

mbunuh

amok asal-muasalnya adalah konsep psikologis, sehingga sifatnya lebih individual. "*Amok* massal" adalah suatu *contradictio in terminis*, alias di dalamnya terdapat pengertian yang bertentangan.

Tingkat pembunuhan massal berikutnya termasuk yang populer disebut "pembasmian etnik" (*ethnic cleansing*) serta berbagai jenis pembunuhan serupa, yang dilakukan atas dasar motif politik atau sosial. Kasus mutakhir yang kerap kali dirujuk pastilah Bosnia. Pada kategori ini, juga didapati pembunuhan massal antar-kelompok politik, dengan motivasi yang lebih bersifat politis ketimbang kultural. Berbagai pembunuhan politik (massal) di Amerika Latin dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Kasus Chiapas di Mexico, yang juga berada dalam kelompok tersebut, tentu masih melekat di banyak ingatan para penganjur perdamaian dunia.

Yang lebih dari kategori pembunuhan massal apa pun adalah jenis-jenis pembunuhan massal yang bukan hanya dilindungi oleh negara (*state*), tetapi bahkan didorong atau dilakukan oleh negara itu sendiri. Dalam kosakata induk, pembunuhan massal jenis ini disebut sebagai *genocide*, yaitu pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis oleh negara. *Holocaust*, suatu istilah yang secara khas merujuk pada pembasmian kaum Yahudi (utamanya di Jerman, tetapi tidak terbatas hanya di negara tersebut), semasa Perang Dunia II, adalah *genocide* dalam bentuk paling mengerikan.

ANTOK SUGIANTO

Dengan tipe-tipe dan kategori tersebut, sejarah Asia Tenggara diwarnai pengalaman panjang terjadinya berbagai pembunuhan massal dari segala tipe, mulai dari yang dapat disebut sebagai *genocide* hingga pembunuhan massal dengan nuansa individu. Pembunuhan massal oleh Khmer Rouge di Kampuchea (1975 hingga akhir 1978) bagi banyak peneliti disepakati sebagai suatu *genocide*. Ladang pembantaian, *the killing fields*, masa itu memakan korban seperlima jumlah penduduk negeri tersebut.

Dalam *genocide* yang dilakukan Khmer Rouge, konsepsi yang diterapkan ialah upaya pengembangan dan pembangunan pertanian. Banyak studi yang percaya, pembantaian massal di ladang-ladang Kampuchea pada masa itu hanyalah merupakan ekses dari diterapkannya ideologi negara. Namun lebih banyak lagi yang percaya, pembunuhan massal itu bukan ekses, melainkan direncanakan. Apa pun yang menjadi motivasi di baliknya, akibatnya tetap sama. Yaitu, lebih sejuta nyawa rakyat Kampuchea hilang hampir-hampir tanpa makna.

Sebaliknya, meskipun sulit menyebut *the killing fields*, hal serupa di Indonesia pada pasca-G-30-S sebagai suatu *genocide*, korban masa itu mencapai sekitar 400 ribu orang (beberapa laporan menyebut hingga 1 juta orang, yang sulit dipercaya, mengingat besaran pengurus PKI masa itu). Karena sensitivitas masalah G-30-S, tak ada penulis non-partisan di dalam negeri. Akhirnya, sejarah yang muncul dimuati *victimization*, yaitu menjadikan korban (yang telah kalah atau bahkan mati) sebagai kambing hitam. Mereka tak lagi berhak, apalagi mampu, membela dirinya. Sebaliknya, para penulis asing mendapatkan eksotisme sejarah dengan angka-angka korban yang fantastis tersebut. Jadilah potret hitam-putih, antara ingatan publik (yang mayoritas dibentuk pemerintah) dan kisah-kisah eksotis *genocide* bangsa Indonesia dari dunia di luar kita.

Di luar peperangan, situasi serupa dapat dirujuk pada kasus-kasus Aceh, Timtim, dan Irian Jaya. Pada ketiga kasus ini, yang bahkan mungkin disusul dengan kasus-kasus lain dalam skala yang lebih kecil, didapati unsur tindak kekerasan negara (*state violence*) melalui operasi militer. Negara (pemerintahan sebagai representasinya) tentu saja menolak kasus-kasus tersebut sebagai pembantaian massal, apalagi *genocide*. Yang secara resmi mereka yakini dan disampaikan kepada publik adalah, mereka berhadapan dengan kekuatan bersenjata, sehingga kategori "pembunuhan massal" ini menjadi pertempuran (sebagai bagian dari peperangan). Jika kategorinya jatuh pada "pembunuhan massal" (apalagi *genocide*), pihak ABRI jelas bisa dituntut.

Ironisnya, sekalipun secara teoretis pembunuhan massal tidak melibatkan situasi psikologis dan tindakan yang bersifat individual, kebanyakan kasus justru menunjukkan hadirnya sifat ini. Banyak sekali kasus pertentangan individual disalurkan melalui tindak kekerasan kolektif, dengan motivasi yang tumpang tindih. Tidak jarang, *personal vendetta* alias balas dendam pribadi berubah di permukaan sebagai *political vendetta*.

Tetapi, apa pun alasannya dan kategorinya, pembunuhan massal hanya indikasi: ada yang "sakit" dengan masyarakat yang mengalaminya. Dan, kasus Jawa Timur harus ditempatkan dalam konteks ini. ▲

Memburu Dalang Te

Eskalasi teror "dukun santet" makin meluas ke seluruh penjuru Jawa Timur. Ratusan tersangka sudah ditangkap, tetapi teror berkedok ninja terus berlanjut. Oknum ABRI terlibat?

NAHDLATUL Ulama (NU) "berdamai" dengan Mabes ABRI. Inilah kesan dari Apel Akbar Nasional Generasi Muda NU, di Parkir Timur-Senayan Jakarta, Minggu (11/10). Tak berlebihan, karena apel yang dipimpin Ketua Tanfidziyah PBNU K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini dihadiri tim lengkap dari Mabes ABRI. Selain Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto dan KSAD Jenderal Subagyo H.S. – yang duduk bersebelahan dengan Gus Dur – ikut hadir Kassospol ABRI Letjen S.B. Yudhoyono, Sekjen Dephankam Letjen Soeyono, Gubernur Lemhanas Letjen Agum Gumelar, dan beberapa perwira tinggi lain.

Apel yang diikuti belasan ribu *nahdliyin* itu, memang, seperti menghapus kesan bahwa sedang ada "sesuatu" di antara NU dan ABRI. Itulah kesan yang diam-diam mencuat, menyusul merebaknya kasus pembantaian ratusan "dukun santet" di Banyuwangi, Jawa Timur. Pembunuhan yang semula benar memangsa dukun santet itu belakangan menjadi teror massal bagi warga NU. Soalnya, di tengah arus kuat yang mencurigai keterlibatan aparat keamanan, teror kian jelas terarah ke guru *ngaji* dan ulama NU.

Apel di Senayan itu juga tidak memberi porsi khusus untuk menyorot kasus kriminalitas-politik nan menghebohkan tersebut. Maklum, di samping ada isu lain yang punya bobot politis lebih besar (semisal, ihwal pentingnya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan), sikap PBNU terhadap kasus Banyuwangi itu sendiri juga sudah jelas. "Bagi NU, kasus Banyuwangi itu masalah sepele. Kenapa? Karena, kita tinggal di negara yang punya tentara. Jadi, NU percaya dan menyerahkan penanganan kasus itu kepada aparat ABRI di daerah," kata Gus Dur.

Bukan kali yang pertama Gus Dur berbicara begitu. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, termasuk saat ditemui *Tajuk*, Rabu (7/10), ia bahkan sudah mewanti-wanti warganya untuk tidak gegabah dan main hakim sendiri. "Bahwa ada yang ingin menjatuhkan NU, itu jelas. Tetapi, kalau Pak Wiranto bilang itu kriminal murni, ya sudah. Itu urusan aparat. Kalau NU kerja sendiri dan semua kerja sendiri, bisa berkelahi satu sama lain. Akhirnya, kita jadi seperti hidup di hutan. Bukan di negara yang ada pemerintah dan aturan hukumnya," tuturnya.

Di hutan atau di negara, yang pasti, terentang jarak ratusan kilometer antara Jakarta dan Banyuwangi. Ini berarti, terbuka kemungkinan adanya beda tajam antara ucapan dan fakta di lapangan. Dan, sejauh pemantauan *Tajuk*, itulah yang sebenarnya terjadi. Terlepas dari kemungkinan ucapan Gus Dur yang "bersayap", Banyuwangi dan sejumlah kota kabupaten lain di Jawa Timur hingga kini memang masih diselimuti perasaan waswas dan mencekam.

Selain barikade yang dipasang mencolok di sudut-sudut jalan masuk kampung, sistem keamanan swakarsa – yang terasa kian menyita energi warga – pun masih rutin digelar setiap malam. Pentungan, celurit, golok, dan pelbagai senjata tajam lain, juga masih menjadi tentengan wajib ke mana pun si pemilik pergi. Begitu takutnya warga keluar malam, sampai-sampai untuk sekadar buang air kecil saja, "Terpaksa kita tampung di plastik dulu, dan baru dibuang esok paginya," tutur Arifin, penduduk Glenmore.

Kecurigaan tak cuma terjadi antarsesama warga, tetapi juga warga terhadap aparat, aparat terhadap warga, aparat terhadap aparat, dan – celakanya – kecurigaan semua pihak terhadap orang asing, termasuk wartawan. Sebelum terjun ke lapangan, wartawan *Tajuk* sampai-sampai harus

1

memenuhi anjuran para tetua desa untuk "diisi" terlebih dahulu.

Eskalasi teror dan pembunuhan yang meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Timur sontak membuat pemandangan "siaga perang" tergelar di mana-mana. Selain di lima kota yang sudah banyak disebut – Jember, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, dan Pasuruan – teror juga sudah muncul di Bangil dan Blitar, bahkan menyeberang ke Pamekasan dan Sumenep-Madura. Kalaupun belum sampai ke tingkat pembunuhan, teror via telepon atau surat kaleng sudah lebih dari cukup untuk membuat jantung para kiai dan santri di beberapa pesantren berdegup kencang.

Dari hari ke hari, hasil tangkapan tersangka oleh pihak kepolisian sebenarnya terus bertambah. Selain yang ditangkap hidup-hidup, ada pula satu-dua yang ditembak mati karena melawan. Dari 21 kecamatan di Banyuwangi saja, seperti dilaporkan Komando Pengendalian Operasi (Kodalops) Polres Banyuwangi, hingga Senin (12/10) tercatat 118 tersangka – 59 di antaranya mengaku membunuh – sudah

Teror Banyuwangi

1 PENANGKAPAN TERSANGKA. Diliputi perasaan saling curiga antar sesama.

2 SISKAM SWAKARSA. Eskalasi teror membuat 'siaga perang' tergelar di mana-mana.

diperiksa. Sedangkan, total korban tewas sebanyak 95 (di luar yang bunuh diri karena ketakutan), tujuh luka berat, dan tiga luka ringan. Sebegitu jauh, tetap saja belum diperoleh kesimpulan final: apa sebenarnya motif di balik kasus ini.

Kerja keras aparat faktanya juga belum mampu menghentikan pembunuhan. *Tajuk* mencatat, pembunuhan "dukun santet" di Banyuwangi terakhir terjadi Jumat malam 2 Oktober lalu. Korban bernama Abas, warga Kecamatan Kalipuro, yang kabarnya memiliki ilmu santet. Kematian Abas terasa dramatis, terjadi justru setelah siang harinya ia melakukan sumpah pocong di hadapan Muspika Kalipuro. Abas bersumpah, tak akan mempraktekkan lagi ilmu tenungnya.

Usai bersumpah, Abas sendiri mengaku lega dan tak khawatir lagi bakal menjadi sasaran pembunuhan. Percaya diri yang meningkat ditunjukkan Abas lewat pergaulannya dengan tetangga yang lebih rileks. Pukul 21.00 ia bahkan ikut meronda di kampungnya, Dusun Bulusan, Desa Klatak. "Dia juga sempat mengantar kopi, sebelum akhirnya menghilang," tutur seorang warga.

Jenazah bekas dukun santet itu ditemukan seorang anak kecil, yang hendak mengembalikan pinjaman sepeda ke rumah tetangga Abas. Anak itu menjerit keras, saat melihat sesosok mayat terbujur bersimbah darah di tepi jalan. "Kondisinya sangat mengenaskan. Saat kita angkat, isi kepalanya berhamburan keluar," cerita warga. Darah segar berceceran, terutama di sekitar kepala yang retak seperti habis dikampak.

Dusun Bulusan gempar seketika. Rasa saling curiga menyebar, lantaran kematian Abas dinilai tak masuk akal. "Kalau malam tiba, semua jalan masuk kampung ditutup dan dijaga. Warga luar juga kita larang masuk, tetapi si pembunuh masih bisa menyusup," tutur warga tadi, seraya berpesan untuk tidak menyebut namanya. "Mungkin, para pembunuh itu beraksi ketika warga sedang mengejar ninja di dusun sebelah," timpal warga yang lain.

Alkisah, beberapa jam sebelum mayat Abas ditemukan, warga yang sedang ronda didatangi seseorang. Tergopoh-gopoh, ia memberi tahu tentang keberadaan komplotan ninja yang sedang beraksi di dusun sebelah. Karuan, warga terpancing untuk meninggalkan pos jaga, dan ramai-ramai mengejar ninja. Fakta berbicara: tak ada ninja di dusun sebelah, karena si ninja justru beraksi di dusun mereka sendiri. Abas jadi korban. Lalu, siapa si pembunuh sadis itu?

Jawaban resmi masih berupa teka-teki. Toh, di kalangan ormas pemuda NU – Banser, Ansor, dan Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa – ihwal jati diri si "tersangka" diakui sudah dalam genggaman. Siapa? Untuk sementara, tersangka yang masih buron itu diidentifikasi sebagai tiga sekawan: Salam, Gaguk, dan Wanto (semua nama samaran) – preman yang biasa *mangkal* di kompleks pelacuran Srono. "Tiga orang ini sudah mengaku sebagai algojo. Bahkan, saking seringnya membunuh, mereka sampai tak

mampu menghitung jumlah korbannya," tutur seorang pemuda, yang mengaku kenalan dekat Salam.

Sebagian warga umumnya juga sudah telanjur yakin, tiga sekawan itulah gembong pembantaian "dukun santet" selama ini. Nama ketiga algojo itu, kabarnya, telah pula diserahkan kepada Danrem, Dandim, dan Kapolwil Besuki – saat temu muka dengan tokoh masyarakat di Hotel Ikhtiar Surya, 1 Oktober lalu. Cuma, jawaban Kapolwil ketika itu dinilai tak memuaskan. Kapolwil mengaku tak bisa menindak langsung, kecuali para tersangka tersebut kembali beraksi.

Satu hal, keyakinan warga itu sendiri jelas bukan tanpa dasar. Selain rentetan fakta – menunjuk keterlibatan Salam, Gaguk, dan Wanto – di sejumlah kasus pembunuhan, ketiganya juga tak ragu berbicara terbuka kepada kawan dekatnya. Yang pasti, sejauh ini, motif yang mendasari tindakan mereka sepenuhnya diakui melulu masalah uang. "Kalau ada yang bayar, kami siap bergerak asal ada sedikitnya 50 massa yang mendukung," aku Gaguk, suatu kali, seperti ditirukan karibnya kepada *Tajuk*.

Pola dan modus pembunuhan cenderung dilakukan profesional. Tidak hanya terencana sistematis, tetapi juga seperti di bawah komando. Mirip-mirip cara kerja intelijen.

Sebagai pembunuh bayaran, mereka menawarkan dua paket senilai Rp 200 ribu dan Rp 90 ribu. Paket pertama, syaratnya ringan, karena si pemakai jasa tak perlu ikut repot. Asalkan bayar di muka, semua urusan pembunuhan – termasuk mengerahkan pendukung – mereka tangani. Sedangkan, paket kedua, pengguna jasa harus ikut mencarikan massa. Biasanya, 25 orang dikerahkan si pemakai jasa, dan sisanya yang 25 orang disuplai oleh para algojo. Kenapa harus 50? Tak ada jawaban pasti.

Masalahnya, kata seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Genteng, aksi tiga sekawan itu tidak benar-benar murni kriminal. Pasalnya, kepada kawan-kawannya, mereka pernah berkoar bahwa, memasuki bulan Oktober, sasaran mereka adalah para kiai. Alasannya? "Dulu, yang menyembelih bapak dan saudara-saudara saya adalah Ansor. Ansor kan nggak mungkin gerak kalau nggak disuruh kiai," tutur sumber *Tajuk*, yang bersumpah mendengar langsung ucapan itu dari Salam. Konon, ayah si Salam anggota PKI yang terbunuh pada 1965.

Ultimatum Salam jadi kenyataan. Ketika Oktober tiba, sudah dua kasus percobaan pembunuhan kiai yang tergelar. Pertama, menimpa Kiai Burhan, pimpinan pondok pesantren di Dusun Sempu, Desa Sraten, Cluring. Dan, kedua, dialami Kiai Sulhan, dari Kecamatan Genteng. Yang menarik, kedua kasus sama-sama gagal. Beberapa pelaku yang berpakaian ala ninja berhasil pula ditangkap. Saat diinterogasi, Trimo – salah satu tersangka – meng-aku disuruh Djoko, warga setempat. Setelah dicek, Djoko yang disebut diketahui sudah terbunuh pada 1966, tersangkut PKI.

Sampai di sini, pelacakan kembali kabur. Karena, menurut penyelidikan, tak terlihat keterkaitan antara tersangka yang ditangkap dengan Salam, Gaguk, maupun Wanto. Ujung-ujungnya, berbagai versi cerita tentang pelaku pun merebak ke sana-sini. Bisa dimaklumi, karena fakta di lapangan cenderung menunjukkan pola dan modus pembunuhan yang berbeda-beda. *Tajuk* sendiri mencatat, ada sedikitnya lima pola pembunuhan yang pernah terjadi.

Pola pertama, antara lain terjadi di Pakis, Plampang. Dipicu dendam pribadi A kepada B, si A lantas memprovokasi warga – melibatkan oknum militer – untuk menghabisi B, seraya menudingnya sebagai dukun santet. Pola ini cenderung membunuh secara keroyokan. *Pola kedua*, seperti terjadi di Pondok Nongko, dilakukan dengan menyewa pembunuh bayaran (diduga Salam Cs), dan melibatkan massa sekitar 50 orang. Sebelum pembantaian, rombongan memaksa warga untuk memadamkan listrik, sehingga tak diketahui pasti wajah si pelaku.

Pola ketiga, juga memakai pembunuh bayaran. Bedanya, saat hendak mengeksekusi korban, sebagian massa disuruh memakai masker aneka warna. Masker mirip topeng ninja ini terbuat dari bahan *silk*, yang banyak dijual di toko garmen. *Pola keempat*, ini baru ninja *beneran*. Menilik pakaiannya – baju dan celana hitam, dipadu kaus loreng merah putih khas Madura – si pelaku seperti sengaja mendiskreditkan Pagar Nusa. Karena, itulah seragam perguruan pencak silat NU nan legendaris itu. Topeng mereka pun seragam, dan tak dijual di toko. "Mereka datang dengan truk *colt diesel*," tutur Wahyudi, sekretaris Pagar Nusa Banyuwangi.

Pola kelima, seperti dialami Abas, si pelaku berusaha memancing warga untuk keluar – dengan meniupkan isu tentang keberadaan ninja di dusun lain. Setelah warga keluar, mereka menyelinap dan beraksi tanpa hambatan. Apa artinya? Satu yang pasti: dari waktu ke waktu, pola dan modus pembunuhan cenderung dilakukan profesional. Tidak hanya terencana sistematis, tetapi juga seperti di bawah komando. Mirip-mirip cara kerja intelijen. Apalagi, saat beroperasi, si ninja itu membawa HT.

Kembangan kasus, celakanya, justru membuat rumor makin menjadi-jadi. Sasaran kecurigaan meluas, menyentuh aparat keamanan, aparat pemerintahan, dan bahkan Bupati Banyuwangi Kolonel T. Purnomo Sidik. Kecurigaan ihwal keterlibatan Bupati, utamanya, terkait dengan penugasan via radiogram kepada seluruh camat dan kepala desa, untuk mendata dukun-dukun santet di wilayahnya. Belakangan diketahui, nama-nama dalam daftar itulah yang kelak menjadi korban pembunuhan (lihat: *Schindler's List di Banyuwangi*).

Sementara, kecurigaan terhadap aparat

keamanan, umumnya, dikaitkan dengan kesan lamban dan terlambatnya penanganan kasus ini. Kepada *Tajuk*, seorang kiai bahkan menyebut: beberapa polsek sudah tahu rencana pembunuhan sebelum hari-H. Cuma, entah kenapa, baru setelah korban mencapai 80 orang, intensitas kerja polisi mulai tampak. Itu pun, setelah pihak kepolisian setempat mendapat tambahan satu SSK Brimob dari Surabaya, akhir September.

Sejak itu, kepolisian sigap menangkap para tersangka, bahkan menggulirkan perintah tembak di tempat kepada tersangka yang melawan. Saking banyaknya tersangka yang ditangkap, sejumlah warga yang pernah terlibat pembantaian, kini, justru ketakutan. Beberapa di antaranya, kabarnya, bahkan terang-terangan minta perlindungan ke perguruan Pagar Nusa. Jadi, benarkah aparat lamban bertindak?

Kapolwil Besuki, Kolonel Pol. Budi Utomo, menepis keras tudingan ini. Kalaupun ada kesan lamban, katanya, hal itu justru karena masyarakat Banyuwangi sendiri lebih banyak tertutup. Sehingga, kepolisian tak bisa leluasa bergerak. "Dan, soal korban yang 80 orang, itu kan data sejak Januari 1998. Lagi pula, dari jumlah itu, 70 di antaranya terbunuh di bulan September," jelas Kolonel Budi kepada *Tajuk*.

Namun, penjelasan ini pun tetap belum mampu menenangkan warga. Selain karena "otak pelaku" yang mereka sebut (ya si Salam, Gaguk, dan Wanto) tak kunjung ditindak, warga juga mensinyalir, ada oknum ABRI yang ikut "bermain". Mereka adalah dua anggota Koramil Glagah: Sertu Eddy Suharyanto dan Sertu Koko, yang disebut-sebut terlibat dalam tiga aksi pembunuhan. Dua nama inilah yang, tempo hari, sempat dilansir Kadispen Polri Brigjen Pol. Togar Sianipar di Jakarta.

Dua nama lain yang santer disebut adalah Serka Sugito, anggota Sub Den Pom V/3-3, dan komandannya sendiri, Kapten Djuri. Tuduhan kepada Sugito berawal dari keterlibatan Agus, anaknya, dalam aksi mendemo Mapolres – yang menuntut pembebasan para tersangka. Nama Sugito juga disebut-sebut dalam surat kaleng, yang beredar di kalangan *nahdliyin*. "Saya sering melihat dia bagi-bagi duit bersama Antok, Mukarom, dan Agus. Pembagian uang itu dilakukan setelah pembunuhan," tulis surat itu. Sedangkan, tuduhan ke Djuri terkait dengan isu yang menyebut bahwa Djuri "menekan" Kapolsek Kabat via telepon pada 14 September. Isinya, permintaan agar polisi tidak lagi mengusik keterlibatan aparat militer dalam pembunuhan di wilayahnya.

Konfirmasi dari Sugito, sayangnya, tak bisa diperoleh. Menurut rekan-rekannya, ia sedang berada di Malang, tak jelas sampai kapan. Bantahan tegas datang dari Kapten Djuri. Dia bilang, tak pernah ia menekan Kapolsek Kabat seperti yang dituduhkan. "Nomornya saja nggak tahu, kok bisa-bisanya bilang bahwa saya menelepon. Nggak benar itu," sergahnya, berapi-api. Djuri juga mengaku tak tahu-menahu duduk soal tudingan terhadap dirinya.

Anehnya, kata sumber *Tajuk*, sampai sejauh ini belum ada oknum militer yang ditahan atau diperiksa – seperti yang selama ini diberitakan di media massa. Kecuali Sugito, yang dikabarkan sedang ke Malang, lainnya masih tetap bertugas di lapangan. Jadi?

Teror Banyuwangi, naga-naganya, masih akan berumur panjang. Ini dimungkinkan, meminjam istilah K.H. Hasyim Muzadi, ketua PWNU Jawa Timur, karena kasus itu semakin jelas menunjukkan adanya konfigurasi dari empat motif pembantaian. Yakni, balas dendam, politik (PKI), keteledoran aparat keamanan dalam mengantisipasi, dan ada pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu. "Motif-motif itulah yang saat ini berkumpul menjadi satu di Banyuwangi," ujar Hasyim Muzadi. ▲

Tim Investigasi Tajuk

1 KORBAN YANG SELAMAT. Pola pertama cenderung membunuh secara keroyokan.

2 [illegible] Digempur massa, setelah sang 'dukun' dihabisi.

KISAH MATEHA YANG TAK MATI-MATI

Seorang kakek dituding dukun santet. Dua kali dikepruk massa, dua kali pula ia lolos dari maut.

SEPERTI malam-malam sebelumnya. Rabu (23/9) malam itu, Mateha tampak bermalas-malasan mencari angin di beranda muka kediamannya. Mateha adalah seorang kakek uzur, berumur 84 tahun. Namun, belum lagi puas berleha-leha, dua buah truk *colt diesel* bermuatan puluhan orang tiba-tiba parkir di depan rumahnya. Tak lama kemudian, mereka menyerbu rumah Mateha. Sambil berlompatan turun, orang-orang asing itu berteriak-teriak kencang, "Bunuh dukun santet itu! Bunuh dukun santet itu!" sembari mengacung-acungkan senjata tajam, balok kayu, dan tangan kosong.

Mateha gemetar. Apalagi, setelah pukulan bertubi-tubi menghujam ke badannya. Setelah puas, mereka memboyong Mateha ke atas truk. Keluarganya tak bisa mencegah. Mereka telanjur ngeri melihat arogansi massa. Lantas, truk melesat meninggalkan Dusun Pancoran, Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Siapakah orang-orang asing itu?

Mereka adalah para pemuda berasal dari desa tetangga, Desa Licin. Kabarnya, para penyerang itu sengaja diupah untuk menghabisi Mateha. Otak pelaku aksi tersebut, diduga, Arba'i dan Misadi, yang tinggal sedusun dengan Mateha. Bahkan, Misadi terhitung keponakan Mateha. Kepada *Tajuk,* Arba'i dan Misadi mengaku sudah lama menaruh dendam kesumat kepada Mateha. Pakdenya itu, diyakini Misadi, telah menyantet ayahnya hingga menemui ajal beberapa waktu lalu. Istrinya pun bernasib sama.
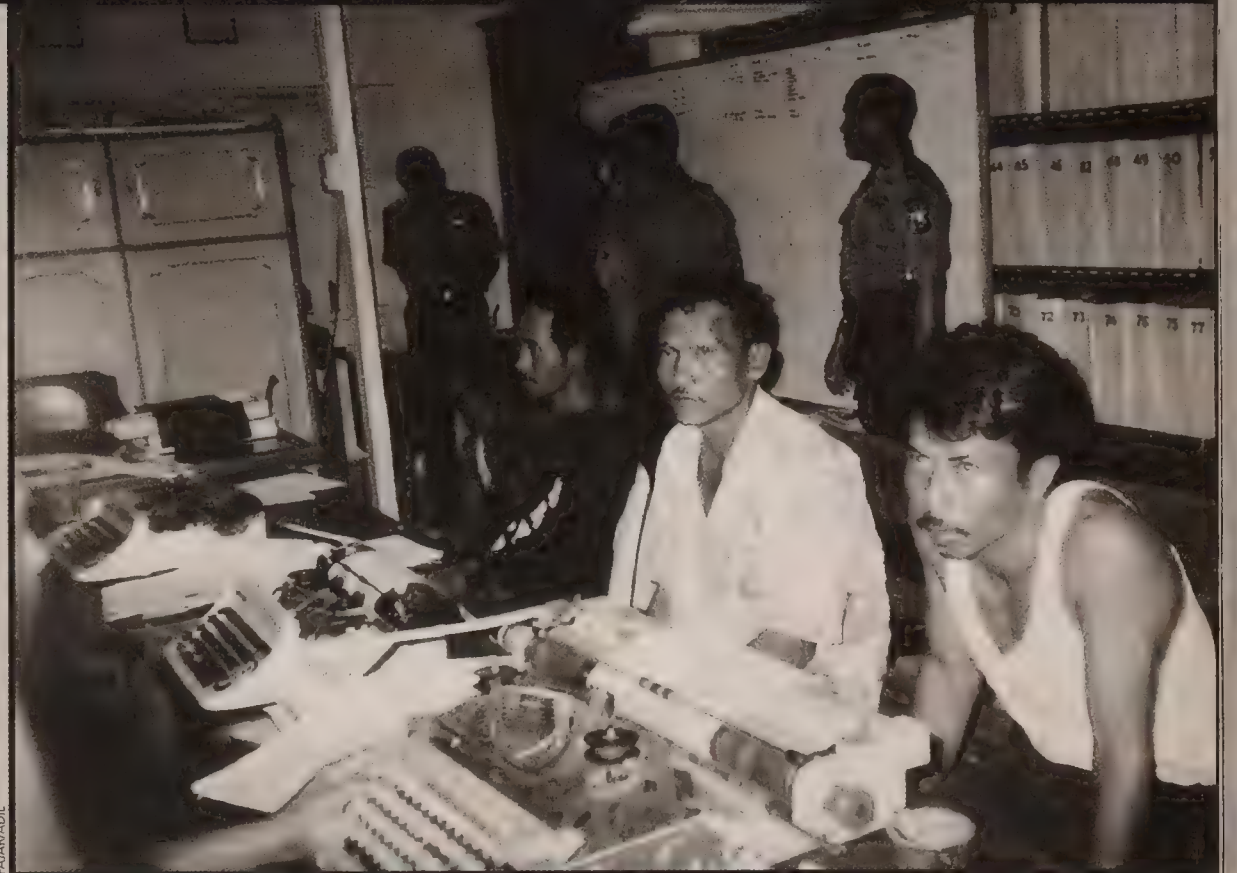
FAJAR/ADIL

MEREKA YANG DIDUGA DUKUN SANTET: Isu gentayangannya dukun santet cepat menyebar.

Motif Arba'i setali tiga uang. Ia berkeyakinan, ayahnya meninggal beberapa tahun lalu lantaran disantet Mateha. Dua putranya pun mengalami nasib serupa. Keduanya tewas setelah seluruh wajahnya dijangkiti penyakit kudis, sehingga wujudnya menyeramkan. Menurut orang pintar yang ditemuinya, penyakit itu lantaran disantet Mateha.

Sampai, akhirnya, momen yang ditunggu tiba. Tanpa diduga, sejak beberapa bulan terakhir "musim" aksi pembataian dukun santet melanda hampir di seluruh Banyuwangi. Mereka lantas mengikuti "tren". Singkat kisah, ia mendatangi para pemuda Desa Licin seraya melempar isu: Mateha dukun santet yang telah membinasakan banyak orang.

Berhasil. Sebelum berangkat ke sasaran, para pemuda itu ditraktir minum-minuman keras, di sebuah kedai. Tak lama, mereka naik dua truk sewaan Arba'i. Lantas, para pemuda itu diberi uang rata-rata Rp 15.000. Setelah itu mereka beraksi, sampai akhirnya berhasil menculik Mateha.

Sepanjang perjalanan, Mateha disiksa. Setelah yakin bahwa si tukang santet renta itu telah tewas, bersamaan dengan saat truk melintas di daerah persawahan sekitar ka-

wasan Kampung Giri, Mateha langsung dilemparkan ke tengah sawah. Ia terkapar di bibir hamparan persawahan. Rupanya, Mateha cuma pingsan. Tak ada luka serius. Bersamaan kokok ayam jantan di keremangan kabut subuh, Mateha terjaga. Ia mengerang, dan perlahan-lahan bangkit. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berjalan pulang ke kediamannya.

Kepulangan Mateha membuat *bungah* keluarganya. Namun, sebaliknya, kabar itu malah menggegerkan orang sekampung. Isu cepat menyebar: sang dukun santet masih gentayangan. Yang paling terkejut, siapa lagi kalau bukan Arba'i dan Misadi. Bukankah orang yang sangat mereka benci sudah dibunuh semalam?

Emosi keduanya makin bergejolak. Mereka pun kembali mengompori warga Desa Banjarsari. Lucunya, Mateha malah *cuek*. Entah lantaran pikun atau apa. Kebiasaan bersantai di beranda muka pun masih terus dilakoninya. Seperti sehari setelah kejadian, malam Jumat (24/9), sekitar pukul 22.00, Mateha, yang dianggap sebagain warga sebagai dukun santet, disantroni puluhan penduduk yang menghujatnya: "Bunuh dukun santet! Bunuh dukun santet!"

Mateha tersadar, bahaya mengancam. "Saya pasrah, walaupun jantung terasa mau copot," kenangnya. Sukur, Lurah Banjarsari, Adiyat, datang melerai. "Mereka menuntut Mateha diusir dari dusun," kisah Adiyat kepada *Tajuk*. Adiyat akhirnya mengungsikan Mateha ke kantor Koramil Glagah.

Aman? Belum! Kebencian Arba'i dan Misadi masih mengintai. Mateha harus mati. Apalagi, aku keduanya, mereka kadung menerima uang dari beberapa janda di desanya, untuk menghabisi Mateha, yang diyakini telah menyantet suami mereka. "Mereka datang ke rumah, memberi uang Rp 100.000 untuk membunuh Mateha," aku Arba'i.

Menurut Arba'i, uang sejumlah itu sudah diberikan kepada Kacung Rp 60.000, dan sisanya untuk menyewa kendaraan. Kacung adalah seorang pria sepuh berusia 53 tahun. Dia diminta Misadi dan Arba'i untuk menghabisi Mateha. Kacung dikenal memiliki reputasi buruk di Banjarsari. Ia residivis, dan pernah terlibat kasus pembunuhan beberapa waktu lalu.

Siasat pun kembali diatur. Mereka menambah tenaga. Kacung merekrut Mislami, dengan memberi uang Rp 20.000. "Kacung bilang buat uang rokok. Nggak tahunya, saya diajak *ngebunuh* Mateha," aku Mislami kepada *Tajuk*. Mereka sepakat mengambil Mateha di Koramil Glagah. Caranya, Misadi akan berpura-pura mengamankan Mateha ke saudaranya di Desa Donosuko. Karena, selama ini Mateha belum tahu niat jahatnya.

"Saya mati," kata Mateha (balakangan) singkat. Tetapi, nyatanya tidak. Ia tak sadarkan diri. Ia mengaku punya ilmu kebal. "Begitu hidup lagi, saya langsung bangun."

Hari-H pun tiba. Rabu (30/9) sore, sekitar pukul 17.00, Misadi, Arba'i, Mislami, dan Kacung, terlihat memelesat dengan mobil *colt* ke arah kantor Koramil Glagah. Setibanya di sana, mereka menemui penjaga piket, Sertu Slamet. "Pak, Pak Mateha mau diambil keluarganya," ujar Kacung kepada Slamet. Slamet mengeluarkan Mateha. Begitu melihat keponakannya, Mateha sontak bertanya, seperti ditirukan Kacung, *"Ingsun iki arep ira gawa nyang ngendi* (Aku ini mau dibawa ke mana)?"

Setelah dijelaskan akan diamankan, Mateha manut. Mereka pun pergi menuju Desa Donosuko. Misadi menyetir. Di bangku belakang, Mateha duduk diapit Arba'i, Mislami, dan Kacung. Di tengah perjalanan, di perbatasan Rejosari, yang membelah dua hamparan persawahan yang gelap dan sepi, Misadi menghentikan kendaraan. Tiba-tiba, ia perintahkan pamannya turun. Mateha menurut. Belum lagi sadar apa yang bakal terjadi, mereka mengikat lengannya dengan tali. Lalu, mereka memukuli Mateha sepuasnya. "Saya kaget. Saya salah apa, kok dipukuli. *Wong*, saya nggak punya utang sama mereka," keluh Mateha. "Pernah *nyakitin* juga nggak."

Tak ada ampun. Leher Mateha dijerat tali dan ditarik sekuat tenaga. Lainnya terus menghujani pukulan. "Setelah itu Mateha roboh ke lumpur, saya suruh mereka pergi. Tinggal saya dan Mateha," cerita Kacung. Kacung melakukan eksekusi terakhir. Dicekalnya leher Mateha yang peot itu. Kemudian, dibanting ke kanan-kiri. Terakhir, ia benamkan wajah Mateha ke dalam lumpur. "Setelah dia nggak napas, saya pulang naik ojek," kisah Kacung polos, tanpa merasa berdosa.

"Saya mati," kata Mateha (balakangan) singkat. Tetapi, nyatanya tidak. Ia tak sadarkan diri. Ia mengaku punya ilmu kebal. "Begitu hidup lagi, saya langsung bangun."

Matahari mulai menyembul di ufuk barat. Mateha tertatih-tatih berjalan pulang dengan wajah memar. Di tengah jalan, ia bertemu seorang polisi, yang kemudian menitipkannya ke balai desa. Kepada Adiyat, polisi itu berkata, seperti ditirukan Mateha kepada *Tajuk*, *"Tak amanna dhisik wong iki* (Saya amankan dulu orang ini)."

Rupanya, Misadi punya banyak telinga. Kabar itu disampaikannya ke Kacung. Kacung kalap, tanpa pikir panjang ia bergegas ke balai desa. Di perjalanan, ia bertemu Adiyat. *"Sira mateni wong tua ae kok ora bisa?"* tegur Adiyat. Kata Kacung, ketika itu Adiyat mengajari cara membunuh Mateha. Dia harus diikat, dan kepalanya dimasukkan ke kantung plastik, baru dipukuli pakai batu. "Lalu Pak Lurah bilang, saya tunggu perintah saja. Nanti, jam 17.00 sore, saya akan dijemput. Mateha akan dikeluarkan," ujarnya. Namun, pada jam itu, Mateha telah dibawa ke polres untuk diamankan.

Perkataan Adiyat berbuntut. Ia diisukan terlibat. Namun Adiyat mengaku, semua itu taktik untuk mengungkap dalang yang mencoba membunuh Mateha. Ia sudah berkoordinasi dengan aparat. Sebelum pukul 17.00, ia minta agar Kapolres Banyuwangi mengamankan Mateha. "Silakan menuduh. Semua saya laporkan ke atas, kok," katanya.

Entahlah bagaimana kebenaran tudingan itu. Yang jelas, beberapa hari kemudian, Kacung, Arba'i, Misadi, dan Mislami, diciduk aparat. Kini, mereka meringkuk di tahanan Polres Banyuwangi. Demikian pula Mateha. Status Mateha adalah korban yang dilindungi. Ia sendiri takjub akan nasibnya. Tetapi, ia sempat berkata lirih, "Saya malas nggak mati-mati." Kemudian, ia pun terkekeh-kekeh. ▲

Tim Investigasi Tajuk
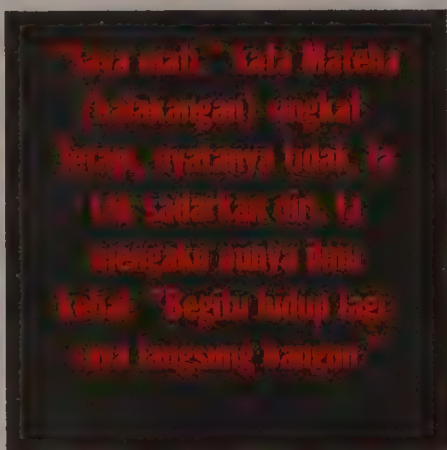
Ada militer terlibat dalam "horor Banyuwangi". Kesan kesengajaan untuk menerlambatkan penanganan kasus itu juga sangat kuat. Apa duduk soal di balik semua ini?

SCHINDLER'S DI BANYUWANGI

PADA mulanya hanyalah secarik kertas. Tetapi, justru dari situlah "horor" di Banyuwangi itu bermula. Secarik kertas berupa radiogram tersebut datang dari Kolonel H. Turyono Purnomo Sidik, bupati Banyuwangi. Ia memerintahkan seluruh jajaran aparat kecamatan di wilayahnya agar mendata semua dukun santet. Aparat kecamatan lantas menyampaikan "amanat" bupati itu kepada seluruh kepala desa, yang selama ini diperkirakan punya warga yang dituduh sebagai tukang santet. "Pendataan itu dilakukan pertengahan September dan selesai pada akhir September," ujarnya kepada *Tajuk*.

Lebih jauh, Sidik lantas menjelaskan begini: "Setelah kami mendengar banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan, kami mengadakan pertemuan dengan Muspika. Mengapa pembunuhan itu berlanjut terus? Kita mencari data dan informasi sulitnya setengah mati. Peserta menjawab, pembunuhan itu dilakukan secara terencana. Buktinya, mereka seolah-olah punya daftar. Dari daftar itu, rumah-rumah yang diduga tempat dukun santet dikasih tanda silang. Kalau data itu ada, saya minta agar mereka mencari."

Dari rapat itulah, radiogram yang menghebohkan tersebut muncul. Hasilnya, ada camat yang melaporkan daftar isian dukun santet, ada yang tidak. Dari 21 kecamatan, hanya 13 yang melaporkan. "Nah, data itu kita peti-es-kan, nggak keluar," tambah bupati yang sudah dua periode memimpin wilayah pengujung Jawa paling timur itu, memberi alasan. Apa target pendaftaran tersebut? "Ya hanya minta data. Kalau tahu orang yang diduga tukang santet, aparat biar turun tangan untuk melakukan pendekatan agar segera meninggalkan Banyuwangi."

Tetapi, sumber *Tajuk* di lapangan berbicara lain. Aksi pembunuhan di Banyuwangi itu bermula dari maraknya aksi-aksi demonstrasi terhadap aparat pemerintahan, mulai dari soal KKN di tingkat kepala desa sampai ke soal mendemonstrasi kepemimpinan Purnomo Sidik sendiri. Itu berlangsung di bulan Juni hingga Juli. "Dalam sehari, di DPRD itu bisa terjadi dua atau tiga kali demonstrasi," ujar Wahyudi, sekretaris Perguruan Silat NU, Pagar Nusa, di Banyuwangi.

Dua bulan sebelum kejadian demonstrasi itu, seluruh kepala desa di Banyuwangi – di bawah koordinasi Muspika – telah melakukan pendataan terhadap warga yang dianggap dukun santet. Bahkan, ada sebagian warga di Kecamatan Kabat dan Rogojampi yang sempat diambil foto oleh koramil setempat. Aparat Muspika memberi alasan, "Data dan foto itu diambil untuk kepentingan bela negara. Sebab, orang yang memiliki ilmu seperti itu nanti diperlukan."

Keterangan mengenai adanya pendataan itu juga diperkuat oleh pernyataan Danramil Kalipuro, Lettu Rehan Abdul Malik, saat melakukan audiensi dengan kalangan pemuda NU. Rehan saat itu menyatakan, jumlah dukun santet di Kalipuro paling banyak dibanding kecamatan-kecamatan lain di Banyuwangi. Rehan menyebut angka 113 dukun santet. Sejak itulah, Danramil lantas sakit-sakitan. Bahkan, memasuki bulan Juni badannya terus memanas, sehingga sebagian mukanya berwarna hitam.

R'S LIST
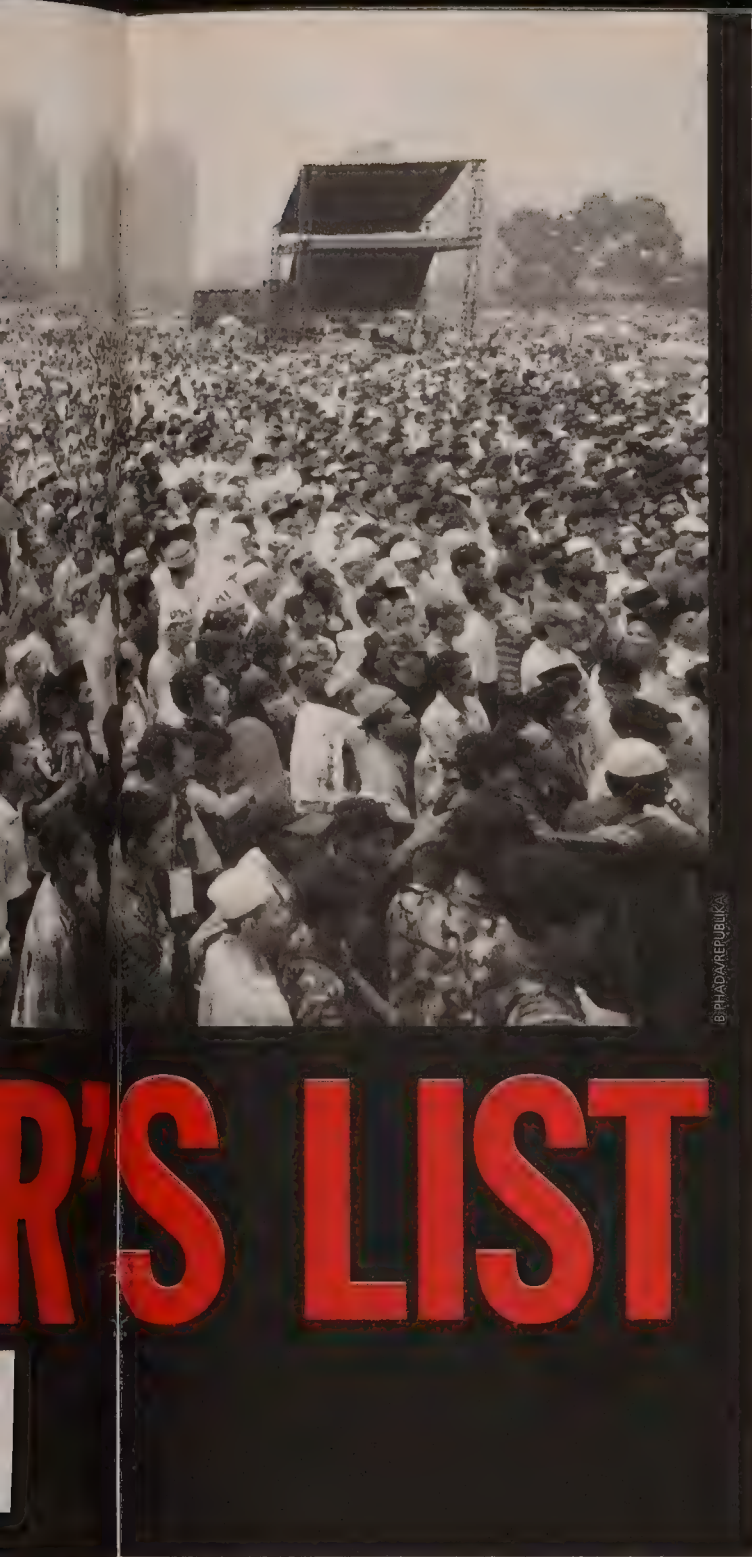
Terkait atau tidak dengan fakta di atas, yang jelas sejak Agustus aksi pembunuhan dukun santet mulai berlangsung semarak. Di Kecamatan Kabat, misalnya, sejumlah warga yang dianggap dukun santet dan telah diambil gambarnya tadi telah menjadi korban. Lewat foto-foto itulah, kemudian, "pembantaian" dilakukan secara terencana. Malah, ada seorang korban yang salah tangkap bernama Buang, karena tidak sesuai dengan foto yang dibawa sang pembunuh. Begitu jumlah korban yang terbunuh di Kabat mencapai 14 orang, pertengahan September silam, Kapolsek lantas menerima telepon dari seorang tentara yang meminta agar polisi tidak lagi mengusik keterlibatan Angkatan Darat dalam kasus pembunuhan di wilayahnya.

DOK. UMMAT

BUPATI T. PURNOMO SIDIK. Tadinya hanyalah dari secarik kertas berupa radiogram. Tetapi, dari situlah "horor" Banyuwangi bermula.

Jadi, kebijakan pendaftaran dukun santet itu akhirnya menjadi bumerang atas terjadinya pembunuhan demi pembunuhan, teror demi teror, yang meresahkan warga dan hingga kini terus berlangsung – yang eskalasinya makin sulit dikendalikan, karena makin melebar ke wilayah lain. Ada sejumlah orang yang sengaja mengungsi ke luar daerah, gara-gara namanya tercantum dalam daftar tersebut. Celakanya, bahkan, ada orang-orang yang mati bunuh diri hanya gara-gara daftar nama itu. Dan, yang lebih celaka lagi, sejumlah guru *ngaji*, kiai lokal, atau pengurus NU di tingkat ranting, akhirnya juga jadi sasaran tuduhan, dan mati terbunuh gara-gara difitnah sebagai tukang santet.

Ada yang ingin mengesankan negeri ini bukan sekadar tidak aman, tetapi aparat keamanannya juga tak mampu mengayomi rakyatnya.

Ini semua terjadi, tidak di zaman politik Nazi Jerman, yang menjelang Perang Dunia II pernah mengeluarkan *Schindler's List* untuk melakukan pembasmian etnis (*ethnic cleansing*) Yahudi di sana. Melainkan, ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, dalam skala lebih kecil dan dalam konteks yang berbeda.

Dan, kisah orang-orang bertopeng ninja atau bentuk dan gaya lainnya, yang melakukan teror terhadap rakyat, tak hanya terjadi di Karesidenan Besuki (Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, dan Bondowoso), kawasan yang menjadi tempat tinggal orang-orang berbudaya *pendalungan* (orang-orang Madura yang di masa lalu melakukan migrasi ke Jawa).

Kantung-kantung NU seperti Pasuruan, Sumenep, dan Pamekasan, yang dalam pengertian politik regional di Jatim dikenal sebagai daerah tapal kuda (kawasan berbentuk setengah lingkaran bak tapal kuda, mulai dari Banyuwangi sampai Sumenep), juga tak luput dari teror orang-orang bertopeng ninja. Para santri di beberapa pesantren di Bangil, seperti dituturkan pengurus NU setempat, Choiron Syakur, mulai panik, karena merasa disatroni ninja. Cerita K.H. Zainuddin, pengurus Syuriyah NU Cabang Blitar, lain lagi. Kepada PWNU Jatim, ia mengaku diteror via telepon, dengan ancaman akan dibunuh.

Rupanya, teror ninja tak cuma terjadi di Jawa Timur. Orang-orang Timtim yang tinggal di NTT, belum lama ini, juga mendapat pengalaman serupa. Ujung-ujungnya, warga Timtim itu secara berombongan pulang ketakutan ke kampung halaman mereka. Sementara, di Timtim sendiri, ada sejumlah pengaduan dari masyarakat, mereka juga merasa diteror oleh sekelompok orang yang berpakaian mirip ninja di film. Berdasarkan keterangan dari beberapa ninja yang tertangkap, mereka adalah bagian dari kelompok pro integrasi yang tergabung dalam Gadapaksi (Garda Muda Penegak Integrasi).

Sedangkan, yang di Banyuwangi, bila si ninja itu tertangkap, mereka umumnya mengaku sebagai pembunuh bayaran yang disuruh oleh keluarga eks PKI untuk membalas dendam atas peristiwa pasca-G-30-S 1965 silam, atau mengaku sebagai pembunuh yang dibayar sekelompok orang untuk menghabisi tukang santet.

Namun, sumber *Tajuk* menemukan fakta lain. Minggu (4/10) malam, Kiai Sulhan, di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, didatangi orang berpakaian ala ninja. Targetnya jelas, sang kiai akan dibunuh. Rupanya Sulhan selamat, bahkan bisa memperdaya si ninja
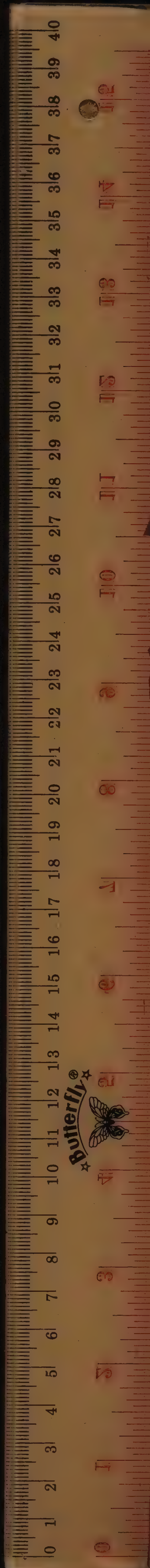
hingga pingsan. Setelah identitas diri si ninja diambil, semuanya menjadi jelas. Si ninja itu, tak lain, adalah oknum militer. Anehnya, kata sumber itu, setelah diserahkan ke pihak keamanan, ninja tersebut tak diproses secara hukum. "Malahan, ia dibebaskan begitu saja. Dan, ada seorang anggota dari lembaga keamanan yang datang ke Kiai Sulhan, meminta maaf," ujar sumber *Tajuk*.

Mengapa ini semua terjadi? Menurut Wahid Asa, wakil sekretaris Tanfidziyah PWNU Jatim, di samping faktor-faktor obyektif seperti seperti adanya sekelompok orang yang dendam terhadap dukun santet dan adanya keluarga eks PKI yang ingin membalas dendam, tampaknya ada konspirasi lain. Sekadar contoh, kasus yang terjadi di perbatasan Banyuwangi Jember yang menyebabkan tewasnya seorang guru *ngaji*, ternyata disebabkan oleh dendam lama yang dilakukan oleh sekelompok aliran sesat atas kematian guru mereka beberapa tahun silam. Atas dasar kondisi obyektif itulah, lantas ada pihak-pihak yang bermain atau memancing di air keruh. Dan, Wahid Asa menengarai kuatnya kesan di kalangan masyarakat, ada sejumlah oknum militer yang terlibat di dalamnya. Kuatnya kesan di masyarakat ini jelas bertentangan dengan sikap resmi pemerintah, yang menyatakan, kasus Banyuwangi adalah kriminal murni semata.

Namun sumber *Tajuk* menyebutkan, ada sekelompok "profesional" yang sengaja ingin mengesankan ke pihak luar: negeri ini bukan sekadar tidak aman, tetapi sekaligus aparat keamanannya tak mampu melakukan pengayoman terhadap rakyatnya. "Setelah Soeharto jatuh, banyak kelompok yang punya uang cukup, mereka tak puas, lalu menciptakan kondisi seperti itu, untuk mencari peluang agar bisa *come back*," ujar sumber *Tajuk*.

Benar, akhir September silam, ada seorang petinggi militer bertandang ke kantor PWNU Jatim. Di situ ia mengaku terus terang, cara-cara kerja dalam pembunuhan kasus Banyuwangi itu menggunakan teknik-teknik militer. Itulah sebabnya, pihak aparat keamanan Jatim, walau telah mengirim pasukan untuk mengamankan Banyuwangi (berupa satu SSK Brimob, akhir September), tetap mewaspadai kondisi Kota Surabaya dan kota-kota lainnya, dengan cara memperketat pengamanan. ▲

Tim Investigasi Tajuk
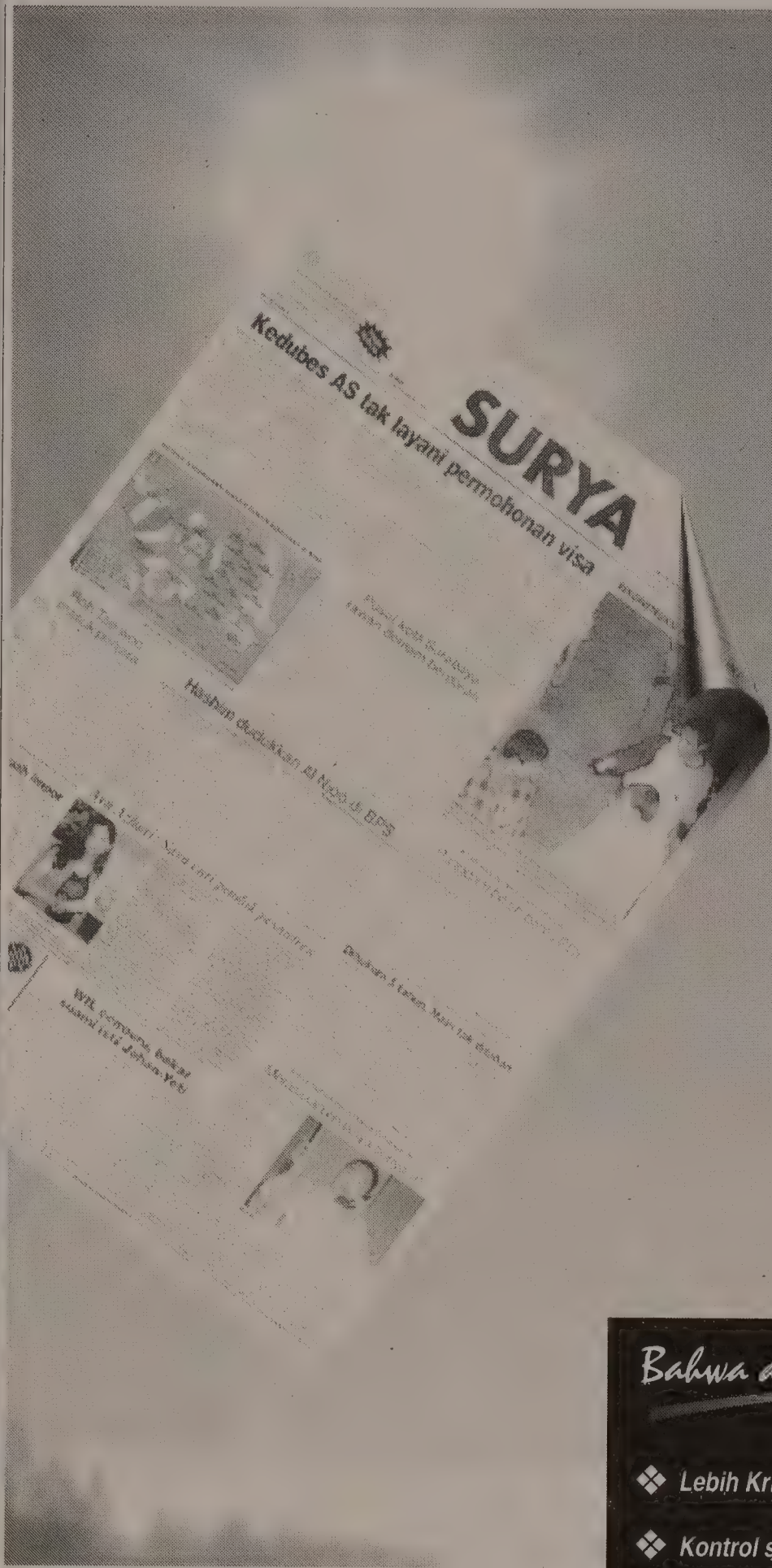
Santet Banyuwangen

ADEK BERRY

DARMANTO JATMAN

KETEMU di Pelabuhan Gilimanuk, Joko, sopir bus Surabaya-Denpasar, mengaku berasal dari Banyuwangi. "O, Banyuwangi yang lagi *rame* dengan santet itu, ya?!" ujar saya, setengah bergurau. "O, itu bukan Banyuwangi, Pak. Itu Banyuwangen," kilahnya, sembari menjelaskan, orang Banyuwangi itu keturunan dari pasukan Kerajaan Mataram zaman Sultan Agung. Saya berusaha melakukan *ice breaking*, dengan bercerita, saya membaca dalam *Kitab Babad Mentaram*, orang-orang Belambangan itu *dugdeng*, tidak "*tedhas tapak paluning pandhe, sisaning gurindha*". Sehingga, keris-keris pusaka Mentaram itu, kalau tidak bisa melukai orang Belambangan, diapkir. Joko tidak mencoba mengelak bahwa Belambangan itu bukan Banyuwangi.

Memang amat meresahkan lingkaran kecurigaan yang diawali dari pembunuhan para tertuduh dukun santet di daerah Banyuwangi yang kemudian menyebar ke daerah sekitarnya. Ada sekelompok orang misterius ala *ninja* membunuh orang-orang yang dituduh dukun santet. Dari modus operandinya, jelas ada perencanaannya. Bahkan, ditemukan daftar dukun santet yang memang telah didata di kepolisian. Sebuah pembunuhan yang menyeret keikutsertaan massa maunya namun justru memperlihatkan pola adanya komplotan di balik itu. Ada pembunuh bayarannya, ada pula yang jadi cukongnya.

Lakon paling spektakuler perkara santet-menyantet adalah *Calon Arang*, yang digarap kereografer Sardono W. Kusuma jadi *Dongeng dari Dirah*. Konon, janda dari Dirah itu marah kepada orang-orang sekelilingnya, karena tidak ada yang mau melamar putrinya yang jadi perawan tua lantaran ia dikabarkan punya ilmu santet (*black magic*). Karena dendam, janda dari Dirah melumpuhkan kerajaan Erlangga dengan santetnya. Terjadilah wabah penyakit. Mereka yang kena pagi, sore mati; yang kena sore, pagi mati. Akhirnya, Prabu Erlangga mengutus Empu Baradah untuk melawan kekuatan gaib si janda. Empu Baradah menang, Calon Arang musnah sampai ke akar-akarnya.

Santet memang ada di balik bayang-bayang kehidupan masyarakat. Ada baiknya kita ingat Erich Fromm tentang "*The pathology of normalcy*". Masyarakat bisa saja sakit, tetapi individunya bisa saja sehat (Dalam hal janda dari Dirah, semakin jelas, ia sakit justru karena "menghukum" masyarakat dengan wabah itu Dmt). Santet adalah jalan keluar bagi mereka yang dikalahkan "di atas *gedebog*", di depan kelir wayang kulit.

Perang antardukun santet adalah "Perang Bintang" di antara mereka-mereka yang tidak sah (*illegal & illegitimate*). Joko *the driver* memang bercerita, sering langit di atas Banyuwangi "dipenuhi" celorot bintang jatuh. "Itu adalah tanda, santet-santet sedang dikirim!" ujarnya, yakin. Artinya, kalau ada orang dikirimi santet, ada kemungkinan orang itu membalas.

Kita bukan masyarakat "asertif". Orang cenderung berbasa-basi, bahkan plintat-plintut, untuk menyatakan penolakan hanya karena takut menyakiti hati orang lain, yang bisa membalas dengan santet. Maka, terbentuklah suatu masyarakat berwacana santet. Sesuatu yang amat saya risaukan segera setelah banyak tokoh mengaku tukang santet dan justru jadi masyhur serta kaya karena itu. Tak urung, saya bertanya: Kenapa dukun santet "kelas kampung" yang *digeber*, bukan selebriti itu? Jawabannya: karena mereka masih dibutuhkan. Plus, tentu saja, karena dominasi wacana masyarakat "di atas *gedebog*" bukanlah kekuatan santet, melainkan senjata (baca: militer) dan rekayasa (politik). Artinya, diperlukan pemicu matinya seorang pejabat (birokrasi dan militer) apabila kita ingin para dukun santet "di atas *gedebog*" itu disingkirkan. Dalam hal ini, tidak oleh massa karena kalau demikian namanya "main hakim sendiri" tetapi oleh pengadilan resmi. Masalahnya: Sudah adakah hukum tentang santet-menyantet?

Hukum kita yang positif itu mungkin tak bisa mengadili tindakan yang merugikan orang lain lewat santet, karena kesulitan pembuktian. Tetapi, bukankah ada Empu Baradah, yang bisa kita mintai tolong agar wabah yang mematikan budaya rasional dan bermoral itu bisa disingkirkan. Di sini, kita dihadapkan dengan "*forced choice*", "atau ini atau itu". Kita bersimpati atau antipati terhadap kegiatan para dukun santet serta usaha-usaha untuk membasminya. Ini cara berpikir "*oposisional biner*" yang jadi acuan berpikir kaum modernis yang di negeri kita ditubuhkan dalam cara berpikir Orde Baru. Padahal, sebenarnya kita punya pilihan yang tidak memaksa kita untuk bersimpati atau berantipati, yakni dengan empati. Dengan memahami pikiran para praktisi santet – baik dukunnya, pelanggannya, maupun komunitasnya – kita justru bisa menawarkan kebermacaman pola pikir, baik yang rasional maupun irasional, yang normal maupun paranormal. Kita bisa mengapresiasi perbedaan, keserentakan: pluralisme!

Kerugian besar yang bakal kita hadapi ketika pembasmian dukun santet dilakukan secara ilegal massal, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah, adalah musnahnya budaya yang menghargai pluralisme dan gerakan massal yang benar (baca: demonstrasi).

Diperlukan wacana yang lebih jernih, supaya tidak terjadi pemusnahan segala parafernalia yang berkaitan dengan itu, seperti dulu juga pernah terjadi pada masa abad-abad gelap gereja di Eropa dengan inkuisisinya.

Menyeberangi Selat Bali dalam kelam malam, saya masih juga terkesiap oleh misteri dan *wingit*-nya Bali-Banyuwangi. Sungguh mati, saya tak bisa menerangkan secara rasional, perasaan apakah ini tapi saya tahu, ini sah sebagai kekayaan insani. ▲

Star Mild, Tur Keliling bareng Kla Project

STAR Mild, rokok *mild* yang cukup populer di Indonesia, akan mensponsori pentas musik Kla Project di tujuh kota utama Jawa-Bali; yaitu Surabaya, Malang, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Bandung. Pentas musik itu dikemas dalam *Star Mild Music Tour with Kla Project.*

Khusus untuk pecinta Kla di Jakarta, telah diselenggarakan *warming up tour* di gudang Hotel Omni Batavia pada 18 September lalu, yang ternyata mendapat sambutan luar biasa, sehingga pihak panitia berencana menampilkan Kla kembali di Jakarta. Keterangan lebih lanjut, hubungi PT Bentoel (021) 5761718.

Pall Mall, Light Up The Night

SATU lagi, rokok putih Amerika dengan label Pall Mall telah memasuki pasar Indonesia. Bila Anda perokok yang selalu mengutamakan kualitas dan cita rasa, kini saatnya Anda mengenal Pall Mall. Sensasi pilihan rasa yang luar biasa, paduan tembakau impor dan lokal yang berkualitas tinggi, dan didukung kualitas produk yang memanfaatkan teknologi laser dalam pembuatan filternya, membuat Pall Mall utuh sebagai produk pilihan bagi perokok berjiwa internasional, modern, dinamis, dan prestisius.

Tersedia dalam tiga pilihan rasa, yaitu *filter, lights*, dan *menthol,* dalam kemasan *red, blue,* dan *green*. Dengan harga banderol hanya Rp 2.800/bungkus, Anda akan mendapatkan sensasi rasa, seakan menghadirkan kenikmatan sensasi kehidupan malam Anda yang istimewa. Keterangan lengkap, hubungi PT BAT Indonesia (021) 5268388. Tidak sekadar rokok putih biasa.

Classic Comfort dari Hugo Boss

MENYAMBUT musim dingin 1998, tren busana pria yang akan muncul adalah jaket dengan kombinasi yang sempurna, jas panjang atau jas kulit dilengkapi kemeja dan dasi eksklusif. Model jaket dengan kancing-kancing tinggi, dua sampai tiga kancing, bentuk bahu yang natural dan siluet ramping sangat *classic comfort*. Meski model jaketnya pas di tubuh, tidak tampak kesempitan, baik dipakai tanpa dalaman maupun kemeja polos. Untuk menambah kesan lembut, dapat dipadu dengan celana panjang satu lipatan yang terbuat dari bahan wol atau flanel.

Gaya jaket panjang dengan aksentuasi dan tambahan kantung pada jaket yang memberi kesan modern ini menjadi salah satu tren musim dingin kali ini. Agak sedikit longgar daripada musim lalu. Paduan bahan wol-sutra dan kasmir untuk busana rajutnya menjadikan koleksi Hugo Boss terlihat lebih eksklusif. Pilihan warna busananya merupakan refleksi bayangan warna-warna musim gugur; seperti abu-abu, biru penerbang, hijau *olive*, cokelat, dan merah sebagai aksennya. Keterangan lengkap, hubungi PT Maha Gaya Perdana (021) 8317401 dan faks. (021) 8317402. Pilihan atraktif untuk pria dinamis.

Rubrik ini disediakan sebagai informasi produk dan jasa baru. Produsen atau distributor yang berminat, dapat menghubungi bagian Iklan, telepon (021) 799.6010 (hunting) fax (021) 797.5348

Impian Rp 560 Triliun

ADEK BERRY

TJOA HOK KIANG

DAHULU, menjadi bankir adalah impian. Mulai dari sarjana S1 *fresh graduate*, konglomerat yang sedang butuh bendera, hingga pemilik toko kelontong atau kontraktor, semua bermimpi ingin menjadi bankir. Yang terjadi, akhirnya, adanya bankir yang bermental baik dan yang bermental kurang baik. Mereka bercampur menjadi satu sejak 28 Oktober 1988 hingga September 1998.

Kebijakan pemerintah melalui Pakto 1988 – mendorong jumlah bank menggelembung menjadi 200-an – secara makro jelas sebagai awal kusutnya persoalan perbankan kita. Tengok saja, bankir yunior bisa menjadi CEO – melalui hubungan famili, teman, tanpa integritas – dan profesionalismenya pas-pasan. Hal ini disebabkan: ada kemudahan untuk memiliki bank, dan juga tidak adanya pagar-pagar yang membatasi aturan main di dunia perbankan.

Akibatnya jelas. Tatkala dunia terlanda resesi, mulai dari Asia sampai kemudian disusul Amerika dan Eropa, ditambah polah spekulan, Indonesia – yang sarat KKN – paling kelimpungan. Dana jangka pendek banyak ditarik investor mancanegara, ditambah dengan politik yang tak kunjung menemukan konsensus hingga 14 bulan terakhir, serta adanya kerusuhan medio Mei silam. Ibarat benteng pertahanan, Indonesia sangat rapuh.

Ambrolnya "benteng pertahanan" ekonomi kita ini disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, masalah kurs dolar yang naik dari Rp 2.500 tahun 1997 menjadi Rp 11.000 September 1998. *Kedua*, masalah BMPK (batas maksimal pemberian kredit), yang sejak 1988 hingga saat ini dipatok sebesar 20% dari kredit, dalam prakteknya bisa mencapai ribuan persen, karena depresiasi mata uang secara tajam ataupun yang dilanggar secara sadar. Dahulu, memang ada jalan keluarnya, yakni lewat asuransi, *risk sharing*. Namun, begitu perekonomian macet, semuanya menjadi jelas di mana lubang itu menganga. *Ketiga*, kredit macet saat ini jumlahnya sekitar Rp 560 triliun, akibat tidak memenuhi persyaratan dalam memproses kredit, sehingga sektor riil mulai terhenti. *Keempat*, dari dana BLBI yang dikucurkan Rp 177 triliun, yang macet sekitar Rp 140 triliun, berasal dari BBO dan BTO. Padahal, dari aset yang diserahkan pemilik bank yang bersangkutan, nilainya akan merosot menjadi 10%-25%.

Sejak krisis Juli 1997 sampai dengan September 1998, suku bunga kredit membubung dari 20% menjadi 60%. Deposito yang dijamin pemerintah saat ini 67%. Sedangkan, SBI yang dikeluarkan BI melalui *retail* 67,43% dan biaya umum serta SDM 5%-10%.

Dengan kondisi tersebut, akibat kebijakan makro yang keliru, saat ini bank-bank di Indonesia, khususnya bank-bank swasta, terus mengalami "pendarahan" setiap harinya. Cepat atau lambat, seluruh bank swasta, yang jumlahnya kini 215 buah, akan segera bangkrut. Nanti, yang tertinggal di Bumi Pertiwi ini hanyalah bank swasta asing dan bank swasta campuran.

Potret buram perbankan ini, tampaknya, sangat mirip dengan kondisi politik dan perekonomian yang pada saat ini masih kabur. Tak ada visi dan misi yang jelas.

Berdasarkan bacaan, diskusi, dan intuisi, berikut ini *way out* untuk kemelut itu. *Pertama*, harus ada konsensus politik yang jelas dari kelompok-kelompok yang bertikai. Segera dibentuk UU yang *fair* seperti UU Pemilu, UU Anti Monopoli, UU Kepartaian, UU untuk Pengusaha Kecil dan Menengah, UU Perbankan dengan asas Pancasila dan makna Bhineka Tunggal Ika. *Kedua*, masalah BMPK harus segera dituntaskan. Perlu kerja sama yang lebih *solid* antara BI dan BPPN, untuk mengejar dan memburu bank-bank yang melanggar BMPK. *Ketiga*, masalah kredit macet juga tidak boleh diulur-ulur. Debitor nakal, baik pribumi maupun nonpribumi, segera dikejar. Dengan perangkat UU Perbankan yang baru, tentu akan lebih mudah melelang aset-aset yang kini dikelola BPPN lewat AMU. *Keempat*, program rekapitalisasi dalam rangka penyehatan bank-bank adalah peningkatan modal bank untuk mencapai CAR yang ditetapkan minimal 4%-8%. Padahal, CAR tersebut terus-menerus menurun, karena bank-bank mengalami kredit bermasalah dan BMPK yang terus meningkat. Bila rekapitalisasi dimulai bulan Agustus 1998 dan mulai pembenahan tahun 1999, mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. *Kelima*, masalah *negative spread*.

Pertama Penjualan SBI yang langsung oleh BI sebaiknya dihentikan segera, karena akan mematikan perbankan "bapak" (BI) dan "anak" (bank-bank). *Kedua*, efisiensi SDM dan umum dengan menutup cabang-cabang yang tidak mendatangkan *profit* dan berlokasi di daerah-daerah yang pasarnya sudah jenuh. *Ketiga*, penurunan suku bunga deposito 67% secara bertahap agar sektor riil – dunia usaha – bisa bernapas dan bangkit kembali. Melalui program KLBI, BI bersama bank mengucurkan kredit murah untuk produk yang bergerak di bisnis sembako, agrobisnis, dan ekspor.

Sebetulnya, sebelum krisis, Indonesia memiliki 237 bank, namun sampai bulan lalu tercatat 28 bank yang tutup dan 44 bank sudah masuk ke BPPN. Sedangkan, bank BBO tercatat 10 buah dan bank BTO dua buah. Perbankan yang konservatif, *prudent*, dan profesional, justru yang pada saat ini bertahan, tetapi itu pun diperkirakan jumlahnya di bawah 10 (dari 215 bank).

Melihat kasus-kasus di atas, kita perlu waktu lima tahun sampai dengan 20 tahun untuk bisa membersihkan diri. Prediksinya, barangkali kelak bank nasional yang tinggal hanya 20-an. Itu pun dengan syarat: BI mesti bertindak independen, dan didukung SDM yang bersih, punya integritas, serta pro-fesional. Ibarat sumber air yang bersih niscaya akan membersihkan yang lain, pimpinan yang bersih dan bisa dijadikan panutanlah yang sungguh kita perlukan. ▲